

Chega!

V o l u m e V:

Lampiran

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)

<http://www.cavr-timorleste.org>

info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e V:
Lampiran

JAKARTA
KPG

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Volume V: Lampiran

KPG: 950 04 10 0342

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di
Timor-Leste - Volume V**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xii + 644 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0248-5

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

2929	Lampiran 1: Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan — Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)
2929	Prakata
2933	Ringkasan Eksekutif
2934	Metode dan mandat
2935	Kerangka dan kesimpulan
2937	Konteks sejarah dan politik
2937	Invasi dan pendudukan Indonesia
2940	Resistensi
2942	Tanggapan internasional
2945	Terobosan di Indonesia
2946	UNAMET dan Jajak Pendapat
2950	Indonesia: kekuasaan dan strategi
2951	Tentara Nasional Indonesia
2956	Milisi
2958	Kepolisian Indonesia
2959	Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi
2962	Kelompok-kelompok politik pro-otonomi
2963	Badan-badan khusus bentukan pemerintah
2965	Pelanggaran, korban, dan pelaku
2966	Jenis-jenis pelanggaran
2971	Kronologi kekerasan: Tiga periode
2975	Korban
2981	Pelaku
2984	Pola dan variasi
2984	Variasi sementara – Menutup Keran
2990	Ketakbertindakan dan keterlibatan polisi
2994	<i>Modus Operandi</i> Milisi
2997	Variasi geografis
3002	Enam Dokumen Kunci
3002	Operasi Pembersihan
3004	Dokumen Tavares
3006	Dokumen Garnadi

- 3008 | Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur
- 3009 | Operasi Cabut

- 3014 | Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum
 - 3014 | Pola Historis
 - 3020 | Pembentukan milisi
 - 3026 | Pengakuan politik dan hukum

- 3032 | Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi, dan senjata
 - 3032 | Perekrutan dan keanggotaan
 - 3035 | Pelatihan
 - 3038 | Operasi
 - 3041 | Senjata: Bukti kesaksian
 - 3046 | Senjata: Bukti dokumenter

- 3050 | Milisi: Pendanaan dan dukungan material
 - 3050 | 'Sosialisasi' dan pendanaan milisi
 - 3054 | Sumber pendanaan pemerintah
 - 3059 | Pendanaan dan dukungan material TNI
 - 3063 | FPKD sebagai saluran pendanaan
 - 3065 | Anggaran milisi

- 3068 | Ringkasan kabupaten
 - 3068 | Aileu (Kodim 1632)
 - 3071 | Ainaro (Kodim 1633)
 - 3075 | Baucau (Kodim 1628)
 - 3079 | Bobonaro (Kodim 1636)
 - 3086 | Covalima (Kodim 1635)
 - 3090 | Dili (Kodim 1627)
 - 3097 | Ermera (Kodim 1637)
 - 3102 | Lautém (Kodim 1629)
 - 3107 | Liquiçá (Kodim 1638)
 - 3114 | Manatuto (Kodim 1631)
 - 3119 | Manufahi (Kodim 1634)
 - 3123 | Oecussi (Kodim 1639)
 - 3125 | Viqueque (Kodim 1630)

- 3129 | Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia
 - 3130 | Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)
 - 3135 | Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)
 - 3139 | Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)
 - 3145 | Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)
 - 3146 | Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)
 - 3149 | Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)

- 3152** | Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999).
- 3157** | Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)
- 3161** | Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)
- 3165** | Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)
- 3170** | Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)
- 3175** | Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)
- 3178** | Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)
- 3182** | Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)
- 3187** | Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

- 3190** | Tanggungjawab individual dan komando
 - 3191** | Tanggungjawab pidana individual
 - 3195** | Tanggungjawab komando

- 3207** | Tanggungjawab internasional
 - 3208** | Tanggungjawab internasional
 - 3214** | Tanggungjawab PBB: Masalah keadilan

- 3246** | Catatan tentang sumber
- 3247** | Catatan tentang penulis

3249 | Lampiran 2: Data dan metode statistik

- 3255** | Pendahuluan
 - 3255** | Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

- 3257** | Sumber-sumber data
 - 3257** | Human Rights Violations Database (HRVD)
 - 3265** | Retrospective Mortality Survei (RMS)
 - 3269** | Graveyard Census Database (GCD)

- 3270** | Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama
 - 3270** | Pembersihan dan penyuntingan basis data
 - 3271** | Penyuntingan dan pembersihan tanggal
 - 3271** | Penyuntingan dan pembersihan usia
 - 3272** | Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan
 - 3272** | Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis
 - 3272** | Deduplikasi pemakaman dan makam GCD
 - 3273** | Proses-proses pembersihan nama-nama

- 3277** | Konversi data

- 3278 | Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)
 - 3279 | Aturan-aturan pencocokan
 - 3282 | Pencocokan intra-sistem
 - 3286 | Pencocokan Antarsistem
- 3290 | Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal
- 3291 | Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan
 - 3291 | Kalkulasi beban RMS
 - 3293 | Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan
 - 3293 | Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian
 - 3295 | Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)
 - 3296 | *Multiple System Estimation* (MSE): motivasi dan teori
 - 3299 | Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian
 - 3300 | Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

3311 | Lampiran 3: Ringkas dakwaan

- 3312 | Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik
 - 3312 | Aileu
 - 3313 | Ainaro
 - 3315 | Baucau
 - 3316 | Bobonaro
 - 3326 | Covalima
 - 3334 | Dili
 - 3340 | Ermera
 - 3342 | Lautém
 - 3345 | Liquiçá
 - 3347 | Manatuto
 - 3348 | Manufahi
 - 3350 | Oecussi
 - 3355 | Viqueque
 - 3356 | Timor Barat

- 3356 | Dakwaan nasional

..... 3359 | Lampiran 4: Ucapan terima kasih

3359 | Pendahuluan

3360 | Donor

3361 | Masukan

3362 | Peserta Audiensi Publik Nasional

3366 | Komunitas CAVR

3383 | Mereka yang memberi pernyataan pada CAVR

3383 | Mereka yang berpartisipasi dalam PRK

3383 | Peserta lokakarya pemulihan

..... 3389 | Daftar istilah dan singkatan

..... 3404 | Indeks

Daftar tabel:

3222	Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999
3225	Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)
3228	Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999
3081	Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro
3229	PBB dan Timor-Leste
3260	Tabel pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan
3264	Matriks pencatatan perhitungan untuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD)
3268	Daftar <i>aldeia</i> yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel
3274	Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste
3274	Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste
3278	Perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan
3288	Matriks hasil pencocokan antarsistem
3289	Tabel total pencatatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data
3291	Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok
3299	Tabel perkiraan proporsi kematian, menurut periode dan cara kematian

Daftar grafik:

3258	Jumlah pernyataan yang diberikan, berdasarkan distrik
3259	Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan
3302	Perkiraan kasar tingkat kematian bagi Timor-Leste
3302	Perkiraan total kematian akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)
3303	Perkiraan total kematian akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan RMS)





Chega!

Bagian 7

Bab

7.1.

Hak penentuan nasib sendiri

653 | Pendahuluan

653 | Kata pengantar

654 | Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri

655 | Kewajiban negara-negara

656 | Konteks internasional

658 | Sumber-sumber

660 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemangku kepentingan utama

660 | Perserikatan bangsa-bangsa

662 | Portugal

670 | Kesimpulan

670 | Indonesia

679 | Kesimpulan

680 | Australia

681 | Kebijakan Australia hingga 1974

683 | Kebijakan Australia 1974 - 1975

687 | Kebijakan Australia 1975 - 1998

689 | Beralihnya kebijakan Australia

691 | Kesimpulan

692 | Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang

692 | Dewan Keamanan

699 | Cina

703 | Prancis

706 | Rusia (USSR)

710 | Inggris

716 | Amerika Serikat (AS)

729 | Jepang

735 | Kesimpulan

737 | Vatikan

737 | Pendahuluan

738 | Latar belakang keterlibatan Vatikan

738 | Gereja Katolik di Timor-Leste

- 739 | Dom José Joaquim Ribeiro (1966-1977)
- 740 | Dom Martinho da Costa Lopes (1977-1983)
- 744 | Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB (1983-2003)
- 746 | Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor-Leste pada 1989
 - 748 | Sikap Vatikan tentang Timor-Leste dan hubungan Vatikan dengan Indonesia
- 750 | Kesimpulan

751 | Diplomasi Resistansi

- 751 | Partai-partai politik dan badan-badan payung
 - 753 | Kebijakan internasionalisasi Fretilin
 - 756 | Pemanfaatan hukum internasional
 - 757 | Upaya diplomasi di PBB
 - 761 | Voting 1982 di PBB
 - 763 | Pembentukan kembali partai-partai
 - 765 | Dari perbedaan ke persatuan: pencarian persatuan dan perdamaian
- 770 | Diaspora
- 774 | Kesimpulan

775 | Masyarakat sipil

- 775 | Pendahuluan
 - 776 | Terminologi
- 777 | Masyarakat sipil internasional
 - 777 | Tahap pertama: Tantangan awal dan permulaan, 1974 - 1978
 - 785 | Tahap kedua: Krisis dan awal baru, 1978 - 1983
 - 790 | Tahap ketiga: Membangun kembali dukungan masyarakat sipil, 1983 - 1991
 - 795 | Tahap keempat: Titik-titik balik, 1991 - 1998
 - 803 | Tahap kelima: Penentuan nasib sendiri, 1998 - 1999
- 804 | Masyarakat sipil Indonesia
 - 805 | Tahun-tahun awal
 - 807 | Tahun 1990-an
- 812 | Kesimpulan

814 | Temuan-temuan

- 814 | Komunitas internasional
- 816 | Pemangku kepentingan utama

Daftar tabel:

819 | Tabel A : Resolusi Sidang Umum dan bagaimana negara memberikan suara antara 1975 - 1982

Hak penentuan nasib sendiri

1.

Pendahuluan

Kata Pengantar

1. Bab ini berfokus pada hak rakyat Timor Leste atas penentuan nasib sendiri, dan sejauh mana hak ini ditegakkan atau diingkari, khususnya di kalangan masyarakat internasional.
2. Hak atas penentuan nasib sendiri merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak terpisahkan dari diri seorang manusia. Hak ini membentuk pasal pertama dalam dua instrumen utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), mengingat pentingnya hak ini bagi tatanan internasional dan perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Pengadilan Internasional mengakui hak atas penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling penting, dan “menyangkut semua negara.”¹
3. Penentuan nasib sendiri adalah juga fundamental karena merupakan hak kolektif suatu bangsa untuk dapat menjadi diri sendiri. Perjuangan untuk dapat menikmati hak ini di atas segala hak yang lain menjadi isu pokok yang sentral dari periode mandat CAVR. Periode ini bermula ketika kekuasaan kolonial yang lama memutuskan pada 1974 untuk mengakui hak ini setelah 14 tahun mengingkarinya, dan berakhir dengan keputusan kekuasaan kolonial yang baru untuk mengakui hak ini pada 1999 setelah 24 tahun pengingkaran. Sementara itu, rakyat Timor Leste melakukan pengorbanan luarbiasa untuk mendapatkan hak ini. Pewujudan hak ini adalah hakiki untuk kelangsungan hidup, identitas, dan nasib Timor Leste.
4. Bab ini mempelajari catatan lembaga-lembaga internasional utama dan pemerintahan-pemerintahan di dunia, dalam menaati berbagai kewajiban yang sudah disepakati secara internasional, untuk melindungi dan memajukan hak ini demi kepentingan rakyat Timor Leste. Bab ini akan melihat tiga pemangku kepentingan utama dalam isu tersebut—Portugal, Indonesia, dan Australia—ditambah dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota tetapnya, yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Jepang juga akan dipelajari karena ia anggota terpilih di Dewan Keamanan di dalam tahun-

tahun penting 1975 dan 1976, dan juga merupakan mitra utama Indonesia di dalam ekonomi regional. Bab ini juga akan melaporkan tentang peranan penting Vatikan serta kontribusi penting para diplomat dan diaspora Timor Leste bersama masyarakat sipil internasional terhadap realisasi penentuan nasib sendiri.

Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri

5. Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri merupakan hak yang sangat jelas dan diakui secara resmi oleh masyarakat internasional. Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB dalam banyak kesempatan memperkuat eksistensi hak ini serta tanggungjawab semua negara di dunia untuk menghormatinya sejak 1960.² Pengakuan atas hak ini menetapkan legitimasi ‘persoalan Timor-Leste’ dalam hukum internasional, dan dengan sangat mencolok membedakannya dengan berbagai klaim atas penentuan nasib sendiri oleh kelompok-kelompok lain.

6. Penentuan nasib sendiri merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh ‘segala bangsa’ untuk menentukan nasib politik dan teritorialnya. Hak ini memberi bangsa Timor Leste tiga hal: untuk a) menentukan status politiknya melalui tindakan memilih bebas; b) menjalankan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara bebas; dan c) untuk memanfaatkan sumberdaya dan kekayaan alamnya secara bebas.³

7. Hak atas penentuan nasib sendiri memberikan hak kepada masyarakat Timor untuk mengakhiri situasi kolonial mereka, dengan menentukan kehendak secara bebas antara kemerdekaan, asosiasi bebas dengan negara yang ada, atau integrasi dengan negara yang ada. Keputusan atas kehendak tersebut haruslah dibuat melalui tindakan ekspresi yang murni dan bebas. Agar dapat sah dan diterima secara internasional, keputusan mengenai masa depan suatu masyarakat harus dihasilkan melalui proses yang terpupuk oleh penerangan, terbuka, adil dan demokratis, bebas dari campurtangan atau ancaman pihak luar, dijalankan secara tidak memihak, dan sebaiknya diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena hak ini adalah milik seluruh bangsa Timor-Leste secara bersama dan bukannya kelompok tertentu, penerapan hak ini haruslah representatif. Bangsa Timor-Leste juga memiliki hak untuk berjuang atas penentuan nasib sendiri, dan untuk menerima dukungan bagi perjuangan mereka ini. Negara-negara boleh menanggapi permintaan untuk bantuan moral dan material seperti ini. Negara-negara tidak diperkenankan menggunakan kurangnya kesiapan politik, ekonomi, sosial, atau pendidikan sebagai alasan untuk membenarkan penundaan suatu kemerdekaan.⁴

8. Hak masyarakat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri juga meliputi hak untuk bebas dari penindasan oleh kekuatan asing, dan hak untuk secara bebas menentukan bagaimana sumberdaya alam mereka seharusnya diperlakukan dan digunakan.

* Kedua tuntutan ini berdasarkan atas Resolusi Majelis Umum 2105, 20 Desember 1965 dan UN Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the UN, Resolusi Sidang Umum 2625 (XXV), Pleno Sidang Umum Sesi 1883, 24 Oktober 1970. Lihat Suzannah Linton, Konsultan Penasihat Hukum pada CAVR, “The Right to Self-Determination in International Law,” submisi kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.

Kewajiban negara-negara

9. Pengakuan internasional bahwa Timor-Leste memiliki hak atas penentuan nasib sendiri membebaskan berbagai kewajiban kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai kuasa pemerintahan di Timor-Leste, Portugal terikat oleh Pasal 73 Piagam PBB dan Resolusi-Resolusi Sidang Umum, untuk menerima sebagai suatu ‘amanat suci’ kewajibannya untuk meningkatkan setinggi-tingginya kesejahteraan bangsa Timor, dan:

- Untuk memastikan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat Timor-Leste, dan melindungi mereka dari penyalahgunaan wewenang;
- Untuk mengembangkan kemampuan memerintah diri sendiri, mempertimbangkan aspirasi politik masyarakat, dan membantu mereka dalam mengembangkan lembaga politik yang bebas; dan
- Untuk menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai situasi di dalam wilayah tersebut.

10. Selain itu, semua negara memiliki kewajiban tertentu mengenai hak atas penentuan nasib sendiri. Semua negara harus menghormati dan menggalakkan hak masyarakat atas penentuan nasib sendiri⁵ serta mengambil aksi positif untuk memfasilitasi realisasinya.⁶ Khususnya, semua negara harus “menahan diri dari turut campur dalam masalah internal dari negara lain, sehingga berpengaruh buruk terhadap kemampuan untuk merealisasikan hak atas penentuan nasib diri sendiri.”⁷ Negara-negara harus menahan diri dari tindakan paksa yang menceraikan suatu masyarakat dari haknya atas penentuan nasib diri sendiri.⁸

11. Di dalam keadaan saat hak suatu masyarakat atas penentuan nasib diri sendiri ditolak, semua negara berkewajiban mengakui keadaan tersebut sebagai tidak sesuai hukum, dan diharuskan tidak melakukan tindakan apapun yang menolong atau membantu mempertahankan keadaan tersebut.⁹

12. Pada 1975, kemudian lagi pada 1976, Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB menyerukan “semua negara” untuk menghormati hak tak terpisahkan bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, serta menghormati persatuan dan keutuhan wilayah Timor Portugis.¹⁰ Semua negara anggota PBB terikat untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.¹¹ Dewan Keamanan juga mewajibkan beberapa ketentuan kepada Indonesia dan Portugal, di mana kedua negara ini juga terikat pada resolusi-resolusi tersebut. Dewan Keamanan menuntut agar Indonesia menarik pasukan bersenjata dari Timor Leste,¹² dan agar Portugal bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan masyarakat Timor secara bebas menjalankan hak mereka atas penentuan nasib sendiri.¹³

13. Komisi mengambil kesimpulan bahwa kewajiban negara-negara adalah sebagai berikut:

- Menghormati hak atas penentuan nasib sendiri, dan menggalakkan realisasi terhadapnya;

- Tidak menggunakan kekerasan memberangus hak atas penentuan nasib diri sendiri;
- Tidak melakukan apapun yang bisa melemahkan hak suatu masyarakat atas penentuan nasib diri sendiri;
- Memberi bantuan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan demi penentuan nasib diri sendiri;
- Tidak memberikan bantuan kepada negara yang terlibat dalam melakukan penindasan terhadap hak atas penentuan nasib diri sendiri;
- Tidak mengakui keabsahan sebuah situasi yang timbul dari penolakan atas hak terhadap penentuan nasib diri sendiri.

Konteks internasional

14. Masyarakat internasional telah menyetujui prinsip dan prosedur-prosedur yang akan mengatur dekolonisasi Timor Portugis; tapi, banyak pemerintahan negara-negara penting mengambil pendekatan yang berbeda pada dasawarsa 1970-an dibanding pendekatan mereka di akhir dasawarsa 1990-an.

15. Sejumlah faktor eksternal telah merugikan kepentingan Timor dan proses hukum pada dasawarsa 1970-an. Hal ini mencakup pemusatan perhatian atas konflik ideologis yang luarbiasa di tingkat internasional, dan berbagai krisis domestik dengan bermacam-macam signifikansi di dalam negara-negara yang paling terlibat dengan Timor-Leste. Persoalan-persoalan ini memang sangat penting dan telah memengaruhi jiwa manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi, mereka juga telah berdampak bagi Timor-Leste dengan membelokkan perhatian dari permasalahan sesungguhnya dan menyamarkan, atau bahkan memutarbalikkan, sikap-sikap resmi.

16. Permasalahan yang dominan pada masa itu adalah Perang Dingin. Ini adalah persaingan terbuka namun terbatas, yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya di Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya, sampai runtuhnya Uni Soviet (USSR) pada 1991. Persaingan Barat - Timur ini merupakan persaingan ideologis antara sistem kapitalis dan komunis, namun selain itu juga merupakan persaingan komersial dan militer. Persaingan ini membagi Eropa, yang dilambangkan dengan jelas oleh Tembok Berlin yang mengisolasi Berlin Barat dari Berlin Timur dan Jerman Timur yang dikuasai komunis. Ia juga membagi Dunia Ketiga, ketika negara-negara ini menjadi ajang kompetisi para adikuasa setelah tercapai suatu keseimbangan kekuasaan di Eropa. Uni Soviet mendukung dekolonisasi. Kompetisi ini tidak serta-merta menghasilkan konflik militer langsung antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, namun memang melibatkan aksi militer atau perang atasnama atau perang proksi (proxy war) di sejumlah negara, termasuk di kawasan Asia. Persaingan ini menimbulkan ketegangan tinggi yang dirasakan di semua lapisan masyarakat di banyak negara, dan memengaruhi opini publik dalam banyak persoalan. Hal ini juga mengakibatkan pengeluaran militer besar-besaran serta perlombaan senjata yang antara lain menghasilkan penumpukan peluru kendali dan persenjataan nuklir yang telah mengancam kelangsungan dunia. Masyarakat

internasional terbagi menjadi Blok Timur, Barat, dan Non-Blok seputar persoalan ini, dan memberikan suara mereka di PBB sesuai dengan dikte geopolitik ketimbang inti permasalahan yang sedang dibahas.

17. Dengan latar belakang seperti ini, pencapaian komunis di Asia, yang memuncak pada 1975 dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam dan kemenangan komunis di Laos dan Kamboja, meniadakan Amerika Serikat dan sekutunya, serta tidak menguntungkan kepentingan Timor-Leste. Indonesia dan pemerintahan yang sangat antikomunis lainnya di kawasan ini, termasuk Australia, Selandia Baru, dan negara-negara anggota ASEAN, bertekad bekerjasama dalam membendung pergerakan lebih jauh komunisme. Perkembangan sayap kiri di Portugal dan Timor Portugis dipandang dengan derajat kekhawatiran yang berbeda-beda, khususnya di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini juga menguntungkan Indonesia yang dapat mengeksploitasi persoalan ini melawan Fretilin, untuk memaksimalkan peran penting mereka bagi negara-negara Barat sebagai benteng melawan komunisme, dan untuk mendapat dukungan politik, militer, serta komersial yang kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

18. Perkembangan politik pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an juga menguntungkan Timor-Leste secara tidak langsung. Selama periode ini muncul berbagai gerakan politik dan gerakan masyarakat sipil yang baru yang mendukung perdamaian, hak asasi manusia, pelucutan senjata, pembangunan, dan keadilan sosial—khususnya sebagai akibat kekecewaan terhadap Uni Soviet dan tragedi-tragedi Perang Dingin seperti keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Gerakan-gerakan ini menuntut adanya suara atau demokrasi partisipatoris dan terdorong oleh kepedulian akan masa depan planet ini, apabila hanya para adikuasa, pemerintahan, dan bisnis besar yang dibiarkan membuat keputusan. Pencarian akan alternatif semacam ini juga dirasakan di komunitas keagamaan di seluruh dunia, termasuk dalam Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan Kedua pada tahun 1960-an. Gerakan-gerakan ini menjadi tulang punggung dukungan masyarakat sipil internasional bagi Timor-Leste.

19. Ketiadaan dukungan resmi bagi kemerdekaan Timor juga diperburuk dengan anggapan bahwa arus dekolonisasi utama sudah usai. Sebagian besar koloni besar milik kekuatan Eropa—Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, dan Belgia—sudah merdeka atau, dalam kasus Portugal, sedang dalam proses menjadi merdeka. Dekolonisasi dimulai di Timur Tengah pada dasawarsa 1920-an dan diikuti oleh gelombang kedua di Asia pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an ketika India mendapat kemerdekaan dari Inggris, dan Indonesia dari Belanda. Proses ini memuncak pada dasawarsa 1960-an dengan gelombang emansipasi ketiga ketika tak kurang dari 42 negara, sebagian besar di Afrika, mendapat kemerdekaan dan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks ini, persoalan seperti Timor dan Makau dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sisa-sisa kolonialisme yang tidak mampu menyokong diri sendiri sebagai negara merdeka, dan paling baik diatasi melalui penggabungan ke dalam entitas yang lebih besar, dalam sebagian kasus ke bekas-bekas koloni yang berbatasan langsung atau memiliki kesamaan-kesamaan lain. Penggabungan Goa ke dalam India

sering dijadikan contoh untuk hal ini. Dari sudut pandang ini, masa depan Timor secara historis sudah ditentukan, dan hanya bisa dibayangkan sebagai bagian dari Indonesia, walaupun pada kenyataannya wilayah ini lebih besar daripada beberapa koloni Portugal di Afrika dan banyak negara-negara yang baru merdeka lainnya.

20. Di tingkatan politik nasional, tiga pemangku kepentingan utama—Portugal, Indonesia, dan Australia—mengalami berbagai tantangan internal dan ketidakstabilan selama masa 1974 - 1975 yang kritis. Persoalan-persoalan dalam negeri menambah kesibukan para pembuat kebijakan utama dan, setidaknya dalam kasus Portugal, terbukti merugikan bagi Timor-Leste.

21. Dalam masa ini, Portugal mengalami kudeta militer sayap kiri, percobaan kudeta balasan, dan beberapa pergantian pemerintahan. Selain amat disibukkan oleh nasibnya sendiri, Portugal juga terlibat dalam dekolonisasi koloni-koloni utamanya di Afrika. Indonesia terancam oleh keruntuhan ekonomi akibat krisis Pertamina selama beberapa bulan pada masa itu. Ini terjadi ketika Pertamina, perusahaan minyak negara Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ibnu Sutowo, mengalami kesulitan membayar utang-utang luar negerinya yang besar. Krisis ini semakin mengancam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada minyak dan kepercayaan para investor asing. Harga minyak yang terus meningkat mampu mengangkat Indonesia dari kemiskinan ke kesejahteraan yang relatif, dan sangat penting bagi kelangsungan program-program politik Presiden Soeharto. Para penasihat presiden mengatakan bahwa Timor tidaklah begitu penting dibandingkan dengan krisis Pertamina, dan bahwa krisis ini menyita sembilan puluh persen waktu presiden dalam bulan-bulan menjelang invasi Indonesia.¹⁴ Kesehatan Presiden Soeharto, yang selalu menjadi soal penting dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, juga menjadi masalah menjelang akhir 1975 ketika ia menjalani operasi kandung empedu. Australia pun mengalami ketidakstabilan politik yang tidak biasa selama masa ini. Pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Gough Whitlam dibubarkan pada November 1975, setelah terjadi krisis konstitusi yang menyisakan suatu pemerintahan sementara pada masa invasi Indonesia. Kebijakan luar negeri menjadi masalah yang tidak begitu penting dalam masa pemilihan umum yang pahit, yang diadakan pada 13 Desember 1975.

Sumber-sumber

22. Komisi sedapat mungkin mendasarkan penelitiannya pada sumber-sumber tangan pertama. Komisi memberitahu mengenai penyelidikannya kepada sebagian besar pemerintahan dan lembaga-lembaga yang disebut dalam bab ini dan meminta masukan dari mereka. Komisi menulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Portugal dan Australia, Pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Republik Rakyat Cina, dan Persatuan Kerajaan Inggris. Komisi tidak menerima satu pun balasan resmi, namun mendapatkan bantuan yang cukup berarti dari sejumlah perwakilan negara-negara ini yang berbasis di Timor-Leste. Komisi juga menghubungi pihak-pihak di Moskow dan Vatikan mengenai akses terhadap dokumentasi.

23. Masalah umum yang dihadapi baik oleh Komisi maupun berbagai pemerintahan adalah tantangan dalam mendapatkan catatan-catatan dari masa 30 tahun yang lalu. Mendapatkan dan mengakses catatan-catatan ini dari masa pra-komputer di masa 1970-an merupakan tantangan administratif dan finansial, yang dipersulit oleh perlunya memberi identifikasi yang tepat mengenai dokumen-dokumen dan tanggal-tanggal. Dalam sebagian besar kasus, penyelidikan yang lebih menyeluruh masih perlu dilakukan, dan dalam kasus di mana belum ada undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi atau di mana akses masih dibatasi, hal ini pun mungkin tidak akan berhasil.

24. Tapi, keputusan beberapa pemerintahan untuk membuka walau sedikit dari informasi mereka mengenai Timor-Leste, telah sangat membantu Komisi dalam mengemban tanggungjawabnya mencari kebenaran. Dokumentasi yang dibuka oleh pemerintah Australia untuk periode 1974 - 1976 telah sangat berharga, seperti halnya laporan dua jilid "Relatórios da Descolonização de Timor" mengenai 1974 - 1975 yang disediakan oleh Pemerintah Portugal. Komisi juga dibantu oleh informasi rahasia yang dibuka kepada Arsip Keamanan Nasional oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Perpustakaan Presiden Ford dan Carter, empat jilid bahan-bahan rahasia yang dibuka oleh Pemerintah Selandia Baru, serta dokumen-dokumen yang dibuka oleh Pemerintah Inggris dan disediakan kepada Komisi oleh Hugh Dowson. Komisi juga banyak mengandalkan catatan debat-debat yang informatif mengenai Timor di PBB, Kongres AS, dan Parlemen Australia, serta koleksi dokumen-dokumen dasar mengenai persoalan Timor yang disunting oleh Heike Krieger dan diterbitkan oleh University of Cambridge. Ini diperkaya lagi oleh laporan mengenai penentuan nasib sendiri yang dipersiapkan untuk Komisi oleh Profesor Geoffrey C. Dunn, Universitas Nagasaki, Jepang, serta kesaksian tertulis dan lisan yang diberikan kepada Komisi oleh para mantan diplomat yang berdinasi di PBB dan Pemerintah Amerika Serikat dan Australia.*

25. Catatan-catatan ini merupakan bagian penting dari khazanah sejarah Timor-Leste yang baru kali ini dapat dilihat oleh sebagian besar orang Timor-Leste. Komisi sangat berterima kasih atas segala kebaikan hati dan kerjasama yang diterimanya dalam menyusun bahan-bahan ini, dan sesuai dengan mandatnya, telah menyimpan dan menyusun arsip-arsip ini untuk bahan referensi di masa mendatang. Komisi berharap bahwa pemerintahan-pemerintahan yang belum melakukan hal ini akan menyumbang catatan-catatannya atau membantu peneliti Timor atau yang lain untuk mengakses arsip-arsip mereka.

.....
* Komisi juga berterima kasih kepada John Waddingham, Julia Davey, dan Peter Carey atas nasihat dan kontribusi mereka pada proses riset bab ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemangku kepentingan utama

Indonesia sudah melakukan studi akan kemungkinan reaksi internasional terhadap intervensi Indonesia di Timor Portugis...[Indonesia] sudah mengambil kesimpulan, bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak akan memprotes. Tidak akan ada reaksi signifikan dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Hubungan dengan Portugal tidaklah penting bagi Indonesia. Referensi apapun tentang hal ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditangani oleh Indonesia dengan memuaskan. Negara-negara Afrika Hitam akan bereaksi, tetapi ini tidak akan memiliki dampak serius bagi Indonesia. Hanya dua negara yang akan memprotes secara keras—Cina dan Australia. Di dalam kasus Cina, bentuk protes ini akan merupakan hal yang rutin dan stereotipikal (“sebuah reaksi wajib”). Sedangkan di Australia, kelompok-kelompok tertentu dan media akan menimbulkan kegemparan. Pemerintah Australia akan merasa harus melakukan protes. Ini akan disesali oleh Indonesia. Tetapi semua itu akan hilang ditelan waktu.¹⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa

26. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 1945 setelah Perang Dunia Kedua, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun kerjasama antarnegara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan hak-hak asasi manusia. Negara-negara anggotanya terikat oleh Piagam PBB, sebagai kesepakatan internasional yang memaparkan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai anggota komunitas internasional.

27. Piagam PBB mengakui prinsip-prinsip dari hak atas penentuan nasib sendiri dan, seperti yang tercantum dalam Bab XI piagam tersebut, mewajibkan anggotanya yang tanggung jawab atas wilayah-wilayah atau koloni-koloni yang tidak berpemerintahan sendiri, untuk menerima suatu ‘amanat suci’ guna mendorong kemajuan bangsa-bangsa itu beserta lembaga-lembaga politiknya, dan memberitahu komunitas dunia mengenai langkah-langkah yang diambil dalam persiapan penentuan nasib sendiri.

28. Gerakan menentang kolonialisme semakin kuat bergulir setelah Perang Dunia Kedua. Baik bangsa-bangsa yang terbelenggu maupun kekuatan kolonial sepakat bahwa kolonialisme, sebagai suatu sistem yang didasarkan atas dominasi dan ketidaksetaraan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental PBB dan tidak dapat dipertahankan dalam dunia yang sedang berubah. Pada 1960, untuk mempercepat proses tersebut, PBB mengumumkan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa-bangsa Kolonial. Deklarasi ini diadopsi oleh mayoritas besar anggota-anggota PBB. Deklarasi itu menyatakan:

Segala bangsa berhak atas penentuan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan nasib sendiri dan bebas mengupayakan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.*

29. Begitu pentingnya dokumen ini bagi Timor-Leste, sehingga setiap resolusi Sidang Umum dan Dewan Keamanan mengenai persoalan Timor-Leste mencantumkannya sebagai pendahuluan.

30. Pada hari yang sama, Sidang Umum mengemukakan berbagai prosedur di mana pemerintahan diri sendiri secara total dapat diraih oleh wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Resolusi 1541 (XV) memberi tiga pilihan: kemerdekaan, asosiasi bebas, atau integrasi dengan negara merdeka. Resolusi ini mensyaratkan bahwa integrasi hanya dapat terjadi jika wilayah yang dimaksud sudah memiliki lembaga-lembaga politik yang bebas dan maju, dan bahwa integrasi adalah hasil dari keinginan bebas masyarakatnya yang diungkapkan melalui pemungutan suara dewasa universal yang terbuka.†

31. Pada 1961, PBB membentuk Komite Khusus Dekolonisasi untuk memperkuat Deklarasi tersebut.‡ Peran utamanya adalah untuk menasihati Sidang Umum mengenai cara-cara untuk mendorong dekolonisasi dan kemerdekaan, serta memberitahu Dewan Keamanan mengenai perkembangan di wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Komite ini tidak memiliki kuasa untuk menegakkan resolusi-resolusi atau rekomendasinya, tapi diberi mandat untuk bepergian ke seluruh dunia, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengumpulkan informasi langsung mengenai situasi di wilayah-wilayah itu, termasuk kehendak bangsanya mengenai masa depan mereka. Pembahasan mengenai dekolonisasi juga dilakukan dalam Komite Keempat Sidang Umum.

32. Karena inisiatif-inisiatif ini, dekade 1960-an sering disebut sebagai dekade dekolonisasi dan kemerdekaan. Tidak kurang daripada 42 negara, yang sebagian besar di Afrika, memperoleh kemerdekaan dan keanggotaan PBB selama dasawarsa 1960-an, lebih banyak dari dekade-dekade lainnya dalam sejarah PBB. Walau demikian, Timor tidak turut merdeka sampai 40 tahun kemudian.

33. Hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri diakui pada 15 Desember 1960, ketika Sidang Umum PBB mencantumkan nama Timor sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, bersama dengan koloni-koloni Portugal lainnya.¹⁶

* Resolusi SU 1514 (XV). UN Doc. A.RES/1514 (XV) Sembilan anggota abstain: Australia, Belgia, Republik Dominika, Prancis, Portugal, Spanyol, Union of South Africa, Inggris, dan Amerika Serikat.

† Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh anggota-anggota di dalam menentukan adanya sebuah kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan disebut di dalam Pasal 73e dari Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Prinsip IX, digabungkan ke Resolusi SU 1541 (XV), 15 Desember 1960

‡ Komite itu juga disebut sebagai Komite 24 berdasarkan jumlah anggotanya. Nama lengkapnya adalah Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.

Ini adalah pertama kalinya bangsa Timor-Leste diakui oleh Sidang Umum sebagai bangsa yang berhak atas penentuan nasib sendiri. Portugal menolak menerima keputusan itu dan tetap bersikeras di hadapan tantangan-tantangan internasional sampai terjadi perubahan rezim pada 1974. Walau demikian, keputusan PBB ini sangat signifikan. Meskipun perlu waktu untuk menerapkannya dan menemui berbagai macam rintangan sampai pada 1999, keputusan ini secara radikal mengubah status hubungan Timor dengan Portugal dan komunitas internasional. Keputusan ini mengangkat takdir sebuah bangsa kecil dari ketidakjelasan kolonial menjadi persoalan tanggungjawab internasional, dan PBB serta lembaga-lembaganya menjadi forum pertanggungjawaban utama untuk masa depan bangsa ini.

Portugal

34. Portugal bergabung dengan PBB pada 1955. Amandemen pada 1951 terhadap Konstitusi Portugis 1933 membatalkan Undang-Undang Kolonial 1930, dan menetapkan koloni-koloni Portugis sebagai 'provinsi seberang lautan'. Penduduk pribumi koloni-koloni ini tidak diikutkan dalam pembahasan mengenai perubahan status de jure mereka. Portugal bersikap abstain ketika Sidang Umum menerima Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa-bangsa Kolonial pada 1960, menolak melapor kepada PBB sebagaimana yang diwajibkan dalam Bab XI Piagam PBB, dan menentang inisiatif-inisiatif PBB lainnya termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada 1963 yang mengkritik Portugal atas ketidakpatuhannya dan kembali mempertegas hak atas penentuan nasib sendiri Timor Portugis. Rezim Salazar-Caetano bersikeras bahwa Portugal adalah negara "pluri-continental" di mana bangsa-bangsanya menjalankan penentuan nasib sendiri melalui partisipasi dalam proses politik Portugis. Perdana Menteri Portugis, António de Oliveira Salazar, juga percaya bahwa proses dekolonisasi global ini dimotori oleh negara-negara Dunia Ketiga dan komunis, yang menginginkan disintegrasi Eropa Barat, dan bahwa Barat menuruti pihak mayoritas melalui PBB.¹⁷ Kebuntuan ini berlanjut hingga 1974.

35. Situasi sosio-ekonomi di Timor Portugis pada periode ini terbelakang dan pada dasarnya lumpuh. Konsul Australia untuk wilayah itu, James Dunn, melaporkan pada 1963:

Timor Portugis adalah wilayah yang miskin dan sangat terbelakang. Tidak ada industri hilir, sumberdaya mineralnya sangat minim, dan produksi pertanian subsistennya juga rendah. Sangat sedikit yang dilakukan oleh Portugis untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, dan sejauh ini tidak ada bukti adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi hal ini di masa mendatang.

36. Dunn percaya situasi itu begitu menyia-siakan orang Timor sehingga mereka mungkin akan lebih memilih untuk bergabung dengan Indonesia yang baru merdeka tapi miskin. Ia menulis:

Orang Portugis di Timor tidak banyak mendapat dukungan riil dari penduduk aslinya... sebagian besar mungkin akan lebih memilih berada di bawah Indonesia daripada terus dikuasai Portugis.¹⁸

37. Ada beberapa kemajuan pada awal 1970-an di bawah Gubernur Fernando Alves Aldeia. Namun, sistem ini sesungguhnya sudah begitu bangkrut sehingga José Ramos-Horta, sekembalinya dari pengasingannya di Mozambik, berkomentar:

Saya melihat negeri saya tercinta sama saja seperti sebelum saya pergi (pada 1970). Timor-Leste, di bawah Portugis, tampak duduk diam dalam sejarah. Denyut nadi pembangunan tidak terasa di sini.¹⁹

38. Pada November 1975, PBB menggambarkan situasi sosio-ekonomi Timor-Leste dengan istilah-istilah yang tidak kalah menyedihkan:

Menurut publikasi resmi Portugis, di antara faktor-faktor yang merintang pembangunan wilayah ini ialah rendahnya pendapatan per kapita, kurangnya infrastruktur transportasi dan energi, kurangnya tradisi komersial di antara penduduk pribumi, kekurangan pekerja yang berkualifikasi teknis di berbagai tingkatan sektor publik dan pribadi, kurangnya kemampuan finansial, defisit dalam perdagangan, dan kuatnya pemusatan di proses produksi akan satu produk saja, yaitu kopi.²⁰

39. Kondisi bangsa yang amat menyedihkan ini dibicarakan lebih jauh di kalangan internasional oleh diplomat-diplomat yang mengunjungi wilayah itu setelah 1975. Setelah kunjungan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Portugis Vittorio Winspeare Guicciardi ke Timor pada awal 1976, Pemerintah Australia melaporkan:

Winspeare [Guicciardi] begitu terkejut melihat 'keterbelakangan' sedikit orang yang ia temui di daerah-daerah perdesaan di pinggiran kota dan mengatakan bahwa sangat sulit membayangkan mereka dapat memahami segala persoalan seputar tindakan penentuan nasib sendiri. Ia begitu 'terkesima' bagaimana 'primitifnya' kondisi sebagian orang, contohnya yang ia temui di wilayah kantong Oecussi. Ia mengatakan bahwa ia yakin hidup mereka tidak banyak berubah setelah 500 tahun kekuasaan Portugis.²¹

40. Menyusul perubahan rezim pada 25 April 1974, Pemerintah Portugis yang baru menerima kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Piagam PBB, dan pada 24 Juli 1974 menganulir Pasal 1 Konstitusi 1933, yang mengklasifikasikan Timor-Leste sebagai wilayah nasional dan mengakui haknya atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Portugal secara resmi menyampaikan perubahan radikal kebijakan ini kepada PBB sebanyak empat kali antara Agustus dan Desember 1974.²² Dalam resolusinya yang diadopsi pada 1974, Sidang Umum menyambut penerimaan

oleh Portugal “akan prinsip sakral penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan serta penerapannya yang tanpa syarat terhadap semua bangsa yang ada di bawah dominasi kolonial Portugis”.²³

41. Sesuai dengan prinsip utama kebijakan ini, yaitu menghormati pilihan bebas rakyat, Gubernur Portugis, Kolonel Mario Lemos Pires, secara konsisten berupaya memperlakukan semua partai politik dengan sama selama 1975. Ia tidak menyetujui tindakan-tindakan Kolonel Maggiolo Gouveia, Komandan Polisi Portugis yang bergabung dengan UDT pada awal terjadinya perang saudara, dan dalam dua kesempatan menolak mengakui Fretilin sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Timor yang sah—pada September setelah Fretilin mengambilalih administrasi pemerintahan dan kemudian pada November setelah Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan. Untuk alasan yang sama, Portugal juga tidak mengakui deklarasi integrasi dengan Indonesia oleh empat partai.²⁴

42. Setelah mengakui pada November bahwa ia tidak memiliki “cara untuk menjamin normalisasi situasi di Timor”,²⁵ Portugal menyerahkan persoalan tersebut kepada PBB untuk diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur PBB. Setelah invasi Indonesia, Portugal memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia dan memohon kepada Dewan Keamanan untuk segera menghentikan intervensi militer Indonesia dan memperoleh “penyelesaian konflik secara damai dan ternegosiasi, serta proses dekolonisasi di bawah pengawasan PBB”.²⁶ Walaupun secara fisik telah menarik diri dari Timor, Portugal mengakui kewajibannya sebagai kuasa pemerintahan untuk mendorong penentuan nasib sendiri, dan menyebutkan hal ini secara eksplisit di dalam konstitusinya.²⁷

43. Prinsip ini terus dipertahankan selama terjadinya konflik[†] dan ditegakkan dalam beberapa kesempatan, walaupun menghadapi tekanan politik yang menentang. Ada dua contoh yang dapat dikemukakan. Pada Juni 1976, Jenderal Portugal Morais da Silva mengadakan negosiasi rahasia dengan perwakilan pemerintah Indonesia, yakni Jenderal Benny Moerdani dan Harry Tjan mengenai pembebasan 23 tawanan Portugis yang ditahan di Indonesia sejak perang saudara, yang menjadi kekhawatiran umum di Portugal. Sebagai imbalannya, Morais da Silva menawarkan kemungkinan pengakuan kedaulatan Indonesia di Timor-Leste oleh Portugal. Usulnya ditolak oleh presiden terpilih, Jenderal António Ramalho Eanes, dan perdana menteri baru, Mario Soares, yang menegaskan bahwa negosiasi mengenai kedaulatan itu bergantung pada tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional.²⁷ Dalam kesempatan lainnya, pada 1987, Portugal dan PBB mempertimbangkan untuk mengamati pemilihan umum Indonesia di Timor-Leste sebagai cara untuk

* Pasal 307 Konstitusi Republik Portugal, 2 April 1976, menyatakan: “Portugal terikat pada tanggung-jawabnya, sesuai dengan hukum internasional, untuk menjunjung serta menjaga hak Timor-Leste atas kemerdekaan”. Pada 7 Juli 1989, Pasal 293 diubah sehingga berbunyi “untuk menjunjung serta menjaga hak Timor-Leste atas hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.” Krieger, hal. 36.

† Penerimaan Portugal atas kewajiban internasionalnya bagi Timor Timur bertentangan dengan penerimaannya terhadap pengambilalihan India atas Goa pada 1961 dan pelepasan Spanyol atas Sahara Barat kepada Maroko pada November 1975. Keduanya terjadi tanpa adanya proses penentuan nasib sendiri.

menilai sikap rakyat Timor terhadap integrasi. Setelah sebuah kampanye protes oleh kalangan masyarakat sipil, Portugal pun memperbarui komitmennya terhadap penentuan nasib sendiri.

44. Pada 1991, Portugal menegaskan komitmen pada prinsip ini ketika ia mengajukan Australia ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice; ICJ) atas dasar bahwa Perjanjian Celah Timor antara Australia dengan Indonesia telah melanggar, antara lain, hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. ICJ memutuskan tidak bisa bertindak sebagai hakim di dalam perdebatan ini. Tapi, ICJ menyatakan bahwa dalam pandangan Portugal dan Australia, wilayah Timor-Leste tetap merupakan wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri dan masyarakatnya memiliki hak atas penentuan nasib diri sendiri.²⁸

45. Keputusan Portugal untuk mendekolonisasi Timor-Leste, untuk mempertahankan dukungan secara prinsip atas penentuan nasib sendiri, dan untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia selama 25 tahun, telah berperan sangat penting bagi nasib Timor-Leste. Meskipun demikian, walaupun sudah berkali-kali menyatakan komitmen kebijakan sejak 1974, secara umum Portugal gagal menjelmakan prinsipnya menjadi dukungan yang berkelanjutan sampai menjelang akhir konflik. Portugal telah salah mengelola proses dekolonisasi pada 1974 dan 1975, dan umumnya tidak efektif sebagai 'kuasa pemerintahan' selama sebagian besar masa pendudukan Indonesia itu.

46. Letnan Kolonel Lemos Pires bersaksi kepada Komisi bahwa banyak faktor yang memengaruhi gagalnya proses dekolonisasi pada masa 1974 - 1975, termasuk agresi yang dilakukan oleh Indonesia dan ketidakdewasaan partai-partai politik baru di Timor. Tapi, satu faktor kunci untuk semua ini adalah kegagalan Portugal untuk melibatkan komunitas internasional sebelum dan setelah 1974.

47. Mantan gubernur itu menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan dekolonisasi adalah peristiwa revolusioner yang sangat mendadak dan mengejutkan baik bagi Portugal maupun Timor-Leste. Keduanya tidak siap dan tidak memiliki perangkat yang baik untuk menjalankan peran mereka masing-masing, dan seakan terjerumus ke dalam kekacauan karena keputusan itu. Hal ini sebagian besar merupakan akibat kegagalan rezim Salazar-Caetano mematuhi kewajiban internasionalnya dalam mempersiapkan diri beserta koloni-koloninya untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan cara yang sistematis dan positif, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengabaian Portugal atas tanggungjawabnya dan kekukuhannya meneruskan status quo yang melanggar kebijakan PBB menggagalkan terjadinya dekolonisasi yang sah serta mengakibatkan kehancurannya sendiri dan pergolakan, baik di dalam negeri maupun di wilayah-wilayahnya di seberang lautan. Hal ini juga menimbulkan adanya pandangan di Portugal bahwa kemerdekaan bukan pilihan politik dan ekonomi yang dapat berjalan bagi Timor-Leste, dan bahwa wilayah itu seharusnya bersatu dengan Indonesia, walaupun harus melalui proses penentuan nasib sendiri.

48. Walaupun keputusannya untuk melakukan dekolonisasi dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, Portugal menolak menginternasionalisasi proses itu dengan mencari bantuan kepada PBB. Pada Februari 1975, misalnya, delegasi Pemerintah Portugis di Timor bertemu dengan Komisi Nasional Dekolonisasi di Lisbon, dan menegaskan “perlunya segera menetapkan kebijakan dengan jelas, [dan] membela internasionalisasi persoalan Timor melalui PBB, khususnya meminta negara-negara Dunia Ketiga sebagai satu-satunya pelindung terhadap intervensi militer Indonesia.” Komisi ini memutuskan bahwa permintaan kepada PBB untuk menahan Indonesia harus digunakan sebagai jalan terakhir. Namun, Portugal lebih memilih melakukan pembicaraan rahasia putaran ketiga dengan Indonesia.[†] Penolakan untuk melibatkan PBB ini, setidaknya sampai setelah invasi Indonesia terjadi, merupakan kesalahan besar. Mantan Gubernur Lemos Pires mengatakan kepada CAVR:

Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya menjadi pemain utama dalam proses ini...Saya kira akan lebih baik bagi Portugal [dan] proses dekolonisasi Timor-Leste apabila Portugal menginternasionalisasi persoalan ini sejak kebutuhan akan penentuan nasib sendiri diakui pada 1974...Pemerintah Portugis tidak meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa datang ke wilayah ini...Saya kira ini adalah kesalahan.^{*}

49. Alilh-alih mencari bantuan internasional, Portugal justru memutuskan mengelola proses itu sendiri dengan sedikit sumberdaya militer dan uang, tanpa rencana, dan sambil kewalahan dengan runtuhnya imperium Portugal di Afrika dan konflik di dalam negeri. Akibat ketidakstabilan politik yang mewabah di Portugal, Timor menderita akibat tidak adanya kepemimpinan yang tegas di saat krisis. Pemerintahan di Portugal tidak berdaya, misalnya, selama berlangsungnya Gerakan Militer UDT pada Agustus, dan lagi pada November menjelang invasi Indonesia. Letnan Kolonel Lemos Pires mengatakan kepada Komisi:

Tidak ada kebijakan dekolonisasi bagi Timor-Leste. Dukungan dana yang diberikan sangat sedikit...Pasukan militer yang dialokasikan teramat minim.²⁹

* João Loff Barreto, *The Timor Drama*, 1981, hal. 25-26. Pada Juni 1975 Komisi kembali menolak menginternasionalisasikan isu tersebut dan pada September Portugal meyakinkan Indonesia bahwa PBB adalah jalan terakhir. Barreto, hal. 53. Letnan Kolonel Portugis, Lopes Pires, seorang pengawas militer dalam pertemuan Komisi Nasional Dekolonisasi menulis: “Saya memahami [internasionalisasi] ini sebagai satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menghindari apa yang kita semua ingin hindari, melihat situasi sistematis yang memburuk”. Barreto, hal. 63. Menteri Luar Negeri Australia, Don Willesee, mengatakan kepada Parlemen pada 8 Oktober 1975: “Sampai pada saat itu, Pemerintah Portugal... belum menyerahkan proposal resmi apapun untuk mediasi PBB di Timor Portugis”. (http://www.whitlam.org/collection/2000/20001012_EastTimor_74-75/index.html).

† Pejabat-pejabat Portugal dan Indonesia bertemu secara rahasia di Lisbon pada 14 Oktober 1974, di Paris pada 14 November 1974, dan di London pada 9 Maret 1975.

‡ Mario Lemos Pires, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003. PBB mengikuti proses itu dan mengadakan pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi di Lisbon pada Juni 1975, tapi Portugal tidak menyerahkan isu tersebut sampai pada Desember 1975.

50. Kurangnya pasukan Portugis dapat dipahami dalam konteks revolusi Pergerakan Pasukan Bersenjata (Movimento das Forças Armadas, MFA), namun membuat gubernur relatif tidak berdaya pada masa perang saudara, dan wilayah itu pun menjadi semakin rentan terhadap agresi Indonesia.* Situasi sial yang dihadapi Portugal ini semakin tersorot jelas, ketika Gubernur Lemos Pires mundur ke Ataúro dan kemudian ke Portugal.

51. Portugal sangat menyadari adanya rencana Indonesia yang semakin agresif untuk menyatukan Timor, dan mencoba meredam tindakan Indonesia melalui jalur-jalur diplomatik. Meskipun demikian, selama periode ini Portugal tampaknya menganggap Indonesia sebagai bagian dari solusi ketimbang bagian dari masalah. Perundingan-perundingannya dengan Indonesia sampai terjadinya invasi pada 7 Desember 1975 umumnya terjadi secara rahasia dan kooperatif, dengan pemahaman akan kepentingan-kepentingan Indonesia, termasuk jaminan bahwa persoalan tersebut tidak akan diinternasionalisasikan, dan khususnya tanpa kritikan umum mengenai maksud-maksud militer Indonesia dan campurtangannya dalam hubungan dalam negeri Timor Portugis.

52. Menteri Luar Negeri Melo Antunes konon tidak menggunakan kesempatan dalam perundingan di Roma dengan Indonesia pada 1-2 November 1975, untuk memperlihatkan bukti yang diberikan oleh wartawan Portugis, Adelino Gomes, bahwa Indonesia telah mengumpulkan pasukan di Timor Barat dan sudah melintas masuk ke Timor Portugis.³⁰ Komunike dari pertemuan itu menggambarkan pertemuan itu sebagai “terbuka,” tapi tidak menyebutkan aktivitas militer Indonesia. Pertemuan itu justru terfokus pada perlunya diadakan perundingan dengan partai-partai politik Timor “untuk mengakhiri pertikaian bersenjata” dan melindungi “kepentingan Indonesia”. Dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pada 28 dan 29 November 1975, Portugal mempersalahkan Fretilin atas situasi itu dan tidak menyebutkan Indonesia secara langsung.³¹ Baru setelah invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975, ketika sudah sangat terlambat, Portugal secara langsung memprotes aksi-aksi militer Indonesia, kemudian memutuskan hubungan diplomatik dan membawa isu itu kepada Dewan Keamanan.

53. Mantan Gubernur Lemos Pires mengatakan kepada Komisi bahwa menurutnya Australia seharusnya dapat lebih membantu Portugal dan Timor pada saat itu. Pada 1975, dia, anggota-anggota Parlemen Australia, UDT, dan Fretilin berulang-kali membuat permohonan agar konsulat Australia, yang ditutup pada 1971, dibuka kembali sehingga ada kehadiran internasional dan dapat memberi laporan langsung kepada Australia mengenai situasi yang terjadi. David Scott bersaksi kepada Komisi bahwa permohonan ini ditolak oleh Pemerintah Australia pada enam kesempatan.³² Menurut Gough Whitlam yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, “(Portugal) tidak pernah kapan pun... membuat permohonan spesifik kepada Australia atau kekuatan regional lainnya.”³³

.....
* Portugal mengurangi pasukannya dari kurang-lebih 3.000 orang pada 1974 sampai kira-kira 200 orang pada pertengahan 1975. José Ramos-Horta menulis: “Dalam pandangan saya, pengurangan pasukan adalah kesalahan yang paling berdampak merusak yang dilakukan oleh Portugis pada 1974”. Funu: The Unfinished Saga of East Timor, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1987, hal. 48.

54. Portugal bersikap relatif pasif di kancah internasional selama tahun 1970-an dan awal 1980-an. Richard Dalton, seorang pejabat dalam Misi Inggris di PBB, mengamati bahwa pada 1976:

Portugal terus diam. Secara pribadi mereka mengatakan bahwa mereka akan menerima apapun yang bisa diterima PBB secara utuh. Mereka tidak berusaha menyelesaikan apapun.³⁴

55. Kehampaan inisiatif ini sangat kontras dengan agresi diplomatik Indonesia dan menyebabkan terjadinya kehilangan suara di PBB serta melemahnya dukungan bagi Timor-Leste. Pemerintah Portugis terkadang lamban atau tidak tanggap terhadap peristiwa-peristiwa penting di Timor-Leste. Contohnya adalah ketika Portugal gagal memprotes penyerangan militer Indonesia di Timor-Leste, yang diikuti oleh kegagalan gencatan senjata pada 1983. Hal ini memicu kritik samar-samar dari José Ramos-Horta:

Kelalaian kriminal dan kepengecutan politik [Portugal] adalah dua hal yang dalam delapan tahun terakhir turut menyebabkan hilangnya blok suara yang mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Setelah masa singkat setahun di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Pinto Balsemão, ketika Pemerintah Portugal memang melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menarik perhatian komunitas internasional akan tragedi bangsa Timor-Leste, kita kini kembali lagi ke kesunyian dan pelarian yang sudah menjadi sikap pejabat Portugis sejak 1974 sampai 1981.³⁵

56. Beberapa pertanda positif adanya komitmen yang agak terlambat muncul pada dekade 1980-an, dan memiliki momentum yang semakin besar pada dekade 1990-an. Pada 1982, di bawah Presiden Ramalho Eanes, Portugal mulai membahas persoalan ini secara sistematis serta mengerahkan kementerian luar negeri dan diplomat-diplomatnya. Pada 1982 itu juga, Majelis Nasional Portugis membentuk Komite Khusus untuk Pendampingan Situasi di Timor-Leste. Di samping menunjukkan konsensus antarpantai mengenai persoalan tersebut, Komite memfasilitasi internasionalisasi persoalan Timor-Leste oleh wakil-wakil Portugis di berbagai forum, termasuk Komite Khusus Dekolonisasi PBB.

57. Satu kemajuan besar terjadi pada Juni 1986 ketika Portugal bergabung dengan Komisi Ekonomi Eropa (European Economic Commission, EEC) dan dengan Parlemen Eropa pada tahun berikutnya. Ini merupakan keterlibatan Portugal yang pertama dalam sebuah organisasi lintas-negara yang signifikan. Dipimpin oleh Presiden Mario Soares, dan didorong oleh tumbuhnya persatuan dalam Resistansi Timor, Portugal memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk menggali dukungan di antara rekan-rekan Eropanya, terutama Irlandia,* Yunani, dan Italia.

.....
* Menyusul footage televisi mengenai pembantaian Santa Cruz dan aktivitas komunitas yang dipimpin oleh Kampanye Solidaritas Irlandia Timor-Leste (East Timor Ireland Solidarity Campaign, ETISC), yang

Kegiatan resmi semakin meningkat selama dekade 1990-an, didorong antara lain oleh tanggapan publik di Portugal terhadap demonstrasi yang terjadi pada kunjungan Paus Yohanes Paulus II, dampak emosional pemuda Timor yang berdoa dalam bahasa Portugis selama pembantaian Santa Cruz 1991, serta penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1996. Contohnya, pada 1993, Portugal berperan besar dalam diterimanya oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB suatu resolusi positif mengenai Timor-Leste. Dalam apa yang dideskripsikan oleh seorang diplomat Amerika Serikat sebagai “salah satu saat yang paling dramatis di sidang tahun ini”, Portugal, dengan bantuan dari bekas koloni-koloninya, mendapatkan dukungan dari AS, Kanada, dan Australia untuk resolusi tersebut. Misi AS di Jenewa melaporkan:

Diloloskannya Resolusi Timor Leste menunjukkan titik puncak akan usaha yang luarbiasa besar dari Pemerintah Portugis, yang memainkan peranan sangat gigih di dalam dialog antara EC-Indonesia, menangkis tekanan yang cukup besar—termasuk dari teman-teman terdekatnya—untuk menerima penggunaan bahasa yang kompromistis.³⁶

58. Portugal kembali ke panggung utama bersama Indonesia dalam negosiasi-negosiasi yang bermuara pada Kesepakatan 5 Mei 1999. Pembicaraan antara Portugal dan Indonesia yang berdasar pada Resolusi Sidang Umum 37/30, tidak mengalami banyak kemajuan sejak 1983; namun, menyusul keputusan Kofi Annan untuk mengaktifkan kembali proses itu pada 1997, Portugal bekerja langsung dengan Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste, Jamsheed Marker, dan berpegang teguh pada kebijakan penentuan nasib sendiri yang selalu diutarakannya. Menurut Duta Besar Marker, Perdana Menteri Guterres dan Menteri Luar Negeri Jaime Gama menegaskan bahwa “mereka tidak dapat menerima penyelesaian yang tidak berdasar pada pilihan bebas rakyat Timor”.³⁷ Hal ini dicapai melalui Kesepakatan 5 Mei 1999 dan pemungutan suara pada Agustus, dan Portugal memainkan peran penting dalam kedua peristiwa itu.

59. Portugal tidak secara resmi melepaskan diri sebagai ‘kuasa pemerintahan’ di Timor-Leste. Setelah perdebatan di Lisabon menghadapi Kesepakatan 5 Mei, diputuskan untuk tidak membesar-besarkan masalah, agar tidak membahayakan atau memperlambat jalannya negosiasi yang sensitif itu menjelang tindakan penentuan nasib sendiri pada 1999. Alih-alih, disetujui bahwa dukungan Portugal terhadap tindakan-tindakan yuridis dan yang dapat diterima secara internasional, yang akan berujung pada kemerdekaan, akan mengakhiri statusnya sebagai “kekuasaan pemerintahan”. Tindakan-tindakan tersebut adalah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei 1999 (selama prinsip-prinsip keadilan [due process] dipenuhi), dukungan bagi pembentukan dan berjalannya UNTAET sebagai pemerintahan transisi,³⁸ dan pengakuan atas Republik Demokratik Timor-Leste.

dibentuk di Dublin pada 1992, Irlandia mendukung isu Timor-Leste mulai dari presiden sampai bawahan-bawahannya. Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews, berperan aktif dalam Uni Eropa dan ditunjuk sebagai utusan khusus Uni Eropa untuk Timor-Leste.

60. Pada 8 Mei 2002 Sidang Umum memutuskan “untuk menghapus Timor-Leste dari daftar ‘Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri’ setelah mendapatkan kemerdekaannya”.³⁹

Kesimpulan

61. Portugal mempunyai tanggungjawab utama, yaitu mempersiapkan dan memfasilitasi dekolonisasi di Timor, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya kepada PBB dan rakyat Timor. Kegagalannya di bawah rezim Salazar-Caetano untuk menjalankan tanggungjawab ini dan mempersiapkan masa depan bangsa Timor tanpa Portugal, patut disesalkan dan merupakan pelanggaran hak atas penentuan nasib sendiri. Hal ini juga mengikis hak atas kemerdekaan dengan memperkuat pandangan umum bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak dapat eksis secara ekonomi dan politik, dan hanya dapat bertahan melalui penyatuan dengan Indonesia.

62. Perubahan kebijakan Portugal pada 1974 untuk mendukung penentuan nasib sendiri, serta keteguhannya berpegang pada prinsip ini selama masa pendudukan Indonesia, merupakan hal yang sangat penting bagi nasib Timor-Leste. Meskipun demikian, Portugal gagal menjalankan tanggungjawabnya kepada rakyat Timor-Leste selama periode kritis 1974 - 1975 dan sesudahnya. Walaupun Timor secara geografis merupakan ketiga terbesar dari enam wilayah Portugal, Timor berada di urutan bawah dalam daftar prioritas Portugal. Bagi Portugal, periode ini tampaknya menandakan akhir perannya ketimbang menjadikannya aktif mengambil tanggungjawab baru. Pemerintah pusat tidak menyediakan sumberdaya yang cukup kepada perwakilan lokalnya, tidak pula mengamankan wilayah itu di tengah ancaman agresi yang jelas dari luar, bahkan terlalu mengakomodasi posisi Indonesia, dan menolak menginternasionalisasi isu tersebut. Jumlah nyawa yang hilang akibat kelalaian ini sangat besar. Kepasifan dan kebimbangan ini terus mewarnai kegiatan diplomatiknya hingga pertengahan 1980-an, walaupun ada kewajiban-kewajiban konstitusional dan internasional serta petisi yang terus-menerus dari rakyat Timor-Leste dan masyarakat sipil Portugis untuk pembelaan yang lebih meyakinkan bagi kepentingan bekas koloninya.

63. Mario Lemos Pires, Gubernur Timor Portugis yang terakhir, menjalankan tugasnya pada 1974 dan 1975, dengan sikap terhormat dan berprinsip di hadapan tantangan-tantangan yang berat. Komisi mengakui peran Mario Lemos Pires selama masa yang kritis ini.

Indonesia

64. Indonesia mendapat dukungan dari PBB dalam perjuangannya untuk kemerdekaan dari Belanda, dan bergabung dengan badan dunia itu pada 1950. Di bawah Presiden Sukarno, Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi yang lantang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

65. Pemerintah Indonesia baik di bawah Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto secara resmi mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan tidak mengklaim hak teritorial atas koloni itu.

66. Dalam serangkaian pernyataan kepada Sidang Umum antara 1954 dan 1962, yang berkaitan dengan sengketa atas Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, para pejabat Indonesia berulang-kali menekankan bahwa batas-batas nasional Indonesia adalah batas-batas bekas wilayah Hindia Belanda. Pada 1961, misalnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengatakan:

Mengenai pulau besar Borneo...yang bagian utaranya merupakan wilayah Inggris, dan sama halnya mengenai setengah pulau Timor, yang milik Portugis, kami tidak memiliki klaim teritorial apapun; karena yang kami anggap sebagai milik Indonesia dan wilayah Indonesia adalah tidak lain dan tidak bukan seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda.⁴⁰

67. Pada 1960, Indonesia mendukung Deklarasi PBB mengenai 'Pemberian Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial' dan resolusi Sidang Umum yang mengakui Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Indonesia mendukung resolusi-resolusi PBB selanjutnya, yang mengecam praktik-praktik kolonial Portugal dan kegagalannya memenuhi kewajibannya di bawah Piagam PBB. Wakil Ketua Dewan Penasihat Presiden Sukarno, Ruslan Abdulgani, berkata dalam sebuah pawai yang diadakan di Jakarta pada 1961:

Isilah hati kalian dengan kebencian tidak hanya terhadap penjajahan Portugis, tapi juga terhadap segala penjajahan yang masih ada di bumi Asia dan Afrika"; dan menambahkan bahwa "mata dan hati [Indonesia] ditujukan kepada Timor Portugis dan Goa [yang] masih berada di bawah kekuasaan penjajahan."⁴¹

68. Pemerintah Australia yakin bahwa kehadiran rezim kolonial yang terus-menerus di dalam kepulauan Indonesia akan memprovokasi Presiden Sukarno untuk menumpas sisa-sisa kolonialisme terakhir di lingkungannya, dan Australia menganjurkan kepada Portugal untuk membangun wilayah itu dan kepada Indonesia untuk tidak menggunakan kekuatan. Meskipun demikian, ketertarikan Sukarno pada Timor umumnya hanya berupa wacana dan tidak bisa disamakan dengan kampanye-kampanye 'ganyang Malaysia' atau Irian Barat.

.....
* Presiden Soeharto mengutip Pembukaan UUD 1945 ini dalam pernyataannya kepada perwakilan Pemerintahan Sementara Timor Timur, menanggapi petisi mereka untuk integrasi dengan Indonesia, 7 Juni 1976; dalam Krieger, hal. 48.

Dalam sebuah kunjungan ke Lisabon pada 1961, ia konon mengatakan kepada Perdana Menteri Portugis, Salazar, bahwa Indonesia menghormati kedaulatan Portugis di wilayah itu.⁴²

69. Kebijakan-kebijakan ini dilanjutkan di bawah Presiden Soeharto Pada Oktober 1974, dalam debat pertama di Komite Keempat PBB sejak terjadi perubahan rezim di Portugal, perwakilan Indonesia menyatakan:

Indonesia ingin melihat bangsa Timor Portugis menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri secara teratur dan damai, sesuai dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial.

70. Dia menambahkan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk integrasi, tetapi “hubungan semacam itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang, antara lain, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan”.⁴³ Duta Besar Indonesia untuk PBB, Anwar Sani, mengulangi sikap ini dalam sebuah pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi PBB yang diadakan di Lisabon pada Juni 1975.

71. Namun, pada kenyataannya Indonesia telah memutuskan sebelum akhir 1974 bahwa hanya ada satu hasil penentuan nasib sendiri yang dapat diterima. Pada Desember, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, seperti dikutip oleh kantor berita resmi Indonesia Antara, mengatakan bahwa rakyat Timor hanya memiliki dua pilihan: “tetap di bawah Portugis atau bergabung dengan Indonesia.” Kemudian ia mengatakan bahwa pilihan dengan Portugal tidak mungkin, karena pilihan itu “selain menambah beban Portugal, juga akan merupakan bentuk baru kolonialisme”; dan menyatakan, bahwa kemerdekaan akan “tidak realistis” karena “keterbelakangan dan kelemahan ekonomi penduduknya”.⁴⁴

72. Penasihat utama Soeharto, Harry Tjan, memastikan keputusan ini kepada Pemerintah Australia. Pada Februari 1975 dia memberi tahu Kedutaan Besar Australia bahwa:

Pemerintah Indonesia sudah membuat suatu keputusan bahwa, cepat atau lambat, Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia. Ini merupakan keputusan bulat oleh semua tokoh terkemuka Indonesia yang terlibat, termasuk presiden. Yang masih perlu diputuskan adalah kapan, dan bagaimana, hal ini harus diwujudkan. Seperti yang ia katakan, ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi akan terjadi. Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu mencoba segala cara yang memungkinkan sebelum berpaling ke solusi militer. Ia mengatakan bahwa ini adalah ‘tindakan terakhir’.⁴⁵

73. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menyebutkan kembali hal ini dalam sebuah analisis rahasia penting mengenai persoalan ini, yang ditulis pada Januari 1976 untuk Perdana Menteri Australia yang baru, Malcolm Fraser. Ia menuliskan:

Indonesia tidak akan dihalangi untuk mencapai tujuan fundamental kebijakan (penggabungan) ini. Indonesia sudah berketetapan dengan sikap ini secara konsisten, sejak beberapa bulan sebelum saya datang menjabat pos ini Maret lalu.⁴⁶

74. Ini merupakan keputusan yang amat menentukan. Keputusan ini bertolak-belakang dengan komitmen publik Pemerintah Soeharto untuk menghargai keinginan bebas rakyat Timor. Keputusan itu juga menempatkan Indonesia pada jalur yang akan bertabrakan dengan dua partai utama Timor-Leste, yaitu UDT dan Fretilin, yang menyuarakan kemerdekaan, dan memberi sebuah tantangan diplomatik yang besar bagi komunitas internasional.

75. Pelaksanaan tujuan ini dipercayakan kepada badan intelijen militer Opsus (Operasi Khusus) yang menyusun proyek terselubung Timor, untuk melancarkan operasi yang diberi nama sandi Operasi Komodo. Operasi ini dikendalikan oleh Mayor Jenderal Ali Moertopo, kepala Opsus; dan Letnan Jenderal Yoga Sugama, kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen). Eksekutif utamanya adalah Liem Bian Kie (sekretaris pribadi Ali Moertopo) dan penasihat utamanya adalah Harry Tjan dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies), lembaga penggagas bagi Opsus. Ini bukanlah tantangan baru. Opsus, di bawah Ali Moertopo, pernah menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat pada 1969 dan berhasil memastikan bahwa proses itu membuahkan pilihan prointegrasi. Beberapa tokoh lainnya dalam kampanye integrasi Timor juga sudah berpengalaman dalam pengambilalihan Irian Barat. Tokoh-tokoh ini termasuk Presiden Soeharto, dahulunya Mayor Jenderal, yang mengomandoi kampanye militer Mandala 1962 untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda; Jenderal Benny Moerdani; dan Kolonel Dading Kalbuadi.^{*} Seiring perkembangannya, Operasi Komodo mengembangkan sejumlah fungsi, termasuk diplomasi internasional (sebagian besar diarahkan kepada Portugal), intelijen, subversi, dan belakangan persiapan untuk penggunaan kekuatan militer. (Lihat Bagian 3: Sejarah Konflik.)

76. Di akhir Agustus 1975, Indonesia memperkeras posisinya dan memutuskan melancarkan intervensi militer guna mendapatkan integrasi. Hal ini terjadi setelah keberhasilan Fretilin dalam perang saudara, dan sinyal samar-samar oleh Menteri Koordinasi Antar-Wilayah Portugis, António de Almeida Santos, bahwa Portugal mungkin akan menyerahkan kekuasaan kepada Fretilin. Pada pertemuan 5 September, Presiden Soeharto dan Jenderal Benny Moerdani menyelidiki tujuh kemungkinan, mulai dari undangan kepada Indonesia dari Portugal untuk langsung turuntangan, sampai pada keterlibatan PBB, di mana Indonesia akan berpartisipasi. Presiden Soeharto mencoret semua opsi kecuali rencana Opsus yang ia sebut sebagai 'cara klasik'. Di bawah komando Jenderal Moerdani, rencana Opsus akan

.....
* Catatan mengenai keterlibatan Kapten Moerdani di Irian Barat dan Timor-Leste dapat ditemukan dalam Julius Pour, Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993. Moerdani tanggung jawab atas peran militer dalam Operasi Komodo. Kalbuadi bertugas sebagai komandan lapangan dalam penyerangan Indonesia di Timor Portugis pada 16 Oktober 1975.

mengerahkan “sukarelawan” yang dipersenjatai dengan baik, untuk menyokong pasukan UDT dan pasukan Timor anti-Fretilin lain, dalam usahanya untuk mencegah penguasaan Timor sepenuhnya oleh Fretilin.⁴⁷

77. Tapi, Indonesia menjelaskan intervensi militernya kepada PBB dari segi kewajibannya untuk menjunjung tinggi hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Dalam pernyataan kepada Dewan Keamanan pada 15 Desember 1975, perwakilan Indonesia, Anwar Sani, menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas wilayah itu, bahwa Timor berada dalam keadaan anarki, dan bahwa Indonesia turuntangan atas permintaan partai-partai politik yang mewakili sebagian besar rakyat “untuk mengembalikan situasi damai kepada wilayah itu agar rakyat dapat menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri dengan bebas dan secara demokratis.”⁴⁸

78. Sidang Umum dan Dewan Keamanan menolak penjelasan Indonesia. Kedua badan itu mengecam campurtangan militer Indonesia dan menyerukan mundur secepatnya, serta mengimbau Portugal sebagai kekuasaan pemerintahan untuk bekerjasama dengan PBB “agar memungkinkan rakyat Timor-Leste menjalankan hak penentuan nasib sendiri mereka dengan bebas”. Dewan Keamanan juga meminta agar PBB mengirim utusannya ke wilayah tersebut, antara lain untuk menjalin “komunikasi dengan semua pihak di wilayah itu, dan agar semua Negara yang berkepentingan menjamin implementasi resolusi yang ada saat ini”.⁴⁹ Sekretaris Jenderal menunjuk Vittorio Winspeare Guicciardi untuk menjalankan tugas ini.

79. Tanggapan awal Indonesia terhadap resolusi PBB ini menyatakan, antara lain, bahwa Portugal telah kehilangan haknya untuk melaksanakan program dekolonisasi di wilayah itu, dan bahwa tidak perlu lagi ada referendum karena penentuan nasib sendiri telah terjadi dalam bentuk deklarasi integrasi dengan Indonesia pada 30 November. Posisi ini, yang jelas bertentangan dengan resolusi PBB dan komitmen Indonesia sendiri, kemudian ditinggalkan sebagai tanggapan terhadap adanya misi Guicciardi. Pemerintahan Sementara Timor Timur, yang dibentuk oleh Indonesia, berkata kepada utusan PBB bahwa “untuk menghormati kehendak PBB, yang pertama-tama harus dilakukan oleh Majelis Rakyat Timor Timur adalah meratifikasi keputusan rakyat untuk integrasi penuh dengan Republik (Indonesia)” dan bahwa perwakilan PBB akan diundang untuk mengamati proses itu.⁵⁰

80. Sebuah program empat tahap disusun oleh Indonesia dengan harapan bahwa sebuah proses yang kredibel akan memberi legitimasi bagi integrasi di mata dunia internasional, dan mencoret persoalan Timor-Leste dari agenda PBB.

81. Langkah pertama dan terpenting adalah untuk melaksanakan tindakan penentuan nasib sendiri. Ini terwujud dalam bentuk Majelis Rakyat, yang berkumpul di Dili pada 31 Mei 1976, dan menghasilkan petisi dengan suara bulat, yaitu untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini diikuti dengan kunjungan misi pencarian fakta Pemerintah Indonesia untuk memeriksa apakah permintaan itu benar-benar mewakili kehendak rakyat. Menyusul laporan positif oleh misi ini, Parlemen Indonesia menyetujui rancangan undang-undang integrasi pada 15 Juli 1976. Langkah keempat dan yang

terakhir, rencana undang-undang integrasi disahkan sebagai undang-undang dan diumumkan oleh Presiden Soeharto pada 17 Juli 1976.

82. Dalam sambutannya ketika menerima petisi itu, pada 7 Juni 1976, Presiden Indonesia berusaha menjelaskan integrasi dari sisi budaya dan sejarah, ketimbang sisi hukum, dan sebagai kemenangan atas kolonialisme Eropa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam sambutannya yang ditujukan lebih kepada delegasi orang Timor daripada kepada komunitas internasional, ia mengatakan bahwa petisi tersebut merupakan “peristiwa bersejarah”, karena menandai penyatuan kembali setelah perpisahan selama generasi ke generasi oleh batas-batas buatan:

Saya tidak merasa seperti menyambut orang asing hari ini. Saya merasa bahwa saya kembali bertemu dengan saudara-saudara saya, yang sudah dipisahkan selama...ratusan tahun oleh batas-batas buatan pemerintah penjajahan.⁵¹

83. Proses integrasi memungkinkan Indonesia mengklaim bahwa rakyat Timor-Leste telah mengungkapkan keinginan mereka sekali dan untuk selamanya, dan bahwa wilayah itu telah menjadi provinsi Indonesia, secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mulai saat itu, seruan-seruan Portugal dan yang lainnya untuk penentuan nasib sendiri ditolak sebagai campurtangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini juga menjadi dasar bagi penentangan Indonesia terhadap keterlibatan langsung para pemimpin Timor-Leste dalam negosiasi.

84. Komunitas internasional tidak mengakui proses pada 1976 ini. Walaupun ketika itu tidak banyak yang dikatakan oleh setiap negara, secara umum disepakati bahwa Majelis tersebut gagal memenuhi uji dasar kebebasan memilih, terutama karena kehadiran pasukan Indonesia, ketiadaan opsi lain, serta status meragukan keterwakilan para peserta. Resolusi Sidang Umum 31/53, yang disetujui pada 1 Desember 1976, menolak “klaim bahwa Timor-Leste telah disatukan dengan Indonesia, karena rakyat Wilayah itu belum bisa dengan bebas menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri mereka dan kemerdekaan”.⁵² Majelis Rakyat tidak mengikuti prosedur yang dipaparkan dalam resolusi Sidang Umum 1541 (XV) PBB tanggal 15 Desember 1960, yang menegaskan bahwa proses itu harus diinformasikan, bebas, dan demokratis. Seorang penasihat hukum Pemerintah AS, George H. Aldrich, mengatakan kepada Kongres:

Kita sebenarnya tidak tahu banyak mengenai proses seleksi bagi para utusan ini, walaupun prosesnya sendiri terjadi pada masa pendudukan militer oleh Indonesia ketika masih banyak pertempuran berlangsung.⁵³

85. Alison Stokes, yang mewakili Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta pada peristiwa itu, melaporkan bahwa para pengamat asing diperkenankan berada di Dili kurang daripada dua jam, dan sesi itu sendiri berlangsung selama satu jam. Dia menulis:

Penilaian saya adalah bahwa Majelis Rakyat Timor Timur, dengan serius, sungguh-sungguh, dan formal, dan dengan suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia. Namun, bagi pengamat luar, ada dua kecacatan berat dalam tindakan penentuan nasib sendiri ini. (A) Siapa-siapa saja para wakil yang mengambil keputusan ini, bagaimana mereka dipilih, dan apakah mereka memang dapat mewakili kehendak rakyat Timor-Leste. (B) Hanya ada satu opsi yang dicantumkan untuk status politik masa depan, yakni integrasi. Saya diberitahu di Dili, pemilihan distrik dilakukan atas dasar satu orang satu suara; dan seorang wartawan memberi tahu saya bahwa di Baucau pun demikian. Di daerah-daerah lain ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat setempat, di mana para tetua adat yang melakukan seleksinya.

Ketika saya menanyakan kepada orang Indonesia yang bersama kami mengapa Majelis Rakyat membahas hanya satu opsi, yakni integrasi, mereka mengatakan bahwa pilihan tersebut harus dipandang dalam konteks keseluruhan dari berbagai kejadian dalam bulan-bulan terakhir, yakni ketika opsi-opsi lain seperti hubungan dengan Portugal atau kemerdekaan, telah dibuang oleh orang Timor Timur. Selain itu, ada beberapa aspek yang mengecewakan hari itu: (A) Ketika di pesawat, kami diberikan selebaran bertajuk ‘Timor Timur’, yang diterbitkan oleh PSTT yang antara lain menyatakan, bahwa ‘rakyat Timor Timur sepenuhnya berada di belakang Pemerintahan Sementara dalam mempersiapkan integrasi penuh Timor Timur ke dalam Republik Indonesia...’: penilaian dini itu terasa janggal. (B) Sidang Majelis tersebut dilakukan dalam bahasa Portugis, dan hanya sebagian yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Seorang Timor yang duduk di dekat saya mengomentari dalam bahasa Inggris jalannya sidang tersebut atas permintaan saya, namun ini tidak sebaik penerjemahan resmi. (C) Kami tidak menemui satu pun anggota PSTT atau Majelis Rakyat. Tidak ada konferensi pers. (D) Pawai di jalanan dan sorak-sorai massa terlalu diatur dan terlihat tidak spontan.⁵⁴

Hanya sedikit wakil komunitas internasional yang hadir. Indonesia mengungkapkan penyesalan bahwa undangan untuk Sekretaris Jenderal, Dewan Keamanan serta Komite Khusus Dekolonisasi tidak diterima, dan bahwa hanya tujuh negara anggota PBB yang mengirimkan pengamat-pengamatnya.^{*} Di antara mereka yang diundang namun tidak menerima adalah Australia, Jepang, Filipina, Singapura, dan AS. Fretilin mengecam Majelis itu sebagai tidak representatif, dan menyatakan bahwa merekalah yang mewakili mayoritas rakyat itu.⁵⁵

.....
^{*} Tujuh negara yang mewakili adalah: India, Iran, Malaysia, Selandia Baru, Nigeria, Arab Saudi, dan Thailand. Laporan Sekretariat PBB, Annex 1. A/AC.109/L.1098 dan Add. 1.

86. Walaupun proses itu tidak sah, lebih daripada 30 negara anggota PBB secara eksplisit atau implisit mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia sampai 1990, dan pada saat yang sama juga mengakui bahwa Timor-Leste belum menjalankan tindakan penentuan nasib sendiri yang sungguh-sungguh. Beberapa negara seperti Australia, India, Papua Nugini, dan Amerika Serikat mengakui penggabungan itu melalui pernyataan publik eksplisit. Hanya Australia yang secara eksplisit mengungkapkan dukungannya bagi pengakuan *de jure*, praktik yang kemudian ditinggalkan pada tahun 1990-an. Yang lainnya memastikan pengakuan mereka dengan suara yang mereka berikan di Sidang Umum PBB. Negara-negara ini termasuk Bangladesh, Kanada, Yordania, Malaysia, Oman, Filipina, Singapura, Swedia, dan Thailand. Kelompok-negara yang ketiga dapat dikatakan secara efektif telah memberi pengakuan, dan dalam beberapa kasus menegaskan kembali dukungan yang sudah ada, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Indonesia setelah 1976, yang tidak mengeluarkan Timor-Leste dari definisi 'Indonesia'. Negara-negara ini adalah Austria, Brunei, Bulgaria, Cina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Arab Saudi, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab.*

87. Francesc Vendrell, yang telah bekerja dalam masalah Timor-Leste di Sekretariat PBB, menjelaskan kepada Komisi bagaimana Indonesia bisa memperoleh berbagai macam dukungan internasional seperti ini, walaupun telah melakukan pelanggaran di Timor [Leste]. Dia mengatakan kepada Komisi pada audiensi publik mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional:

Walaupun reaksi langsung di sebagian besar negara adalah mengutuk aneksasi Timor-Leste, sedikit demi sedikit, dan cukup cepat, dalam beberapa tahun sebagian besar negara tidak lagi ingin terlalu kritis mengenai apa yang terjadi di Timor-Leste.⁵⁶

88. Vendrell menjelaskan bahwa hubungan-hubungan politik dan ekonomi Indonesia dengan sejumlah kelompok penting memengaruhi pergeseran sikap yang pragmatis ini. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mendapat dukungan di Barat sebagai "sebuah negara antikomunis". Indonesia juga mendapat dukungan dalam ASEAN dan dunia Islam, yang dalam keduanya Indonesia merupakan anggota terbesar, dan dalam gerakan nonblok yang turut didirikan oleh Indonesia.⁵⁷

89. Pemerintah Indonesia terus berusaha mempertahankan keabsahan proses 1976 itu, walau menghadapi tantangan internasional yang semakin kuat terhadap kehadirannya di Timor, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz. Pada 1992, Menteri Luar Negeri Ali Alatas merasa terpanggil untuk membawa posisi Indonesia ke National Press Club di Washington. Dalam pidatonya yang bertajuk "Debunking the Myths around a Process of Decolonisation" ("Membantah Mitos Seputar Suatu Proses Dekolonisasi"), dia kembali menyatakan posisi yang sudah sering

.....
* Daftar negara yang menandatangani perjanjian mengenai perpajakan dan perjanjian lainnya dengan Indonesia yang dapat dianggap sebagai pengakuan integrasi dapat dilihat di Krieger, hal. 291-297.

dikemukakan, bahwa Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas wilayah Timor-Leste dan telah mengikuti keputusan rakyat Timor-Leste mengenai masa depannya, yang dilakukan melalui proses yang benar dan adil.⁵⁸

90. Pada 21 Mei 1998, BJ Habibie menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Agenda perubahan daruratnya juga mencakup pembahasan masalah Timor-Leste yang oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sudah diakui secara terbuka sebagai “kerikil di dalam sepatu Indonesia”, suatu penghalang bagi pembangunan. Presiden dilaporkan pernah berkata kepada rekan-rekannya:

Kenapa kita masih ada masalah ini ketika kita punya segudang masalah lain? Apa kita dapat minyak? Tidak. Apa kita dapat emas? Tidak. Kita cuma dapat batu-batu. Kalau orang Timor Timur masih tidak berterima kasih setelah segala apa yang sudah kita lakukan, untuk apa kita harus bertahan?⁵⁹

91. Pada Juni ia mengumumkan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan sebuah ‘status khusus’ bagi Timor-Leste, suatu perubahan kebijakan yang sebelumnya berulang-kali ditolak oleh Presiden Soeharto, termasuk yang terakhir pada 1997. Pada 27 Januari 1999, khawatir bahwa otonomi akan berujung pada kemerdekaan yang akan merugikan Indonesia dari segi biaya, Presiden Habibie mendapat persetujuan Kabinet untuk sebuah resolusi yang singkat dan jelas mengenai persoalan ini, melalui pilihan antara otonomi dan kemerdekaan. Setelah pertemuan Kabinet, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan bahwa:

Otonomi khusus akan diberikan kepada Timor Timur. Dan apabila ini tidak diterima luas di Timor Timur, kita akan meminta keanggotaan baru MPR hasil pemilihan umum mendatang ini, untuk melepaskan Timor Timur dari Indonesia.*

92. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor dengan bebas menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB, yang pertama kalinya dijanjikan pada 1960. Militer Indonesia melanjutkan kebijakan subversi yang telah menjadi ciri pendekatan mereka sejak 1974. Tapi, upaya-upaya sabotase dan intimidasi mereka diimbangi oleh kekuatan demokrasi dalam pemerintahan dan kalangan sipil Indonesia. Hasilnya sangat jelas: 21,5% berpihak pada otonomi khusus, dan 78,5% menentang.

93. Dalam pernyataannya mengumumkan hasil Jajak Pendapat, Sekretaris Jenderal Kofi Annan menasihati:

.....
* Dikutip dalam *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2001 [selanjutnya, *East Timor in Transition*, DFAT], hal. 38. Sejumlah orang penting Indonesia telah meminta perubahan kebijakan ini selama beberapa tahun (lihat bagian mengenai masyarakat sipil Indonesia dalam bab ini). Setelah Habibie menjabat sebagai presiden, tokoh-tokoh seperti Adi Sasono, Dewi Fortuna Anwar, dan Ginanjar Kartasasmita juga memengaruhi pemikirannya. Lihat Clinton Fernandes, *Reluctant Saviour*, Scribe Publications, Carlton North, Victoria, 2004, hal.40-41. Sebuah rekomendasi yang berpihak kepada penentuan nasib sendiri dari Perdana Menteri Australia John Howard, juga merupakan faktor penting.

Mereka yang memilih untuk menerima usulan otonomi khusus ini sebaiknya tidak menganggap hasil ini sebagai suatu kekalahan. Dan yang mayoritas sebaiknya tidak menganggap ini sebagai suatu kemenangan: tidak ada yang menang dan yang kalah hari ini. Sebaliknya, momen ini mengumandangkan kesempatan baru bagi warga Timor-Leste untuk mulai menempa masa depan baru bagi apa yang sebentar lagi akan menjadi Timor-Leste merdeka.⁶⁰

Kesimpulan

94. Pemerintahan Soeharto melanggar hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Dilanggar pula hukum internasional dan semangat UUD 1945, yakni budaya dan kebijakan antikolonial. Pihak militer Indonesia paling tanggung jawab atas pelanggaran ini. Rakyat Indonesia tidak diminta pendapat atau diberi informasi sehingga tidak memikul tanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

95. Pemerintahan Soeharto memiliki kepentingan yang sah terhadap hasil proses dekolonisasi Timor, dan disediakan pula jalur-jalur komunikasi untuk menyalurkan kepentingan tersebut, tetapi Indonesia memilih mengabaikan proses yang sah.

96. Pelanggaran ini terjadi menyusul keputusan rahasia tingkat tinggi pada 1974 untuk mengintegrasikan koloni Portugis saat itu ke dalam wilayah Indonesia. Secara terbuka pemerintahan Soeharto mendukung hak rakyat Timor untuk memilih secara bebas salah satu dari tiga pilihan yang ada, sebagaimana diatur dalam Resolusi 1541(XV) tahun 1960 Sidang Umum PBB, dan menyatakan diri sebagai warga negara internasional yang baik. Dalam praktiknya, Indonesia berusaha mengatur hanya satu dari ketiga pilihan tersebut, yaitu integrasi, serta melemahkan dan menolak hak atas kemerdekaan yang merupakan tujuan akhir kedua partai politik utama Timor. Pemerintahan Soeharto berusaha mengesahkan pengambilalihan wilayah yang dilakukannya atas dasar tanggungjawab kemanusiaan, keamanan regional, pertahanan, kultur prakolonial, ikatan historis dan etnis, serta kurangnya kelangsungan hidup ekonomi Timor-Leste. Pengakuan ini bukanlah alasan yang sah untuk menolak hak tak terhapuskan rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, dan tidak sesuai dengan Deklarasi 1960 tentang 'Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Kolonial' yang dikatakan dijunjung tinggi oleh Indonesia.

97. Proses subversi ini semakin agresif. Presiden Soeharto menegaskan kepada para penasihatnya dan pemerintahan-pemerintahan asing bahwa ia lebih suka mencapai integrasi melalui proses politik, tapi ia tidak menyatakan kekuatan militer tidak mungkin digunakan. Ia mengizinkan penggunaan kekuatan militer pada 1975 ketika menjadi jelas bahwa perkembangan di Timor lebih berpihak pada kemerdekaan. Meskipun pihak-pihak yang berpengaruh dalam komunitas internasional mengakomodasi keputusan ini, PBB mengutuk intervensi Indonesia dan menolak keabsahan aneksasi sesudahnya. PBB tetap menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, meskipun klaim Indonesia resmi justru sebaliknya.

98. Intervensi militer dan kesalahan manajemen pemerintahan Soeharto di Timor-Leste menjadi bencana bagi rakyat Timor-Leste dan Indonesia sendiri, termasuk ribuan tentara muda Indonesia dan keluarga mereka. Kekerasan yang berkelanjutan pada tingkat lokal menyebabkan kegagalan diplomasi pada tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan hasil yang berusaha dihindari oleh Indonesia dan negara-negara tetangganya pada 1975, yaitu Timor-Leste merdeka di bawah pimpinan Fretilin.

99. Keputusan Presiden Habibie pada 1999 untuk membebaskan Indonesia dari Timor-Leste melalui tindakan penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh PBB, dan penghormatan atas proses tersebut oleh Presiden Abdurrahman Wahid, adalah tindakan negarawan sejati yang sesuai dengan hukum internasional dan membantu memulihkan kedudukan Indonesia dalam komunitas internasional.

Australia

100. Meskipun Australia bukanlah pihak yang berkepentingan utama dalam konflik Timor-Leste, pemerintahan Australia berturut-turut mengamati secara dekat isu ini, dan Australia dilihat sebagai pemain utama oleh Portugal dan Indonesia, serta juga oleh Resistansi Timor-Leste. Kedekatan Australia dengan Pulau Timor dan statusnya sebagai kekuatan menengah di wilayah ini, ditambah dengan keberadaan masyarakat sipil yang aktif serta perhatian parlemen dan media atas situasi Timor Timur, membuat keterlibatan Australia tidak terelakkan, meskipun pemerintah Australia dalam berbagai kesempatan berusaha menjauhkan diri dari isu tersebut.

101. Kekuatan Barat utama juga berharap Australia memainkan peran penting. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris menekan Australia agar meningkatkan tanggungjawabnya terhadap isu-isu regional, antara lain isu Timor Portugis, setelah isu tersebut menjadi masalah internasional pada 1960. Sidang-sidang kabinet 1963 tentang masa depan wilayah ini menyebutkan “usulan-usulan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa Australia sebaiknya meningkatkan inisiatif pertahanan dan diplomasi di Asia Tenggara, serta membagi tanggungjawab langsung dengan Amerika Serikat atau Inggris, ketimbang sekadar mendukung kepemimpinannya.”⁶¹

102. Setelah keputusan Portugal untuk mendekolonisasi wilayah ini pada 1974, pemerintah negara-negara Barat meminta kepada pemerintah Australia saran intelijen dan kebijakan tentang isu ini. Menyadari pengaruh tetangganya di Eropa, pemerintahan Soeharto memberikan perhatian khusus pada hubungannya dengan Australia, dan tetap menginformasikan para pejabat Australia tentang perkembangan posisi Indonesia.^{*} Di antaranya, pembicaraan tentang isu Timor-

.....
* Sebagai tambahan atas komunikasi resmi dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen) dan Departemen Luar Negeri Indonesia, Australia memiliki hubungan khusus melalui Harry Tjan mengenai cara-cara kerja Operasi Komodo. Komunikasi dari pejabat kedutaan besar pada Juli 1975 menggambarkan betapa Australia menghargai keterbukaan Tjan dan koneksinya: “la sering membacakan langsung untuk kita catatan pertemuan rahasia dengan Portugal mengenai Timor Portugis. Ia memiliki dokumen-dokumen rahasia mengenai hal itu. Sering ia menerima telepon dari orang-orang penting (Ali, Yoga) ketika kami berada di kantornya Tjan menghormati dan memercayai kami. Ia berbicara kepada kami tak seperti ia bicara kepada orang lain.” Dokumen 157, Jakarta, 21 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), *Australia and*

Leste antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, dalam dua kesempatan pada 1974 dan 1975. Pentingnya peran Australia, baik bagi pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan negara-negara Barat, ditunjukkan secara jelas melalui dampak keputusan Australia untuk menentang Indonesia mengenai pertanyaan yang diajukan dalam Sidang Umum PBB pada Desember 1975. Pada waktu itu Harry Tjan, penasihat penting Presiden Soeharto untuk isu Timor, dengan marah memberitahu pemerintah Australia bahwa suara Australia merugikan karena banyak negara mengharapkan kepemimpinan Australia. Amerika, dikatakannya, telah menyampaikan kepada pihak Indonesia bahwa niat Australia dalam pemungutan suara sangat memengaruhi pemberian suara pihak Amerika. Indonesia juga mengetahui bahwa Kelompok Sembilan (termasuk Inggris) juga dipengaruhi oleh sikap Australia. Tentu saja beberapa negara lain terpengaruh juga. Pendekatan umum Australia di PBB “sangat merugikan Indonesia”.⁶²

Kebijakan Australia hingga 1974

103. Ciri-ciri utama kebijakan Australia mengenai isu tersebut berkembang pada 1960-an setelah Timor Portugis dicantumkan oleh PBB sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri. Kebijakan ini bukan timbul sebagai tanggapan atas hak Timor yang baru saja diakui, tapi sebagai kewaspadaan mengenai posisi bertentangan antara Portugal dan Indonesia, yang potensial menimbulkan konflik di utara Australia. Para pembuat kebijakan di Canberra percaya bahwa penolakan Salazar untuk bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuat konsesi minimal terhadap sentimen Dunia Ketiga akan memancing Sukarno untuk mengambil tindakan militer terhadap Portugal yang serupa dengan tanggapannya terhadap Inggris atas pembentukan Malaysia dan terhadap Belanda mengenai Irian Barat. Antara 1961 dan 1964, Perdana Menteri Australia, RG Menzies, beberapa kali menulis surat kepada Perdana Menteri Portugis, António de Oliveira Salazar, dalam rangka menghindari krisis yang diprediksikan.

104. Konflik tidak terjadi, tetapi sebagai tanggapan atas kemungkinan itu, dikembangkan beberapa kebijakan kunci. Beberapa bentuk kebijakan, yang diambil sebelum kemunculan pemerintahan Soeharto atau pembentukan Fretilin, mencirikan penanganan isu Timor-Leste oleh Australia sepanjang masa konflik.

105. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri Garfield Barwick mencantumkan hal-hal berikut:⁶³

- Australia mendukung prinsip penentuan nasib sendiri.*

the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976, Department of Foreign Affairs and Trade [selanjutnya, DFAT], Melbourne University Press, Victoria, 2000, hal. 295.

* Cara mengimplementasi tindakan penentuan nasib sendiri merupakan pokok bahasan dalam lingkungan resmi. Sebuah kelompok kerja departemen melaporkan: “Tentu saja pemerintah ingin melihat penyerahan oleh Portugal diiringi dengan semacam proses penentuan nasib sendiri. Di samping itu, kami harapkan bahwa pihak Indonesia sendiri menginginkan adanya semacam tindakan penentuan nasib sendiri untuk melindungi diri dari tuntutan neo-kolonialisme karena membuat persetujuan dengan kekuasaan kolonial. Mungkin secara teoretis masalah penentuan nasib sendiri bisa diatasi dengan pengaturan seperti di Nugini Barat” “The Future of Portuguese Timor”, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.31

- Timor tidak memiliki masa depan di bawah pemerintahan Portugal.
- Wilayah ini tidak memiliki kemampuan untuk kemerdekaan politik.
- Australia akan menerima penggabungan dengan Indonesia, apabila penggabungan tersebut berjalan damai dan seiring dengan keinginan rakyat Timor yang diungkapkan secara bebas.
- Australia akan menentang agresi militer Indonesia dalam wilayah ini, dan mendukung tindakan PBB sebagai balasannya.
- Opini publik Australia tidak akan menerima tindakan kekerasan Indonesia terhadap Timor.
- Inisiatif Australia apapun mengenai persoalan ini harus mempertimbangkan pentingnya hubungan baik Australia dan Indonesia. Catatan-catatan Sidang Kabinet 1963 mengenai hal tersebut di atas menyatakan:

Kabinet menunjukkan bahwa (tidak ingin) mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan Australia dipandang oleh Indonesia dan negara-negara lain sebagai musuh. Tujuan Australia terhadap Indonesia adalah mencapai tingkat saling pengertian yang setinggi mungkin.⁶⁴

106. Barwick menolak proposal yang diajukan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Harriman, yang menyatakan agar Portugal dibantu untuk membentuk program pembangunan sepuluh tahun, yang akan memuncak pada tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor.

107. Nasib Timor Portugis tidak dipersoalkan pada tahun-tahun awal Orde Baru. Pemerintahan Soeharto menunjukkan sedikit ketertarikan pada wilayah ini, dan Australia menutup konsulatnya di Dili pada 1971. Australia menyambut baik Orde Baru dan sangat menghargai penekanan Orde Baru pada stabilitas, antikomunisme, pertumbuhan ekonomi, masalah domestik, dan hubungan regional positif yang, dalam pandangan Australia, sangat berbeda dengan kebijakan luar negeri yang agresif dan pergolakan domestik di bawah pemerintahan Sukarno. Perkuatan dan perluasan hubungan antara Australia dan Indonesia menjadi tujuan utama. Pada 1973, Kedutaan Besar Australia melaporkan:

Presiden Soeharto (...) bermaksud baik terhadap Australia... Hal ini merupakan kesempatan yang unik bagi Australia, dengan mengutamakan kepentingan nasional, untuk mengembangkan hubungan lebih erat dengan negara yang sangat penting bagi Australia.⁶⁵

108. Selama periode ini, pejabat-pejabat Australia terus memberikan saran mendukung penggabungan Timor ke Indonesia. Pada 1970, Perdana Menteri Australia, William McMahon, mendapat informasi:

Tidak ada gejala bahwa Indonesia ingin mengambilalih Timor Portugis... (tapi) dalam jangka panjang penggabungan koloni itu ke dalam Indonesia merupakan opsi yang paling layak.⁶⁶

109. Pada 1973 Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, mendapat informasi:

Rakyat Timor Portugis secara marginal mungkin akan lebih baik di bawah pemerintahan Indonesia, daripada pemerintahan yang lain (separuh pulau ini, yang ada di bawah Indonesia, diatur dengan lebih baik daripada koloni Portugis ini, dan prospek koloni ini sebagai entitas terpisah sangat buruk).⁶⁷

Kebijakan Australia 1974 - 1975

110. Kebijakan Australia tentang Timor setelah Revolusi Anyelir di Portugal terutama diputuskan oleh Perdana Menteri Australia Gough Whitlam (1972 - 1975). Pemerintahan Partai Buruh, yang pertama setelah lebih daripada dua dasawarsa, di bawah Whitlam memperkenalkan serangkaian reformasi domestik yang penting, selain juga memberikan perhatian terpenting atas posisi Australia di Asia dan hubungannya dengan Indonesia.

111. Kebijakan Whitlam tentang Timor mirip kebijakan yang diwariskan pemerintahan Menzies, dengan satu perbedaan penting. Kebijakan Whitlam menempatkan prioritas tertinggi pada kerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan Presiden Soeharto sendiri, yang kedudukannya sebagai pengganti Sukarno dan sikap positifnya terhadap Australia merupakan faktor-faktor baru yang disambut baik. Whitlam mengambil kebijakan ini tanpa berbicara dengan Kabinet.⁶⁸ Namun, garis besar kebijakan disetujui oleh para pemimpin dari kedua kubu politik. Sekretaris Departemen Luar Negeri, Alan Renouf, memberitahu para pejabat Malaysia pada Oktober 1975:

Perdana Menteri [Whitlam], sebagian besar anggota Kabinet, serta Fraser [Pemimpin Partai Oposisi] dan Peacock [Menteri Luar Negeri Bayangan], sependapat dengan aspirasi kaum integrasionis Indonesia.⁶⁹

112. Whitlam membicarakan kebijakan Timor secara langsung dengan Presiden Soeharto dalam dua kesempatan: pada 5 - 8 September 1974 di Yogyakarta, Indonesia, dan pada April 1975 di Townsville, Australia. Presiden Soeharto menegaskan bahwa ia memberikan status khusus pada pertemuan pertama dan berharap mendengar pernyataan resmi tentang Timor dari Perdana Menteri Australia.

113. Singkatnya, Whitlam mengajukan tiga hal utama kepada presiden Indonesia:

1. Ia mengurangi ketiga pilihan yang ada bagi rakyat Timor menurut hukum internasional menjadi satu pilihan, yakni bergabung dengan Indonesia, apabila pilihan ini secara bebas dipilih oleh rakyat Timor. Menurut catatan resmi pertemuan tersebut:

Perdana Menteri menyatakan dua hal sebagai dasar pemikirannya mengenai Timor Portugis. Pertama, ia yakin bahwa Timor Portugis seharusnya menjadi bagian dari Indonesia.

Kedua, hal ini harus terjadi sejalan dengan harapan-harapan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan tepat.

2. Kemerdekaan bukanlah pilihan. Ia memberitahu Presiden:

Timor Portugis terlalu kecil untuk menjadi merdeka. Timor Portugis tidak mampu secara ekonomi. Kemerdekaan tidak akan disambut baik oleh Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di wilayah ini, karena Timor Portugis yang merdeka pasti akan menjadi pusat perhatian negara-negara lain di luar wilayah ini.

Ia memberitahu presiden [Soeharto] bahwa Australia akan mendukung posisi Indonesia di Lisbon:

Tujuan kami sendiri di Lisbon adalah menunjukkan kepada pemerintahan Portugis pandangan mengenai Timor Portugis sebagai bagian dari Indonesia.

3. Ia menekankan pentingnya melindungi hubungan bilateral dan tidak mengasingkan opini publik Australia:

Ia berharap bahwa Presiden akan tetap mengingat kebutuhan akan dukungan dari publik Australia bagi bergabungnya Timor Portugis ke Indonesia, yang berdasar pada penghormatan atas harapan rakyat yang dinyatakan secara demokratis.⁷⁰

Ia menekankan poin ini pada pertemuan kedua dengan presiden pada hari yang sama.

114. Presiden Soeharto, pada intinya, mengutarakan posisi yang sama. Mayor Jenderal Ali Murtopo, kepala proyek rahasia Opsus untuk Timor, memberitahu Duta Besar Australia untuk Portugal pada 14 Oktober bahwa pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk integrasi:

Ali berkata bahwa sampai kunjungan Whitlam ke Jakarta, mereka belum mengambil keputusan tentang Timor. Namun dukungan Perdana Menteri untuk gagasan penggabungan ke Indonesia menolong mengkristalkan pemikiran mereka, dan kini mereka yakin akan kebijaksanaan posisi ini.⁷¹

115. Pembuatan kebijakan Whitlam membalikkan prioritas yang ditetapkan dalam pertemuan (briefing) mengenai penentuan nasib sendiri, yang telah disetujui oleh Menteri Luar Negeri, Senator Willesee, sebelum pertemuan Whitlam dengan Soeharto. Hal tersebut menekankan pada proses penentuan nasib sendiri yang terbuka bagi ketiga pilihan yang ada, ketimbang pada hasil proses tersebut. Ini juga tidak menyingkirkan isu kemerdekaan atas dasar-dasar ekonomi.⁷² Menteri Luar Negeri dan sekretaris departemennya, Alan Renouf,

sependapat dengan Whitlam bahwa integrasi sepenuhnya dengan Indonesia adalah hasil terbaik, tetapi ia percaya pula bahwa prioritas harus diletakkan pada penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dalam pandangan mereka, hal ini akan lebih bisa diterima bagi publik Australia dan memastikan bahwa hal-hal yang tidak dapat diterima dalam Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat tidak terulang di Timor. Pada November 1991, Willesee mengutarakan ketidaksepakatan dirinya dengan Whitlam:

Saya percaya seharusnya kita tidak bersikap seperti Tuhan, tetapi biarlah rakyat Timor yang memutuskan.*

116. Whitlam mengulangi posisinya pada pertemuan lebih lanjut dengan Presiden Soeharto di Townsville pada 4 April 1975. Sebagai tanggapan, Presiden Soeharto berkata bahwa ia menyadari adanya spekulasi di Australia tentang kemungkinan invasi Indonesia atas Timor Portugis, tetapi “Indonesia tidak akan pernah memikirkan tindakan semacam itu.”⁷³

117. Setelah pecah perang saudara pada Agustus, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menganjurkan agar Perdana Menteri tidak lagi menulis surat tentang Timor kepada Presiden Soeharto. Ia menulis:

Soeharto akan lebih mencari pengertian dari Australia terhadap apa yang ia, setelah berpikir baik-baik, putuskan untuk lakukan, ketimbang ingin menerima apa yang mungkin ia anggap sebagai ceramah ataupun peringatan bersahabat...Mulai sekarang saya mengusulkan agar kebijakan kita didasarkan pada menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari isu Timor; segera menarik warga Australia dari Timor; membiarkan kejadian demi kejadian berjalan; serta jika dan ketika Indonesia melakukan intervensi, bertindak untuk meminimalkan dampak publik di Australia, dan secara privat menunjukkan pengertian kepada Indonesia atas isu-isu yang mereka hadapi.

118. Duta Besar Woolcott menyatakan bahwa masalah Celah Timor di perbatasan dengan laut Australia dapat lebih mudah diselesaikan dengan Indonesia, daripada dengan Portugal atau Timor-Leste merdeka, dan menyimpulkan:

Saya tahu bahwa yang saya rekomendasikan lebih cenderung pragmatis ketimbang berprinsip, tetapi inilah yang dimaksud dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.⁷⁴

.....
* David Jenkins, “Whitlam can't maintain outrage over East Timor”, The Sydney Morning Herald, 30 November 1991. Whitlam dan Senator Willesee setuju mengenai perlunya mempersiapkan Timor untuk menentukan nasib sendiri. Pada Juli 1975, Menteri Luar Negeri menyetujui program hibah Australia bagi Timor-Leste, namun program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadi perang saudara antara UDT dan Fretilin. (Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, hal. 140.)

119. Sejalan dengan saran ini, pada 26 Agustus 1975 Whitlam menyampaikan kepada Parlemen Australia bahwa Australia bukanlah pihak yang berkepentingan di Timor Portugis:

Kita tidak memiliki kewajiban maupun kepentingan nasional untuk terlibat kembali dengan perihal-perihal kolonial maupun pascakolonial Timor Portugis...Kita tetap berpendapat bahwa masa depan wilayah itu harus diselesaikan oleh Portugal dan rakyat Timor sendiri, dengan Indonesia yang juga berperan penting karena kepentingan utamanya.⁷⁵

120. Indonesia menyampaikan kepada Whitlam penghargaan atas bantuan dan pengertiannya:

Jenderal Moerdani mengatakan bahwa ia, Presiden, dan yang lain berutang besar kepada Whitlam atas pengertian yang sudah beliau tunjukkan mengenai posisi Indonesia dan posisi bermanfaat yang sudah beliau ambil. Presiden sangat menghargai ini. Tapi dia juga menghargai kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah. Apabila Australia tidak bisa mendukung Indonesia secara terbuka di beberapa bulan ke depan, dia berharap bahwa kita akan mengambil pilihan ketiga dan tetap diam.⁷⁶

121. Secara resmi Australia tidak menentang Operasi Flamboyan, serangan Indonesia ke Timor Portugis pada 16 Oktober 1975, yang mengakibatkan kematian lima wartawan yang berbasis di Australia. Sebelumnya Woolcott pernah mengeluarkan pernyataan dari Jakarta:

Meskipun kami mengetahui bahwa hal itu tidak benar, namun secara formal posisi pemerintah Indonesia adalah tidak ada intervensi militer Indonesia di Timor Timur. Apabila Menteri [Senator Willesee] menyampaikan atau menyiratkan kepada publik bahwa pemerintah Indonesia berbohong, kita akan mengundang reaksi terluka dan marah.⁷⁷

122. Pada 11 November 1975, Malcolm Fraser mengganti Whitlam sebagai perdana menteri, tetapi melanjutkan garis kebijakan yang sama.* Atas permintaan Fraser, Duta Besar Woolcott secara rahasia bertemu dengan Presiden Soeharto di kediamannya pada 25 November 1975 untuk meyakinkan bahwa pemimpin Australia saat ini meletakkan hubungan Australia dengan Indonesia, dan hubungan

.....
* Malcolm Fraser ditunjuk sebagai pemegang jabatan Perdana Menteri setelah pemerintahan Whitlam dibubarkan pada 11 November 1975. Peranan sebagai pemerintah sementara secara inti adalah mempertahankan proses administrasi rutin tanpa menerapkan kebijakan baru. Fraser menjadi perdanamenteri setelah Partai Liberal memenangi pemilu 13 Desember 1975, dan tetap bertugas hingga 1983. Kebijakan pra-pemilunya mengenai Timor tetap dipertahankan.

pribadi dengan Presiden, sama tingginya dengan yang dilakukan Whitlam; bahwa pemimpin Australia kini akan “berusaha lebih meningkatkan hubungan tersebut” dan tidak akan menerima José Ramos-Horta atau wakil Fretilin manapun apabila mereka datang ke Australia.

123. Fraser juga meminta Duta Besar Woolcott untuk memberitahu Presiden “bahwa ia memahami kebutuhan Indonesia untuk memperoleh solusi yang tepat bagi isu Timor Portugis.” Woolcott melaporkan bahwa Presiden sangat senang ketika mengetahui pengertian Australia, dan ketika ia bertanya kepada Duta Besar Woolcott untuk memastikan maksud Perdana Menteri, Woolcott menjawab:

Saya memperkirakan bahwa apa yang dimaksudkan Perdana Menteri dengan solusi yang tepat adalah solusi yang sesuai dengan kepentingan kebijakan Indonesia.

124. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama-sama tidak langsung mengacu kepada penggunaan kekuatan militer.

Presiden tidak menyinggung keterlibatan Indonesia secara langsung meskipun saya beranggapan ia pasti menyadari bahwa saya mengetahui hal itu.’

125. Secara pribadi Whitlam berkampanye atas nama Indonesia. Setelah kunjungannya ke Timor Timur pada 1982, yang segera ia laporkan kepada Presiden Soeharto, ia berperan penting dalam pencopotan Dom Martinho da Costa Lopes sebagai kepala Gereja Katolik di Timor, dan kemudian pada tahun itu juga ia berbicara di hadapan Komite Khusus PBB mengenai dekolonisasi dan mengajukan petisi kepada komite ini untuk menghapus isu Timor-Leste dari agenda PBB.

126. Sepanjang tahun 1970-an Pemerintah Australia mengikuti kebijakan ‘bisnis seperti biasa’ dalam urusannya dengan Indonesia, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan. Pemerintahan Whitlam memulai kerjasama pertahanan dengan Indonesia pada Juli 1972 senilai 20 juta dollar Australia yang termasuk perlengkapan berupa 16 pesawat penyerang, kerjasama latihan dan intelijen. Kerjasama ini diperbarui pada 1975 dan meningkat pada pemerintahan Fraser. Bantuan ini disediakan dengan persyaratan bahwa bantuan tersebut tidak boleh digunakan di Timor-Leste ataupun untuk represi internal.

Kebijakan Australia 1975 - 1998

127. Kebijakan dua-arah Australia menciptakan dilema politis ketika isu Timor-Leste dibahas di Sidang Umum PBB menanggapi invasi Indonesia. Australia

* Dokumen 343, Canberra, 20 November 1975 dan Dokumen 344, Jakarta, 25 November 1975, dalam Wendy Way, hal. 579-80. Fraser mengatakan kepada TV ABC pada 12 September 2000 bahwa Departemen Luar Negeri tidak memberitahu kepada dia sebagai pemegang jabatan perdana menteri mengenai rencana invasi Indonesia. (Alan Ramsey, “East Timor the secret that never was”, Sydney Morning Herald, 16 September 2000.)

memilih menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, sejalan dengan prinsip-prinsip PBB dan posisi Indonesia sendiri, tetapi berusaha agar acuan tentang Indonesia dihapus dari resolusi tersebut. Usaha ini gagal dan resolusi yang disetujui pada 12 Desember 1975 menyedihkan intervensi militer Indonesia serta menyerukan penarikan pasukan Indonesia secepatnya. Hal yang sangat menyebalkan pihak Indonesia adalah Australia menjadi satu-satunya negara tetangga yang mendukung resolusi tersebut.*

128. Australia terus mengakui hak Timor atas penentuan nasib sendiri dan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap cara Indonesia menggabungkan wilayah tersebut. Australia menolak undangan Indonesia untuk menghadiri Majelis Rakyat Timor Timur di Dili pada 31 Mei 1976, dan tidak mengakui majelis tersebut sebagai tindakan sah dalam penentuan nasib sendiri. Kebijakan ini terus dipegang selama konflik. Dalam pernyataan resminya terhadap persoalan tersebut, pemerintah Australia menyampaikan:

Hingga 30 Agustus 1999, posisi Australia adalah bahwa rakyat Timor Timur belum menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri.⁷⁸

129. Namun Australia tidak menjunjung hak tersebut dalam praktiknya. Australia tidak mendukung resolusi-resolusi berikutnya tentang penentuan nasib sendiri di Sidang Umum PBB antara 1976 dan 1981, serta memilih menentang Resolusi Sidang Umum 1982 yang lemah yang tidak menegaskan lagi hak tersebut, serta mengadakan pembicaraan di bawah naungan PBB untuk menyelesaikan konflik. Secara tidak langsung, Australia pun mengabaikan hak tersebut. Pada Januari 1978 secara de facto Australia mengakui kontrol Indonesia atas Timor-Leste. Pengakuan itu diperluas dengan pengakuan de jure sejak 14 Februari 1979, ketika Australia memulai negosiasi dengan Indonesia mengenai perbatasan dasar laut dengan Timor-Leste. Kebijakan-kebijakan ini dan program kerjasama dengan Indonesia setelah itu, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan, berakibat pada penguatan dan pengesahan kedaulatan Indonesia di Timor-Leste.

130. Kebijakan pengakuan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Fraser yang konservatif itu, dilanjutkan oleh pemerintahan Partai Buruh. Pada 17 Agustus 1985—hari kemerdekaan Indonesia—Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh, Bob Hawke, tanpa ragu memastikan bahwa Australia mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia di Timor-Leste, dan menganggap rakyat Timor-Leste sebagai warga negara Indonesia. Pada 11 Desember 1989, Menteri Luar Negeri di kabinetnya, Senator Gareth Evans, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas,

* Pada Oktober, Kedutaan Besar Selandia Baru di Canberra melaporkan bagaimana pemerintah Australia berniat menangani isu tersebut setelah "invasi menjadi berita umum". Mereka menyampaikan kepada Pemerintah Selandia Baru: "Mereka [Indonesia] akan diberitahu bahwa pemerintah Australia tidak memiliki pilihan kecuali bersikap kritis, namun relasi bilateral dengan Indonesia tetap merupakan hal yang sangat penting. Dengan kata lain, 'kami terpaksa menggebukmu, harap mengerti dan bertahanlah'. Tentu saja setiap pernyataan dari Australia, baik yang dikeluarkan di sini maupun kalau perlu di PBB, akan dibuat dengan kata-kata yang selemah mungkin". 17 Oktober 1975, dalam New Zealand Government East Timor Official Information Act (OIA) Material (selanjutnya, NZ OIA Material), Volume 1.

menandatangani Perjanjian Kerjasama Zona Celah Timor meskipun ada keberatan dari Portugal yang menyatakan bahwa perjanjian ini melanggar hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor.

131. Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Perdana Menteri Paul Keating sejak Desember 1991 mempertahankan serta bahkan mengembangkan kebijakan pemerintahan Hawke. Setelah kunjungannya ke Indonesia, Keating menyampaikan kepada Parlemen Australia:

Saya sengaja memilih Indonesia sebagai tempat kunjungan luar negeri saya yang pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah prioritas utama kita.⁷⁹

132. Ia menyarankan agar pelecehan hak-hak asasi manusia di Timor-Leste dibicarakan melalui [proses] rekonsiliasi jangka panjang.

133. Sejak 1975, fraksi-fraksi dalam Partai Buruh Australia (Australian Labor Party, ALP) bersikap kritis terhadap kepemimpinan partai ALP, karena mengabaikan kebijakan partai yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste serta melemahkan kebijakan itu. Ketika di pihak oposisi, juru bicara Urusan Luar Negeri ALP, Laurie Brereton, membuat ulasan kebijakan partai mengenai Timor-Leste, dalam konteks munculnya gerakan demokrasi rakyat di Indonesia dan perkembangan-perkembangan lain; contohnya, pembicaraan-pembicaraan yang diprakarsai PBB, advokasi Portugal mengenai isu ini, dan penguatan kepedulian publik di Australia. Ulasan kebijakannya menyimpulkan bahwa “tidak ada solusi yang tahan lama bagi konflik di Timor-Leste, apabila tidak ada negosiasi yang memungkinkan rakyat Timor-Leste menegakkan hak penentuan nasib sendiri.”⁸⁰ Kebijakan yang diperbarui ini disahkan pada Konferensi Nasional ALP 1998 dan pada Kaukus Federal. Brereton menggunakan kebijakan ini dalam setiap kesempatan, untuk menandingi kebijakan status quo pemerintahan Howard yang berkuasa mulai Maret 1996.

Beralihnya kebijakan Australia

134. Kematian politik Presiden Soeharto dengan segera diakui pemerintah Australia sebagai kesempatan untuk melanjutkan [penyelesaian] masalah Timor-Leste dalam kerangka kedaulatan Indonesia.

135. Setelah tawaran otonomi Presiden Habibie pada 9 Juni 1998, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengadakan pembicaraan mengenai persoalan ini di Jakarta dan, menyimpang dari praktik sebelumnya, mengizinkan pembicaraan langsung dengan pihak Timor-Leste. Kegiatan tersebut meliputi kunjungan Duta Besar John McCarthy ke Timor-Leste; pertemuan dengan Xanana Gusmão, pemimpin Resistansi yang ada di penjara, dan permintaan pembebasannya; serta, berdasarkan saran duta PBB Jamsheed Marker, survei tentang opini rakyat Timor baik yang berada di dalam maupun di luar Timor-Leste. Duta Besar Australia untuk PBB, Penny Wensley, dan Duta Besar McCarthy menjadi anggota penting

kelompok-kelompok inti yang dibentuk oleh Jamsheed Marker di New York dan Jakarta untuk isu ini.

136. Survei tentang opini rakyat Timor dilaksanakan pada Juli - Agustus 1998 dan sangat penting dalam mengubah arah kebijakan Australia. Survei ini mencakup semua sisi perdebatan politik dan menemukan bahwa sebagian besar responden Timor sepakat tidak menerima status quo; bahwa solusi apapun, termasuk otonomi, pada akhirnya harus disetujui rakyat, apakah melalui referendum atau proses pengambilan keputusan lain, dan dengan semacam jaminan internasional; serta bahwa peranan Xanana Gusmão penting untuk penyelesaian masalah. Australia membagi hasil survei tersebut kepada pemerintah Indonesia.⁸¹

137. Pada 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard, menulis surat kepada Presiden Habibie dan menekankan pentingnya pembicaraan langsung dengan rakyat Timor-Leste secepatnya guna memastikan dukungan mereka terhadap otonomi dalam wilayah Indonesia. Ia juga mencatat dukungan yang semakin bertambah, baik di Timor-Leste maupun secara internasional, untuk penentuan nasib sendiri; dan menyarankan pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri setelah periode otonomi yang cukup lama, serupa dengan pendekatan yang disetujui di Kaledonia Baru.

138. Presiden Habibie tersinggung dengan pendapat bahwa kehadiran Indonesia di Timor-Leste disamakan dengan kolonisasi Prancis di Kaledonia Baru, tapi mengakui usulan Australia mengenai penentuan nasib sendiri. Pada rapat kabinet 1 Januari 1999, terdapat kesepakatan bahwa Indonesia akan meminta pendapat rakyat Timor-Leste mengenai masa depan mereka dan mengizinkan kemerdekaan apabila rakyat menolak tawaran otonomi khusus.

139. Intervensi Perdana Menteri Howard dimaksudkan untuk memajukan rekonsiliasi dan memastikan Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, melalui persetujuan bebas rakyatnya. Namun inisiatif itu menghasilkan efek yang berlawanan. Usulan ini menjadi pemicu kemerdekaan dan akhir dari kebijakan integrasionis yang telah menjadi inti kebijakan Australia tentang Timor selama proses dekolonisasi. Pada 6 Desember 1999, Wakil Sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, John Dauth, memberitahu Komite Senat Australia bahwa pemerintah Australia akhirnya meninggalkan preferensinya bagi Timor-Leste untuk tetap menjadi wilayah otonomi Indonesia, baru setelah rakyat Timor-Leste memilih merdeka:

Kami selalu menyatakan secara jelas kepada pemerintah Indonesia sepanjang tahun ini bahwa kami menghormati kedaulatannya hingga saat proses-proses yang diprakarsai Presiden Habibie membuahkan hasil yang berbeda.⁸²

140. Pemerintah Australia dan para diplomatnya memainkan peran penting dalam memajukan dan mendukung tindakan penentuan nasib sendiri secara politik, finansial, dan organisasi. Setelah pemungutan suara 30 Agustus 1999 dan meletusnya kekerasan, Australia mengatur dan memimpin International Force in East Timor

(Interfet – Pasukan Internasional di Timor Timur) yang diutus Dewan Keamanan dan membantu mengembalikan proses PBB pada jalurnya, serta memastikan bahwa keputusan rakyat untuk merdeka dihormati dan dilaksanakan.

Kesimpulan

141. Rakyat Timor-Leste menggantungkan harapan yang tinggi pada Australia berdasarkan kedekatannya, kehadirannya selama Perang Dunia Kedua, hubungannya dengan Indonesia, serta reputasinya sebagai negara internasional yang baik dan berpengaruh.

142. Harapan-harapan ini tidak terpenuhi hingga 1999. Australia hanya memberi dukungan nominal selama proses dekolonisasi, tetapi tidak menjunjungnya selama sebagian besar periode ini. Australia hanya mendukung satu pilihan, yaitu integrasi dengan Indonesia, meskipun bukti sejak 1974 telah menunjukkan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri akan menentang integrasi. Pendapat Whitlam kepada para pejabat Departemen Luar Negeri pada 1974 bahwa “saya setuju dengan penggabungan [Timor-Leste dengan Indonesia], tapi saya harus melakukan penghormatan terhadap penentuan nasib sendiri”, adalah juga pendapat dari kelima pemerintahan Australia yang menjabat selama era Soeharto.*

143. Australia menjelaskan kepada tingkat tertinggi pemerintahan Indonesia bahwa Australia menentang penggunaan kekerasan di Timor-Leste; tetapi begitu keputusan diambil dan dilaksanakan pada pertengahan 1975, Australia mengetahui dan menerimanya. Australia segera mengakui pendudukan militer Indonesia atas Timor-Leste, dan memberikan pengesahan melalui pengakuan *de jure* atas kedaulatan Indonesia. Kecuali dalam satu kesempatan, Australia memberikan suara menentang Timor-Leste di Perserikatan Bangsa-Bangsa; meremehkan tanggungjawab Portugal sebagai kuasa pemerintahan;† dan, dengan sikap dan tindakannya, menggerogoti dukungan internasional bagi Timor-Leste.

144. Mantan petugas resmi menteri luar negeri Australia, Kenneth Chan, bersaksi kepada Komisi:

Walaupun saya sudah berusaha untuk memberi laporan yang seimbang akan perkembangan kebijakan Australia terhadap Timor-Leste, penilaian keseluruhan saya terhadap kebijakan selama 25 tahun yang dipertimbangkan di sini ialah bahwa kebanyakan dari

* Dalam pembicaraan pribadi, Whitlam mengatakan kepada pejabat departemen Luar Negeri: “Saya berpihak pada integrasi, tetapi penentuan nasib sendiri perlu dihormati juga. Saya ingin Timor diintegrasikan [dengan Indonesia] tetapi harus dengan cara yang tidak akan menimbulkan argumentasi, karena hal tersebut akan membuat masyarakat Australia lebih kritis terhadap Indonesia.” 24 September 1974. Dokumen, p. 111.

† Australia mengatakan di depan Mahkamah Internasional bahwa Portugal tidak memiliki status sebagai kekuatan administratif Timor-Leste, karena wilayah ini ditinggalkan begitu saja pada 1975, dan Portugal tidak disebutkan sebagai kekuatan administratif di dalam resolusi Sidang Umum PBB pada 1976, 1977 dan 1978. Di samping itu, Portugal telah salah mengelola wilayah itu pada 1974. Krieger hal. 371-477.

kebijakan tersebut merupakan suatu kegagalan. Ada kegagalan untuk mendukung prinsip pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum serta keadilan internasional: hak semua orang terhadap penentuan nasib sendiri. Dan ada juga kegagalan dalam bekerja untuk menahan Indonesia dari jalan intervensi militer dan kekerasan pada 1975, terutama setelah Fretilin mengambilalih kontrol atas Timor-Leste dan membuat deklarasi kemerdekaan secara satu pihak.*

145. Rakyat Timor-Leste menyambut baik dan mengambil manfaat dari dukungan praktis yang kuat dari Australia bagi tindakan penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya pada 1999.

Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang

Dewan Keamanan

146. Dewan Keamanan, yang bermarkas di New York, adalah badan yang paling berpengaruh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini ditugasi menjaga perdamaian dan keamanan antara bangsa-bangsa sesuai dengan Piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri atas 15 anggota: lima anggota tetap, yakni lima negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua—Republik Rakyat Cina, Prancis, Federasi Rusia (dahulu Uni Soviet), Inggris Raya, dan Amerika Serikat; dan sepuluh anggota lainnya yang dipilih oleh Sidang Umum setiap dua tahun.

147. Timor Portugis menjadi subjek pembicaraan Dewan Keamanan pada tahun 1960-an, ketika Portugal dikritik karena gagal memenuhi kewajibannya menurut Piagam PBB. Hal ini berubah setelah 1974 dan, menanggapi permintaan Portugal, Dewan Keamanan bersidang pada 15 Desember 1975 untuk membicarakan intervensi Indonesia ke dalam wilayah Timor Portugis.

148. Pada 22 Desember 1975, Dewan Keamanan mengesahkan resolusi yang meminta semua negara menghormati integritas wilayah Timor Portugis dan hak rakyat Timor Portugis atas penentuan nasib sendiri.⁸³ Resolusi ini mengecam intervensi militer Indonesia dan menyesali Portugal yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Bab XI Piagam PBB. Resolusi ini meminta Indonesia menarik semua pasukannya dari wilayah ini tanpa menunda-nunda dan meminta Portugal, sebagai kuasa pemerintahan, bekerjasama sepenuhnya dengan

* Kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret 2004. Chan bekerja di dalam Departemen Urusan dan Perdagangan Luar Negeri dari 1972 sampai 1978. Dia mewakili Australia di PBB pada periode 1979-1982, saat dia sebagian besar berurusan dengan isu dekolonisasi. Dia ialah administrator atas Kepulauan Cocos (Keeling) pada 1984, ketika rakyat kepulauan tersebut memilih untuk bergabung dengan Australia.

PBB untuk memungkinkan rakyat Timor-Leste menegakkan hak penentuan nasib sendiri dengan bebas. Resolusi ini juga meminta semua negara dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama PBB meraih solusi damai bagi situasi saat itu, dan untuk memfasilitasi dekolonisasi serta meminta Sekretaris Jenderal mengirim utusan khusus ke wilayah ini, karena keadaan sangat mendesak, untuk membuat penilaian di tempat dan menghubungi semua pihak dan negara guna memastikan pelaksanaan resolusi ini.⁸⁴ Resolusi ini disahkan dengan suara bulat.

149. Dewan Keamanan tidak mengutuk Indonesia, baik tentang agresi maupun penggunaan kekerasan yang tidak sah. Ia mendeskripsikan aksi Indonesia sebagai ‘intervensi’ bukan ‘invasi’; membatasi dirinya dengan menuntut Indonesia untuk menarik pasukannya, dan tidak merekomendasi atau menjatuhkan hukuman atas sikapnya.

150. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (Special Representative of the Secretary-General; SRSG), Vittorio Winspeare Guicciardi, mengunjungi Timor-Leste pada Januari. Karena halangan Indonesia, ia tidak dapat bertemu dengan wakil-wakil Fretilin dan laporannya tidak memberi hasil yang diinginkan.⁸⁵

151. Setelah menerima laporan tersebut, Dewan Keamanan bertemu pada 22 April 1976 untuk menyetujui resolusi lebih lanjut. Isi resolusi ini pada dasarnya sama dengan resolusi Desember, termasuk permohonan agar Utusan Khusus Sekretaris Jenderal melanjutkan tugasnya, tapi menghilangkan dua hal: paragraf yang “mengecam” intervensi bersenjata Indonesia, dan paragraf yang “menyesali” kegagalan Portugal.⁸⁶ Dua belas negara setuju akan resolusi ini, satu tidak setuju, dan dua abstain: Jepang dan Amerika Serikat.*

152. Indonesia tidak memenuhi permintaan kedua Dewan Keamanan tersebut, yaitu untuk menarik pasukannya, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan bagi penolakan ini. Permintaan agar Utusan Khusus Sekretaris Jenderal kembali mengunjungi Timor-Leste dan melanjutkan pembicaraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tidak ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal, Kurt Waldheim. Diplomat Inggris di PBB, Richard Dalton, melaporkan bahwa José Ramos-Horta menantang Sekretaris Jenderal karena gagal menjalankan Resolusi 389. Dalton menulis:

Winspeare telah diperintah untuk tidak mengambil inisiatif apapun. Ia mengatakan kesediaannya bila pihak-pihak yang berkepentingan ingin berkonsultasi dengan dia; tapi ia sendiri tidak akan berusaha mempertemukan mereka. Menurut Schlittler-Silva, seorang Brasil yang menemani Winspeare dan yang masih berhubungan dengan isu itu di Sekretariat, apabila Sekretaris Jenderal ditantang mengenai alasan Resolusi 389 tidak ditindaklanjuti, ia siap mengatakan bahwa belum ada anggota Dewan yang mendesaknya.[†]

* Satu anggota (Benin) tidak ikut dalam pemungutan suara.

† 11 Juni 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi Inggris, Dowson File 7.25. Sekretaris Jenderal Waldheim tidak menolak dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri ala Irian Barat untuk Timor-Leste. Ia menginformasikan Luard, Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign and Commonwealth

153. Dewan Keamanan tetap “mengagendakan isu itu” tetapi tidak membahasnya kembali hingga 1999.

154. Pada 1982, Sekretaris Jenderal sekali lagi diminta memainkan peran langsung. Resolusi Sidang Umum 37/30 meminta Sekretaris Jenderal Javier Perez de Cuellar “untuk memprakarsai pembicaraan dengan semua pihak yang berkepentingan langsung, dengan maksud menggali kesempatan guna mencapai penyelesaian menyeluruh atas isu ini.” Dengan bantuannya, pembicaraan antara Indonesia dan Portugal mulai dilaksanakan pada 1983. Pembicaraan tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang berarti dan pihak Resistansi Timor tidak disertakan sebagai salah satu dari “pihak-pihak yang berkepentingan langsung”. Namun, kegigihan Sekretariat untuk memajukan isu yang tampak sangat sulit diselesaikan itu merupakan tanda dalam dunia diplomasi yang serba simbolis bahwa, meskipun terbengkalai, isu ini masih bertahan dalam agenda PBB.

155. Pada akhir 1992, perundingan antara Portugal dan Indonesia dilanjutkan setelah sempat dihentikan oleh Portugal menyusul pembantaian Santa Cruz. Pada waktu yang bersamaan, diplomat PBB berpengalaman, Francesc Vendrell, menjadi Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik, lalu Direktur untuk Asia dan Pasifik di Sekretariat PBB. Keterlibatannya dan penunjukan Tamrat Samuel untuk memegang berkas Timor-Leste sangat berarti dalam memperkuat kapasitas Sekretaris Jenderal antara 1993 dan 1999.[†]

156. Kedua pejabat ini memusatkan perhatian pada memajukan partisipasi rakyat Timor-Leste dalam negosiasi tersebut. Berdasarkan saran mereka, Sekretaris Jenderal mendapat izin dari Indonesia bagi Utusan Khusus, Amos Wako, saat itu Jaksa Agung di Kenya, untuk menemui Xanana Gusmão yang ada di dalam penjara dan diberitakan menyetujui integrasi. Francesc Vendrell menyampaikan pada audiensi publik CAVR:

Kini saya dapat memberitahu Anda, bahwa ketika Wako dan Tamrat Samuel, yang juga menemaninya, mengunjungi penjara untuk bertemu dengan Xanana, Xanana menyelundupkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Dalam surat itu dia menyatakan dan menegaskan kembali komitmennya untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan tanah airnya.⁸⁷

Affairs bahwa: “Ia bisa memperkirakan adanya semacam penentuan nasib sendiri di bawah naungan PBB, tetapi belum jelas dalam bentuk apa. Tentu saja pihak Indonesia ingin agar PBB melegalisasi ‘Anschluss’-nya.... Sebuah proses serupa dengan yang diterapkan di Irian Barat dapat dipertimbangkan, apabila Indonesia bisa menerimanya.” British FCO Record of Conversation, 15 Mei 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi Inggris, Dowson File 4.

* 23 November 1982, dalam Krieger, hal. 128. Javier Perez de Cuellar melakukan kontak bilateral terpisah dengan Indonesia dan Portugal, sejak awal 1982, ketika ia menjadi Sekretaris Jenderal. Dalam pekerjaannya ia dibantu oleh Under-Secretary-General Rafeeuiddin Ahmed.

† Arnold Kohen menggambarkan Francesc Vendrell sebagai “pejabat PBB yang berperan paling signifikan dalam isu Timor-Leste sejak 1975”. *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, Oxford, 1999, hal. 289.

157. Mengomentari pertanyaan tentang apakah pantas seorang pejabat PBB membawa dokumen semacam itu, Vendrell mengatakan keyakinannya bahwa ia bertugas memastikan agar pandangan orang Timor disampaikan ke negosiasi tersebut. Ia berbicara dalam audiensi:

Orang-orang mungkin berkata bahwa tim ini tidak bersikap netral. Namun kami melihat diri kami bersikap objektif. Objektivitas tidaklah sama dengan netralitas. Isu Timor-Leste masuk ke inti nilai-nilai dan prinsip-prinsip PBB, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalau Anda bekerja pada PBB, Anda tidak bisa netral mengenai isu-isu ini... Kami bekerja demi hak rakyat Timor untuk menjalankan hak penentuan nasib sendiri... Dua pihak yang berunding adalah Indonesia, kekuatan pendudukan, dan Portugal, kuasa pemerintahan sah. Rakyat Timor-Leste tidak terwakili.⁸⁸

158. Sesuai dengan tujuan ini, Vendrell dan Tamrat Samuel menemui Uskup Belo, para pastor dan suster di Dili pada 1994, dan terkesan oleh tingkat dukungan bagi penentuan nasib sendiri serta keyakinan mereka pada Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Salah satu hal yang paling mengharukan adalah keyakinan luarbiasa yang dimiliki setiap orang pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tamrat dan saya merasa tanggung jawab, yakni kami harus melakukan yang terbaik atas nama rakyat yang hanya dapat berpaling pada PBB untuk memperoleh dukungan.⁸⁹

159. Dialog Menyeluruh Antar-Timor (All-Inclusive intra-East-Timorese Dialogues, AIETD) yang disponsori PBB merupakan hasil dari pengalaman itu. Francesc Vendrell dan Tamrat Samuel merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal agar ia meminta Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia untuk menerima ide dialog guna menyatukan masyarakat Timor dari dalam Timor-Leste dengan masyarakat Timor-Leste yang sedang pengasingan:

Pada dasarnya, apabila mereka bertemu dan dibiarkan berdiskusi sendiri, mungkin mereka akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, dan mampu mencapai proposal bersama mengenai Timor-Leste.⁹⁰

160. Hal ini disetujui, dan dengan dukungan dari pemerintah Austria, beberapa pertemuan telah dilakukan. Pertemuan-pertemuan tersebut tidak mengeluarkan hasil secara politik, tapi dalam pertimbangan Francesc Vendrell, pertemuan-pertemuan itu telah menolong masyarakat Timor yang terlibat untuk menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan.

161. Dengan pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal pada 1997, Kofi Annan meningkatkan perhatian atas isu Timor-Leste. Segera setelah penganugerahan

Hadiah Nobel Perdamaian kepada José Ramos-Horta dan Uskup Carlos Ximenes Belo pada Desember 1996, penunjukan Jamsheed Marker dari Pakistan sebagai Utusan Pribadinya untuk Timor-Leste pun memperkuat upaya PBB. Dalam apa yang disebut inovasi oleh Kofi Annan, Duta Besar Marker dan rekan-rekannya membentuk 'kelompok inti' negara-negara untuk menyelesaikan persoalan Timor. Kelompok ini beranggotakan Australia, Jepang, Selandia Baru, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Para pejabat kelompok tersebut juga terlibat dalam diplomasi bolak-balik yang kuat antara New York, Jakarta, Lisbon, dan Timor-Leste, termasuk pembicaraan dengan semua pelaku utama. Usahanya makin meningkat setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan keputusan Presiden Habibie pada Juni 1998 untuk memberi 'otonomi luas' kepada Timor-Leste.

162. Jamsheed Marker menyatakan rasa hormatnya kepada Kofi Annan karena keputusannya untuk memprioritaskan persoalan Timor di PBB:

Bila merenungkan urutan kejadian saat itu, saya tetap yakin bahwa tanpa adanya keputusan awal Kofi Annan untuk memulai proses negosiasi mengenai Timor- Timur, yang bukan sekadar diperhatikan tetapi diperjuangkan dengan gigih setiap saat, PBB tidak akan mampu meraih semua kesempatan yang timbul akibat desentralisasi politik di Indonesia. Dengan lain kata, ibarat kami yang memegang bola dan kamilah yang melarikannya ke gawang begitu mendapat kesempatan.⁹¹

163. PBB memperoleh kesempatan untuk “melarikan bola” ketika pada Januari 1999 Pemerintah Habibie mengumumkan ‘pilihan kedua’ bagi rakyat Timor-Leste Timur: pilihan antara otonomi dan kemerdekaan. Pada 11 Maret, Sekretaris Jenderal bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dan Menteri Luar Negeri Portugal, Jamie Gama, dan menyetujui Jajak Pendapat langsung mengenai ‘pilihan kedua’ yang diatur oleh PBB, kemudian mengirim misi penilaian PBB ke Timor-Leste yang dikepalai Francesc Vendrell, wakil Jamsheed Marker selama negosiasi berlangsung.

164. Mengingat situasi sengit yang berlangsung di wilayah ini, persoalan paling penting bagi PBB adalah keamanan dan kepastian bahwa Jajak Pendapat akan dijalankan dengan damai dan bebas. Dalam pertemuan tripartit berikutnya pada 22 April, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dengan datar menolak permintaan PBB yang menyatakan agar pasukan Indonesia dikantongkan atau dilokalisasi di wilayah-wilayah tertentu satu bulan sebelum Jajak Pendapat. Pada pertemuan tingkat tinggi mereka di Bali pada 27 April, Presiden Habibie juga menolak usulan Perdana Menteri Australia untuk menerima kehadiran pasukan perdamaian internasional.

165. Pada 5 Mei 1999 pertemuan tripartit terakhir dilaksanakan di New York antara Kofi Annan, Menteri Luar Negeri Alatas, dan Gama; dan tiga butir Kesepakatan yang berkaitan dengan Jajak Pendapat ditandatangani. Tiga butir Kesepakatan tersebut antara lain mengizinkan pengambilan suara secara langsung, rahasia, dan umum; pembentukan misi PBB untuk melaksanakan Jajak Pendapat; serta memercayakan

keamanan kepada pihak Indonesia.⁹² Mereka didukung oleh Dewan Keamanan pada 7 Mei, yakni kali pertama Dewan Keamanan membicarakan masalah Timor-Leste sejak April 1976.⁹³ Pada 11 Juni, Dewan Keamanan membentuk Misi PBB di Timor Timur (UN Mission in East Timor - UNAMET). Ian Martin ditunjuk sebagai Wakil Khusus bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Timur dan kepala UNAMET.*

166. Meskipun dianggap hal yang bersejarah, tiga butir Kesepakatan tersebut mendapat sambutan beragam. Pada satu sisi, Kesepakatan tersebut melambangkan kemenangan diplomasi internasional dan, dengan dilatarbelakangi kepalsuan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 di Irian Barat dan Majelis Rakyat Timor Timur pada Mei 1976, merupakan bukti baik bahwa Indonesia menuju demokratisasi. Pada sisi lain, ada kekhawatiran bahwa memercayakan keamanan kepada pihak Indonesia akan mengundang bencana. Dalam minggu-minggu sebelum pemungutan suara, yang ditunda karena alasan keamanan, José Ramos-Horta memprediksikan kekerasan dan meminta agar komunitas internasional mengambil langkah-langkah pencegahan:

Skenario terburuk—yang nyata—adalah kekerasan akan terjadi; bahwa kekerasan tersebut ditargetkan pada PBB; bahwa mereka mengundurkan diri dan terjadi pertumpahan darah yang luarbiasa di Timor-Leste. Mereka—bukan hanya PBB tetapi negara-negara yang benar-benar penting, seperti Australia—harus menciptakan kondisi untuk memastikan hal ini tidak terjadi.⁹⁴

167. Dalam kesaksiannya kepada CAVR pada Audiensi Publik Nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Ian Martin, kepala UNAMET, mengakui bahwa kritik utama terhadap Kesepakatan tersebut adalah mengenai diletakkannya keamanan di tangan militer Indonesia. Meskipun ia bukan bagian dari negosiasi, ia berkata:

*Saya sudah panjang-lebar memikirkan hal ini, dan saya setuju dengan pendapat dari para negosiator bahwa tekanan sekeras apapun terhadap Presiden Habibie pada awal 1999 tidak akan menghasilkan diterimanya Pasukan Penjaga Kedamaian. Dengan demikian, saya merasa lebih baik mengambil risiko, daripada kehilangan kesempatan untuk penentuan nasib sendiri yang tertutup selama 24 tahun dan yang akan tertutup lagi setelah Habibie.*⁹⁵

168. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Ian Martin juga menjawab kritik bahwa UNAMET dianggap bersikap berat sebelah supaya hasil pemungutan suara adalah kemerdekaan, dan bahwa kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara dipancing kemarahan pihak Timor Timur prointegrasi karena proses dan hasil yang tidak adil. Ia berkata:

* Ian Martin adalah Sekretaris Amnesty International 1986-92. Sebelum menjabat sebagai kepala UNAMET, ia bertugas dalam beberapa jabatan hak asasi manusia untuk PBB di Haiti, Rwanda, dan Bosnia-Herzegovina.

Saya pikir ini hanya pandangan Indonesia dan kelompok-kelompok orang Timor Timur prointegrasi dan tidak memiliki kredibilitas di tempat lain, tetapi pertanyaan ini penting untuk dijawab. Menurut pendapat saya, usaha belum cukup dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini di Indonesia, khususnya ketika hal ini diteruskan sampai ke sidang-sidang di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta, oleh jaksa dan pembela. Para saksi TNI dalam pengadilan-pengadilan tersebut dibiarkan begitu saja ketika mereka menyatakan kebohongan paling mencolok, misalnya ketika mengatakan bahwa polisi sipil PBB telah mengambilalih tanggungjawab keamanan di Timor Timur, atau bahwa kotak-kotak suara ditemukan di rumah Uskup Belo, dan lain-lain.

169. Martin menjelaskan:

UNAMET bukannya prokemerdekaan: UNAMET hanya berkomitmen agar rakyat Timor Timur bisa menjalankan haknya, yang diakui secara internasional, atas penentuan nasib sendiri... Prosedur pendaftaran dan pengumpulan suara yang kami tempatkan dan jalankan diperhatikan secara cermat oleh Komisi Pemilihan Independen, yang menyelenggarakan audiensi publik mengenai keluhan-keluhan pada hari-hari setelah pemungutan suara, serta oleh berbagai pengamat internasional. Semua pengamat yang netral menilai, pemilihan telah dijalankan dengan adil dan efisien, meskipun dalam kondisi yang sulit dan hambatan waktu.

170. Ia kemudian menyatakan bahwa aspek-aspek Jajak Pendapat bersifat tidak adil bagi pendukung kemerdekaan.

[Jajak Pendapat] itu berpihak kepada pendukung integrasi karena pihak Indonesia gagal memenuhi komitmen yang dijanjikan. Komitmen tersebut, di antaranya, bahwa pejabat pemerintah Indonesia akan bersikap netral, dan bahwa pejabat pemerintah asal Timor hanya berkampanye dalam kapasitasnya sebagai individu tanpa menggunakan dana dan fasilitas pemerintah ataupun “tekanan jabatan”. Semua ketentuan tersebut dilanggar secara terang-terangan tanpa menghiraukan protes UNAMET.⁹⁶

171. Pemungutan suara berlangsung relatif damai, dan hari pelaksanaan pemungutan suara merupakan hari kemenangan kecil bagi sebagian besar rakyat Timor-Leste. Setelah pecah kekerasan, Presiden Habibie, di bawah tekanan internasional yang kuat, menyetujui mengundang PBB mengirim pasukan internasional untuk memulihkan ketertiban. Hal ini disahkan oleh Dewan Keamanan pada 15 September 1999.⁹⁷

172. Pada 20 Oktober 1999, badan legislatif tertinggi Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengakui hasil Jajak Pendapat Timor-Leste

dan mencabut TAP MPR 1978, yang menyatakan penggabungan Timor Timur ke Indonesia.* Pada hari yang sama, Presiden Habibie turun dari kursi kepresidenan untuk digantikan Abdurrachman Wahid.

173. Pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan menyambut baik keputusan MPR dan mendirikan Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UN Transitional Administration in East Timor, UNTAET). Resolusi ini disetujui secara mutlak dan memberi wewenang kepada UNTAET untuk menjalankan semua otoritas legislatif dan eksekutif, antara lain pelaksanaan kehakiman, dan membantu Timor-Leste mempersiapkan pemerintahan sendiri. Kofi Annan menunjuk Sergio Vieira de Mello dari Brasil sebagai Wakil Khusus bagi Timor Timur yang baru dan Kepala Pemerintahan Transisi.†

174. Disetujuinya Resolusi Dewan Keamanan pada 25 Oktober menandai pengalihan otoritas atas Timor-Leste dari Indonesia kepada PBB. (Mengenai berakhirnya peranan Portugal yang formal, lihat segmen mengenai Portugal dalam bab ini; paragraf 59.)

Cina

175. Republik Rakyat Cina (RRC) yang bergabung dengan PBB pada 1971 merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.‡ Berkaca pada pengalaman sendiri tentang latar belakang kolonialnya yang sering memalukan, Cina secara tradisional telah mengambil posisi kuat dalam hal kedaulatan, kemandirian, penentuan nasib sendiri, dan hak-hak Dunia Ketiga. Cina khususnya sensitif terhadap apa yang mereka anggap pengaruh Barat yang berlebihan pada sistem internasional, termasuk campurtangan luar dalam masalah internal sebuah negara, atas nama intervensi kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta pemaksaan pengertian tentang hak asasi manusia yang bersifat individualistik.

176. Cina menentang kolonialisme Portugal di Afrika dan berencana menggabungkan Makau [ke Cina],§ meskipun dulu dan hingga saat ini masih tetap menentang kemerdekaan bagi Taiwan dan Tibet.

* Beberapa legislator Indonesia percaya bahwa pihak legislator dan bukan presiden yang berhak mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan, dan bahwa dengan menyetujui Kesepakatan 5 Mei Presiden Habibie tidak mengikuti prosedur yang benar.

† Pada waktu diangkat Sergio Vieira de Mello adalah Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat di PBB. Ia pernah menjabat sebagai Pembantu Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi. Ia tengah bertugas sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Irak, ketika terbunuh secara tragis pada 19 Agustus 2003 akibat serangan bom terhadap kantor PBB.

‡ Menyusul revolusi komunis Cina pada 1949 dan munculnya Perang Dingin, Taiwan menempati kursi 'Cina' di PBB. Pada 1971, PBB mengakui RRC sebagai wakil sah Cina satu-satunya dan menggantikan Taiwan di PBB.

§ Portugal mengembalikan Makau kepada Cina pada Desember 1999. Sekarang Makau disebut Daerah Administrasi Khusus Makau (SAR, Macau Special Administrative Region) dan memiliki otonomi luas kecuali dalam bidang luar negeri dan pertahanan.

177. Indonesia mengakui Republik Rakyat Cina pada 1950, dan hubungan Cina-Indonesia pada periode Sukarno pada umumnya berlangsung positif. Hubungan tersebut memburuk dengan tajam pada 1965, ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pro-Beijing dituduh mencoba melakukan kudeta di Jakarta. Di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia menerapkan larangan diskriminatif terhadap kebudayaan dan praktik keagamaan Cina, termasuk melarang penggunaan nama Cina, teks Cina, serta pengajaran bahasa Cina di sekolah-sekolah. Dukungan pemerintah Soeharto pada Vietnam yang pro-Moskow juga mengecewakan Cina.

178. Pemerintah Soeharto khawatir Cina akan campurtangan dalam masalah Timor Portugis. Pada 1974 – 1975, Presiden Soeharto dan para penasihatnya berulang kali menyatakan kekhawatirannya kalau Timor-Leste yang merdeka, condong ke kiri, dan lemah secara ekonomi akan mencari dukungan Cina. Para pejabat Indonesia setuju ketika Sekretaris Departemen Luar Negeri Australia, Alan Renouf, memberitahu mereka pada Oktober 1974 bahwa:

dia memperkirakan niat Cina akan menjadi kekhawatiran khusus bagi Indonesia. Dia menyatakan bahwa terdapat 10.000 orang Cina di Timor Portugis, dan meskipun saat itu mereka berorientasi pada Taiwan, kesetiaan mereka dapat berubah.⁹⁸

179. Presiden Soeharto mengangkat masalah tersebut pada kedua kesempatan saat dia membahas Timor dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam.

180. Baik Renouf maupun Whitlam berusaha menenangkan kekhawatiran Indonesia. Dalam sebuah surat pada Presiden Soeharto, Whitlam menulis:

Kami tidak memiliki bukti yang mendukung kekhawatiran tentang masalah ini. Saat ini kami berpendapat bahwa Cina, Uni Soviet, atau negara adikuasa lainnya hanya sedikit saja tertarik terhadap Timor Portugis; dan menurut hemat kami negara-negara yang mungkin tergoda untuk ikut campur, akan berhati-hati agar tidak membahayakan hubungan mereka dengan Indonesia.⁹⁹

181. Para diplomat di negara-negara lain dan PBB setuju dengan penilaian ini dan menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah Soeharto.^{*}

182. Fretilin menyertakan Cina dalam strategi internasionalnya untuk mendapat perhatian dan dukungan, tapi inisiatif tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya bahwa Fretilin adalah komunis. Pers yang dikontrol pemerintah dan surat kabar militer *Berita Yudha* memuat cerita-cerita yang

.....
^{*} Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik, Perwalian, dan Dekolonisasi PBB, Tang Ming-Chao, memberitahu Whitlam ketika berkunjung ke Canberra pada September 1975 bahwa meskipun ia seorang pegawai negeri internasional, ia dapat memastikan "bahwa Cina tidak memiliki kepentingan di Timor Portugis". Dokumen 227, Canberra, 12 September 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 406-408

mengklaim adanya infiltrasi Komunis Cina ke Timor, pendanaan demonstrasi-demonstrasi dan keterlibatan Maois, termasuk pembicaraan tentang kunjungan rahasia empat orang jenderal Cina ke Timor-Leste melalui Australia. Presiden UDT, Francisco Lopes da Cruz, mengklaim pada April 1975 bahwa “agen-agen di Indonesia dan Taiwan” milik UDT telah mengonfirmasi hubungan Cina dengan Timor.*

183. RRC adalah satu-satunya negara penting di Asia yang mendukung Fretilin, dan satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan yang mengakui deklarasi kemerdekaan unilateral dan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste. Cina mendukung dua resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijalankan sebagai tanggapan terhadap invasi Indonesia, dan sangat mengutuk tindakan-tindakan Indonesia. Perwakilan Cina, Huang Hua, memberi tahu Dewan Keamanan pada Desember 1975:

*Agresi terang-terangan pemerintah Indonesia terhadap Republik Demokratik Timor-Leste telah membongkar ambisi liar Indonesia untuk membasmi pasukan-pasukan patriotik rakyat Timor-Leste, mencekik Republik Demokratik Timor-Leste yang baru lahir, dan kemudian mewujudkan skemanya yang telah lama direncanakan untuk menjajah Timor-Leste. Tindakan-tindakan pemerintahan Indonesia di atas, melanggar semua tujuan dan prinsip Piagam PBB. Delegasi Cina hanya dapat memperlihatkan kemarahannya dan mengutuknya.*¹⁰⁰

184. Pengakuan Cina terhadap RDTL berarti Cina menerima bahwa deklarasi kemerdekaan unilateral Fretilin adalah tindakan penentuan nasib sendiri. Tapi, hal ini tidak mencegah Cina untuk memberi dukungannya, dengan satu pengecualian, pada resolusi Sidang Umum PBB tentang Timor-Leste antara 1975 dan 1982.

185. Cina juga menyediakan bantuan praktis bagi Fretilin. José Ramos-Horta menulis:

Sementara Moskow menjaga jarak dengan Fretilin, Beijing memberikan keramahmatan dan dukungan diplomatik aktif. Saya pribadi mengunjungi RRC pada awal 1976, seperti juga perwakilan-perwakilan Fretilin lainnya. Cina juga memberikan kata-kata dukungan yang kuat di PBB, begitu pula bantuan finansial.¹⁰¹

186. Bantuan-bantuan ini tidak termasuk bantuan militer, meskipun Fretilin memintanya melalui Menteri Pertahanan, Rogério Lobato, yang mengunjungi Cina tidak lama setelah invasi Indonesia dan bertemu dengan Jenderal Ch'en His-lien, komandan senior dalam Tentara Pembebasan Rakyat (TPR), serta mengunjungi sebuah unit TPR. Duta Besar Australia untuk Cina, Stephen Fitzgerald, diminta oleh

.....
* Dokumen 131, Jakarta, 12 Mei 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 259. James Dunn menyangkal cerita-cerita dari November 1974 ini dengan menyebutnya propaganda. Ia khususnya sangat kritis tentang “kebohongan belaka” yang disebar oleh Francisco Lopes da Cruz pada September 1975, misalnya klaimnya bahwa 20 orang “pelatih militer” asal Vietnam Utara telah mengajar prajurit-prajurit Fretilin. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, 2003, hal. 72, 183.

Pemerintah Australia untuk melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim bantuan militer pada pejabat-pejabat Cina, dan berkesimpulan bahwa:

Posisi Cina saat ini tampaknya didikte oleh sikap moral bahwa Indonesia seharusnya dikecam karena tindakan agresi terbukanya, padahal sebelumnya Cina tidak berniat terlibat. Setelah invasi Indonesia, Cina terpaksa, meskipun dengan segan, mengambil posisi dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Saat itu, Fretilin tampaknya merupakan partai pribumi yang paling mudah diidentifikasi karena konsisten dengan kebijakan-kebijakan mereka sendiri.*

187. Duta Besar Fitzgerald percaya bahwa pada saat itu Cina belum menyangkal masalah bantuan militer. Tapi, dengan kata-kata Perdana Menteri Cina, Ch'iao Kuan-hua, pada perjamuan selamat datang pada 29 Desember 1975, bahwa "rakyat Timor-Leste... pasti akan memenangkan kemerdekaan nasional selama mereka gigih bergantung pada diri sendiri dan perjuangan keras", maka ia memastikan bahwa itu berarti "tidak".

188. Pemerintah Inggris percaya bahwa kata-kata keras Cina di Dewan Keamanan seharusnya tidak diterima mentah-mentah. Dalam sebuah telegram ke London pada 2 Januari 1976, Duta Besar untuk Indonesia, John Ford, menulis:

Mengenai kunjungan delegasi Fretilin ke Peking dan dukungan terbuka Cina pada Fretilin, pihak Cina tampaknya telah berkomentar bahwa dukungan mereka terhadap Fretilin sebaiknya tidak usah terlalu diperhatikan: "ada waktunya ketika meriam perlu ditembakkan, meski hanya menembakkan bola-bola kertas".¹⁰²

189. Pada Juli 1976, Cina meyakinkan Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, bahwa Cina tidak akan ikut campur dalam masalah internal Indonesia.¹⁰³

190. Indonesia diuntungkan oleh hubungannya dengan Cina, meski Fretilin dituntut karena menginginkan hubungan yang sama. Dukungan Cina pada Timor-Leste melemah pada 1980-an karena hubungannya yang membaik dengan Indonesia, dan karena merasa bahwa usaha untuk meraih kemerdekaan adalah sia-sia. Indonesia mengurangi posisi pro-Vietnamnya dan Cina mengambil pendirian yang lebih netral terhadap Timor-Leste. Pada 1985, Indonesia mengendurkan larangan hubungan dagang dengan Cina yang menghasilkan keuntungan aliran finansial spektakuler dan meningkatkan pertukaran bilateral. Pada Agustus 1990, kedua negara menormalisasi hubungan dan, sebagai bukti hubungan yang

* 7 Januari 1976. Dokumen, hal. 663-64. Pengertian akan posisi Cina ini dikonfirmasi oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Winspeare Guicciardi yang mengatakan bahwa sebelum ia meninggalkan New York untuk mengunjungi Timor-Leste dan sekitarnya pada Januari 1976, ia diberitahu oleh Tang Ming-Chao [Wakil Sekretaris Jenderal untuk Dekolonisasi] bahwa menurut Cina "misi Winspeare akan memiliki nilai hanya jika ia mendesak pihak Indonesia untuk 'langsung pergi'." Laporan oleh pejabat Pemerintah Australia, 10 Februari 1976. Documents, hal. 705.

sangat membaik, Presiden Soeharto mengunjungi Beijing pada 1991. Untuk mengakomodasi keberatan dari pihak nasionalis dan militer, pemerintah Soeharto mendapat kesepakatan dari Cina bahwa Cina tidak akan menyediakan bantuan bagi tindakan subversi atau ikut campur dalam masalah dalam negeri Indonesia.

191. Cina mendukung Resolusi Dewan Keamanan pada 1999 yang membenarkan tindakan penentuan nasib sendiri yang akan diatur oleh PBB. Sejalan dengan prinsipnya yang menentang intervensi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi, Cina mencoba memengaruhi blok Asia agar mendukung Indonesia pada 1999 untuk menentang penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Timor pada tahun itu. Hal ini tidak berhasil. Tapi, Cina berhasil menghilangkan sebagian referensi pada penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia sebelum membiarkan Dewan Keamanan membenarkan campurtangan Interfet pada September 1999.

Prancis

192. Prancis ialah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggota tetap Dewan Keamanan, dan negara donor bagi anggaran organisasi tersebut. Pemerintah Prancis berkomitmen melakukan koordinasi kebijakan luar negerinya dengan menerapkan semua tujuan dan prinsip PBB, yang banyak memiliki persamaan dengan tradisi republik Prancis.

193. Prancis tidak mendukung inisiatif-inisiatif dekolonisasi yang dilakukan PBB pada 1960-an. Prancis abstain dalam mendukung deklarasi bersejarah mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Jajahan (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) pada 14 Desember 1960, serta prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan pelaporan tentang koloni. Pada periode yang sama, Prancis bergabung dengan Portugal dalam menentang pendaftaran Timor oleh Sidang Umum sebagai sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri.

194. Pemerintah Prancis mendukung Resolusi Dewan Keamanan 384 yang disetujui dengan suara bulat pada 22 Desember 1975, sebagai tanggapan terhadap invasi Timor-Leste oleh Indonesia. Prancis menegakkan hak rakyat Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta mengimbau Indonesia agar menarik mundur pasukannya, tapi mengambil pendekatan secara damai pada masalah tersebut. Berbicara dalam debat Dewan Keamanan pada 18 Desember, wakil Prancis, M. LeCompt, mendesak kerjasama ketimbang saling menyalahkan:

Misi Dewan dalam kasus ini bukan untuk menyalahkan, apalagi untuk menimpakan kesalahan pada salah satu pihak yang terlibat. Kami tahu bahwa situasi-situasi sejarah jarang sekali sederhana, sehingga yang baik dan yang jahat tidak dapat ditentukan berdasarkan pandangan dari satu pihak saja. Timor juga bukan pengecualian terhadap aturan itu.¹⁰⁴

195. Prancis juga memilih mendukung resolusi Dewan Keamanan yang kedua, yang disetujui pada 22 April 1976. Prancis lagi-lagi menegakkan hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, tapi menyesali resolusi tersebut tidak menyertakan rekomendasi dari Jepang untuk mengakui niat baik Indonesia serta keputusannya untuk menarik mundur pasukannya. Dalam sebuah pernyataan penjelasan yang ambigu, wakil Prancis, M. Travert, memberitahu Dewan:

*Daripada terus memikirkan masa lalu dan menyalahkan pihak ini atau itu, kita sekarang harus melihat ke depan. Masa depan Timor-Leste harus didasarkan pada rekonsiliasi nasional, penghentian total permusuhan, dan bersatunya keragaman partai, yang perbedaannya tampaknya bagi kami tidak terlalu fundamental dibanding dengan aspirasi bersama mereka, yaitu peningkatan rakyat Timor menuju kesejahteraan dan kemerdekaan.*¹⁰⁵

196. Untuk bertahan di posisi ini, Prancis abstain dari mendukung Resolusi Sidang Umum pertama, yang disetujui menyusul invasi Indonesia, karena resolusi tersebut tidak seimbang dan menyalahkan Indonesia sepenuhnya.¹⁰⁶ Pemerintah Prancis tetap abstain pada semua resolusi Sidang Umum berikutnya dengan menyatakan bahwa resolusi-resolusi tersebut “mengabaikan realitas situasi di Timor-Leste”.¹⁰⁷ Pada 1979, Pemerintah Giscard d’Estaing menandatangani perjanjian pajak dengan Indonesia. Dalam pandangan Pemerintah Australia, ini mengimplikasikan pengakuan *de jure* bagi kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste karena perjanjian tersebut ditandatangani setelah penggabungan 1976, dan memiliki klausa yang mendefinisikan Indonesia sebagai wilayah yang ditentukan oleh hukum Indonesia.¹⁰⁸

197. Peralatan militer yang disediakan bagi Indonesia oleh Pemerintah Giscard d’Estaing digunakan di Timor-Leste, termasuk tank dan helikopter Puma dan Allouette. Helikopter Puma diproduksi di Indonesia pada 1979. Tambahan Allouette disediakan oleh Prancis pada 1982. Pihak Resistansi Timor mengklaim bahwa peralatan ini digunakan dalam pertempuran. José Ramos-Horta menulis:

‘Allouette’ adalah sesuatu yang sangat ditakuti Fretilin. Kesenjangan dan kecepatannya memungkinkan pengoperasian efektif di daerah-daerah hutan dan pergunungan untuk mengejar pasukan-pasukan gerilya yang sedang mundur, atau memaksa mereka keluar dari basis-basis mereka.¹⁰⁹

198. Pada Januari 1978, Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta mengonfirmasi adanya helikopter-helikopter Puma di Dili, tetapi yakin bahwa helikopter tersebut tidak dipersenjatai.

Angkatan Darat dan Udara saat ini mengoperasikan sekitar sepuluh helikopter ringan (BO-105, Puma, dan Allouette), yang berbasis di Dili. Dari apa yang kami lihat, helikopter-helikopter tersebut hanya

digunakan untuk kegiatan pengintaian dan evakuasi terbatas. Tidak ada yang tampak dibekali peralatan sebagai pesawat bersenjata.*

199. Pihak Resistansi Timor-Leste dan organisasi-organisasi masyarakat sipil Prancis berharap bahwa Prancis akan mendukung Timor-Leste di PBB, setelah Francois Mitterand menjadi presiden sosialis pertama negara itu pada 1981. Ketika dalam oposisi, pihak sosialis selalu bersemangat mengkritik kebisuan pemerintah konservatif Giscard d'Estaing (1974 - 1981) dalam isu tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima secara moral, dan Mitterand menyebut rakyat Timor sebagai rakyat yang "ditinggalkan, korban-korban dari kekuatan-kekuatan yang akan menghapus mereka".¹¹⁰ Mitterand menjadi presiden sejak 1981 sampai 1995 dan, menurut Konstitusi Prancis, memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri. Pada Desember 1981, ia memberitahu televisi Portugis bahwa rakyat Timor-Leste sedang mengalami "penindasan yang sangat keras... bahwa tidak dapat diterima bila pihak yang kuat menghancurkan yang lemah dan melakukan eliminasi-eliminasi fisik yang dapat mengakibatkan pemunahan rakyat" dan bahwa "jika PBB tidak mengambil inisiatif untuk membela hak-hak Timor, Prancis akan menjalankan kewajiban tersebut."¹¹¹

200. Pada praktiknya, Prancis di bawah pemerintahan Mitterand melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya dan bahkan abstain dari mendukung Resolusi Sidang Umum 1982, yang hanya mengimbau Sekretaris Jenderal untuk mencoba mencari solusi melalui dialog. Pada 1983 Pemerintah Prancis secara resmi memberitahu Portugal bahwa mereka akan menentang pengambilan suara tahun itu jika isu tersebut timbul.¹¹² Menjawab pertanyaan tentang hak asasi manusia di Timor-Leste pada 1986, Menteri Luar Negeri, Roland Dumas, berkata bahwa informasi tentang masalah tersebut tidak lengkap dan kontradiktif, dan bahwa pada 1982 sebagian besar rakyat Timor Timur telah memilih Partai Golkar Soeharto. Prancis secara singkat menyebut Timor dalam debat tentang penentuan nasib sendiri di Komisi hak asasi manusia PBB pada Januari 1987. Para aktivis Timor-Leste memasuki dan meminta suaka di Kedutaan Prancis di Jakarta tiga kali pada 1995-1996; permintaan-permintaan mereka untuk pergi ke Portugal telah dihormati.

201. Prancis merupakan donor besar bagi Indonesia selama periode Soeharto. Pada 1991, Prancis adalah donor bilateral terbesar kedua, dan mempertahankan dukungannya selama krisis ekonomi Asia sejak 1997. Berlawanan dengan sebagian dugaan, Prancis meningkatkan kerjasama militernya dengan Indonesia di bawah Presiden Francois Mitterand. Pembelian-pembelian Indonesia pada 1990-an mencakup meriam dan kendaraan pengintai amfibi. Sejak 1994, didorong oleh strategi agresif antara bisnis dan pemerintah, untuk pertama kalinya penjualan Prancis di Asia melampaui pasar-pasar tradisional seperti Timur Tengah, dan perusahaan-perusahaan grup Thompson, contohnya, menyediakan berbagai peralatan militer

* Laporan oleh Duta Besar Roger Peren dan Col MacFarlane, Atase Pertahanan, 13 Januari 1978. *New Zealand Documents on East Timor*, Vol. 1. MacFarlane adalah atase pertahanan Barat pertama yang diperbolehkan mengunjungi Timor-Leste setelah invasi.

dan komunikasi bagi Indonesia. Kerjasama juga mencakup pertukaran personel militer. Pada 1997, Prancis menganugerahkan bintang penghargaan kepada BJ Habibie untuk perannya dalam mempromosikan hubungan Prancis-Indonesia dan pembangunan industri di Indonesia.

202. Prancis campurtangan dalam isu Timor-Leste pertama kalinya pada 1999. Di bawah Presiden Jacques Chirac, Prancis mendukung proses penentuan nasib sendiri seiring dengan pernyataan-pernyataan kebijakan sebelumnya, dan merupakan satu dari 22 negara yang berkontribusi pada International Force for East Timor (Interfet), khususnya untuk meningkatkan kapabilitasnya di udara dan di air.

Rusia (USSR)

203. Bekas Uni Soviet (USSR),* yang menurut pengakuannya sendiri merupakan teman rakyat kolonial, adalah negara adikuasa dan anggota tetap Dewan Keamanan. Indonesia dan pihak Barat khawatir Uni Soviet akan campurtangan dalam Timor-Leste dan memonitor aktivitasnya secara dekat. Pada kenyataannya, Rusia memainkan peran kecil dan, seperti negara adikuasa lainnya, melakukan pendekatan pragmatis berdasarkan kepentingan strategisnya di Indonesia.

204. Menyusul Revolusi Bolshevik 1917, Uni Soviet mempromosikan dirinya sebagai jawara rakyat kolonial dan pergerakan revolusioner. Aktivitas ini meningkat setelah Perang Dunia Kedua dan jatuhnya kerajaan-kerajaan Eropa, dan memuncak pada 1970-an dengan, antara lain, intervensi Soviet di Angola pada 1975, Perang Ogaden (1976-78),† dan invasi gagal di Afghanistan (1979 - 1989).

205. Pada 1960, Uni Soviet mengusulkan dan membuat naskah asli deklarasi bersejarah PBB tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara dan Bangsa Jajahan. Naskah tersebut banyak dimodifikasi, tapi inisiatif ini merupakan kontribusi penting pada dekolonisasi, termasuk bagi Timor-Leste. Uni Soviet mendukung dua Resolusi Dewan Keamanan tentang Timor-Leste yang diambil sebagai tanggapan terhadap invasi Indonesia, dan semua Resolusi Sidang Umum tentang masalah tersebut antara 1975 dan 1982.

206. Ketertarikan Soviet pada Timor tidak sekuat yang sebelumnya ditunjukkan pola pemilihan ini, atau seperti yang diantisipasi oleh sebagian pihak. Dalam konteks Perang Dingin yang seru, dan menyusul jatuhnya Vietnam ke tangan Viet Cong, ketakutan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk Indonesia dan Timor-Leste, bahwa Soviet mungkin akan campurtangan dan membentuk “Kuba Asia” di Timor-Leste, mungkin bahkan dengan peluru-peluru kendali yang disediakan Soviet yang mengincar Jakarta. Utusan PBB, Jamsheed Marker, pernah menyebut suatu “pandangan persisten” bahwa Pemerintah Amerika Serikat mendorong Soeharto

* Uni Soviet pecah pada 1991 ketika limabelas negara anggotanya merdeka. Sekarang Uni Soviet dikenal sebagai Federasi Rusia, atau Rusia.

† Somalia dan Ethiopia berperang untuk menguasai wilayah Ogaden milik Ethiopia. Uni Soviet awalnya mendukung Somalia kemudian pindah mendukung Ethiopia.

untuk campurtangan di Timor guna mencegah kemungkinan tersebut. Menurut skenario ini, seperti diamati oleh Marker, “pengambilalihan Dili akan menambah fasilitas Soviet yang sudah ada di Teluk Cam Ranh, dan memberi alasan Moskow untuk menghadirkan angkatan lautnya yang sangat strategis di wilayah tersebut”.

207. Komisi tidak berhasil mengakses arsip-arsip Rusia, sehingga sulit menentukan kebenaran dari kepercayaan dramatis tapi penting ini.[†] Bukti yang ada memberi kesan kuat bahwa klaim-klaim ini sering termotivasi secara politik di sisi Indonesia dan tidak memiliki dasar realitas, karena Uni Soviet lebih tertarik pada hubungannya dengan Indonesia dibandingkan dengan nasib Timor-Leste.

208. Pemerintah-pemerintah yang mendukung Indonesia menyangkal klaim-klaim tersebut. Dalam sebuah laporan pada 8 Oktober 1975, atase pertahanan Selandia Baru di Jakarta, Kolonel AG Armstrong, menulis:

Pihak Indonesia mengklaim pada beberapa kesempatan bahwa Fretilin menerima bantuan dari luar, tapi mereka tidak pernah bisa memberikan bukti nyata.

209. Laporan Armstrong menyebut klaim Angkatan Laut TNI (TNI-AL) yang telah menemukan “kapal selam milik Cina Merah berlayar di sekitar kota Dili”, dan bahwa identitasnya sebagai sebuah kapal selam buatan Rusia, yang saat itu digunakan oleh Cina, dikonfirmasi melalui “tanda” yang terdapat pada mesin-mesinnya. Kolonel tersebut melaporkan bahwa informannya meragukan Angkatan Laut Indonesia “mampu mengidentifikasi kelas kapal selam dari suara mesinnya” dan bahwa dari nama pembuat kapal yang dimaksud berarti pembuatannya setelah perpisahan Sino-Soviet. Ia menyimpulkan:

Sebuah kapal selam mungkin saja telah terlihat, tapi identifikasi positifnya sebagai milik Cina, Rusia, atau apapun harus diragukan.¹¹³

210. Pejabat-pejabat Australia juga meragukan kebenaran mengenai tujuan pihak komunis terhadap Timor. Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, secara pribadi memberitahu Presiden Soeharto pada beberapa kesempatan bahwa pernyataan itu tidak berdasar. Departemen Luar Negeri memperkirakan dengan tepat pada November 1974 bahwa Uni Soviet tidak akan “menaruh ambisi di situ, karena ... alasan bahwa hal ini dapat merusak apa yang harus dinilai oleh Moskow sebagai hubungan yang lebih penting dengan Indonesia.”¹¹⁴

.....
* *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland, 2003, hal. 9. Uni Soviet menyediakan bantuan militer bagi Vietnam Utara dalam perangnya dengan Vietnam Selatan dan AS, dan sesudah kemenangan Vietnam Utara pada 1975 menjadi donor bantuan militer dan ekonomi terbesar bagi Vietnam. Berdasarkan perjanjian pada 1978, Vietnam memberikan kepada Uni Soviet akses ke fasilitas-fasilitas di Da Nang dan Cam Ranh Bay, sehingga secara signifikan meningkatkan kehadiran angkatan laut Soviet di wilayah tersebut yang sampai saat itu hanya terbatas pada Soviet Timur-Jauh.

† Satu sumber dokumentasi yang mungkin adalah Pusat Penyimpanan Dokumentasi Kontemporer (TKhSD) di Moskow.

211. Sikap Soviet terhadap Timor-Leste digambarkan dengan baik dalam cerita di bawah ini, yang dikemukakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott:

Saya ingat pernah bertanya kepada duta besar Soviet bagaimana reaksi Uni Soviet jika Indonesia bergerak menggabungkan Timor-Leste. Kami memainkan semacam sandiwara. Mengajak saya melihat peta Indonesia di dinding kantornya, dia bertanya: “Timor-Leste di mana?” Memainkan peran saya, sayapun menunjukkannya pada peta. “Sangat kecil dan dikelilingi oleh Indonesia, bukan?”, dia berkata, dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan.¹¹⁵

212. Woolcott menguraikan bahwa cerita itu mengungkap sisi buruk kekuasaan yang besar, dan menyatakan bahwa USSR menyetujui invasi India di Goa pada 1961.

213. Pernyataan-pernyataan perwakilan Soviet di PBB mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tapi isi pernyataan itu sangat umum dan tidak mengecam Indonesia secara langsung.¹¹⁶ José Ramos-Horta melaporkan bahwa diplomat-diplomat Soviet hanya memberi sedikit dukungan kepada delegasi Fretilin:

Tidak seperti orang Cina yang ramah, orang Rusia tidak pernah mengundang delegasi kami ke Misi mereka untuk pertemuan, apalagi makan.¹¹⁷

214. Menulis pada Februari 1976, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, John Ford, mengomentari sikap Rusia:

Hal ini sudah bernada *pianissimo*, dan saya mempunyai kesan, sejak awal Rusia sudah memutuskan bahwa Indonesia akan lolos dengan tindakannya, dan Rusia tidak akan mau membahayakan pengaruhnya yang berkembang di Indonesia. Seandainya Rusia memimpin kelompok pertentangan terhadap Indonesia, mereka mungkin akan diusir, dan kedutaannya yang baru dan luarbiasa indahny akan ditinggalkan begitu saja.¹¹⁸

215. Moskow menolak permohonan yang diajukan berkali-kali oleh perwakilan Fretilin untuk mengunjungi USSR. Mereka tidak memberikan visa sampai pada 1985, sepuluh tahun setelah terjadinya invasi, dan kemudian hanya untuk mengambil bagian dalam acara-acara budaya.

216. Uni Soviet dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada 1953. Uni Soviet menyokong Indonesia dalam perselisihan mengenai Irian Barat dan mulai 1960 Indonesia adalah penerima nonkomunis terbesar untuk bantuan militer dari blok Soviet. Hubungan tersebut selamat dari penindasan politik terhadap sayap kiri oleh pasukan-pasukan Soeharto pada 1965, dan, meskipun ada pertentangan-pertentangan ideologi, kedua pihak melihat keuntungan bersama dalam kelanjutannya. Uni Soviet sangat menghargai kegunaan strategis hasil hubungan itu, dan berusaha agar hubungannya dapat memperkecil pengaruh AS dan Cina di Asia Tenggara. Dalam

perang dinginnya dengan Amerika Serikat, Moskow menghargai sikap Indonesia yang, tak seperti Korea Selatan dan Filipina, tidak menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, dan memperkenankan kapal selam nuklir Soviet melewati lautan Nusantara. Hubungan itu juga mengimbangi peningkatan pengaruh regional Cina yang mengancam kepentingan kedua negara dengan beberapa cara yang berbeda.

217. Selain mempertahankan dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri pada nada pianissimo, Uni Soviet melunakkan posisinya mengenai isu Timor-Leste pada 1979 sebagai imbalan atas dukungan Indonesia terhadap penggantian Khmer Merah yang pro-Cina dengan pemerintahan pro-Soviet Heng Samrin sebagai perwakilan Kamboja di PBB. Soviet juga mengatakan bahwa pemerintah Soeharto melakukan pembayaran kembali sebanyak USD2 miliar dari periode Sukarno, dengan syarat Soviet menerima kedaulatan Indonesia di Timor.¹¹⁹

218. Kebijakan luar negeri Soviet berubah haluan ketika Mikhail Gorbachev diangkat menjadi presiden pada Maret 1985. Ia lebih menekankan penyelesaian konflik melalui negosiasi daripada kekuatan, yang dengan demikian seharusnya lebih berpihak pada Timor-Leste. Tetapi karena jauhnya Timor dari fokus Uni Soviet, dan pentingnya hubungan dengan Indonesia, Soviet justru menentang kebijakannya sendiri. Presiden Soeharto berkunjung ke Moskow pada September 1989 dan Indonesia meringankan larangan-larangan terhadap perdagangannya dengan Soviet, dan kunjungan ke Soviet itu menghasilkan kemajuan ekonomi yang lebih kuat.

219. Pecahnya Uni Soviet pada 1991, dan pembebasan “negara-negara tahanan”-nya, merupakan sumber inspirasi bagi Resistansi Timor-Leste. Dorongan semangat juang tidak datang dari keinginan untuk melihat disintegrasi Indonesia, tetapi karena hal ini mendemonstrasikan bahwa *status quo* dapat diubah bahkan ketika ada kekuatan besar yang terlibat. Hal ini sangat berarti bagi peningkatan semangat rakyat Timor yang telah menjadi sasaran indoktrinasi dari semua pihak bahwa penentuan nasib sendiri bagi rakyat kecil adalah sia-sia.* Dalam pidato-pidato ketika itu yang menitikberatkan bahwa tidak ada yang tidak dapat diubah, José Ramos-Horta sering bercerita tentang kosmonot Soviet yang kepulangannya ke Bumi harus ditunda karena tempat pendaratan yang telah ditunjukkan oleh bagian kontrol misi tidak lagi menjadi bagian Uni Soviet.

220. Dukungan Rusia atas Jajak Pendapat 1999 yang diatur oleh PBB serta dukungan terhadap Interfet terkesan sangat kritis mengingat wewenang vetonya dalam Dewan Keamanan. Dukungan ini diberikan agar memungkinkan Timor-Leste menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri, yang telah diperjuangkan sejak beberapa dekade yang lalu oleh Uni Soviet.

* Indonesia menyatakan dalam sebuah publikasi pada 1980 bahwa: “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu memisahkan bangsa Timor Timur dari Indonesia.” Departemen Penerangan Republik Indonesia, *The Province of East Timor: Development in Progress*, hal. 8.

Inggris

221. Inggris adalah Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutu dekat Portugal dan Indonesia, berdasarkan sejarah panjang hubungan dengan bangsa-bangsa ini sejak beberapa ratus tahun lalu. Namun selanjutnya pemerintah Inggris menunjukkan perhatian yang terbatas saja atas isu Timor-Leste, selama hampir 40 tahun sejarah dekolonisasi wilayah ini.

222. Aliansi Inggris dan Portugal berlangsung selama 600 tahun, dan Inggris tidak aktif mempertanyakan kegagalan rezim Salazar untuk membangun atau mendekolonisasi Timor Portugis berdasarkan Piagam PBB. Inggris menyatakan abstain ketika Sidang Umum PBB mengesahkan deklarasi tentang dekolonisasi dan menggolongkan Timor sebagai wilayah tak berpemerintahan sendiri pada 1960. Inggris juga menyatakan abstain pada 1964, ketika Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi mengecam Portugal karena lalai menjalankan resolusi-resolusi Sidang Umum dan Dewan Keamanan sejak tiga tahun sebelumnya.¹²⁰

223. Menyusul keputusan dekolonisasi Portugal pada 1974, para pejabat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melaporkan perkembangan-perkembangan kepada pemerintah di London. Seorang pejabat kedutaan mengunjungi wilayah ini pada Juli 1975, dan berdasarkan laporannya, Duta Besar Inggris, John Archibald Ford, membuat rekomendasi berikut bagi Foreign and Commonwealth Office (FCO) di London:

Meskipun tanpa intervensi dari Uni Soviet atau Cina, wilayah tersebut berpotensi menjadi semakin sulit diatur, dan argumentasi untuk penggabungannya dengan Indonesia semakin kuat...Tentu saja bila dipandang dari segi ini, adalah menguntungkan bagi Inggris apabila wilayah Timor diserap ke dalam wilayah Indonesia secepat dan setenang mungkin. Dan apabila masalah ini memuncak dan dipermasalahkan di PBB, sebaiknya kita diam-diam saja dan menghindari melawan pemerintah Indonesia.*

224. Kedutaan Besar Australia memperkuat pendekatan Inggris. Dalam surat rahasia ke Canberra tertanggal 21 Juli 1975, seorang pejabat menulis:

Pandangan Kedutaan Besar Inggris...menarik...Mereka tahu apa yang pasti akan terjadi, dan mereka menempatkan kepentingan jangka panjang mereka di Indonesia. Mereka ingin berada pada jarak kejauhan yang nyaman.¹²¹

225. Pada Oktober, Australia memastikan kepada pemerintah Inggris bahwa Presiden Soeharto telah memutuskan intervensi militer. Duta Besar Ford melaporkan hal ini ke London:

* 21 Juli 1975, dikutip oleh Duta Besar Australia, Richard Woolcott. Brian Toohey dan Marian Wilkinson di *The Book of Leaks*, Angus and Robertson, London, 1987, hal. 176. Ford adalah duta besar Inggris ke Indonesia 1975-1978.

Kedutaan Besar Australia kini telah memastikan (tetapi meminta kita tidak membalas komunikasi ini ke mereka di Canberra atau memberi tahu yang lain) bahwa Presiden Soeharto telah mengesahkan operasi klandestin (termasuk penggunaan kapal dan pesawat terbang) ... Tujuannya adalah pengepungan total Dili sebelum 15 November.¹²²

226. Suratnya diakhiri dengan rekomendasi lebih lanjut tentang keterlibatan:

Duta Besar Amerika Serikat saat santap malam dengan Sir Michael Palliser pada 21 Oktober berkata bahwa Timor ada pada urutan tinggi dalam daftar Kissinger mengenai tempat-tempat di mana AS tidak ingin berkomentar atau terlibat. Saya yakin kita harus terus mengikuti sikap Amerika.¹²³

227. Rekomendasinya diterima oleh Menteri Luar Negeri Pemerintahan Partai Buruh, James Callaghan.*

228. Pemerintah Inggris tidak melakukan tindakan atas kematian wartawan Malcolm Rennie dan *cameraman* Brian Peters dari stasiun televisi Nine Network, keduanya warga negara Inggris, di Balibó pada 16 Oktober 1975.¹²⁴ Pada 24 Oktober Duta Besar Ford menginformasikan ke pemerintah Inggris bahwa:

Kami mengerti bahwa para wartawan terbunuh, hampir pasti karena mereka kurang berhati-hati, selama serangan oleh pasukan Indonesia/UDT, dan bahwa jasad mereka dibuang oleh komandan setempat, mungkin dibakar ... Karena tidak ada protes apapun yang mampu mengembalikan jenazah para wartawan tersebut, saya sarankan agar kita menghindari tuntutan kepada pihak Indonesia. Mereka berada di dalam zona perang atas pilihan mereka sendiri.¹²⁵

229. Kebijakan Inggris menanggapi pengambilan paksa Timor Portugis oleh Indonesia dilaporkan ke Canberra oleh Komisi Tinggi Australia (Australian High Commission) di London:

Male (*Deputy Under-Secretary*, FCO) hari ini mengatakan bahwa seandainya Indonesia mengambil Timor dengan menggunakan kekerasan, pemerintah Inggris sebaiknya bertahan dari tekanan yang tentu saja akan berkembang dengan pesat di sini, untuk bukan sekadar mengutuk Indonesia secara lisan, tetapi juga untuk mengambil tindakan lebih drastis seperti menghentikan semua bantuan. Untuk menanggulangi tekanan tersebut, pemerintah Inggris perlu mengeluarkan pernyataan dengan cepat pada waktunya untuk (a) menekankan sikap kesabaran dan ketabahan di pihak

.....
* Callaghan adalah Sekretaris Departemen Luar Negeri pada 1975 - 1976, lalu Perdana Menteri pada 1976 - 1979

Indonesia dalam menghadapi masalah ini, (b) menyangkal bahwa isu Timor, meskipun secara marginal, merupakan masalah Inggris, dan (c) mengatakan bahwa negara-negara di wilayah yang memiliki alasan yang kuat untuk memperhatikan Timor, tidak merasa terlalu terganggu oleh perkembangan situasi.¹²⁶

230. Keputusan Inggris untuk tetap “bersikap *low profile*” sebagian besar didikte oleh kepentingan yang dikaitkannya pada kepentingan perdagangan jangka panjang di Indonesia. Hal ini mengacu kembali ke abad ke-17 dan ke-18, ketika English East India Company bersaing dengan VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) untuk menguasai perdagangan rempah di kepulauan ini. Pada awal abad ke-20, investasi Inggris di Hindia Belanda berada di urutan kedua setelah Belanda. Inggris memimpin Pos Komando Sekutu di wilayah ini selama Perang Dunia Kedua, mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda di Jawa, kemudian membantu mediasi antara Belanda dan Indonesia sebelum kemerdekaan. Hubungan memburuk pada awal 1960-an ketika Sukarno menentang rencana Inggris untuk Singapura dan Malaysia. Soeharto segera mengakhiri kebijakan konfrontasi Sukarno, dan memperbaiki hubungan politik dengan menerima kunjungan Ratu Elizabeth II pada 1974. Deregulasi pada 1980-an memungkinkan masuknya banyak perusahaan terbesar Inggris, dan Inggris sekali lagi menjadi investor kedua terbesar di Indonesia.¹²⁷

231. Kepada pemerintahan Inggris di London, Duta Besar Ford memberitahukan pandangannya bahwa tindakan Indonesia dibenarkan atas dasar keamanan. Dalam memo rahasia setelah invasi tersebut, ia menulis:

Dugaan saya adalah apabila Indonesia mengizinkan Fretilin mendirikan pemerintahan yang bermusuhan di Timor-Leste, dan menjadikan Timor-Leste sebagai rumah bagi para pembangkang dari Maluku dan pulau-pulau bagian luar lainnya, hal ini akan jauh lebih merugikan. Saya kira Indonesia sebenarnya membeli keamanan dengan harga yang pantas, meskipun sebenarnya dapat memperolehnya dengan cara yang lebih murah apabila Indonesia lebih efisien.¹²⁸

232. Pada Februari 1976, bertentangan dengan Menteri Inggris, Lord Goronwy-Roberts, Departemen Luar Negeri mengusulkan pertemuan dengan José Ramos-Horta:

Adalah kebijakan Kerajaan Inggris untuk sedapat mungkin menghindari keterlibatan dalam isu Timor. Peranan kami di PBB terutama untuk menegaskan kembali dukungan kami terhadap prinsip penentuan nasib sendiri. Pada akhir November, kami memutuskan untuk tidak mengakui Deklarasi Kemerdekaan Fretilin. Menerima kunjungan Ramos-Horta berarti (a) Inggris menunjukkan perhatian yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya; (b) memberi semacam pengakuan pada eksistensi “pemerintahan” Fretilin yang

lebih tinggi daripada sebelumnya; (c) akan berpotensi merusak hubungan kami dengan Indonesia—hubungan yang telah cukup tegang karena dukungan kami terhadap resolusi Dewan Keamanan yang baru-baru ini.¹²⁹

233. Pada waktu yang sama, para wakil Inggris mendukung aspek-aspek kampanye Indonesia, dengan cara mengadakan pertemuan dengan dan memberi saran kepada para pejabat Indonesia tentang penanganan persoalan ini. Duta Besar Ford melaporkan pada Januari 1976:

Saya memberitahu mereka [para pejabat Indonesia] bahwa kami telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia di PBB dan saya yakin kami telah berhasil mengatur meredakan pembicaraan tentang persoalan Timor di New York.¹³⁰

234. Berita kawat tersebut berlanjut dengan melaporkan saran Duta Besar tentang bagaimana menanggapi laporan-laporan kekejaman yang muncul akibat invasi Indonesia. Berita-berita kawat lainnya mengecam tindakan tak pantas dan kaku yang dilakukan Indonesia, bukan berdasarkan keprihatinan terhadap Timor, tetapi karena inkompetensi semacam itulah yang membuat Inggris dan negara-negara lain lebih sulit membela Indonesia.

235. Berdasarkan kebijakan *low-profile*-nya, pemerintah Inggris bersikap abstain terhadap semua resolusi Sidang Umum mengenai masalah Timor-Leste antara 1975 dan 1982. Inggris mendukung Resolusi 384 (1975) dan 389 (1976) Dewan Keamanan PBB, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri Timor-Leste dan meminta Indonesia menarik pasukannya. Pada 22 April 1976, wakil Inggris, Murray, memberitahu Dewan Keamanan bahwa Inggris menyatakan setuju terhadap Resolusi 389 “karena kami sangat menganggap penting prinsip penentuan nasib sendiri.”¹³¹ Ia juga menyatakan bahwa Inggris tidak menganggap tindakan penentuan nasib sendiri telah dilakukan di Timor-Leste, karena tidak terpenuhinya tiga syarat penting: perdamaian dan ketertiban, ketiadaan tekanan dari pasukan asing, dan tata cara yang tepat.

236. Sejalan dengan kebijakan ini, Inggris tidak mengakui “tindakan penentuan nasib sendiri” yang diatur Indonesia dan dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Timor Timur di Dili pada 31 Mei 1976. Kemungkinan diundang ke Dili untuk menghadiri acara tersebut menimbulkan kekhawatiran yang amat sangat di antara para diplomat negara-negara Barat di Jakarta, yang enggan mengakui apa yang mereka ketahui sebagai proses palsu. Seorang pejabat dari Foreign Office menulis:

Tujuan Indonesia adalah untuk memperoleh tampilan yang tampak terhormat atas pengambilalihan Timor Timur secara cepat, dengan cara mengaitkan pihak asing yang terkemuka pada “tindakan pilihan”.¹³²

237. Agar tidak mengecewakan pemerintah Indonesia, Duta Besar Ford memilih memberitahu para pejabat mereka bahwa ia ada acara lain hari itu. Ketika pemerintah Indonesia mengirim undangan lain yang meminta peransertanya dalam suatu misi untuk mengesahkan dukungan rakyat bagi petisi integrasi tersebut, Sekretaris Departemen Luar Negeri Inggris, Anthony Crosland, menambahkan alasan lain untuk menjauhkan Inggris dari hubungan apapun dengan proses tersebut:

Karena alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan kita di Kepulauan Falkland, Belize, dan Gibraltar, kita menganggap penting mempertahankan prinsip keterlibatan PBB dalam penegakan penentuan nasib sendiri. Kami sangat terdorong, karenanya, untuk meminta Anda menolak undangan tersebut.¹³³

238. Pemerintah Inggris menegaskan kembali pengakuannya atas hak penentuan nasib sendiri Timor dalam beberapa kesempatan. Dalam pernyataannya kepada Komite Keempat Sidang Umum pada 1982, wakil Inggris menegaskan dukungan pemerintahnya bagi prinsip tersebut, dan kemudian menyatakan bahwa Portugal dan Indonesia “sendiri dapat menyelesaikan permasalahan ini” dan bahwa Inggris, sebagai teman kedua negara tersebut, berharap hal ini dapat dilaksanakan sesuai kehendak rakyat Timor-Leste.¹³⁴ Pada 1992, Pemerintah Inggris mengulangi komitmen ini dalam konteks usaha Sekretaris Jenderal PBB untuk penyelesaian masalah ini. Baroness Trumpington mengatakan kepada House of Lords 16 Juli 1992:

*Kerajaan Inggris belum mengakui aneksasi atas Timor-Leste, begitu pula masyarakatnya. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah mengakuinya. Kami sangat yakin bahwa masa depan Timor-Leste paling baik diselesaikan melalui hubungan bilateral antara pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Portugal dan Indonesia. Usaha-usaha Sekretaris Jenderal PBB untuk mempertemukan mereka dengan tujuan mencapai penyelesaian, pantas menerima dan mendapat dukungan kita.*¹³⁵

239. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah Inggris memisahkan masalah Timor dari hubungan bilateralnya dengan Indonesia, sambil tetap membiarkan terbukanya kemungkinan penentuan nasib sendiri, bilamana timbul kesempatan. Inggris mempertahankan bantuan penting dan program kerjasama militer dengan Indonesia selama pendudukan Indonesia atas Timor-Leste. Pemerintah Inggris mengungkapkan kepeduliannya atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, antara lain pada waktu pembantaian Santa Cruz pada 1991, tapi berpendapat bahwa dialog akan menghasilkan lebih daripada sekadar mengambil “langkah-langkah mudah, seperti menghapus bantuan.”¹³⁶ Seruan untuk memasukkan situasi hak asasi manusia di Indonesia dan Timor-Leste dalam agenda konsorsium bantuan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), ditolak.

240. Indonesia hanya memiliki industri senjata yang kecil dan harus mengimpor sebagian besar peralatan militernya. Inggris menjadi pemasok utama senjata

selama pendudukan Timor-Leste, dan dalam periode 1994 - 2004 sebagian besar peralatan militer Indonesia datang dari Inggris.¹³⁷ Sebagian besar perdagangan ini dilaksanakan setelah perlombaan senjata internasional yang berkaitan dengan Perang Dingin berakhir. Pemerintah Inggris menyetujui izin ekspor bagi perusahaan-perusahaan Inggris untuk menjual macam-macam senjata ke Indonesia, antara lain pesawat tempur dan kapal perang, kendaraan bersenjata, senapan kaliber besar dan kecil, amunisi, bom, roket, misil, sarana pengendali kerusakan, dan peralatan untuk pelatihan militer. Para pejabat senior militer Indonesia juga dilatih di lembaga-lembaga militer Inggris.

241. Pemerintah Inggris mempertahankan hubungan militer dengan Indonesia. Baroness Trumpington of Sandwich mengatakan kepada House of Lords pada 1992 bahwa Indonesia berhak mempertahankan kemerdekaannya; bahwa pelatihan militer oleh Inggris meningkatkan penghormatan bagi demokrasi dan hak-hak asasi manusia; dan bahwa pengajuan izin ekspor peralatan militer akan ditolak, apabila diduga peralatan militer tersebut digunakan untuk tindakan represi. Baroness Trumpington of Sandwich menyatakan:

*Kami tidak percaya bahwa peralatan militer Inggris yang pernah dijual kepada Indonesia telah dipakai untuk melawan rakyat Timor-Leste.*¹³⁸

242. Atase Militer Kedutaan Besar Indonesia di London mengakui pada 1999, bahwa kendaraan bersenjata Saracen dan Saladin buatan Inggris digunakan di Timor-Leste.* Kelompok Resistansi Timor menyatakan bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan pesawat penyerang Hawk yang dipasok Inggris, khususnya pada puncak peperangan pada 1978-1979. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyatakan kepada Komisi pada Juli 2003, bahwa delapan pesawat Hawk dipasok kepada Indonesia pada 1978; tetapi pihak kedutaan mengatakan bahwa pesawat-pesawat tersebut adalah model-model yang lebih tua, yang hanya sesuai untuk pelatihan bukannya pertempuran udara ke darat. Baik pemerintah Inggris maupun British Aerospace (BAe) menyangkal penggunaan pesawat-pesawat tersebut untuk kegiatan militer membasmi kelompok Resistansi.† Masalah ini menimbulkan kontroversi di Inggris, khususnya setelah pemerintah Inggris mengizinkan penjualan lebih lanjut pada tahun 1990-an. (Lihat segmen 7.6.2 dalam bab ini mengenai masyarakat sipil internasional).

* 29 Januari 1999. Mark Thomas Show, Channel 4. Hendro Subroto melaporkan bahwa panserintai Ferret Mk.2, kendaraan pengangkut pasukan VF 603 Saracen, dan kendaraan VF 601 Saladin (lengkap dengan senapan 76 mm) digunakan pada invasi Indonesia 1975. Eyewitness to Integration of East Timor, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

† Pada Desember 1995, Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta melaporkan tuduhan bahwa pesawat tempur Hawks digunakan untuk serangan pengeboman terhadap Fretilin pada awal 1995. Atase Militer Inggris dan teknisi yang membantu merawat pesawat tersebut memeriksa buku catatan (log book) mencari bukti bahwa terjadinya pengeboman tetapi hasilnya negatif. Selandia Baru, OIA Material, Volume 4, 13 Desember 1995.

243. Apakah peralatan militer buatan Inggris digunakan dalam pelanggaran tertentu di Timor-Leste atau tidak, pemberian bantuan militer ini membantu Indonesia meningkatkan kemampuan militernya dan memberikan kesempatan bagi pasukan bersenjata Indonesia untuk menggunakan peralatan lain di Timor-Leste. Lebih penting lagi, kebijakan bantuan militer bagi Indonesia oleh kekuatan Barat utama dan anggota Dewan Keamanan, menjadi tanda dukungan politik yang mendasar bagi pihak penyerang dalam konflik ini, dan menyakitkan serta membingungkan orang Timor yang mengetahui dukungan yang diutarakan Inggris bagi penentuan nasib sendiri. Pada Mei 1976, Duta Besar Inggris untuk Jakarta saat itu, John Ford, berpendapat bahwa Timor-Leste terlalu terbelakang untuk tindakan penentuan nasib sendiri gaya Barat. Masyarakat Timor-Leste berhak mempertanyakan apa yang begitu beradab dari Inggris dalam dukungannya terhadap agresi Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung.¹³⁹

244. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Departemen Luar Negeri, Robin Cook, pemerintahan Partai Buruh Inggris sedikit memperbaiki tindakannya, dengan mendukung secara aktif perundingan yang mencapai puncaknya pada tindakan penentuan nasib sendiri Timor-Leste pada Agustus 1999. Jamsheed Marker, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste, menyampaikan penghargaan kepada Duta Besar Inggris untuk PBB, Stewart Eldon, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Robin Christopher, atas kontribusi mereka bagi kelompok inti negara-negara yang bekerjasama dengan proses PBB. Duta Besar Christopher menampung Xanana Gusmão di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta setelah ia dibebaskan dari tahanan pada September 1999. Baik sebagai Sekretaris Departemen Luar Negeri Inggris maupun sebagai wakil Uni Eropa, Robin Cook berperan dalam keputusan yang diambil pada pertemuan APEC di Auckland pada 9 September 1999, tentang mendesaknya keberadaan pasukan internasional untuk mengembalikan ketenteraman di Timor setelah pemungutan suara. Pada 11 September, Jeremy Greenstock, wakil Inggris di Dewan Keamanan, mengunjungi Timor sebagai bagian dari misi Dewan Keamanan yang mendahului pasukan internasional, dan menggambarkan Dili sebagai “neraka di bumi”. Inggris mengikutkan pasukan Gurkha dan mendanai pasukan Interfet.

Amerika Serikat (AS)

245. Amerika Serikat, yang dahulu juga wilayah jajahan, adalah arsitek utama dan salah satu negara pendiri PBB pada 1945 se usai Perang Dunia Kedua, dan anggota tetap Dewan Keamanan serta negara adikuasa. Nama ‘United Nations’ (Perserikatan Bangsa-Bangsa) digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Pendahulunya, Liga Bangsa-Bangsa, didirikan dalam situasi yang serupa setelah Perang Dunia Pertama (1914 - 1918). Berdirinya lembaga tersebut bermula dari reaksi terkejut Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, bahwa suatu peradaban maju dapat terlibat dalam kekejaman dan kehancuran yang ekstrem yang mewarnai perang akbar tersebut. Dalam pidato ‘Empatbelas Butir’-nya yang tersohor pada 1918, Presiden Wilson memaparkan hal-hal yang ia anggap sebagai premis

dasar bagi penyelesaian konflik secara damai. Selain tentang pembentukan suatu perserikatan bangsa-bangsa, di dalamnya juga terkandung rumusan awal mengenai prinsip penentuan nasib sendiri yang kemudian diadopsi dalam Piagam PBB.*

246. Amerika Serikat tidak mendukung Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Jajahan oleh PBB pada 1960, tetapi kemudian mengubah pendiriannya pada 1961 dan mengakui Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dengan hak menentukan nasib sendiri.

247. Kebijakan Amerika Serikat semakin berkembang selama masa ini, sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran akan terjadinya pertikaian antara Portugal dengan Indonesia atas wilayah tersebut. Seperti Australia, Amerika Serikat pun khawatir jika penolakan Perdana Menteri Salazar terhadap tuntutan PBB untuk dekolonisasi akan memancing campurtangan Presiden Sukarno atas nama anti-imperialisme. Untuk menghindari terjadinya peperangan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengusulkan agar Amerika Serikat mengajukan masalah tersebut kepada Komite Dekolonisasi PBB, dan menentang segala kemungkinan penggunaan kekuatan oleh Indonesia dengan alasan bahwa kekuatan tidak dapat dibenarkan dalam hal kegagalan dekolonisasi Portugal dan akan merugikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen kebijakan Departemen Luar Negeri 1963 menyatakan:

Satu kegagalan tidak dapat membenarkan kegagalan yang lain... Kita jangan memandang tindakan Indonesia semacam itu sebagai babak kedua dalam sebuah drama yang dimulai dengan Goa dan akan berakhir dengan kematian PBB... Kita tidak dapat membiarkan upaya apapun untuk menguasai wilayah dengan menggunakan kekuatan. Tindakan demikian akan menjadi pelanggaran terhadap berbagai kewajiban dalam Piagam PBB yang telah disetujui oleh Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kita harus menentang Indonesia secara diplomatik dan di dalam PBB.¹⁴⁰

248. Departemen Luar Negeri juga mengemukakan pandangan bahwa Timor Portugis tidak mampu menjalankan penentuan nasib sendiri dan harus bergabung dengan Indonesia:

Kita dan Portugis harus mengakui bahwa penentuan nasib sendiri untuk Timor Portugis tidak ada artinya untuk jangka waktu yang tidak menentu ke depan... Secara realistis, hanya satu masa depan yang mungkin bagi wilayah itu, yaitu sebagai bagian dari Indonesia.¹⁴¹

* Butir ke-5 dari pidato *Fourteen Points* Presiden Wilson mengacu kepada klaim kolonial dan perlunya "ketaatan yang kuat terhadap prinsip bahwa dalam menentukan semua masalah kedaulatan semacam itu, berbagai kepentingan dari penduduk setempat juga harus dipikirkan secara seimbang". Butir-butir yang lain mencakup perlunya pengurangan persenjataan oleh negara-negara "sampai pada titik terendah yang memungkinkan bagi keamanan dalam negeri".

Garis-garis besar kebijakan ini tidak sampai perlu dilaksanakan karena pertikaian yang diperkirakan ternyata tidak terjadi. Analisis pesimistis Departemen Luar Negeri AS mengenai terbatasnya pilihan bagi Timor pada waktu itu dapat dipahami, melihat penolakan rezim Salazar mempersiapkan wilayah tersebut untuk merdeka. Namun, ketika isu tersebut kembali mengemuka satu dekade kemudian, pandangan bahwa satu-satunya pilihan bagi Timor adalah berintegrasi dengan Indonesia menjadi—bersama dengan faktor-faktor Perang Dingin—penentu kebijakan dominan yang mengalahkan semua pertimbangan lain. Berbagai rekomendasi lain yang digagas pada 1960-an secara efektif diabaikan sampai berakhirnya Perang Dingin di akhir 1980-an.

249. Gary Gray, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS, memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa kebijakan AS mengenai Timor-Leste sejak 1974 secara signifikan dibentuk oleh situasi global dan regional masa itu, dan oleh keinginan pihak Indonesia dan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan mereka, karena semakin meluasnya pengaruh komunis di kawasan Indocina. Ia mengatakan:

Seseorang dapat melihat 1975 sebagai puncak kekuasaan komunis di dunia, dan persepsi ancaman bagi Amerika Serikat dan ancaman bagi apa yang pada waktu itu disebut dunia bebas [free world]... rezim-rezim komunis didirikan di Laos, Kamboja, dan Vietnam pada Maret dan April 1975, pemberontakan aktif komunis masih mewabah di Thailand dan Malaysia, dan konsep adanya ancaman komunis besar-besaran terhadap Asia Tenggara dan teori domino masih tetap diyakini. Pada waktu yang bersamaan, terjadi kesepakatan yang kuat di Washington bahwa Indonesia sebagai pengimbang antikomunis sangat penting untuk melawan ekspansi komunis di Asia, baik di kawasan tersebut maupun di dalam Indonesia sendiri.¹⁴²

250. Hubungan saling menguntungkan bagi kepentingan setiap negara ini sudah terjalin baik sejak awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan ditekankan di tingkat kepemimpinan tertinggi. Hal ini mencakup dukungan Amerika Serikat untuk pengambilalihan Irian Barat oleh Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat di sana pada 1969.* Dalam memo kepada Presiden Gerald Ford pada September 1974, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger,

* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyatakan pada Juli 1969: "Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat terjadi seperti sebuah cerita tragedi Yunani, akhirnya sudah diperkirakan. Tokoh jahat yang utama, Pemerintah Indonesia, tidak dan tidak akan pernah mengizinkan penyelesaian lain selain memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Kegiatan penentangan mungkin meningkat, tapi Angkatan Bersenjata Indonesia akan mampu membendung, dan jika perlu, memberantasnya." Presiden Nixon berkunjung ke Indonesia pada waktu Penentuan Pendapat Rakyat baru saja selesai. Penasihat Keamanan Nasionalnya, Henry Kissinger, mengatakan kepadanya: "Anda harus memberitahu (Soeharto) bahwa kita memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat". Brad Simpson (ed.), *Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"*, dikirim 9 Juli 2004, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/index.htm>, pada Juli 2005. Kissinger menjadi direktur dan pemegang saham di perusahaan tambang emas dan tembaga AS Freeport McMoran setelah perusahaan itu memenangi konsesi di Irian Barat pada 1967.

merekomendasikan agar Ford bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik “untuk meyakinkan Pemerintah Soeharto bahwa Anda menganggap Indonesia sangat penting sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Timur, dan bahwa Anda berniat terus memberikan bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat untuk Indonesia”.¹⁴³ Pengarahan tersebut selanjutnya menggariskan “pentingnya Indonesia secara strategis bagi kita” dalam arti geografis, jumlah penduduk, sumberdaya alam, dan peran konstruktif di kawasan, baik di Vietnam maupun di ASEAN sebagai penyeimbang tekanan-tekanan dari Uni Soviet dan Cina. Sementara itu, Presiden Soeharto menginginkan menteri luar negerinya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yang baru, agar menyampaikan kepadanya harapan Presiden Soeharto untuk membangun hubungan personal yang akrab, mengundangnya untuk mengunjungi Indonesia dan memberikan bantuan militer dan ekonomi. Kedua presiden tersebut bertemu dua kali pada 1975: pada Juli ketika Presiden Soeharto mengunjungi Amerika Serikat, dan pada Desember ketika Presiden Ford mengunjungi Indonesia.*

251. Pemerintah Amerika Serikat mengetahui rencana-rencana Indonesia untuk memasukkan Timor-Leste ke dalam wilayahnya. Setidaknya sejak Februari 1975, Pemerintah Amerika Serikat juga mengetahui bahwa ada kemungkinan digunakannya kekuatan, dan hal ini berarti akan melibatkan penggunaan perlengkapan militer yang dipasok oleh Amerika Serikat. Sebagai contoh, para pejabat Amerika Serikat sepakat bahwa latihan militer gabungan Indonesia yang dilaksanakan di Lampung, Sumatra Selatan, pada 11 Februari 1975, hampir pasti merupakan bagian dari persiapan untuk menguasai Timor. Mengomentari latihan tersebut, Konsulat Amerika Serikat di Surabaya menulis:

Saya dan atase politik Zingsheim terkesima dengan kesamaan kondisi lapangan dan gaya latihan ini, dengan yang akan dilibatkan dalam operasi Indonesia untuk menguasai Dili. Latihan itu meliputi pengepungan vertikal landasan pacu Branti, serangan amfibi terhadap daerah pantai terdekat, dan gempuran dari laut dan udara... dan pengerahan pasukan penerjun payung di wilayah musuh.†

* Diklaim bahwa faktor penting dalam keputusan Amerika Serikat untuk mendukung pengambilalihan Timor oleh Indonesia adalah jaminan bahwa selat laut dalam antara Timor dan Wetar tetap berada di tangan negara sahabat, karena selat tersebut dapat digunakan untuk jalur lintas tanpa hambatan antara Samudera Pasifik dan Hindia bagi kapal-kapal selam nuklir Amerika Serikat. Lihat Michael McGuire *The Geopolitical Importance of Strategic Waterways in the Asian-Pacific Region*, Orbis, Vol.19, No.3, Edisi Musim Gugur 1975, hal. 1058-76 dan Michael Richardson, “Jakarta rules the way: why Indonesian goodwill is vital to America’s Indian Ocean submarine force”, *The Age*, 4 Agustus 1976. CAVR belum bisa memperolehi kepastian mengenai klaim ini. Namun, jelas bahwa Amerika Serikat khawatir dukungan Pemerintah Soeharto untuk “prinsip kepulauan” dalam berbagai negosiasi mengenai hukum laut akan membatasi transit Amerika Serikat melalui kepulauan tersebut. Lihat memo Menteri Luar Negeri Henry Kissinger untuk Presiden Ford, 21 November 1975. Dokumen 124 Dokumen Terdeklasifikasi National Security Archives.(NSA)

† Konsulat Amerika Serikat Surabaya, 20 Februari 1975. Dokumen 23 NSA. Kapal-kapal yang digunakan dalam latihan dilabuhkan di Surabaya dan pasukan tentara berasal dari Malang di Jawa Timur

252. Indonesia pada waktu itu menyangkal bahwa latihan itu ada hubungannya dengan Timor, tapi invasi ke Dili sepuluh bulan kemudian mengikuti pola yang dipaparkan di atas. Dalam dua kesempatan tersebut, gempuran terhadap garis pantai dilakukan dengan menggunakan kapal perang yang dipasok Amerika Serikat, KRI Martadinata. Hubungan kawat antara para pejabat Australia dan Amerika Serikat pada waktu itu mengungkapkan kekhawatiran bahwa perebutan Timor-Leste dengan kekuatan yang menggunakan peralatan Amerika Serikat dan Australia akan merusak hubungan dengan Indonesia.¹⁴⁴

253. Pada masa itu juga, pemimpin oposisi Selandia Baru, Robert Muldoon, berkunjung ke Jakarta, dan diberi penjelasan mengenai Timor oleh para pemimpin Indonesia. Kedutaan Amerika Serikat melaporkan ke Washington:

Sikap yang diambil oleh Suharto dan [Adam] Malik dengan Muldoon memperkuat dugaan bahwa Pemerintah Indonesia telah memutuskan memasukkan Timor-Leste ke dalam wilayahnya, meletakkan dasar politik untuk suatu pengambilalihan, dan mengharapkan bahwa negara-negara sahabat akan menemukan cara untuk tidak menentang tindakan ini.^{*}

254. Menanggapi penyelidikan Dewan Keamanan Nasional AS pada Maret 1975 mengenai kebijakan yang akan diambil jika Indonesia menggunakan kekuatan di Timor-Leste, Menteri Luar Negeri Kissinger menyetujui kebijakan non-aksi. Penyelidikan tersebut juga mencakup rekomendasi dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, David Newsom, yang mendukung non-aksi:

Duta Besar Newsom telah merekomendasikan kebijakan umum untuk tidak bertindak. Ia memberi alasan bahwa kita memiliki kepentingan yang besar di Indonesia dan tidak memiliki kepentingan di Timor-Leste. Jika kita mencoba membujuk Indonesia untuk tidak melakukan apa yang Suharto [sic] anggap sebagai penggunaan kekuatan yang perlu, hal ini bisa menimbulkan kesulitan besar dalam hubungan kita.¹⁴⁵

255. Kebijakan ini diterapkan dalam pertemuan tingkat tinggi Ford – Soeharto di Camp David pada 5 Juli 1975. Menteri Luar Negeri Kissinger tidak menyinggung Timor Portugis dalam arahan yang diberikannya untuk Presiden Ford sebelum pertemuan tersebut, dan selama pertemuan itu Amerika Serikat tidak mengemukakan

* Kedutaan AS di Jakarta, 25 Februari 1975. Dokumen 28 NSA. Berdasarkan komunikasi AS: "Adam Malik mengatakan kepada Muldoon bahwa pemerintahan Timor Portugis dipengaruhi komunis dan bahwa orang-orang Timor prokemerdekaan telah menawarkan pangkalan-pangkalan kepada Uni Soviet dan RRC sebagai balasan atas dukungan untuk gerakan kemerdekaan. Malik mengatakan bahwa para pengungsi melintasi perbatasan ke wilayah Indonesia untuk menghindari teror oleh kaum kiri di Timor Portugis... Soeharto mengatakan bahwa, karena situasi serius di Timor, Pemerintah Indonesia berharap negara-negara sahabat seperti Australia dan Selandia Baru 'akan memahami' posisi Indonesia, yang diartikan oleh Pemerintah Selandia Baru sebagai permintaan agar Selandia Baru 'memahami' kemungkinan pengambilalihan Timor Portugis oleh Indonesia."

isu tersebut atau memperingatkan Indonesia tentang penggunaan kekuatan atau peralatan Amerika, meski Presiden Soeharto memberikan kesempatan ketika ia dengan sukarela mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan. Sebagai tanggapan atas penjelasan Presiden Soeharto mengenai isu tersebut, Presiden Amerika Serikat membatasi diri untuk bertanya apakah Portugal telah menentukan tanggal bagi rakyat Timor Timur untuk memilih. Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Presiden Amerika mengumumkan paket bantuan militer untuk Indonesia.

256. Melalui jalur-jalur diplomatik, para pejabat Amerika Serikat menyampaikan kepada Indonesia bahwa AS memilih integrasi secara damai melalui penentuan nasib sendiri dan mengemukakan kekhawatirannya bahwa penggunaan kekuatan dan peralatan militer AS akan menimbulkan reaksi menentang di Kongres dan merugikan hubungan kedua negara.¹⁴⁶ Namun, kebijakan resmi adalah untuk tetap tampak tidak terlibat dan tidak terlalu peduli. Ketika diberitahu pada 8 Oktober 1975 bahwa Indonesia telah memulai operasi militer di Timor, Menteri Luar Negeri Kissinger menanggapi:

*Saya berasumsi Anda akan tetap menutup mulut mengenai hal ini... mengenai Indonesia. Juga di PBB... pastikan bahwa utusan AS tidak akan membuat pernyataan apapun.*¹⁴⁶

257. Pada 5 Desember 1975, menanggapi berbagai serangan yang dilakukan oleh Indonesia pra-invasi, Presiden Fretilin dan Republik Demokratik Timor-Leste yang baru diproklamasikan, Xavier do Amaral, mengirim telegram kilat kepada Presiden Amerika Serikat meminta AS untuk campurtangan:

Pemerintah saya percaya suara AS dapat mencegah perang yang akan menjadi perang yang panjang, berdarah, dan menghancurkan... Demi perdamaian, kami sangat memohon Anda untuk campur tangan.

258. Pemerintah AS tidak menghiraukan permohonan tersebut. Catatan Dewan Keamanan Nasional mengenai korespondensi tersebut menunjukkan bahwa pada 15 Desember surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas dengan sebuah catatan:

Tidak perlu ada tindakan. Tidak perlu dibalas—ini masalah sensitif.¹⁴⁷

259. Presiden Ford dan Soeharto kembali bertemu di Jakarta pada 6 Desember 1975, sehari sebelum invasi besar-besaran Indonesia ke Timor-Leste. Menurut catatan

.....
* Pada 20 Agustus 1975, Duta Besar Newsom mengatakan kepada Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), Letnan Jenderal Yoga Sugama: "Pemerintahan Indonesia harus waspada jika peralatan AS digunakan dalam pendudukan paksa Timor Portugis, hal ini dapat mengakibatkan diberlakukannya pasal-pasal dari Undang-Undang Bantuan Luar Negeri yang dapat membahayakan kelangsungan program bantuan militer. Karena itu, jalan keluar terbaik adalah memasukkan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia secara damai." Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 21 Agustus 1975. Dokumen 73 NSA. Pada Oktober, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Ford, Letnan Jenderal Brent Scowcroft, disarankan oleh stafnya untuk memperingatkan Ali Moertopo mengenai komplikasi politik yang akan terjadi jika peralatan AS digunakan. Dokumen 104 NSA.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pertemuan tersebut terjadi pada pukul 8 pagi, dan delegasi Amerika berangkat menuju pelabuhan udara pada pukul 10.30. Juga hadir pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kissinger, Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, Duta Besar Newsom, dan seorang jurubahasa. Sepanjang pertemuan mereka, yang terutama berpusat pada pembahasan mengenai Indocina dan membendung komunisme, Presiden Soeharto mengemukakan situasi di Timor-Leste, yang ia katakan sebagai ancaman bagi keamanan Indonesia dan kawasan setelah deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin.

260. Mengenai perbincangan tersebut, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa Presiden Indonesia mengatakan kepada delegasi Amerika:

Kami meminta pengertian Anda jika kami menganggap perlu mengambil tindakan cepat atau drastis.

261. Presiden Ford menjawab:

Kami akan mengerti dan tidak akan menekan Anda dalam hal ini. Kami mengerti masalah yang Anda hadapi dan niat yang Anda miliki.

262. Delegasi Amerika mengatakan bahwa penggunaan persenjataan buatan Amerika Serikat dapat menimbulkan masalah, dan Menteri Luar Negeri Kissinger menambahkan:

Bergantung pada bagaimana kita memahaminya: apakah ini untuk membela diri atau operasi asing. Penting bahwa apapun yang Anda akan lakukan dapat cepat selesai. Kami dapat memengaruhi reaksi di Amerika jika, apapun yang akan terjadi, terjadi setelah kami kembali. Dengan demikian, akan lebih sedikit kesempatan bagi orang-orang berbicara secara tidak resmi. Presiden akan kembali pada Senin pukul 14.00 waktu Jakarta. Kami memahami masalah Anda, dan pentingnya untuk bergerak cepat. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa akan lebih baik jika hal itu dilakukan setelah kami kembali.

263. Menteri Luar Negeri Kissinger menyampaikan pertanyaan terakhir:

Apakah Anda mengantisipasi perang gerilya yang lama di sana?

264. Presiden Soeharto menjawab:

*Kemungkinan akan ada perang gerilya kecil.**

* Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, 6 Desember 1975. Dokumen 148 NSA. Pada 1977, Pemerintahan Carter disarankan untuk menolak permintaan dari Anggota Kongres Donald Fraser untuk salinan laporan tersebut dengan alasan bahwa ini adalah hak istimewa dan akan merugikan hubungan luar negeri Amerika Serikat jika dipublikasikan. Dokumen 405 NSA.

265. Kedua pihak menghindari membuat pernyataan eksplisit mengenai intervensi militer, tetapi jelas dari pertemuan tersebut dan dari berbagai pernyataan mengenai penggunaan persenjataan Amerika Serikat dan perang gerilya, hal ini diketahui dan disetujui oleh Presiden Amerika Serikat. Dalam memberikan restunya, ia tidak menyebutkan apapun mengenai hak penentuan nasib sendiri atau dampak kemanusiaan dari perang. Setuju dengan penggunaan kekuatan juga berarti tidak menghiraukan nasihat dari para pejabat mengenai ketidaksahan penggunaan persenjataan AS, karena sebagian besar peralatan angkatan bersenjata Indonesia adalah buatan Amerika.* Indonesia tidak menghiraukan permintaan untuk menunggu: invasi mulai dilancarkan dini hari pada Minggu, 7 Desember, lebih daripada 24 jam sebelum jadwal waktu kedatangan Presiden Ford di Amerika Serikat.

266. Dalam ulasan Gedung Putih mengenai kunjungan pada 10 Desember 1975, Presiden Ford dan Menlu Kissinger tidak membuat pernyataan apapun mengenai Timor. Presiden Ford mengatakan:

*Penting untuk pergi ke sana [Indonesia] setelah kejadian di Vietnam, untuk menunjukkan bahwa kita masih menjadi sebuah kekuatan Asia. Saya terkesan dengan Suharto [sic], yang mencoba untuk mempersatukan negaranya dan menjalankan pemerintahan yang layak, serta memperjuangkan antikomunisme di sana.*¹⁴⁸

267. Pada 13 Desember, ia mengirim cenderamata pribadi berupa bola-bola golf kepada Presiden Indonesia.†

268. Amerika Serikat memberi suara yang mendukung Resolusi 384 Dewan Keamanan PBB yang disepakati secara bulat pada 22 Desember 1975, yang menegaskan hak penentuan nasib sendiri dan menyerukan kepada Indonesia untuk menarik mundur pasukannya. AS tetap bersikap hati-hati selama sesi tersebut, tetapi mencoba membantu Indonesia di belakang layar tanpa terlalu menyinggung sekutunya di NATO, Portugal, yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan pangkalan militer AS di Azores, dan dukungan untuk berbagai isu lain di PBB. Sementara turut mendorong “sebuah penerimaan di PBB agar Jakarta dapat menyelamatkan muka”, AS juga menawarkan untuk membantu Portugal

* Memorandum dari Menteri Luar Negeri Kissinger untuk Presiden Ford pada 21 November 1975 menyatakan: “Penggunaan persenjataan yang dipasok AS oleh Indonesia dalam sebuah pendudukan terbuka terhadap wilayah ini, akan bertentangan dengan undang-undang AS.” Dokumen 124 NSA.

† Dewan Keamanan Nasional, 13 Desember 1975. Dokumen 168 NSA. Kissinger selanjutnya membela kebijakan Pemerintahan Ford mengenai Timor-Leste. Dalam sebuah forum publik pada 2001, ia mengatakan kepada aktivis Timor-Leste, Constancio Pinto: “Timor tidak pernah dibahas dengan kami ketika kami di Indonesia. Di pelabuhan udara ketika kami berangkat, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa mereka akan menduduki koloni Portugis di Timor. Bagi kami hal itu tidak tampak sebagai peristiwa yang sangat penting karena India menguasai koloni Portugis yaitu Goa sepuluh tahun sebelumnya, dan bagi kami hal itu tampak sebagai proses lain dari dekolonisasi. Tidak seorang pun tahu bahkan secara samar-samar apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tidak seorang pun meminta pendapat kami, dan terus terang saya tidak tahu apa yang harus kami katakan jika ada yang menanyakan pendapat kami. Ini benar-benar disampaikan kepada kami ketika kami tengah beranjak pergi.” *Slate, Whopper of the Week: Henry Kissinger*, 7 Desember 2001.

mengamankan pembebasan 23 tentara yang ditawan di Timor Indonesia.* Amerika Serikat abstain dalam Resolusi 389 Dewan Keamanan (1976) yang disahkan pada 22 April 1976 karena, menurut wakil AS, resolusi tersebut gagal mengakui “pernyataan penting yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia bahwa sejumlah kekuatan telah ditarik mundur, dan penarikan mundur tersebut terus berlangsung”. Ia mengatakan abstainnya Amerika Serikat jangan ditafsirkan bahwa Amerika “tidak memberi dukungan terhadap hak rakyat Timor-Leste atau rakyat di manapun di dunia atas hak-hak kesetaraan dan penentuan nasib sendiri”.¹⁴⁹ Amerika Serikat juga abstain dalam pemungutan suara di Sidang Umum mengenai isu tersebut, yang dilakukan pada 12 Desember 1975, kemudian memberi suara menentang semua resolusi Sidang Umum berikutnya sampai 1999.

269. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengetahui bahwa persenjataan AS digunakan dalam invasi terhadap Timor-Leste. Anggota Kongres Helen Meyner menyampaikan kepada sebuah penyelidikan Kongres pada 1977 bahwa Jenderal Moerdani membenarkan penggunaan peralatan Amerika Serikat:

*Ketika kami bertemu di Djakarta dengan beberapa perwira tinggi Indonesia...John Salzberg menanyakan kepada Jenderal Moerdani, apakah persenjataan AS telah digunakan pada 1975. Ia mengatakan, “Tentu saja, ini satu-satunya persenjataan yang kami punya. Tentu saja persenjataan AS digunakan”.*¹⁵⁰

270. Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS diberitahu pada 12 Desember 1975 bahwa peralatan AS digunakan dalam invasi tersebut.¹⁵¹ Laporan kepada NSC menyatakan bahwa peralatan yang dipasok AS meliputi berikut ini:

- Setidaknya sembilan kapal bekas angkatan laut AS, yang salah satunya, *KRI Martadinata*, terlibat dalam penggempuran pesisir sejak 22 November, dan ikut serta dalam gempuran laut selama satu jam yang mengawali serangan di Dili pada 7 Desember
- 13 pesawat yang digunakan dalam serangan di Dili dan Baucau
- Perlengkapan yang digunakan oleh Brigade Lintas Udara ke-18, yang menerjunkan pasukan di atas Dili pada 7 Desember dan Brigade Lintas Udara ke-17, yang terlibat dalam penerjunan pasukan di Baucau pada 9 Desember; perlengkapan yang digunakan terdiri atas senapan, senapan mesin, peluncur granat, mortir, peluncur roket, parasut dan radio; para penerjun payung utama mereka adalah didikan AS
- Sejumlah perlengkapan radio AS digunakan oleh pusat komunikasi di Atambua, Timor Indonesia, yang mengendalikan operasi Timor

* Dewan Keamanan Nasional, 19 Desember 1975. Dokumen 178 NSA. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB pada waktu itu, Daniel Patrick Moynihan, menulis: “Amerika berharap semuanya akan terjadi seperti yang terjadi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Departemen Luar Negeri ingin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa benar-benar terbukti tidak efektif dalam langkah apapun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melakukannya lumayan sukses.” *A Dangerous Place*, Little Brown, 1980, hal. 247.

271. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa menurut pendapatnya, Amerika Serikat adalah pihak yang paling tanggung jawab. “Amerika Serikat ialah yang paling buruk. Paling buruk, karena ia satu-satunya kekuatan yang mampu mengatakan kepada Indonesia, setelah invasi, bukan hanya sebelum, tetapi juga sesudahnya: ‘Jangan nakal, hentikan pembunuhan ini’, tapi mereka tidak melakukan itu...dan mereka sebenarnya tahu mana yang benar.”¹⁵²

272. Kelompok-kelompok dalam Kongres AS secara aktif terus mengemukakan isu penggunaan peralatan militer pasokan Amerika Serikat oleh Indonesia. Menindaklanjuti penyelidikan yang dilakukan oleh Senator Gary Hart pada Desember 1975, Senator Hubert Humphrey dan Clifford Case membawa isu tersebut; dan serangkaian audiensi Kongres dilangsungkan pada 1977 setelah Jimmy Carter mulai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari.

273. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada penyelidikan Kongres pada Maret 1977 bahwa persenjataan AS digunakan selama invasi itu. Mereka juga bersaksi bahwa, sebagai tanggapan, Pemerintah “menanggihkan secara administratif” pemberian bantuan tambahan antara Januari dan Juni 1976 “untuk memastikan bahwa kita mematuhi statuta yang berlaku”, tapi hanya beberapa anggota Kongres saja yang diberitahu secara pribadi mengenai penangguhan tersebut, dan keputusan itu tidak diumumkan secara terbuka.¹⁵³

274. Tindakan ini, yang diambil atas arahan Menteri Luar Negeri Kissinger, terutama dirancang untuk memastikan kelanjutan dukungan militer Amerika Serikat pada Indonesia, ketimbang untuk menaati hukum. Hal ini bukan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, dan pada praktiknya tidak mengubah kenyataan tentang dukungan militer AS untuk agresi Indonesia. Penyelidik diberitahu bahwa peralatan militer yang telah disepakati terus dikirimkan; bahwa bantuan militer kembali diberikan pada akhir Juni 1976, karena terdapat “penurunan tingkat kekerasan yang signifikan di Timor”; dan bahwa Kongres tetap mengizinkan bantuan militer untuk Indonesia, setelah gagalnya usul amandemen yang mendesak penghentian bantuan. Hubungan dengan Indonesia tidak terpengaruh, karena para pejabat di Jakarta tidak mengetahui tentang penangguhan, atau yakin bahwa penangguhan tersebut hanya disebabkan alasan “administratif”. Brent Scowcroft diberi pengarahan sebelum bertemu dengan Adam Malik pada Juni 1976:

*Delegasi Indonesia belum mengemukakan tentang penangguhan kita terhadap pengiriman peralatan militer kepada mereka... Jika mereka menyinggung tentang hal itu, Anda dapat mengatakan bahwa penangguhan kami yang hati-hati mengenai masalah ini telah berhasil melumpuhkan para pengkritik di Kongres seperti Senator Humphrey, dan pada saat yang sama memungkinkan kami kembali melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Jakarta.*¹⁵⁴

.....
* Dokumen 296 NSA. Bahkan apabila Kongres menghentikan bantuan militer, Pemerintah AS telah berkomitmen untuk menemukan cara mengakalinya dan mulai membuat rencana-rencana cadangan pada awal 1976 untuk melanjutkan bantuan. Dokumen 235 NSA.

275. Pada Oktober 1976 Pemerintah AS membenarkan berlanjutnya penggunaan persenjataan AS di Timor-Leste:

Kami paham bahwa Pemerintah Indonesia dalam beberapa bulan ini telah berusaha menggunakan peralatan non-AS dalam operasi Timor. Sejumlah unit perlengkapan AS tidak lagi digunakan. Namun, bukti menunjukkan bahwa peralatan yang dipasok Amerika Serikat—terutama peralatan transportasi dan komunikasi—masih digunakan. Pemerintah Indonesia telah diperingatkan mengenai kekhawatiran kita akan hal tersebut.¹⁵⁵

276. Kerjasama militer terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan AS untuk Indonesia selama dua dekade berikutnya.*

277. Pemerintah AS berikutnya melanjutkan kebijakan dasar mengenai Timor yang dibangun oleh Pemerintahan Ford-Kissinger. Hal ini dijelaskan kepada Audiensi Senat AS pada 1992 dalam pernyataan berikut:

*Pada 1976, para pembuat kebijakan Amerika Serikat memutuskan untuk menerima penggabungan Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia sebagai fakta yang telah terjadi. Mereka memutuskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat atau dunia, yang dapat mengubah kenyataan itu. Karena itu, menentang penggabungan Timor-Leste oleh Indonesia hanya akan memberi sedikit pengaruh pada situasi tersebut. Dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya membuat kebijakan yang dilanjutkan secara konsisten dan bipartisan: Kami menerima pengambilalihan Timor-Leste oleh Indonesia tanpa mendesak dilakukannya suatu penentuan nasib sendiri secara sah. Jelas, sebuah proses demokratis dalam penentuan nasib sendiri akan lebih konsisten dengan nilai-nilai yang kita anut; tapi kenyataan yang ada pada 1975 tidak memungkinkan alternatif tersebut. Menerima dimasukkannya Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia merupakan satu-satunya pilihan yang realistis.*¹⁵⁶

278. Pemerintahan Carter (1977-1981) terus mengutamakan pentingnya Indonesia. Zbigniew Brzezinski, penasihat keamanan nasional Presiden Carter yang agresif, mendukung pereratan hubungan kedua negara.¹⁵⁷ Kunjungan Wakil Presiden Walter Mondale kepada Presiden Soeharto di Jakarta pada Mei 1978, dan kunjungan berkala Jenderal Moerdani ke Amerika Serikat yang terus berlanjut, menghasilkan peningkatan kerjasama militer AS dengan Indonesia. Dalam audiensi Kongres pada 1981, Wakil Menteri Luar Negeri Holbrooke merangkum mengapa AS begitu positif mengenai Indonesia:

* Program Bantuan Militer (Military Assistance Programme, MAP) Amerika Serikat untuk Indonesia berakhir pada 1978, tapi dilanjutkan dengan program penjualan kredit militer luar negeri (Foreign Military Sales, FMS).

*Situasi yang terjadi di Timor-Leste adalah satu dari sejumlah kekhawatiran Amerika Serikat yang sangat penting di Indonesia. Indonesia, dengan jumlah penduduk 150 juta jiwa, merupakan negara terbesar kelima di dunia, anggota Gerakan Non-Blok yang moderat, negara penghasil minyak yang penting—yang memainkan peran moderat dalam OPEC—serta memiliki posisi strategis, dengan laut yang digunakan untuk jalur lintas perdagangan yang luas, antara Samudera Pasifik dan Hindia. Presiden Suharto [sic] dan para pemimpin terkemuka Indonesia lainnya telah secara terbuka menyerukan dibebaskannya para tahanan kita di Iran. Kedudukan Indonesia dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara—ASEAN—juga penting, dan telah memainkan peran sentral dalam mendukung Thailand dan mempertahankan keamanan Thailand ketika terjadi aksi-aksi yang mengganggu keamanan oleh Vietnam di Indocina. Akhir kata, Indonesia telah memberikan perlakuan yang manusiawi bagi lebih daripada 50.000 pengungsi Indocina dan mengambil inisiatif untuk menyediakan salah satu pulaunya sebagai pusat pemrosesan pengungsi ASEAN. Indonesia, tentunya, penting bagi para sekutu utama AS di kawasan tersebut, terutama bagi Jepang dan Australia. Kami sangat menghargai hubungan kerjasama kami dengan Indonesia.*¹⁵⁸

279. Pemerintahan Carter menambahkan penekanan yang lebih kuat pada hak-hak asasi dan kebutuhan kemanusiaan dalam kebijakan tentang Timor yang dirangkum di atas, dan hal ini dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Selama masa jabatannya, lembaga-lembaga internasional diizinkan beroperasi di Timor-Leste, para pejabat AS diizinkan bertemu dengan José Ramos-Horta, dan Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri tentang Praktik Hak-hak Asasi Manusia, yang dimulai pada 1977, sering menyebut tentang pelanggaran di Timor-Leste.

280. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar kematian yang terjadi di Timor-Leste terjadi pada periode ini, jumlah tentara Indonesia meningkat pesat, dan Resistansi Timor-Leste hampir tertumpas seluruhnya.* Arnold Kohen memberi kesaksian kepada Komisi:

Adalah salah kalau kita percaya bahwa tragedi di Timor-Leste merupakan tanggungjawab eksklusif dari Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger. Pernah ada kesempatan untuk mengubah

* Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Laksamana Sudomo, mengatakan kepada Duta Besar Masters pada Juli 1978 bahwa Indonesia sudah menempatkan 29.000 personel militernya di Timor-Leste. Dokumen 602 NSA. Jenderal Moerdani menyangkal pernyataan bahwa bom napalm dan herbisida digunakan di Timor selama periode ini. Laporan Kedutaan AS, 3 Januari 1978. Dokumen 502 NSA. Demikian pula para pejabat AS menyangkal pernyataan Fretilin bahwa personel AS turut berpartisipasi dalam pertikaian militer di Timor selama periode ini. Menteri Luar Negeri Cyrus Vance, 7 Juli 1978. Dokumen 599 NSA. Detail yang berhubungan dengan klaim Fretilin ditemukan dalam Dokumen 578 dan 614 NSA.

kebijakan Amerika terhadap pendudukan Indonesia atas Timor-Leste pada awal 1977, ketika Presiden Jimmy Carter mengambilalih jabatan...dan menyerukan perhatian yang lebih besar pada hak-hak asasi manusia dalam membuat berbagai kebijakan luar negeri AS... Harapan-harapan semacam ini dihancurkan.¹⁵⁹

281. Pemerintahan Carter juga gagal membahas isu mendasar tentang penentuan nasib sendiri. Pemerintahannya mengakui kedaulatan Indonesia, tidak menyinggung tentang penentuan nasib sendiri dalam laporan hak-hak asasi manusia tahunannya, dan tidak mendukung berbagai resolusi PBB mengenai Timor.*

282. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan peristiwa pembantaian Santa Cruz pada 1991, meningkatlah berbagai tekanan kepada AS untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam usaha mencari pemecahan. Sejumlah pertemuan dengan Portugal terjadi. Pada Januari 1992, sekelompok tokoh politik dan akademik Portugis yang terkenal, dipimpin oleh Presiden Ramalho Eanes, menyampaikan surat terbuka, yang menggunakan kata-kata pedas, kepada Presiden George Bush, mendakwa AS tanggung jawab, dengan berdiam diri, atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di Timor-Leste.¹⁶⁰ Meski Amerika Serikat telah menolak resolusi Sidang Umum pada 1982 yang meminta Sekretaris Jenderal membuka konsultasi dengan semua pihak yang terkait langsung, Amerika Serikat sekarang menyatakan dukungannya terhadap dorongan Sekretaris Jenderal untuk memulai pembahasan antara Portugal dan Indonesia mengenai isu tersebut, dan pada 1992 serta 1993, mendukung berbagai inisiatif yang disampaikan Portugal di Komisi Hak Asasi Manusia.¹⁶¹

283. Duta Besar Barry, wakil pemerintahan baru Clinton di Indonesia, mengunjungi Timor-Leste pada 21-23 Februari 1993 untuk “mendapatkan gambaran mutakhir”. Ia melaporkan, bahwa:

kehadiran militer yang represif dan meluas merupakan kendala utama pencapaian integrasi oleh pemerintah... Rakyat Timor tidak menyukai paternalisme, korupsi, dan dominasi militer terhadap ekonomi setempat, dan juga kekejaman mereka...Penggambaran yang paling baik mengenai aspirasi rakyat Timor berasal dari seorang pastor Salesian yang sangat memahami situasi di sana: “Mereka tidak ingin diganggu”.

284. Duta Besar tersebut menutup dengan perkataan “integrasi tidak akan pernah bisa diterima, selama diminta dengan todongan senjata...” tapi tidak menganggap sebagai solusi apa yang belakangan diajukan oleh Indonesia sendiri beberapa tahun kemudian:

.....
* Setelah setiap pemungutan suara di PBB, Duta Besar Indonesia untuk PBB menulis kepada Pemerintah Carter untuk mengemukakan “terimakasih yang tulus dan penghargaan untuk dukungan yang diberikan kepada posisi Indonesia”. Lihat sebagai contoh, Dokumen 491 dan 713 NSA.

Bahkan jika orang-orang Indonesia telah siap untuk memberi pilihan penentuan nasib sendiri (dan mereka tidak siap), Timor-Leste tidak dapat bertahan sebagai suatu entitas terpisah. Otonomi terdengar bagus, tetapi sulit untuk mewujudkannya dalam negara yang sangat sentralistik ini.¹⁶²

285. Pemerintah Clinton secara aktif mendukung proses pada 1999, termasuk melalui Dewan Keamanan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara penyumbang terbesar terbentuknya UNAMET, dan Presiden Clinton, Menteri Luar Negeri Madeleine Albright, yang telah bertemu sebelumnya dengan Xanana Gusmão di Jakarta, serta Menteri Pertahanan William Cohen, masing-masing menekan rekan-rekan Indonesiannya untuk membendung kekerasan yang mengancam jajak pendapat.^{*} Menyambut hasil jajak pendapat pada 4 September 1999, Menteri Luar Negeri Albright mengatakan bahwa AS akan terus menjadi pendukung kuat proses yang dibantu oleh PBB, untuk mengubah Timor-Leste menjadi sebuah negara merdeka.¹⁶³ Setelah kekerasan pecah, Presiden Clinton mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras pada 9 dan 10 September 1999, dengan menekankan perlunya kehadiran pasukan keamanan internasional di Timor-Leste dan dukungan AS untuk pasukan semacam itu, jika Indonesia tidak dapat memulihkan ketertiban. Amerika Serikat menempatkan 1.000 personel angkatan lautnya di perairan Timor, tapi membatasi keterlibatan langsung dalam Interfet dengan membantu secara logistik, termasuk pengangkutan untuk pengerahan pasukan-pasukan lain yang berpartisipasi.

Jepang

286. Jepang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1956. Jepang bukan anggota tetap Dewan Keamanan, tetapi merupakan satu-satunya anggota non-permanen Asia Timur ketika Dewan Keamanan memperdebatkan masalah Timor-Leste pada 1975 dan 1976.

287. Pada 1960, Jepang mendukung diterimanya Deklarasi PBB tentang Pemberian Kemerdekaan untuk Negara dan Bangsa Jajahan dan prinsip-prinsip terkait tentang pelaporan atas koloni.¹⁶⁴ Meskipun demikian, Jepang bersikap abstain terhadap Resolusi 1542 (XV) Sidang Umum yang mencantumkan Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.

288. Menyusul invasi Indonesia, Jepang mendukung Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975), yang disetujui dengan suara bulat pada 22 Desember 1975. Resolusi itu menguatkan hak rakyat Timor Leste yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri, menyesali campurtangan angkatan bersenjata Indonesia, dan menuntut Indonesia segera mundur.

.....
^{*} Kepala UNAMET, Ian Martin, menulis bahwa AS tidak menekan Jakarta untuk menerima penjaga perdamaian sebelum jajak pendapat karena khawatir hal ini akan membahayakan proses tersebut dan ragu bahwa pengamanan dapat lebih diperkuat lagi. (Ian Martin, *Self-Determination in East Timor, The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, Lynne Rienner Publishers, London, hal. 33.)

289. Meskipun demikian, Jepang berusaha memengaruhi dan melemahkan resolusi ini. Duta Besar Jepang untuk PBB pada saat itu, Shizuo Saito, pernah menulis:

Jepang selalu mengambil inisiatif aktif dan terdepan... (dan) terutama memberi masukan agar maksud Indonesia untuk menarik pasukannya akan dihormati, dan agar kecaman tidak akan terlalu menyakitkan bagi Indonesia. Pemerintah lainnya berpihak pada posisi Jepang.¹⁶⁵

290. Peran Jepang dalam Dewan Keamanan menyangkut isu itu ditegaskan oleh José Ramos-Horta, yang mewakili Fretilin dalam pertemuan:

Selama semua debat Dewan Keamanan mengenai Timor Timur pada 1975 dan 1976, upaya delegasi Jepang untuk melunakkan kecaman terhadap Indonesia sangat mencolok.¹⁶⁶

291. Resolusi 384 adalah satu-satunya resolusi PBB yang didukung oleh Jepang setelah invasi Indonesia. Jepang bersikap abstain dalam Resolusi Dewan Keamanan 389 pada April 1976, menyatakan bahwa Jepang percaya Dewan Keamanan harus mengakui bahwa Indonesia sudah mulai menarik pasukannya dari Timor-Leste, sesuai permohonan dalam resolusi sebelumnya. Pada 15 April 1976, wakil Jepang, Kanazawa, berkata kepada Dewan Keamanan:

Walaupun tampak oleh kami bahwa perdamaian dan ketertiban di wilayah Timor belum sepenuhnya pulih, menurut pendapat kami merupakan hal yang baik bahwa perjuangan bersenjata sekarang tampak lebih terbatas pada daerah-daerah terpencil di wilayah itu, dan bahwa kehidupan rakyat sedikit demi sedikit kembali normal.¹⁶⁷

292. Kanazawa menyambut pernyataan Indonesia kepada Dewan Keamanan, “bahwa para sukarelawan bersenjata sudah mulai meninggalkan wilayah Timor pada Februari, dan bahwa proses penarikan diri diharapkan akan selesai dalam waktu singkat.”

293. Pernyataan Indonesia bahwa invasi terdiri atas “para sukarelawan” tidak lebih dapat dipercaya dibanding dengan pernyataannya untuk mundur. Pada saat itu kedua pernyataan tersebut diketahui tidak benar. Atase Pertahanan Selandia Baru di Jakarta memberitahu pemerintahnya pada Januari 1976 bahwa pernyataan mengenai “sukarelawan” merupakan “rekaan konyol”, dan ia mengatakan:

Pengelakan dan kebenaran yang setengah-setengah merupakan ciptaan diplomatik yang diterima, tetapi kebohongan yang terang-terangan tidak mudah dimaafkan.¹⁶⁸

294. Lapornya pada periode Januari - Maret 1976 tidak menyebutkan perihalan penarikan diri, dan mengatakan bahwa “situasi militer masih begitu tidak stabil,

sehingga mengharuskan adanya tentara Indonesia dalam jumlah yang besar [di Timor-Leste] ...”¹⁶⁹ Utusan PBB, Winspeare Guicciardi, juga skeptis terhadap pernyataan Indonesia. Dalam laporan keduanya mengenai Timor-Leste, yang ditulis tujuh bulan setelah invasi pada Juni 1976, ia menulis bahwa ketika dia mengangkat isu yang menyangkut Resolusi Dewan Keamanan 384 dan 389, Indonesia dengan mudahnya mengulangi pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa penarikan “sukarelawan Indonesia” akan selesai dalam waktu singkat.¹⁷⁰ Dalam perkembangan selanjutnya, wakil Indonesia di PBB mengatakan kepada rekan Amerikanya bahwa Indonesia harus menghormati keinginan Pemerintahan Sementara Timor Timur, yang tidak menginginkan penarikan pasukan bersenjata, dan ia bertanya: “Bagaimana caranya Indonesia bisa ditarik mundur dari wilayah yang sudah digabungkan ke dalam Indonesia?”¹⁷¹

295. Dalam pernyataan-pernyataan lain kepada Dewan Keamanan, Kanazawa mendukung hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dan meminta kelanjutan usaha untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban serta perpanjangan mandat Perwakilan Khusus. Walaupun positif, usulan-usulan ini telah pernah disetujui oleh Indonesia sebelumnya, dan tidak ada tambahan baru atau yang sepadan dengan kapasitas Jepang—sebagai investor dan donor utama Indonesia—untuk memengaruhi jalannya kejadian.

296. Jepang menentang delapan Resolusi Sidang Umum PBB mengenai Timor-Leste antara 1975 dan 1982. Ini termasuk resolusi 1982 yang lemah, yang menyerahkan isu tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk menemukan penyelesaian melalui dialog. Selama kunjungannya ke Dili pada 1976, Winspeare Guicciardi melihat poster-poster yang mengungkapkan perasaan terimakasih kepada Jepang atas pemberian suara yang mendukung Indonesia di PBB.¹⁷²

297. Menurut Pemerintah Australia, Jepang secara implisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste pada 1982, ketika Jepang menandatangani persetujuan pajak dengan Indonesia yang persyaratannya tidak mengeluarkan Timor-Leste dari wilayah Indonesia.¹⁷³ Jepang menyangkal bahwa ia secara formal mengakui penggabungan itu. Jepang pun tidak menghadiri Majelis Rakyat Timor Timur pada 31 Mei 1976, saat petisi untuk integrasi dinyatakan oleh Indonesia sebagai tindakan penentuan nasib sendiri yang sah.* Pada 1991, Parlemen Jepang mengatakan kepada PBB:

Pemerintah Jepang tidak pernah mengakui secara formal penggabungan Timor-Leste oleh Indonesia. Posisi resmi Jepang adalah sebagai berikut: “Posisi dasar kami berkaitan dengan daerah Timor-Leste adalah bahwa Jepang terus mengawasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB” dan

* Indonesia mengundang Jepang untuk hadir di Majelis Rakyat Timor Timur 31 Mei 1976. Dalam telegram pada 28 Mei 1976, seorang pejabat Kedutaan Inggris di Tokyo mengomentari masalah itu: “Orang Jepang sedang berada dalam dilema yang tidak asing. Di satu sisi mereka lebih baik tidak ada hubungannya dengan undangan itu, namun di sisi lain mereka takut mengecewakan orang-orang Indonesia. Mereka tidak ingin diwakili di Dili jika mereka tidak bersama kelompok yang baik...”, dalam *UK unclassified documents*, Dowson Files 7.19.

bahwa “kami tidak berhak menghakimi mengenai yurisdiksi pulau tersebut”. Karena itu, pemerintah Jepang telah menginstruksikan para penerbit buku-buku sekolah untuk menggambarkan jenis garis yang sama antara Timor Timur dan Timor Barat seperti garis yang digambarkan antara Maroko dan Sahara Barat. Garis sejenis itu menunjukkan bahwa terjadi sebuah konflik internasional yang statusnya belum diselesaikan. Forum Anggota Diet telah berkali-kali menegaskan posisi ini melalui pertanyaan-pertanyaan pada mimbar Diet dan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada pemerintah.¹⁷⁴

298. Faktor penentu utama posisi Jepang terhadap isu Timor pada 1970-an dan 1980-an adalah hubungan ekonominya dengan Indonesia. Setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, Jepang memusatkan fokusnya pada pembangunan kembali ekonominya, yang hanya memiliki sumberdaya alam yang rendah dan sangat bergantung pada jasa hubungan internasional. Tujuan-tujuan ekonomi ini mendikte kebijakan luar negerinya yang low profile, dan yang pada dasarnya sejajar dengan kebijakan AS.

299. Indonesia dan Jepang membangun hubungan diplomatik resmi pada 1957, setelah negosiasi yang berlarut-larut mengenai reparasi perang Jepang kepada Indonesia akibat pendudukannya terhadap bekas koloni Belanda ini antara 1942 dan 1945. Setelah itu menyusul pula perluasan investasi Jepang, eksploitasi, dan bantuan sumberdaya alam. Indonesia, yang memiliki pasar yang sangat luas, sumberdaya alam, dan lokasi strategis, menjadi sangat penting bagi perekonomian Jepang, terlepas dari siapa memegang kekuasaan di Jakarta. Persentase persediaan minyak dan perdagangan Jepang yang signifikan mengalir melewati Selat Malaka. Setelah rezim Soeharto mengambilalih kekuasaan, Jepang memberi bantuan dalam pembangunan konsorsium bantuan internasional, Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang mengadakan pertemuan pertamanya di Tokyo pada 1967. Sejak 1980-an, Jepang merupakan investor dan donor Indonesia yang terbesar, serta sangat melindungi hubungan tersebut. Tanggapan Jepang terhadap Timor-Leste dibatasi oleh prioritas-prioritas ini.

300. Pada 1979, Jepang memberi 100 juta yen kepada program peringanan kelaparan gabungan Palang Merah Indonesia – Palang Merah Internasional di Timor-Leste. Pada 1991, Pemerintah Jepang memutuskan membuat hak asasi manusia dan faktor-faktor lain, seperti pengeluaran militer oleh negara penerima, sebagai pertimbangan dalam mengalokasikan program bantuannya yang besar-besaran. Forum Anggota Diet Jepang untuk Timor-Leste menyambut inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa “jika kriteria ini diterapkan secara jujur untuk Indonesia, yang merupakan penerima nomor satu Overseas Development Assistance [ODA; Bantuan Pembangunan Seberang Lautan] Jepang, diskusi mengenai isu Timor Timur tidak dapat dihindari.”¹⁷⁵ Hal ini tidak terjadi. Pemerintah Jepang mengelak dari komitmen penting ini dengan menandatangani Deklarasi Bangkok mengenai Hak Asasi Manusia pada 1993, yang menyatakan bahwa bantuan seharusnya tidak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Walaupun menilai catatan domestik hak

asasi manusia Jepang sebagai yang terbaik di Asia Timur, Kenneth Christie dan Denny Roy menyimpulkan bahwa:

Dalam praktik, pemasyarakatan hak asasi manusia bukan faktor yang penting dalam bantuan pembangunan luar negeri Jepang.¹⁷⁶

301. Pada 1990-an, Jepang tergerak memainkan peran yang relatif lebih positif dalam permasalahan Timor-Leste. Hal ini dilakukan sebagian besar karena perkembangan di Timor-Leste dan tekanan domestik, terutama dari salah satu lembaga masyarakat dan anggota-anggota Diet Jepang, yang berkomitmen menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.*

302. Sebuah contoh pembelaan masyarakat sipil adalah kesaksian kepada Komite Khusus Dekolonisasi pada 1987 oleh Iwamura Shouhachi, mantan perwira angkatan bersenjata yang bertugas di Timor-Leste dari 1942 sampai 1945. Dalam presentasinya ia meminta kepada Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuat Jepang selama Perang Dunia Kedua, dan untuk memperkenankan penentuan nasib sendiri yang benar:

Di Jepang saya hanya seorang warganegara tua. Tetapi saya bertekad tidak pernah melupakan kejahatan yang dilakukan oleh Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan bertindak menurut apa yang telah saya pelajari dari pengalaman pahit.

303. Dengan menitikkan air mata, ia berkata kepada Komite:

Sangat menyakitkan untuk sekarang berbicara mengenai pengorbanan dan beban yang kami paksakan atas rakyat Timor, sebuah bangsa yang tidak ada hubungannya dengan perang itu... Pemerintah Jepang tidak pernah meminta maaf atau membayar reparasi kepada rakyat Timor, untuk apa yang telah dilakukannya di sana dalam Perang Dunia Kedua: seharusnya Jepang melakukannya.†

* Suster Monica Nakamura mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan utama Free East Timor Japan Coalition, jaringan payung nasional Jepang yang utama, adalah "mendukung hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Mengenai bantuan kemanusiaan, kami [menyediakan hal itu] dalam beberapa kesempatan tetapi kami terpusat pada isu penentuan nasib sendiri." Audiensi publik nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004. Koalisi tersebut mencakup sekitar 40 kelompok di seluruh negara.

† 13 Agustus 1987, diberitakan dalam *The Australian*, 15 Agustus 1987. Sekutu-sekutu dan Jepang menduduki Timor Portugis dari 1942 sampai 1945 dengan melanggar kenetralan Portugis. Tentara-tentara Jepang tanggung jawab atas sejumlah besar kematian, pelanggaran terhadap perempuan, dan kerusakan fisik. Menurut sebuah survei di Timor-Leste pada 1996, kira-kira 700 perempuan Timor dijadikan budak seks untuk tentara Jepang. (*Japan Times*, 14 Desember 2002). Sejak perang itu, Jepang telah membayar reparasi kepada tetangga sekitarnya untuk meringankan reintegrasinya ke dalam wilayah itu dan meminta maaf secara eksplisit atas agresi dan pelanggaran pada masa peperangan. Indonesia menerima USD223 juta dari Jepang, ditambah USD400 juta untuk bantuan dan pembatalan utang perdagangan sebanyak USD177 juta. Timor-Leste tidak diganti kerugiannya akibat peperangan karena Portugal, dengan sikapnya yang netral selama peperangan, bukan salah satu penandatangan Konferensi San Fransisco 1951 yang menentukan kewajiban reparasi Jepang. Organisasi non-pemerintah Jepang

304. Pada 1995, sehubungan dengan tekanan domestik yang gigih serta perkembangan di Timor-Leste, Pemerintah Koalisi Sosialis/LDP Murayama mengubah posisi Jepang dari pengamat lepas menjadi pendukung proses PBB. Pada konferensi APEC 1995 dan 1996, Menteri Luar Negeri Jepang memberitahu rekan Indonesiannya, Ali Alatas, mengenai minat Jepang untuk mencari penyelesaian isu itu secara damai dan cepat, melalui jasa baik Sekretaris Jenderal PBB.^{*} Perubahan kebijakan ini juga membuka jalan bagi Jepang untuk menyediakan sumber dana untuk proses PBB, termasuk All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue (AIETD), di mana Jepang menyumbang sebanyak USD100.000 pada 1996.

305. Pada saat yang sama, Jepang dengan berhati-hati memisahkan isu itu dari hubungan ekonominya dengan Indonesia. Meskipun hampir setengah dari anggota Diet Jepang menandatangani petisi yang mengecam militer Indonesia atas pembantaian Santa Cruz pada 1991, pemerintah Jepang menahan diri untuk tidak memberi kecaman langsung, dan membatasi tanggapannya pada penyesalan belaka. Jepang tidak memberi tanggapan resmi pada penyerahan Penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta pada 1996. Ketika José Ramos-Horta mengunjungi Jepang pada Januari 1997 atas undangan kelompok masyarakat sipil, Menteri Luar Negeri tidak dapat bertemu dengannya.[†] Surat kabar Jakarta Post memberitakan bahwa Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto, yang sedang mengunjungi negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan krisis ekonomi Asia, memberitahu Presiden Soeharto bahwa tidak ada pejabat senior Jepang yang akan bertemu dengan José Ramos-Horta.[‡]

306. Menyusul keputusan Kofi Annan pada 1997 untuk menguatkan masalah Timor-Leste, Jepang adalah salah satu dari kelompok utama lima negara yang dukungannya diakui oleh Jamsheed Marker, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste.[§] Pemerintah Jepang mendukung keputusan Presiden Habibie untuk memperkenalkan dilakukannya pemilihan suara di Timor-Leste serta Jajak Pendapat yang diatur oleh PBB, yang diadakan pada 30 Agustus 1999. Setelah pemilihan, Jepang meminta agar hasil dari pemilihan itu dihargai oleh semua

dan Gereja Katolik Jepang terus menuntut permintaan maaf resmi dan reparasi, termasuk dari Dana Perempuan Asia yang dibentuk pada 1995 oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama, dan telah membantu korban-korban orang Timor untuk bersaksi di Tokyo.

* Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang Kono dan Ali Alatas dilangsungkan selama pertemuan Osaka APEC pada November 1995 ketika pemuda Timor sedang mencari suaka di kedutaan besar Jepang di Jakarta. Pertemuan 1996 antara Menteri Luar Negeri Yukihiko Ikeda dan Ali Alatas itu terjadi di Filipina setelah Penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta.

† José Ramos-Horta diberitahu bahwa Menteri Luar Negeri sedang sibuk mengatur situasi darurat di Peru ketika para militan menduduki Kedutaan Jepang.

‡ Hubungan perekonomian Jepang-Indonesia mengalami kemunduran pada 1997 bukan karena negara Timor-Leste, melainkan karena mobil "Timor". Ketika Presiden Soeharto menyerahkan hal monopoli untuk mobil Indonesia baru yang dinamakan "mobil Timor", Jepang menganggap langkah itu merusak minat terhadap mobil Jepang di Indonesia. Protes pun dilayangkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia dan menimbulkan kemarahan Presiden Soeharto.

§ Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal memuji sumbangan Duta Besar Yukio Takasu. (*Jamsheed Marker*, hal. 14, 74).

pihak, dan agar Indonesia “memenuhi tanggungjawabnya atas keamanan (dan) mengambil semua langkah yang diperlukan” untuk mengendalikan para milisi.¹⁷⁷ Jepang mengumumkan bantuannya sebanyak mungkin untuk peralihan itu, namun menolak menghentikan bantuan kepada Indonesia sebagai balasan atas tindak penghancurannya, dan memperingatkan negara-negara donor lainnya bahwa penghentian bantuan dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan menghambat pemulihan ekonomi Asia Timur. Jepang tidak diperbolehkan oleh konstitusinya untuk menyumbangkan pasukan kepada Pasukan Internasional untuk Timor-Leste (International Force for East Timor, Interfet). Namun, Jepang menjadi donor utama bagi Interfet, dengan menyumbang USD100 juta, agar pasukan dari negara-negara berkembang dapat berpartisipasi. Sehubungan dengan usaha-usaha sebelumnya, Jepang juga memberi bantuan yang sangat banyak untuk memenuhi biaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Timor-Leste.*

Kesimpulan

307. Jelas dari pengamatan di atas bahwa selama sebagian besar periode mandat, tanpa memandang ideologi, lokasi, atau tanggungjawab dalam tatanan internasional, kekuatan-kekuatan utama dunia sedikit banyak memiliki sikap yang sama terhadap masalah Timor-Leste. Dengan Cina sebagai pengecualian, selama tahun-tahun awal pendudukan Indonesia, pemerintahan dengan berbagai corak politik di Eropa, Asia, dan Amerika Utara jauh lebih banyak memberi dukungan kepada Indonesia daripada Timor-Leste. Beberapa dari pemerintah-pemerintah ini bekerja lebih keras daripada yang lainnya untuk mendukung dan mengonsolidasi kehadiran Indonesia. Namun, mereka yang memberi suara mendukung Timor-Leste di PBB juga terus memprioritaskan hubungan mereka dengan Indonesia, dan tidak bersikap aktif dalam memberi dukungan untuk penentuan nasib sendiri di luar PBB.

308. Sikap ini ditunjukkan oleh banyak anggota PBB lainnya. Pemerintah negara-negara Barat seperti Kanada dan Selandia Baru serta pemerintah negara-negara Asia seperti India, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand, semua sangat berpihak kepada Indonesia. Secara umum, satu-satunya pengecualian yang mencolok adalah Portugal, bekas koloni-koloninya di Afrika, dan beberapa negara kecil.

309. Sikap resmi internasional mengenai masalah Timor-Leste diwarnai oleh pola pikir yang muncul pada masa Salazar, dan dikembangkan lebih jauh serta semakin mengakar pada 1970-an. Pemikiran ini bersifat sangat negatif dan sangat merugikan aspirasi dan hak-hak rakyat Timor. Pemerintah negara-negara mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan menyatakan bahwa mereka tidak mendukung cara Indonesia melakukan penggabungan, tetapi tujuan umum

* Ini termasuk USD2 juta untuk para pengungsi Timor dan sumbangan yang sangat besar untuk Trust Fund (TFET) yang dibentuk untuk rekonstruksi Timor-Leste. Siaran Pers Departemen Luar Negeri Jepang, 4 Oktober 1999.

dari pendekatan mereka, kalau bukan niat mereka, adalah untuk melegitimasi dan mengonsolidasi pengambilalihan Indonesia. Aspek-aspek utama pola pikir ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kemerdekaan bagi Timor Timur tidak mungkin atau tidak diinginkan. Pandangan bahwa negara Timor merdeka tidak dapat berkembang secara ekonomi, sosial, atau politik, dianggap sudah jelas dengan sendirinya pada periode 1960-an, dan secara luas beredar dalam kalangan resmi di Portugal, Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat pada saat itu. Hal ini menjadi dogma pada tahun 1970-an, dan setelah Fretilin muncul diwarnai pula oleh pandangan bahwa negara kecil yang lemah dalam kepulauan Indonesia akan menjadi ancaman bagi stabilitas regional. Namun, sangat mungkin bahwa negara Timor merdeka yang dipimpin oleh UDT juga tidak akan dapat diterima.*
2. Setengah dari Pulau Timor di bagian timur secara alami merupakan bagian Indonesia. Pandangan ini dipromosikan sebagai sesuatu yang jelas kepada siapapun yang mempelajari lokasi Timor di peta dalam hubungannya dengan Indonesia. Presiden Soeharto dan rakyat Timor pendukung integrasi menegaskan bahwa dalam pandangan mereka, bangsa Timor Timur dan Indonesia adalah saudara dan bahwa integrasi adalah reuni yang “alamiah” setelah berabad-abad dipisahkan oleh kolonialisme Eropa.† Para penyusun kebijakan Barat juga memilih menggambarkan integrasi, dalam kata-kata Henry Kissinger, sebagai “evolusi normal setelah akhir kekuasaan kolonial”.¹⁷⁸
3. Indonesia dipaksa oleh keadaan untuk turut campur. Sejak 1960-an, Indonesia terus menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa ia tidak memiliki klaim legal atau ambisi teritorial atas Timor Portugis. Penggabungan Timor-Leste akan lebih merupakan “reaksi defensif ketimbang sebuah keharusan nasionalis”.¹⁷⁹ Selain menyebutkan alasan keamanan, Indonesia juga mencoba memberi pembenaran pada pengambilalihannya atas dasar kemanusiaan. Jusuf Wanandi, penasihat Presiden Soeharto, mengatakan kepada pers Kanada pada 1984:

* Setelah mengunjungi wilayah itu pada awal 1978 setelah pengambilalihan Indonesia, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Roger Peren, menuliskan: “Kesimpulannya, rakyatnya miskin, kecil, dijangkiti penyakit, dan hampir semuanya tidak bisa baca-tulis, sangat sederhana, dan, seperti yang berulang kali diberitahukan kepada kami, ‘primitif’... ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan ketika menilai kapasitas mereka untuk mengambil bagian dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri, atau bahkan bertindak sebagai warga negara yang tanggung jawab dari sebuah negara merdeka.” 13 Januari 1978, NZ...OIA Material, Volume 1.

† Pandangan ini semakin diterima di Indonesia dan menjelaskan rasa “sakit” di beberapa bagian ketika rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan dari Indonesia. Lihat, contoh, buku Lela E Madjiah yang berjudul *Timor Timur: Perginya Si Anak Hilang*, Pustaka Antara Utama, Jakarta, 2002. Melaporkan kematian Jenderal Benny Moerdani pada 2004, David Jenkins menuliskan: “Moerdani selalu menganggap Timor-Leste berada dalam Indonesia, dan menelan kepahitan ketika pada 1999 Presiden Habibie, yang selalu tidak ia sukai, memperkenankan Timor-Leste memilih keluar dari republik itu”. *Sydney Morning Herald*, 10 September 2004.

*Kami bangun pada suatu hari, dan menyadari adanya kekacauan tepat di depan pintu kami. Portugis telah meninggalkan kekosongan...Tempat itu sangat kacau. Saya pikir kami kurang-lebih dipaksa untuk melakukan apa yang telah kami lakukan.*¹⁸⁰

Klaim ini didengungkan secara internasional selama masa konflik. Bahkan, pada 1995 Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Don McKinnon, menyangsikan bahwa penggabungan Indonesia bisa disebut sebagai ‘invasi’, dan mengatakan bahwa Indonesia turut campur karena adanya “masalah pengungsi yang besar”, dan untuk “mendukung pihak yang lemah” dalam sebuah perang saudara.¹⁸¹

4. Secara politik, Fretilin tidak dapat diterima ataupun sah. Indonesia dan rakyat Timor yang prointegrasi mendorong sentimen anti-Fretilin dengan mengutuk Fretilin sebagai komunis, teroris, tak representatif, dan haus kekuasaan. Meskipun negara-negara Barat dan pejabat-pejabat lainnya tidak setuju dengan kebanyakan klaim Indonesia, pemerintah banyak negara sering bersikap menentang Fretilin dan menolak berhadapan dengan wakil-wakilnya, walaupun PBB menerima Fretilin sebagai jurubicara yang sah bagi Timor-Leste.
5. Pendudukan Indonesia tidak dapat diubah. Hal ini dianggap jelas secara matematis karena jumlah kekuatan Indonesia yang sangat dominan; dan istilah “tidak dapat diubah” muncul kembali bagaikan mantra, dalam pernyataan-pernyataan resmi yang dilayangkan selama bertahun-tahun.^{*} Banyak pemerintah memberi suara menentang resolusi mengenai Timor-Leste di PBB dengan dasar bahwa kedaulatan Indonesia merupakan sesuatu yang sudah diputuskan (*fait accompli*). Untuk alasan yang sama, mereka memperkecil masalah itu secara internasional menjadi masalah bilateral kecil antara Portugal dan Indonesia, yang penyelesaiannya harus dibantu oleh PBB.

Vatikan[†]

Pendahuluan

310. Gereja Katolik merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam persoalan Timor-Leste selama mandat Komisi periode 1974 - 1999. Perjuangan dekolonisasi berdampak berat pada Gereja dan melibatkan semua kalangan, mulai

^{*} Jill Jolliffe terbukti benar ketika ia mengamati pada 1978 bahwa “satu-satunya yang tidak bisa diubah tentang Timor Timur adalah pembunuhan.” *East Timor: Nationalism and Colonialism*, University of Queensland Press, 1978, hal. 304.

[†] Komisi telah mencatat berbagai sumber untuk bagian ini, termasuk kesaksian langsung yang diungkapkan kepada CAVR. Komisi ingin memberikan penghargaan khusus kepada Arnold Kohen dan Pastor Patrick Smythe atas submisi dan saran mereka. Arnold Kohen adalah penulis *From the Place of the Dead – Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, 1999. Patrick A. Smythe adalah penulis *The Heaviest Blow – The Catholic Church and the East Timor Issue*, Lit Verlag Munster, 2004.

dari akarrumput hingga eselon teratas hierarki Gereja di Roma. Pentingnya isu ini bagi Gereja dan kepentingan politik Vatikan atas pemerintah Indonesia jelas tampak dari fakta bahwa Paus Yohanes Paulus II adalah satu-satunya pemimpin dunia yang mengunjungi wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Bagian ini mengupas bagaimana Vatikan menanggapi dukungan kuat Gereja lokal terhadap rakyat Timor-Leste dalam hak penentuan nasib sendiri bagi warga.

Latar belakang keterlibatan Vatikan

311. Vatikan memiliki pengaruh dan jangkauan yang penting, baik secara langsung melalui jalur-jalur resminya maupun secara tidak langsung melalui keanggotaan sekitar satu miliar umat dan jaringan institusinya, yang banyak di antaranya ditempatkan secara strategis. Berpusat di Roma dan dipimpin oleh Sri Paus, Vatikan merupakan otoritas pusat Gereja Katolik Romawi. Aktivitas politik dan diplomatik Vatikan diatur oleh Menteri Luar Negeri, jabatan terpenting di bawah Paus. Vatikan memiliki hubungan diplomatik formal dengan sebagian besar negara, dan mempertahankan kira-kira 100 misi diplomatik permanen di luar negeri. Misi diplomatik ini meliputi Washington, Lisabon, Canberra, dan Jakarta, di mana perwakilan Vatikan dibuka pada 1965. Vatikan (atau ‘Takhta Suci’) mempunyai misi pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1964; karena itu, Vatikan memiliki suara dalam keputusan-keputusan PBB, tetapi tidak memiliki hak suara. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Eropa dan sebagian besar badan-badan khusus PBB. Stasiun radio resminya, Radio Vatican, didengar luas di Eropa. Surat kabar semi-resmi Vatikan, *L'Osservatore Romano*, diterbitkan setiap hari dalam bahasa Italia, dan setiap minggu dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, dan Prancis.

312. Konsili Vatikan Kedua, yang berakhir sepuluh tahun sebelum invasi Indonesia, memerintahkan agar jaringan dan sumberdaya Vatikan harus digunakan untuk melayani kebenaran, perdamaian, dan keadilan, khususnya bagi mereka yang miskin dan papa. Gereja dan negara mempunyai peran yang berbeda, dan Gereja Katolik, meskipun sangat sentralistik, tidaklah monolitik. Sebagai pusat institusi global, Vatikan berhadapan dengan banyak dilema dan tekanan kebijakan dari kepentingan yang bertentangan, baik di dalam maupun di luar komunitas Katolik. Di sisi lain, benarlah bahwa Vatikan memiliki sumberdaya dan pengaruh penting dan, khususnya dalam kasus Timor-Leste, memiliki informasi yang lengkap tentang situasi dan aspirasi Gereja lokal, yang dianggap menjadi tanggungjawab langsung Vatikan.

Gereja Katolik di Timor-Leste

313. Gereja Katolik di Timor-Leste memiliki tiga pemimpin selama periode 1974-1999: Uskup José Joaquim Ribeiro, Dom Martinho da Costa Lopes, dan Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB. Selama pendudukan Indonesia, setiap pemimpin ini awalnya berusaha mengakhiri kekerasan melalui dialog dan perwakilan langsung kepada otoritas sekuler. Ketika upaya ini gagal, mereka masing-masing beralih

mengambil peran yang semakin vokal untuk melindungi hak rakyat. Sejak sekitar 1983, Gereja mengimbau adanya penentuan nasib sendiri, karena yakin bahwa penentuan hak kolektif tersebut merupakan kunci untuk mencapai perdamaian sejati dan dinikmatinya hak-hak individu. Peranan profetik Gereja lokal ini, dan advokasinya untuk hak politik atas penentuan nasib sendiri, merupakan tantangan terbesar bagi Vatikan dalam masalah Timor-Leste, meskipun Vatikan pada prinsipnya juga mendukung hak penentuan nasib sendiri.

Dom José Joaquim Ribeiro (1966-77)

314. Uskup Ribeiro yang berkebangsaan Portugis memimpin Gereja selama dua tahun terakhir pemerintahan Portugis, dan selama dua tahun pertama pendudukan Indonesia.

315. Sebelum invasi Indonesia, peran dan status Gereja di Timor-Leste ditentukan dalam Konkordat 1940 antara Vatikan dan Portugal. Berdasarkan kesepakatan ini, Gereja di Timor-Leste menikmati beberapa keistimewaan termasuk subsidi negara, pengecualian pajak, dan hibah tanah yang luas. Gereja juga tanggung jawab atas pendidikan dan merupakan agen utama “misi pemberadaban” Portugal.^{*} Hubungan istimewa ini berakhir dengan terjadinya Revolusi Anyelir di Portugal. Sebagai bagian integral sistem kolonial kuno, Gereja benar-benar ditantang oleh perubahan lingkungan politis. Suatu periode kebimbangan serta kegelisahan akut pun menyusul, diperparah oleh kekerasan perang saudara dan bayangan invasi Indonesia.

316. Di Timor-Leste, program Fretilin mencakup kritik terhadap peran Gereja dalam masa kolonialisme dan kepemilikan Gereja atas lahan-lahan luas. Beberapa pejabat Gereja dan pastor lebih berpihak pada UDT karena mengkhawatirkan tersebabnya paham komunisme di wilayah mereka. Uskup Ribeiro secara terbuka menuduh Fretilin sebagai “komunis”. Dalam Surat Gembala yang dikeluarkan pada 25 Januari 1975, ia melarang umat Katolik memilih Komunis atau Sosialis, tetap membela hak atas properti pribadi, dan memperingatkan bahwa Marxisme mengancam “menghilangkan nilai-nilai positif rakyat Timor”.[†] Meskipun kemudian diubah, pandangan-pandangannya memengaruhi persepsi Gereja tentang Fretilin dan sikap Vatikan serta beberapa negara yang menerima pengungsi perang saudara di Timor-Leste, khususnya Indonesia, Portugal, dan Australia.

* Dalam situasi gejolak pemikiran Gereja di seputar Konsili Vatikan Kedua (1962-1965) dan gerakan pembebasan di Afrika, beberapa misionaris memanfaatkan perannya sebagai pengajar untuk mengkritik kolonialisme dan mengenalkan murid-murid mereka kepada ide-ide baru. Hal ini secara nyata dilakukan oleh seminari di Dare yang dikelola Yesuit, yang menjadi alma mater banyak pemimpin nasionalis masa depan.

† Patrick A. Smythe, *‘The Heaviest Blow’ – The Catholic Church and the East Timor Issue*, Lit Verlag, Münster, 2004, hal. 36. Uskup Atambua di Timor Barat, Indonesia, Theodore van den Tillart SVD, juga menggambarkan Fretilin sebagai Marxis kepada Kardinal Knox dari Australia dan berkata bahwa Fretilin mendapat bantuan dari gerakan komunisme internasional serta bersalah atas pelanggaran hak-hak asasi manusia yang meluas. Kardinal Knox kemudian bertugas di Vatikan. Smythe, 72.

317. Invasi dan aneksasi Indonesia atas Timor-Leste terjadi menjelang akhir masa kepausan Paus Paulus VI (1963 - 1978). Paulus VI memainkan peran utama dalam pembentukan dan penerapan perubahan yang diperkenalkan Konsili Vatikan, termasuk doktrin Konsili tentang keadilan sosial. Ia sangat menentang kekerasan dan memberikan pidato tak terlupakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1963, saat ia mendeklarasikan “tak ada perang lagi, perang tak akan ada lagi” (“*no more war, war never again*”).¹⁸² Menteri Luar Negeri Vatikan, Jean-Marie Cardinal Villot (1969-79), mengetahui dengan baik invasi tersebut, serta akibat-akibat kemanusiaannya, dari beberapa sumber. Hal ini juga berlaku pada Uskup Ribeiro, yang berharap intervensi militer Indonesia akan berjalan setenang aksi India di Goa; tapi ia benar-benar terganggu dengan apa yang ia saksikan. Pada awal 1976 ia berkata kepada pemerintah Indonesia bahwa “pasukan Indonesia, dengan pembunuhan, pelanggaran, dan penjarahan yang dilakukannya, ribuan kali lebih buruk” (daripada Fretilin); dan menambahkan, bahwa “pasukan terjun payung Indonesia turun dari langit seperti malaikat tetapi kemudian berperilaku seperti setan”.¹⁸³ Ribeiro terus melakukan protes hingga, karena kecewa, mengundurkan diri ke Portugal pada 1977.

318. Meskipun demikian, Komisi belum bisa mendapatkan bukti bahwa Paus Paulus VI membuat tanggapan umum mengenai invasi tersebut, atau menggunakan jabatannya untuk memperkuat tuntutan Dewan Keamanan PBB tentang penarikan pasukan Indonesia.

319. Duta Besar Vatikan di Jakarta, Vincenzo Farano (1974-80), juga menerima banyak informasi. Ia percaya bahwa Gereja tidak perlu takut akan berintegrasinya Timor-Leste dengan Indonesia. Tetapi, seperti halnya Uskup Ribeiro, ia terkejut dengan adanya kekerasan. Untuk menanggapi hal tersebut secara pribadi, ia menyediakan bantuan medis dan melakukan kunjungan berkala ke Timor-Leste, termasuk berkunjung ke wilayah yang dikuasai Fretilin dan ke tempat-tempat pengungsian para pengungsi perang saudara di Timor Barat. Meskipun berada lebih jauh, Wakil Paus di Australia juga mengetahui perkembangan di Timor-Leste dari media dan sumber-sumber seperti Komisi Katolik Australia untuk Keadilan dan Perdamaian, yang mengeluarkan serangkaian pernyataan tentang Timor-Leste pada 1975 dan 1976.

Dom Martinho da Costa Lopes (1977-83)

320. Uskup Ribeiro mengundurkan diri pada 23 Oktober 1977. Karena kasus Timor-Leste yang tidak jelas, Vatikan kemudian mengambilalih pengelolaan Gereja lokal secara langsung, ketimbang menggabungkannya dengan Gereja Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan pemimpin agama setempat, Vatikan menunjuk Dom Martinho da Costa Lopes sebagai Administrator Apostolik dan menjadikannya putra asli Timor pertama yang menjadi pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste. Ia langsung tanggung jawab kepada Vatikan melalui Duta Besar Vatikan di Jakarta.*

.....
* Monsignor Lopes tidak ditahbiskan sebagai uskup, tetapi karena posisinya, orang-orang Timor-Leste biasanya menganggapnya sebagai uskup.

321. Secara politik pengaturan ini penting. Hal ini menunjukkan dukungan Vatikan terhadap proses PBB tentang penentuan nasib sendiri, bukannya terhadap klaim Indonesia bahwa status politik wilayah ini telah diputuskan. Diwawancarai di Roma pada 1980, para pejabat Vatikan menyatakan bahwa mereka menganggap Timor-Leste sebagai “negeri terjajah” tempat tidak ada tindak nyata untuk mendorong penentuan nasib sendiri. Mereka menambahkan bahwa Vatikan tidak akan mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, sampai jelas bahwa hal itu merupakan keputusan rakyat Timor-Leste yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁸⁴ Sejalan dengan kebijakan ini, Vatikan mempertahankan tanggungjawab langsung atas Gereja lokal sepanjang masa konflik, dan dengan demikian memberi perlindungan serta akses internasional bagi para pejabatnya, dan menolak tekanan dari Indonesia untuk melakukan integrasi eklesiastis. Namun, Vatikan tidak mengumumkan ataupun memajukan posisinya secara internasional. Sangat sedikit umat Katolik atau publik internasional umum yang mengetahui bahwa Vatikan mendukung hak warga atas penentuan nasib sendiri.

322. Masa jabatan Monsignor Lopes cukup singkat. Selama tiga tahun pertama, ia menerapkan pendekatan kooperatif dalam pembicaraannya dengan otoritas Indonesia mengenai banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh para pastor dan pihak-pihak lain kepadanya. Ia juga selalu memberi informasi baru kepada para uskup Indonesia dan Wakil Paus di Jakarta. Komisi tidak berhasil menemukan catatan apapun bahwa Vatikan membuat intervensi publik atau peranan yang mendukung selama periode ini.

323. Sejak 1981, hubungan Monsignor Lopes dengan Vatikan dan militer Indonesia memburuk, dan pada April 1983 ia mengundurkan diri di bawah tekanan dari kedua pihak tersebut. Alasan retaknya hubungan dengan Vatikan berkaitan dengan perbedaan pandangan yang mendasar tentang isu Timor-Leste dan bagaimana menanganinya. Masa ini merupakan periode krisis yang hebat setelah kekalahan besar Resistansi, kelaparan, dan, pada pertengahan 1981, penyerangan militer baru terhadap Fretilin. Vatikan juga prihatin bahwa meningkatnya keterlibatan Gereja dalam konflik ini akan membahayakan Gereja di Indonesia.

324. Kementerian Luar Negeri Vatikan di bawah pimpinan Kardinal Agostino Casaroli (1979-1990) memiliki pandangan yang sama dengan pandangan banyak negara bahwa pengambilalihan oleh Indonesia bersifat menetap, baik secara internal maupun secara diplomatik, dan bahwa perlawanan yang terus berlanjut tidak ada gunanya dan bahkan berbahaya. Pat Walsh menginformasikan kepada Komisi bahwa pada 1980 Wakil Paus di Jakarta, Monsignor Pablo Puente, dan rekannya di PBB di New York, Monsignor Ettore de Filippo, memberitahu kepadanya bahwa pengambilalihan oleh Indonesia adalah *fait accompli*; bahwa pembangunan di masa Indonesia lebih baik daripada pembangunan di masa Portugal; bahwa Vatikan

.....
* Dalam laporan Mei 1980 ke Vatikan, para uskup Indonesia, yang juga mendapat tekanan dari pemerintah mereka, meminta “Takhta Suci mempertimbangkan dan memikirkan status Gereja Katolik di Timor-Leste sehingga Gereja Timor-Leste dapat sepenuhnya masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia”. Mengutip Smythe, hal 59.

tanggung jawab melindungi kepentingan Gereja lokal, dan bahwa hal ini dapat tercapai melalui kerjasama dengan Indonesia.¹⁸⁵ Vatikan juga percaya bahwa usaha diplomasi diam-diam lebih produktif daripada diplomasi publik.* Hasil positif pendekatan ini dapat ditunjukkan dalam beberapa hal, contohnya, pengenalan Tetum sebagai bahasa katekis dan liturgi—suatu kontribusi yang signifikan bagi bertahannya kebudayaan—dan pemberian visa kepada para misionaris. Monsignor Puente juga percaya bahwa Indonesia telah menerima bahwa pendekatan militer yang menindas adalah salah, dan bahwa mereka mendengarkan usulannya mengenai peran substansial Gereja.

325. Monsignor Lopes memiliki sudut pandang yang sepenuhnya berbeda, yang secara efektif menyimpang dari strategi Vatikan dan serupa dengan pembangkangan. Setelah enam tahun yang sulit dan mengecewakan, ia tidak memiliki pandangan yang sama dengan keyakinan Vatikan pada militer dan integrasi. Pada Mei 1981, untuk pertama kalinya secara terbuka ia mengkritik tindakan kejam militer Indonesia. Kemudian, ketika ABRI menyalahkannya karena mereka merasa tidak didekati secara pribadi, Monsignor Lopes menanggapi dengan mengatakan bahwa pendekatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya kepada pejabat militer senior, termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Yusuf, tidak menghasilkan perubahan apapun.† Ia juga mengkritik Gereja. Pada Juli 1981, ia turut menandatangani pernyataan yang menegur Gereja Indonesia dan Vatikan atas sikap diam mereka. Menunjuk pada kematian lebih daripada 200.000 orang selama enam tahun sebelumnya, pernyataan tersebut menyuarakan kepedihan:

Kami tidak mengerti mengapa Gereja Indonesia dan Gereja Romawi Universal hingga saat ini belum menyatakan secara terbuka dan resmi solidaritas mereka dengan Gereja, penduduk, dan agama di Timor-Leste. Mungkin ini adalah tamparan terkeras bagi kami... Kami terpana karena sikap diam ini, yang membiarkan kami mati ditinggalkan.¹⁸⁶

326. Ia tidak setuju bahwa rakyat Timor-Leste harus menyerah. Ia mengadvokasi pendekatan antikekerasan, tetapi membela hak pembelaan diri Fretilin dan bekerjasama dengan pemimpin Resistansi, Xanana Gusmão.[‡]

.....
* Wakil Vatikan untuk PBB, Monsignor Renato Martino, memberitahu Patrick A Smythe: "Takhta Suci bertindak dengan cara sangat tenang, diam-diam... Tidak ada tiupan terompet, tidak ada keinginan publikasi". Op.cit. 191. Monsignor de Filippo berkata kepada Pat Walsh bahwa pada saat itu ia memiliki pandangan pasif tentang Timor-Leste di PBB.

† Rowena Lennox mengutip perkataan Administrator Apostolik tentang masa ini: "Berdasarkan ciri kenabian misi saya, saya merasakan keinginan kuat untuk memberitahu seluruh dunia... tentang genosida yang dilakukan di Timor, sehingga, saat kita mati, paling tidak dunia tahu kita mati berjuang." *Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa Lopes*, Pluto Press, 2000, hal 174.

‡ Atas permintaan Xanana Gusmão ia menyelundupkan berkas-berkas ke luar Timor-Leste untuk Delégasi Eksternal Fretilin, yang membahayakan militer Indonesia, serta rekaman dan foto pembicaraan gencatan senjata pada 1983. Ia membicarakannya dalam sebuah seminar di Melbourne pada Oktober 1983: "Jose Gusmão Xanana berkata Fretilin adalah rakyat dan rakyat adalah Fretilin. Ini benar." *ACFOA East Timor Report*, No. 5.

327. Pada 1981, Vatikan menolak permintaan Monsignor Lopes untuk bertemu Sri Paus. Pada 1982, Vatikan menyalahkan Monsignor Lopes setelah ia menjadi pusat kontroversi mengenai masalah kelaparan di Timor-Leste setelah penyerangan militer pada 1981. Monsignor Puente mengkritik Administrator Apostolik dalam sebuah pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam. Whitlam yang pernah mengunjungi Timor-Leste tidak percaya bahwa Timor-Leste mengalami kekurangan pangan. Catatan Pemerintah Australia tentang pertemuan ini menyatakan bahwa: “Puente berbicara tentang Administrator secara hati-hati tetapi sangat penuh kritik. Whitlam berkata, ia beranggapan Administrator bertingkah laku ‘keji’. Puente tidak mengungkapkan keberatan.”^{*} Dalam perbincangan dengan pihak Keuskupan Australia, Menteri Luar Negeri Vatikan mengkritik Monsignor Lopes yang melebih-lebihkan situasi pangan dan, dalam kritik terselubung mengenai Administrator, meminta agar isu sulit dan peka tentang Timor-Leste ditanggapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Pada Maret 1983, Jenderal Benny Moerdani, seorang Katolik, ditunjuk menjadi kepala pasukan bersenjata Indonesia dan menekan Monsignor Puente untuk mengganti Monsignor Lopes. Hal ini terjadi pada April dan pada 17 Mei Monsignor Lopes terbang meninggalkan Dili bersama Wakil Paus.[†] Fretilin menolak seruan untuk menyerah yang dikeluarkan Jenderal Moerdani pada Agustus, dan serangan baru diluncurkan oleh militer Indonesia.

328. Rekan-rekan sesama pastor Monsignor Lopes marah atas perlakuan terhadap Monsignor Lopes. Dalam surat yang ditulis pada April kepada uskup-uskup Katolik sedunia, sekelompok pastor memuji Monsignor Lopes karena acap menjadi “satunya suara yang muncul membela mereka yang dipaksa bisu dan takut, dan bagi mereka yang penegakan kebebasan berekspresi hanya akan mengakibatkan penahanan atau penghilangan”. Pernyataan mereka mengungkapkan “kekecewaan” dan “luka yang dalam” pada “kampanye pencemaran nama baik” yang dilakukan untuk melawan Monsignor Lopes.¹⁸⁷

329. Dalam perjalanannya ke Portugal, Monsignor Lopes diterima oleh Paus Yohanes Paulus II di Roma, dan ia menggambarkan secara positif sikap Sri Paus. Ia juga bertemu dengan Kardinal Casaroli dan berkata kepadanya “pendapat Anda tentang Timor-Leste salah.” Ia kemudian mengunjungi banyak negara di Eropa, Amerika Utara, dan Kepulauan Pasifik untuk menyuarakan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta, meskipun di beberapa tempat ia tidak diperhitungkan sebagai saksi yang dapat dipercaya, berkontribusi terhadap mobilisasi berbagai badan Gereja untuk mendukung Timor-Leste. Ia tidak kembali ke negara tempat kelahirannya dan meninggal di Portugal pada 1991.

^{*} Submisi dan informasi tambahan dari Hon. E.G. Whitlam, Australian Senate Inquiry into East Timor, 1999, hal. 18 dan 97. Whitlam mempublikasikan secara luas kritiknya terhadap Monsignor Lopes, khususnya di Australia.

[†] José Ramos-Horta mengenang bahwa Monsignor Lopes mengatakan kalau pengunduran dirinya dilakukan karena tekanan politik tetapi menerima hal ini “sebagai rencana Tuhan” dan tidak pernah mengecam Paus atau Monsignor Puente. *Funu*, hal 203-4. Semua catatan menunjuk intervensi Jenderal Moerdani, meskipun jelas bahwa Vatikan telah kehilangan kepercayaan pada Administratornya.

Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB (1983-2003)

330. Penunjukan Dom Carlos Filipe Ximenes Belo oleh Vatikan dilakukan tanpa diadakan pembicaraan yang semestinya dengan para pastor setempat, dan awalnya ia tidak disukai pastor-pastor di Timor-Leste, khususnya dalam konteks pengunduran diri Monsignor Lopes. Monsignor Belo dengan hati-hati menolak berperan politik, yang merusak hubungannya dengan pihak Resistansi, tetapi seperti halnya dua pendahulunya, ia perlahan-lahan terpaksa menjadi lebih vokal. Ia menjelaskan gejala-gejala tersebut dalam surat kepada Wakil Paus di Jakarta:

Sejak 1983, tahun saya ditunjuk sebagai Administrator Apostolik, setiap tahun kami menyaksikan penganiayaan-penganiayaan serupa. Kami telah berbicara dengan pihak otoritas, tetapi tidak ada hasil. Rakyatlah yang selalu menderita.¹⁸⁸

331. Sejak awal masa jabatannya sebagai uskup, ia membaktikan dirinya kepada penentuan nasib sendiri baik sebagai hak maupun sebagai rumusan perdamaian abadi. Pada 5 Desember 1984, ia menulis surat kepada Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian di Prancis:

Meskipun semua kekuatan melawan kami, kami tetap bersikukuh bahwa satu-satunya solusi konflik Timor-Leste adalah solusi politik dan diplomatik, dan konsep ini tetap kami sebarluaskan. Solusi tersebut harus mencakup, di atas segalanya, penghormatan hak rakyat atas penentuan nasib sendiri. Kami pun berharap bahwa imbauan Paus Yohanes Paulus II kepada Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci, yaitu [tentang] penghargaan atas identitas kultural, etnik, dan religius masyarakat Timor-Leste, diwujudkan. Selama hal ini tidak diterapkan, tidak akan ada solusi damai bagi Timor-Leste.¹⁸⁹

332. Sebagai tanda kepercayaan, Vatikan mengangkat Monsignor Belo sebagai Uskup pada 1988. Pada Februari 1989, uskup baru ini mengulangi dukungannya bagi penentuan nasib sendiri dalam sepucuk surat pribadi kepada Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar. Surat-surat serupa dikirimkan ke Presiden Portugal dan Sri Paus. Surat Uskup Belo tersebut menantang Sekretaris Jenderal untuk melangkah melampaui hubungannya dengan Portugal dan Indonesia serta meminta pendapat rakyat Timor-Leste secara langsung melalui referendum. Surat tersebut secara eksplisit menolak pernyataan yang dipertahankan Indonesia bahwa Timor-Leste telah sepenuhnya menjalankan hak penentuan nasib sendiri, dan menyiratkan bahwa pernyataan-pernyataan partai politik Timor-Leste tentang status Timor-Leste juga cacat. Uskup Belo menulis:

Rakyat Timor-Leste harus diizinkan memilih masa depan mereka melalui referendum. Hingga saat ini masyarakat Timor-Leste tidak diajak bicara. Pihak lain berbicara atas nama mereka. Indonesia menyatakan bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih integrasi, tetapi

rakyat Timor-Leste sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Portugal menginginkan waktu untuk menyelesaikan persoalan. Dan kami terus mati sebagai manusia dan sebagai bangsa.

333. Menanggapi tekanan untuk menarik surat tersebut, Uskup menyatakan bahwa ia tidak mengadvokasi satu pilihan politik di atas pilihan politik lain, tetapi menegaskan prinsip demokratik. Wakil Paus, Monsignor Canalini, menjauhkan diri dari surat tersebut dengan menyatakan bahwa isi surat tersebut merupakan pandangan pribadi Uskup Belo semata.^{*} Pada 1987, ia menyatakan posisi resmi Vatikan dalam wawancara dengan salah satu media Indonesia, tetapi dinyatakannya bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan uraian hukum ketimbang kenyataan. Pada 1990, dalam sebuah acara kebaktian di Dili, ia diminta menjelaskan posisi Vatikan tentang Timor-Leste, tapi ia menolak.

334. Sikap Uskup Belo sangat menegaskan hubungannya dengan pihak Resistansi dan menjadikannya peraih Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1996. Anugerah bergengsi ini, yang diterimanya bersama-sama dengan José Ramos-Horta, membuat perhatian internasional terpusat pada pentingnya penentuan nasib sendiri, dan berperan dalam momentum yang mencapai puncaknya pada pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri ini pada Agustus 1999. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Kepausan, Kardinal Roger Etchegaray, yang melakukan kunjungan yang disambut baik ke Timor-Leste pada Februari tahun itu, bergabung dengan Uskup Belo pada upacara penganugerahan di Oslo.[†]

335. Vatikan tidak setuju kalau uskup-uskup lain mengeluarkan pendapat tentang Timor-Leste. Menanggapi surat Uskup Belo kepada PBB, Dom Manuel da Silva Martins, Uskup Setubal di Portugal, mengumpulkan tandatangan dari 160 uskup dalam surat dukungan yang dikirimkan kepada PBB. Kardinal Casaroli melarang Dom Manuel da Silva Martins mengirim surat tersebut, dan juga melarangnya berbicara secara terbuka tentang persoalan tersebut. Dom Manuel tidak sependapat, dan larangan dilonggarkan setelah pembantaian Santa Cruz pada 1991.[‡] Uskup Soma dari Jepang, yang mengumpulkan 1.257 tandatangan anggota Gereja untuk surat dukungan serupa yang dikirimkan kepada PBB, juga diperingatkan Vatikan. Suster Monica Nakamura memberitahu Komisi:

Suatu hari Uskup Soma memberitahu saya bahwa setelah ia menyatakan rasa solidaritasnya bagi Timor-Leste, ia menerima surat dari pejabat Vatikan yang bertanya kepadanya tentang siapa yang telah memberinya izin untuk melakukan hal semacam ini.

.....
^{*} *Readers Digest* melaporkan bahwa Wakil Paus memerintahkan Uskup Belo menjauh dari dunia politik. Paul Raffaele, "Hero of a Forgotten People", *Readers Digest*, Maret 1996. Edisi ini dilarang beredar di Jakarta.

[†] Uskup Belo mengomentari bahwa kunjungan Kardinal Etchegaray telah "mendorong kepercayaan terhadap Vatikan". *CIIR Timor Link*, Maret 1996.

[‡] Wakil Paus membuka semua referensi tentang Timor-Leste laporan-laporan *ad limina* lima tahunan hierarki Portugis atas dasar bahwa Dioses Dili bukan tanggungjawab Portugal lagi. Smythe op. cit. 91.

Dengan senyum lebar Uskup Soma berkata bahwa samasekali tidak perlu meminta izin untuk melakukan hal yang benar.¹⁹⁰

336. Di Australia, Uskup Hilton Deakin juga menolak berhenti mengeluarkan pernyataan terbuka.

Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor-Leste pada 1989

337. Banyak pihak berharap bahwa kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor-Leste pada 1989 akan menjelaskan ambiguitas dalam kebijakan Vatikan tentang wilayah ini dan menyatakan dengan tegas di mana Takhta Suci berpihak. Meskipun memahami pentingnya hal tersebut, ungkapan-ungkapan keprihatinan Sri Paus sebelumnya terbatas pada pengakuan tentang penderitaan di Timor-Leste, dukungan doa sepenuhnya, dan imbauan bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah lain untuk menghormati identitas rakyat Timor-Leste.* Karena mengetahui peran Sri Paus dalam mewujudkan perubahan politik di Polandia, rakyat Timor-Leste berharap Sri Paus akan memanfaatkan kunjungannya untuk mendukung penentuan nasib sendiri secara politik, tetapi juga khawatir kalau-kalau kunjungan ini akan mendukung kedaulatan Indonesia. Kunjungan tersebut tidak menghasilkan kedua-duanya. Sri Paus mengakui konflik ini dan menyatakan prinsip-prinsip untuk penyelesaian konflik, tetapi menekankan ciri pastoral kunjungannya serta menyatakan bahwa solusi politik adalah masalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan masalah Vatikan.

338. Dalam wawancara di radio Portugis pada 1991, Paus mengenang kunjungan tersebut:

Saya pergi ke Timor-Leste bukan sebagai seorang politikus tetapi sebagai Paus dan uskup, sebagai pastor Gereja yang mengunjungi berbagai komunitas Katolik... hal yang saya inginkan bagi komunitas tersebut—yang juga saya katakan selama kunjungan saya di Timor—adalah bahwa komunitas tersebut harus dapat hidup sejalan dengan prinsip-prinsip, kebiasaan, tradisi, dan agamanya sendiri. Masalah politik adalah masalah yang harus diangkat di tempat lain: Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saya harap—saya ungkapkan hal ini saat berada di sana, dan saya harus mengatakannya kembali kini—bahwa masalah Timor-Leste akan diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan serta hak-hak bangsa... Saya mempertahankan hubungan dengan uskup mereka, Monsignor Belo. Saya di sana juga memberikan perlindungan khusus bagi para korban... Namun satu hal yang harus ditekankan: apabila Anda berbicara tentang melupakan Timor-Leste, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan perasaan saya yang sebenarnya, karena saya berdoa bagi pulau itu setiap hari.¹⁹¹

.....
* Contohnya, misi yang diadakan Paus Yohanes Paulus II di Fatima pada 1982 diterjemahkan ke dalam bahasa Tetum.

339. Rakyat Timor-Leste sangat menghargai kunjungan Sri Paus. Yang paling penting adalah dia datang. Alex Gusmão, salah satu pelajar yang berdemonstrasi di dekat Misa Kepausan di Tasitolu, menyampaikan kepada Komisi:

*Kami merasa sangat bangga. Apabila ia hanya mengunjungi Indonesia, berarti ia menerima Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, tetapi ia mengunjungi kita. Hal ini memberi banyak harapan bagi kita.*¹⁹²

340. Masyarakat Timor-Leste membedakan Sri Paus dari birokrasi Vatikan yang tetap mereka kecam keras. Pemimpin Resistansi saat itu, Xanana Gusmão, yang menerima kunjungan Kepausan dengan tangan terbuka, pada 1991 menjawab pertanyaan tentang Vatikan:

Kami semua tahu tentang penyingkiran Monsignor Lopes dan penyingkiran para pastor Portugis, dan kami curiga suatu hari Monsignor Belo juga akan disingkirkan. Saya berpikir bahwa ini adalah tindakan tidak bermoral Vatikan, dan bahwa mereka bertindak berdasarkan kepentingan politik mereka sendiri. Pernyataan Pastor Tucci yang datang untuk mempersiapkan kunjungan Paus sangat mengejutkan. Ia berkata bahwa Vatikan tidak seharusnya mengorbankan kepentingannya hanya demi beberapa ratus ribu orang Katolik. Saya pikir ini bukan sikap yang benar. Kami terus merasakan pengaruh Jakarta pada Vatikan dan konsekuensi pengaruh yang dipaksakan Vatikan terhadap Gereja Timor-Leste.¹⁹³

341. Setelah kunjungannya, Paus Yohanes Paulus II memberikan lebih banyak penekanan pada kebutuhan akan adanya resolusi konflik yang damai dan benar. Untuk tetap sejalan dengan hal ini, misi Vatikan ke PBB menjadi lebih aktif dan melakukan protes terus-menerus untuk meminta hak-hak asasi manusia, dialog, dan pengurangan pasukan. Pada 1998, Sri Paus dan Menteri Luar Negeri, Kardinal Angelo Sardonio, membicarakan persoalan ini dengan Sekretaris Jenderal PBB dan memberikan dukungan mereka bagi proses PBB. Kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat pada Agustus 1999 memuakkan Sri Paus:

Kami tidak dapat menekan kepedihan kami yang sangat mendalam karena sekali lagi rasa kemanusiaan telah gagal ketika, menjelang kedatangan Milenium Ketiga, tangan-tangan pembunuh sesama saudara terangkat lagi untuk membunuh dan menghancurkan tanpa ampun... dalam usaha sia-sia untuk menghapus keinginan yang diungkapkan rakyat dan aspirasi sahnya...¹⁹⁴

Sikap Vatikan tentang Timor-Leste dan hubungan Vatikan dengan Indonesia

342. Vatikan tidak bertindak memobilisasi sumber-sumber globalnya untuk mendukung penentuan nasib sendiri secara politik yang dianggap Gereja setempat dan Administrator Apostoliknyanya sebagai kunci menuju perdamaian. Hal ini tidak dilakukan karena tiga pertimbangan yang berkaitan: konsep Vatikan tentang misi Gereja, perhatian bagi Gereja Katolik di Indonesia, dan *modus operandi* diplomatik Vatikan.

343. Misi Gereja ditegaskan pada Konsili Vatikan II (1962-65). Secara singkat, Konsili ini mengikat Gereja modern pada misi spiritual dan sosial di dunia, terbebas dari sistem politik apapun. Namun, Vatikan dan Gereja Timor-Leste berbeda dalam interpretasinya atas misi tersebut dalam konteks krisis di Timor-Leste. Gereja lokal, yang telah menjadi bagian dari sistem kolonial Portugis, kini menekankan basis komunitasnya, independen dari negara dan peran profetik.^{*} Vatikan cenderung menggunakan pendekatan konsiliasi dan prinsip-prinsip yang ditekankan tanpa bersikap langsung atau spesifik. Vatikan juga beranggapan bahwa kebijakan dan pengelolaan isu Timor-Leste merupakan hak prerogatifnya, dan bukan tanggungjawab perwakilan setempat.

344. Tanggapan Vatikan juga dibentuk oleh tanggungjawabnya atas kesejahteraan dan misi Gereja di Indonesia, serta kepekaan terhadap situasi Gereja di Indonesia sebagai kelompok minoritas di negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pada pertemuan pertama mereka pada 1985, Sri Paus berbicara kepada Uskup Belo:

Saya memahami posisi Anda. Saya berdoa bagi Timor. Saya menderita untuk Timor. Namun, di sisi lain, Gereja di Indonesia juga perlu perhatian kami.¹⁹⁵

345. Sejak Indonesia merdeka, hubungan Gereja - Negara di Indonesia secara umum baik. Sebagaimana yang terjadi di Timor-Leste, kemerdekaan didukung secara aktif oleh banyak pihak dalam Gereja Katolik, hal yang mengakibatkan berdirinya negara sekuler dan bukan negara Islam. Hubungan ini makin erat setelah Jenderal Soeharto mulai berkuasa pada 1965. Gereja, bekerjasama dengan pihak militer dan Soeharto, berperan dalam “mengimunitasi” masyarakat terhadap komunisme, dan bergabung dengan Orde Baru sebagai rekan dalam pembangunan bangsa melalui, di antaranya,

* Dalam jumpa pers pada 1996, Uskup Belo berkata: “Saya sepenuhnya tahu norma-norma Gereja Katolik yang mengharuskan pemimpin agama tidak turut dalam praktik politik nyata yang menjadi bidang para politikus. Namun, sebagai uskup saya memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan suara orang-orang miskin dan sederhana yang, ketika diintimidasi atau diteror, tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau menyuarakan penderitaan mereka.” 25 November 1996. Pastor Indonesia Romo Mangunwijaya mendukung usaha Uskup Belo dan berkata bahwa Pancasila, dasar negara Indonesia, juga mengharuskannya berbicara demi kepentingan publik.

jaringan institusi kesehatan dan pendidikannya yang disegani.* Orang-orang Katolik memperoleh beberapa posisi berpengaruh dalam pemerintahan Soeharto yang bertujuan melindungi Gereja dari Islam militan. Seperti halnya Gereja Indonesia, Vatikan enggan membahayakan stabilitas hubungan ini dengan mengaitkan diri terlalu dekat atau secara terbuka dengan isu Timor-Leste.† Vatikan juga menghargai keuntungan hubungan harmonis dengan Indonesia bagi hubungannya dengan seluruh dunia Islam, sehingga lebih suka melihat masalah Timor-Leste sebagai isu politik dan bukan agama. Vatikan takut masalah Timor-Leste dipandang sebagai isu agama apabila Gereja yang lebih luas terlibat lebih jauh dalam persoalan ini. Gereja Indonesia bukannya tidak peka atas penderitaan Timor-Leste dan permintaan Gerejanya, tapi mengakui hambatan politik yang dialami dan memberi dukungan terbatas untuk memberikan bantuan serta pendampingan dalam bentuk praktik. Dalam suratnya kepada Monsignor Belo tertanggal 17 November 1983, yang ditulis setelah Uskup Belo menjelaskan persoalan Timor-Leste kepada para uskup dalam sidang mereka, Konferensi Wali-Gereja Indonesia menulis:

Gereja Katolik Indonesia... meskipun menghadapi banyak hambatan, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan solidaritas dan rasa persahabatan kepada umat dan seluruh rakyat Timor-Leste, yang sedang dibanjiri cobaan yang dahsyat baik secara fisik maupun spiritual.‡

346. Beberapa pastor Indonesia secara pribadi mendesak sikap yang lebih kuat yang, apabila diambil, mungkin akan memberikan lebih banyak pilihan bagi Vatikan.

347. Seperti yang telah disebutkan, Vatikan tidak melakukan diplomasi terbuka karena alasan kebijakan, atas dasar pemikiran bahwa konfrontasi membatasi opsi-opsi strategis, menutup pintu menuju dialog, dan tidak seproduktif protes pribadi. Sejalan dengan itu, pernyataan Vatikan tentang Timor-Leste bersifat umum ketimbang informatif; Vatikan tidak memublikasikan aktivitasnya atau mengancam militer Indonesia secara langsung, dan mencoba menahan siapapun yang melakukan hal tersebut. Kebijakan ini diberlakukan juga pada negara-negara lain yang berkaitan dengan Timor-Leste. Tidak ada bukti, contohnya, bahwa Vatikan menentang perdagangan senjata internasional dengan Indonesia, meskipun kebijakan Gereja menentang proliferasi senjata. Kebijakan untuk tidak menarik perhatian itu juga melindungi hubungan Vatikan dengan Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, Pastor Patrick Smythe menyimpulkan:

.....
* Peran Gereja Katolik pada masa pembersihan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terdokumentasikan dengan baik. Para uskup merasa cemas karena sejumlah pembunuhan dan meminta maaf karena tidak adanya tanggungjawab dari pihak mereka, yang mungkin berperan dalam pembunuhan yang kejam. Aktivis Katolik Harry Tjan dan Jusuf Wanandi, yang menjadi penasihat Presiden Soeharto dalam pengambilalihan Timor-Leste, secara aktif turut dalam aktivitas antikomunis dan menjalin hubungan erat dengan militer.

† Serangan-serangan sektarian atas gereja-gereja Kristen terjadi setelah Soeharto jatuh.

‡ Surat ini ditandatangani oleh Monsignor FX Hadisumarta, O.Cam dan Monsignor Leo Soekoto, SJ dengan mengatasnamakan Majelis Agung Wali-Gereja Indonesia (MAWI).

Secara umum Gereja memberikan ulasan terbatas tentang Timor-Leste dalam siaran radio atau publikasi cetaknya, dan dengan demikian gagal menjalankan tanggungjawabnya yang diproklamasikan “untuk melengkapi informasi yang masih kurang bagi mereka yang membutuhkannya, dan memberi suara bagi mereka yang bisu”.

348. Transparansi dan akuntabilitas bukanlah ciri khas diplomasi Vatikan mengenai isu Timor-Leste. Dengan ketiadaan beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur posisi resmi seperti perilaku pemberian suara, pengawasan oleh media, hibah, dan perdagangan, kurangnya informasi menyulitkan usaha untuk menilai tindakan yang menurut Vatikan diambil atas nama Timor-Leste, dan efektivitas tindakan-tindakan tersebut. Komisi berharap bahwa Vatikan akan membantu menyelesaikan persoalan ini, dengan membuat arsipnya terbuka bagi penelitian independen.

Kesimpulan

349. Vatikan berperan dalam usaha penentuan nasib sendiri di Timor-Leste dan Komisi mengakui nilai kontribusi ini, khususnya pada tahun-tahun ketika Timor-Leste hanya memiliki sedikit sekutu yang berpengaruh. Vatikan tidak menelantarkan Gereja di Timor-Leste.

350. Tapi, kontribusi Vatikan terbatas. Lebih banyak yang tidak dilakukan daripada yang dilakukan. Vatikan menjunjung tinggi prinsip penentuan nasib sendiri, dengan tidak memutuskan status Gereja lokal hingga rakyat Timor-Leste bebas memutuskan masa depan politik mereka sendiri, dan dengan tidak menyetujui dorongan integrasi baik dari Gereja maupun pemerintah di Indonesia. Pada 1989, Paus Yohanes Paulus II, dalam tindakan yang sangat dihargai, memasukkan Timor-Leste dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai tamu pemerintah Indonesia, tapi ia tidak menyetujui integrasi dengan Indonesia, seperti yang dikhawatirkan banyak orang Timor akan dilakukannya.

351. Di sisi lain, Vatikan tidak berupaya menyuarakan penentuan nasib sendiri atau mendesak pihak-pihak lain melakukan hal tersebut, dan bahkan kadang-kadang menyarankan integrasi. Hal ini dilakukan meskipun komunitas internasional secara prinsip setuju dengan pentingnya hak penentuan nasib sendiri dan sepakat bahwa hak ini telah disangkal keberadaannya di Timor-Leste, meskipun penentuan nasib sendiri merupakan aspirasi murni Gereja Timor-Leste dan satu-satunya cara yang mendasar dan nyata untuk menyelesaikan konflik serta mengatur masalah-masalah Gereja lokal. Pendekatan ini memungkinkan Vatikan menyeimbangkan tanggungjawabnya terhadap Gereja di Indonesia, tetapi melemahkan kemungkinan kontribusinya, khususnya selama tahun-tahun awal

.....
* Smythe, hal. 19. Ada banyak pengecualian lokal terhadap hal ini, terutama oleh lembaga perdamaian, keadilan, dan perkembangan Katolik di beberapa negara dan oleh beberapa tulisan keuskupan serta acara televisi.

ketika Vatikan secara khusus memperoleh informasi lengkap dan krisis berada pada titik terburuk. Ketika pihak-pihak lain bersuara, Vatikan berusaha membungkam mereka. Pembungkaman dilakukan kepada banyak orang di Gereja, contohnya kepada Dom Martinho da Costa Lopes, putra Timor asli pertama yang menjadi pemimpin Gereja di Timor-Leste, yang setia sepenuhnya pada Gereja, Sri Paus, dan rakyat Timor, dan yang komitmennya melekat pada cawan penderitaan dan doa, alih-alih pada partai politik. Vatikan telah mendiskreditkan Dom Martinho dan sebaiknya kini mengakui pelayanannya sebagai putra sejati Gereja dan wakil pihak-pihak lain di Gereja, khususnya para pastor dan suster di Timor-Leste yang mendampingi umat mereka pada masa-masa terkelam mereka, dan rekan-rekan Gereja di mana pun mereka berada.

Diplomasi Resistansi

352. Timor-Leste membentuk kampanye untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan pada tiga garis depan, yaitu: militer, diplomatik, dan klandestin. Bagian ini berhubungan dengan kampanye diplomatik dan mengemukakan kontribusi yang dilakukan oleh: 1) partai-partai politik, termasuk organisasi-organisasi payung Resistansi, dan 2) diaspora Timor-Leste. Usaha aktivis Timor di Indonesia dipaparkan di bagian lain dalam Laporan.

Partai-partai politik dan badan-badan payung

353. Dari lima partai bersejarah yang terbentuk di Timor-Leste setelah Revolusi Anyelir Portugal pada April 1974, hanya UDT dan Fretilin yang terlibat dalam kampanye internasional jangka panjang dengan tujuan menentukan nasib sendiri dan meraih kemerdekaan. Tiga partai kecil lainnya—Apodeti, KOTA, dan Tralabhistas—tidak memiliki kapasitas untuk berperan di luar negeri dan, kecuali Tralabhistas, mendukung integrasi dengan Indonesia.* Meskipun demikian, pada pertengahan Juli 1998, kelima partai ini bersatu menolak tawaran otonomi Habibie dan mengimbau diselenggarakannya referendum.¹⁹⁶

354. UDT merupakan partai pertama dan pada awalnya terbesar di Timor-Leste. Dalam sebuah pernyataan prinsip-prinsip yang disusun pada 1974, UDT melibatkan diri dalam “penentuan nasib sendiri rakyat Timor yang bertujuan membentuk federasi dengan Portugal, sebagai satu cara untuk meraih kemerdekaan”.¹⁹⁷ UDT mengembangkan kebijakan luar negeri, memercayakan João Carrascalão dengan portofolio hubungan luar negeri dan, dengan bantuan Partai Demokrat Kristen,

* *Partido Tralabhistas* (Partai Buruh Timor) mendukung kemerdekaan, tetapi Indonesia memanfaatkannya sebagai keuntungan propaganda, dan pemimpin-pemimpinnya tampak bekerjasama dengan Indonesia setelah pengambilalihan. Pat Walsh, *East Timor's Political Parties and Groupings*, Australian Council for Overseas Aid, April 2001, hal. 22.

mendirikan markas pusat (*Gabinete de Timor*) di Lisbon pada 1974. Meskipun UDT menerbitkan surat edaran dan terlibat dalam semacam kegiatan internasional, mereka tidak memulai membangun dukungan internasional untuk partainya atau untuk penentuan nasib sendiri secara sistematis.*

355. Usaha UDT di Lisbon terlaksana berkat dedikasi beberapa individu, termasuk Moises do Amaral, Paulo Pires, dan, belakangan, Vicente Guterres. Seperti yang lainnya, partai itu juga memiliki beberapa penghubung dengan Timor-Leste. Tetapi pada tahun-tahun awal, ketika komunikasi sangat sulit, UDT memanfaatkan kontak rahasia yang dilakukan sesekali dengan simpatisan-simpatisan UDT yang berada di wilayah pendudukan, termasuk Mario Carrascalão, Uskup José Joaquim Ribeiro, dan Dom Martinho da Costa Lopes.¹⁹⁸ Di Portugal, di mana masyarakat sipil lebih terfokus pada Fretilin, partai tersebut tidak menarik dukungan signifikan dari masyarakat, tetapi orientasi pro-Portugalnya serta keberadaannya di Lisbon membantu tujuan Timor-Leste di tahun 1980-an, ketika Portugal meningkatkan perhatiannya pada masalah itu.

356. Kekalahan UDT dalam perang saudara dengan Fretilin pada 1975 menghancurkan partai tersebut secara politik dan organisasi. UDT tidak pernah membaik sepenuhnya, dan hal ini sangat melemahkan kontribusinya terhadap usaha penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Perang itu mengakibatkan terpencarnya kepemimpinan serta anggota-anggota partai tersebut, dan marginalisasinya di Timor-Leste. Perselisihannya antara UDT dan Fretilin, yang pada awalnya berbagi cita-cita kemerdekaan dan berkoalisi, semakin mendalam dan berkembang.[†] Setelah invasi, perwakilan UDT mengambil posisi menyokong kemerdekaan, berlawanan secara internasional dengan pejabat-pejabat partai di Portugal; sementara rekan-rekan mereka di Timor-Leste mendukung integrasi dalam kesaksian kepada PBB dan Kongres Amerika Serikat. Hal ini merusak kredibilitas partai itu dan mengakibatkan timbulnya kekacauan dan ketidakpercayaan yang cukup besar secara internasional.[‡]

* Misalnya, James Dunn melaporkan bahwa UDT berhasil meraih minat yang besar di Australia pada 1974-1975 tetapi "Horta telah melakukan beberapa kunjungan ke Australia sebelum para pemimpin UDT mengaturnya". *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 50.

† Domingos de Oliveira bersaksi kepada Komisi mengenai hubungan buruk dengan Fretilin yang telah timbul sebelum perang saudara dan diperburuk dengan adanya konflik dan akibatnya. Audiensi publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004. Menyusul invasi Indonesia, sejumlah anggota UDT dibunuh oleh anggota-anggota Fretilin di Aileu, Maubisse, dan Same. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa)

‡ Mario Carrascalão, presiden komite pendiri UDT, membela integrasi dengan Indonesia atas nama UDT dalam debat pertama Dewan Keamanan PBB mengenai Timor-Leste setelah invasi Indonesia. Pada 1977, ia bersaksi kepada Kongres AS sebagai pemimpin UDT. Dalam kesaksian ini, ia mengkritik laporan James Dunn mengenai kekejaman Indonesia pada saat terjadinya invasi sebagai "kebohongan nyata", menuduh Australia "menyelundupkan senjata", menyangkal bahwa telah terjadi "serangan udara", mengatakan bahwa senjata-senjata yang beredar di Dili kebanyakan adalah "buatan Rusia", mengkritik Fretilin dan mengatakan bahwa Timor-Leste telah "mendapat banyak dari integrasi kami dengan Indonesia." ("Pernyataan Mario Carrascalao [sic.], pemimpin partai politik Uniao Democrática Timorese di Timor Timur", dalam *Human Rights in East Timor and the Question of the Use of U.S. Equipment by the Indonesian Armed*

357. UDT menjadi lebih aktif pada pertengahan 1980-an dan sejak 1993, setelah kembali pada garis demokrasi, merupakan pendukung Timor-Leste yang efektif. Namun, diplomasi Resistansi selama dekade pertama setelah invasi Indonesia sebagian besar justru dilakukan oleh Fretilin.

358. Pada awal keberadaannya, Fretilin membuat dua keputusan kebijakan bersejarah yang memberi dampak fundamental pada hasil kampanye internasional untuk kemerdekaan Timor-Leste, yaitu: ikut terlibat dalam diplomasi internasional dan memanfaatkan hukum internasional. Kedua keputusan tersebut lahir dari apresiasi realistis tentang kelemahan dan kerentanan Timor-Leste, dan berhasil karena pemanfaatan kekuatan negara lain demi kepentingan Timor-Leste.

Kebijakan internasionalisasi Fretilin

359. Sejak awal, Fretilin terlibat dalam lobi dan jaringan sistematis internasional. Sejak pertengahan 1974, perwakilan Fretilin yang bermarkas di Casa de Timor di Lisbon berusaha mencari dukungan para politikus, pemerintah, dan masyarakat umum Eropa. Utusan pemerintah Australia di Stockholm melaporkan adanya permintaan informasi dari beberapa pemerintah mengenai situasi Timor-Leste menyusul kunjungan-kunjungan Fretilin ke Eropa.¹⁹⁹ Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Mari Alkatiri, dan Roque Rodrigues menghadiri perayaan kemerdekaan Mozambik pada Juni 1975. Menyusul pernyataan dukungan terhadap Fretilin oleh konferensi 49 negara Afro-Asia di Mozambik pada September 1975, Mari Alkatiri mengunjungi beberapa negara Afrika dengan sukses pada November. Perwakilan Fretilin di Timor-Leste berfokus pada wilayah di sekitarnya. Alarico Fernandes mengunjungi Australia. José Ramos-Horta mengunjungi Indonesia, Selandia Baru, Fiji, dan Australia—kunjungan ke Australia pada saat itu lebih daripada satu kali. Sebagai imbalan, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan jurnalis mengunjungi Timor-Leste, terutama dari Australia tetapi juga dari Portugal.

360. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri menjadi topik perdebatan kepemimpinan Fretilin pada 1975. Sebagian memandang bahwa diplomasi bergaya Barat tidak berguna, dan menyatakan bahwa Timor-Leste harus lebih berfokus pada kepercayaan diri dan perjuangan bersenjata. Sebagian lainnya mendukung pembentukan garis depan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan lainnya di wilayah sekitar, termasuk gerakan pendukung di Indonesia. Walaupun demikian kebijakan resmi Fretilin tetap pro-ASEAN, dan menolak pendekatan dari Irian Jaya dan Maluku Selatan.²⁰⁰

Forces- Hearing before the Subcommittees on International Organizations and on Asian and Pacific Affairs of the Committee on International Relations, House of Representatives, 95th Congress, on Human Rights in East Timor and the Question of the Use of US Equipment by the Indonesian Armed Forces, 23 Maret 1977, US Government Printing Office, Washington, 1977, hal. 47-58.) Francisco Lopes da Cruz, Presiden UDT pertama, menandatangani Deklarasi Balibó dan Deklarasi 17 Desember 1975 yang membentuk Pemerintahan Daerah Indonesia di Timor Timur. Indonesia mengirim João Carrascalão ke Afrika dan Paolo Pires ke Belanda, tapi keduanya ditarik kembali ketika diketahui bahwa mereka menggunakan kesempatan itu untuk berbicara tentang situasi yang sebenarnya di Timor-Leste.

361. Menyusul Deklarasi Kemerdekaan pada November 1975, Fretilin memilih menginternasionalkan perjuangan kemerdekaan. Salah satu keputusan pertama Kabinet Republik Demokratik Timor-Leste yang baru dibentuk adalah membuka garis depan diplomasi dengan mengirim misi tingkat tinggi ke luar negeri. Delegasi ini terdiri atas Menteri Hubungan Politik, Mari Alkatiri; Menteri Pertahanan, Rogerio Lobato; dan Menteri Hubungan Luar Negeri dan Informasi, José Ramos-Horta. Riwayat diplomasi Timor-Leste mungkin akan sangat berbeda jika mereka tidak terburu-buru meninggalkan Timor sebelum kedatangan pasukan Indonesia.²⁰¹ Mereka bergabung dengan tiga perwakilan Fretilin lainnya yang telah berada di luar negeri, yaitu: Abilio Araújo, Menteri Ekonomi dan Sosial; Jose Luis Guterres; Guilhermina Araújo, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi; dan Roque Rodrigues, Duta Besar untuk Mozambik. Tidak satu pun dari kelompok ini dapat kembali ke Timor-Leste, sehingga selama kurang lebih 24 tahun Indonesia berkali-kali menyatakan bahwa mereka tidak mewakili situasi Timor-Leste yang sebenarnya.

362. Meskipun tujuan utama mereka adalah memperkenalkan Fretilin dan Republik Demokratik Timor-Leste secara internasional, aktivitas mereka menjadi dasar kuat bagi kampanye penentuan nasib sendiri di masa depan. Merekalah yang membuka garis depan diplomasi utama di Eropa, Afrika, Amerika Serikat, dan di PBB. Hubungan yang kuat dan berkesinambungan juga dipelihara bersama organisasi-organisasi masyarakat madani di banyak negara. Jaringan ini merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara terbelakang dan miskin, yang hampir tidak memiliki sumberdaya sendiri dan hanya bersekutu dengan beberapa negara.

363. Delegasi Eksternal Fretilin mendirikan markasnya di Maputo, Mozambik, di bawah pimpinan Mari Alkatiri. Pemerintah Mozambik memberi dukungan kukuh selama konflik. Selain memberi basis operasional, dukungan ini juga berupa pendanaan, paspor, dukungan diplomatik di PBB, dan kesempatan belajar.^{*} Misi-misi Timor-Leste juga dibuka di Portugal (Abilio Araújo), Angola (Roque Rodrigues, setelah satu periode sebagai Duta Besar di Mozambik), dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (José Ramos-Horta). Tugas mereka mewakili Timor-Leste di luar negeri, dan mempromosikan perjuangan kemerdekaan, baik di negara asalnya maupun di negara-negara lain. Dukungan kuat dari negara-negara Afrika terhadap Timor-Leste di PBB merupakan hasil diplomasi yang berbasis di Mozambik ini. Anggota-anggota perempuan Fretilin yang berbasis di Mozambik juga aktif secara diplomatik dan mewakili Timor-Leste lebih jauh lagi, termasuk ke Timur Tengah.[†]

.....
^{*} Sebagian besar pemimpin dan pelajar Fretilin yang bergabung dengan mereka yang dari Lisabon menyelesaikan kuliahnya di Mozambik dalam bidang studi seperti pertanian, hukum, dan hubungan internasional. Sebagian besar dari mereka kembali ke Timor-Leste setelah 1999, dan memanfaatkan pengetahuan mereka untuk melayani negara baru tersebut. Wawancara CAVR dengan Harold Moucho, 19 Maret 2005. Tabungan bank resmi Fretilin pada waktu itu adalah di Mozambik.

[†] Anggota-anggota perempuan Fretilin di Mozambik termasuk Ana Pessoa, Filomena de Almeida, Adelina Tilman, Marina Ribeiro, dan Madalena Boavida. Adelina Tilman adalah bagian dari tim Fretilin di PBB.

364. Karena pengaruh Indonesia, kehadiran Fretilin tidak diterima di sebagian besar wilayah Asia-Pasifik, sehingga mulai April 1976 Pemerintah Australia melarang kunjungan pejabat-pejabat Fretilin ke Australia.^{*} Hanya sedikit pemerintah sosialis di Asia Timur yang mengakui eksistensi Republik Demokratik Timor-Leste. Pada awalnya, Republik Rakyat Cina memberi dukungan diplomatik dan finansial kepada Fretilin.[†] Kunjungan-kunjungan dilakukan ke Republik Demokrasi Kamboja, sedangkan kontak persaudaraan dengan Republik Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Laos tetap dipertahankan.[‡] Republik Vanuatu, setelah merdeka pada 1980, merupakan suatu pengecualian di Pasifik Selatan, di mana pemimpinnya, Walter Lini dan Barak Sope, mendukung Timor-Leste di PBB dan menyetujui pembentukan usaha ekonomi oleh Abilio Araújo di Vanuatu untuk membiayai kegiatan-kegiatan diplomatik Fretilin.[§]

365. Penolakan akses ke Australia terhadap pejabat-pejabat Fretilin diatasi dengan kehadiran kader-kader Fretilin dan kelompok-kelompok solidaritas yang mewakili Fretilin secara *de facto* di negara itu. Kegiatan-kegiatan mereka, di antaranya, mengoperasikan penghubung radio yang berbasis di Darwin, yang, hingga penutupannya pada 1978, merupakan satu-satunya jalur komunikasi langsung dua-arah antara Resistansi Fretilin di Timor-Leste dengan garis depan diplomatik. Meskipun demikian, anggota-anggota Fretilin di Australia bersikap lamban untuk berperan secara terbuka. Mereka merupakan minoritas di tengah komunitas yang sebagian besar penganut UDT dan, sebagai pengungsi, mereka takut akan diusir jika mereka berpihak secara terang-terangan pada Fretilin menentang Indonesia. Demonstrasi pertama saat bendera Fretilin dan RDTL dikibarkan secara terang-terangan diadakan di Sydney pada 1981. Situasi politik Australia menenang setelah pemilihan Pemerintahan Buruh Hawke pada 1983. Banyak orang Timor, termasuk pengurus-pengurus Fretilin seperti Lay Kuon Nhen, Abel Guterres, dan yang lainnya, turut ambil bagian dalam *rally* publik di Melbourne, yang diamanatkan oleh Abilio Araújo dan Roque Rodrigues, dan mereka juga menghadiri demonstrasi pada konferensi Partai Buruh di Canberra pada tahun yang sama. Komite Fretilin resmi yang pertama dibentuk di Sydney pada 1986, dengan Harold Moucho sebagai koordinator. Sampai pada akhir 1980-an, Fretilin telah berdiri mapan di beberapa bagian di Australia,

.....
^{*} Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, memberitahu Presiden Soeharto pada November 1975 bahwa Pemerintahnya tidak akan menerima Ramos-Horta atau perwakilan Fretilin lainnya jika mereka datang ke Australia. (Dokumen 344, Jakarta, 25 November 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 580-581.) Pelarangan itu ditarik pada 1993 oleh Pemerintah Buruh Hawke.

[†] Cina mengakui Republik Demokratik Timor-Leste dan menegaskan dalam pembelaannya di Dewan Keamanan. Mari Alkatiri dan José Ramos-Horta mengunjungi Cina pada awal terjadinya konflik. Mari Alkatiri, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003,.

[‡] Rogério Lobato, Panglima Pasukan Revolusioner Timor-Leste, kepada Ieng Sary, Wakil Perdana Menteri Luar Negeri Republik Demokrasi Kamboja, 21 Desember 1977.

[§] Perwakilan Vanuatu di PBB, Robert van Lierop, secara aktif mendukung Timor-Leste di sejumlah forum. Usaha ekonomi itu gagal tetapi merupakan bukti upaya dan kreativitas yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran kampanye internasional.

termasuk Darwin, Sydney, Melbourne, dan Perth, dan mempunyai jaringan komunikasi yang baik dengan gerakan perlawanan di Timor-Leste. Agio Pereira adalah wakil Fretilin pertama di Australia. Yang lainnya adalah Alfredo Ferreira Borges, Estanislau da Silva, dan Francisco Carlos. Mereka tanggung jawab atas berbagai bagian Australia dan di wilayah itu, serta bekerja keras membangun relasi dengan partai-partai politik, Gereja, masyarakat madani, dan media guna memperoleh dukungan bagi Timor-Leste. Pada 14-20 Agustus 1998, Fretilin mengadakan Konferensi Luarbiasa di Sydney.

Pemanfaatan hukum internasional

366. Kampanye awal Fretilin berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Unilateral (UDI) pada 28 November 1975, dan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Ketika mereka tiba di PBB di New York pada 11 Desember 1975, Abilio Araújo dan José Ramos-Horta memperkenalkan diri sebagai menteri RDTL. Dalam pidatonya kepada Dewan Keamanan pada 15 Desember, José Ramos-Horta mengadukan UDT, menyatakan UDI 28 November sebagai “sebuah tindakan heroik untuk menentukan nasib sendiri”, dan meminta Dewan mengutuk invasi Indonesia sebagai tindakan agresi terhadap negara berdaulat yang diakui oleh “negara lain dalam jumlah yang semakin besar.”²⁰² Pada 12 April 1976, dia memberitahu Dewan Keamanan bahwa Fretilin “tidak lagi mengakui kedaulatan Portugis atas Timor-Leste”, dan dengan demikian menolak pendapat PBB bahwa Portugal tetap menjadi kuasa pemerintahan di Timor-Leste. RDTL, dikatakannya, siap menghadapi Indonesia dan Portugal hanya dalam hubungan “antara pemerintah dan pemerintah, atau negara dan negara.”²⁰³

367. Walaupun demikian, tidak lama kemudian menjadi jelas bahwa, dalam kata-kata José Ramos-Horta, “pengakuan terhadap Republik Demokratik Timor-Leste tidak akan terwujud”, karena hanya segelintir negara yang siap mendukung negara baru tersebut. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

Tentunya dalam beberapa minggu pertama setelah invasi, saya dan yang lainnya berargumen dengan penuh semangat mengenai Republik Demokratik Timor-Leste. Tetapi sekitar 1976-1977, kami memutuskan untuk mengubah sikap dan berkonsentrasi pada Timor-Leste sebagai wilayah tak berpemerintahan sendiri dengan hak atas penentuan nasib sendiri...Kami akan berada dalam posisi hukum yang lebih kuat dengan dasar penentuan nasib sendiri bagi sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri.

368. Pada saat itu, seorang rekan yang tidak senang dengan keputusan tersebut menyarankan agar mereka mempertahankan jabatan kementeriannya supaya ketika pemerintah negara-negara menyambut mereka, berarti mereka mengakui RDTL. Ramos-Horta menjawab: “Satu-satunya masalah dengan permintaan itu adalah kita mungkin tidak akan pernah mendapat undangan untuk pergi ke

manapun!”^{*} Walaupun tidak ditarik secara resmi, kebijakan 1975 secara diam-diam dikesampingkan.[†]

369. Keputusan Fretilin untuk lebih memanfaatkan sistem diplomasi internasional daripada perang berdasar pada penilaian pragmatik terhadap realitas politik. Kemunduran strategis ini tidak langsung membuahkan hasil politik dan tetap memerlukan waktu untuk diterjemahkan ke dalam hal-hal yang praktis, tetapi menguntungkan Timor-Leste dalam jangka panjang. Penentuan nasib sendiri memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip dasar yang dipertaruhkan, ketimbang pada tuntutan kelompok yang berkepentingan. Hal ini meningkatkan legitimasi serta daya tarik terhadap isu ini, serta menajamkan fokus pada tanggungjawab komunitas internasional, Portugal, dan terutama PBB. Dalam beberapa waktu, terbentuk hubungan yang luas dengan Portugal, orang Timor yang bukan anggota Fretilin, Gereja, dan masyarakat madani. Selanjutnya perjuangan dijadikan sebagai isu moral dan hak asasi manusia untuk menentang Indonesia dan sekutu utamanya, terutama negara-negara demokratis Barat yang menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia.

Upaya diplomasi di PBB

370. Sebagai badan dunia yang tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak atas penentuan nasib sendiri, PBB merupakan arena utama dalam penyelenggaraan usaha diplomasi Resistansi. Usaha ini dibebankan terutama pada Fretilin karena UDT dan aktivis-aktivis independen Timor tidak melibatkan diri hingga pertengahan 1980-an. Fretilin memercayakan tugas ini kepada José Ramos-Horta sebagai wakilnya di New York selama 13 tahun, hingga pengunduran dirinya dari keanggotaan pada 1998.

371. Pekerjaan itu membutuhkan banyak usaha, keahlian, kreativitas, dan daya tahan yang sangat tinggi. “Orang-orang Indonesia,” ungkap José Ramos-Horta kepada Komisi, “sangat menguasai keadaan setiap saat.”²⁰⁴ Adalah sangat penting memahami cara kerja PBB itu sendiri dan, melalui studi dan diskusi, mencapai suatu tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan internasional serta politik negara-negara anggota yang berpengaruh. Dari hari ke hari, usaha tersebut mencakup lobi terus-menerus, bersikap waspada, memonitor informasi, serta membangun dan memelihara hubungan dengan sejumlah besar negara, pejabat, jurnalis, dan masyarakat madani. Usaha itu lebih intensif pada titik-titik tertentu dalam kalender PBB, terutama ketika hal-hal yang dipertaruhkan bagi Timor-Leste memuncak. Anggota lain dari Delegasi Eksternal bergabung dengan

* Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, 26 Mei 2004. Kira-kira 20 negara, yang sebagian besar di Afrika, mengakui RDTL.

† Dalam keputusannya, Pengadilan Permanen Rakyat (*Permanent People's Tribunal*) yang disponsori oleh Fretilin dan diadakan di Lisabon pada 19 - 21 Juni 1981, mengakui legitimasi dan keabsahan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste. (*Sessão Sobre Timor-Leste*, Lisabon, 19/21 Junho 1981, *Sentença*, hal. 29-30.) Meskipun demikian, penyebutan RDTL tidaklah menolong secara hukum. Pada 1980, kasus Fretilin melawan pemerintah Belanda mengenai penjualan *corvette* ke Indonesia ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa RDTL ataupun Fretilin tidak memiliki status yang sah. Krieger, hal. 298.

José Ramos-Horta dalam kesempatan ini. Untuk memastikan komplementaritas dan konsistensi, usaha ini tetap harus dikoordinasikan dengan kegiatan diplomasi Resistansi di negara-negara tertentu, yang juga membutuhkan keahlian serupa tetapi dalam skala yang lebih kecil dan lebih ringan.

372. Selain skala tugas politik yang monumental itu, José Ramos-Horta dan rekan-rekan Fretilinnya harus juga menghadapi banyak tantangan praktis dan organisasi. Delegasi itu mengalami kekurangan sumberdaya manusia dan finansial. Pada awalnya, misi Guinea-Bissau menyediakan tempat untuk perwakilan Fretilin di kantornya, sedangkan dukungan staf, yang tidak pernah cukup, disediakan oleh para sukarelawan.* Komunikasi dengan Timor-Leste bersifat tidak langsung dan tidak berkala. Sebagai gerakan kemerdekaan, delegasi itu tidak diakui statusnya sebagai suatu pemerintahan ataupun pengamat.† Karena itu, perwakilan Fretilin tidak mampu “memperdagangkan” suara, hibah, atau bahan dagangan sebagai imbalan atas dukungan. Semua bergantung pada niat baik beberapa negara yang bersahabat, terutama Mozambik, Guinea-Bissau, dan negara-negara bekas jajahan Portugis di Afrika lainnya, yang juga baru merdeka. Dukungan ini dilengkapi pada awalnya dengan adanya dukungan dari Duta Besar Tanzania untuk PBB dan Ketua Komite Khusus Dekolonisasi, Salim A. Salim, serta wakil Republik Rakyat Cina, Huang Hua.

373. Portugal bersikap mendukung dalam perdebatan PBB tetapi tidak secara aktif. Sebaliknya, Indonesia telah memiliki kekuatan karena memiliki kedutaan besar di negara-negara penting dan, tanpa perlu mempertimbangkan pola pemilihan suara di PBB, memiliki pula dukungan diplomatik dari sebagian besar negara-negara Barat, Muslim, dan Asia, ditambah dengan bantuan ekonomi dan militer dari Barat yang signifikan. James Dunn berkomentar: “Di dalam PBB, perjuangan ini ibarat perjuangan antara Daud dari Timor melawan Goliath dari Indonesia.”‡ Koordinasi dengan diplomat Fretilin lainnya sulit dan membutuhkan banyak biaya. Di samping itu, delegasi dirintangi oleh perbedaan ideologi internal dan persepsi yang merusak (yang terkadang dikonfirmasi oleh pernyataan

.....
* David Scott membantu membuat misi itu dengan bantuan dari Pusat Perempuan Metodis (Methodist Women Centre) di PBB. Sebagai salah satu dari orang Australia yang terakhir meninggalkan Timor-Leste pada malam sebelum terjadinya invasi Indonesia, dia hampir berangkat langsung ke New York atas nama Asosiasi Timor-Leste Australia untuk membantu Fretilin melobi Dewan Keamanan. Kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.

† Tidak seperi organisasi-organisasi Palestina dan Afrika Selatan, ANC dan PAC, Fretilin tidak diberi status pengamat di PBB. Walaupun demikian, namanya diakui dalam preambuli resolusi Majelis Umum antara 1976 dan 1982. Dalam Resolusi 36/50 1981, Fretilin disebut sebagai “gerakan pembebasan Timor-Leste”. Krieger hal. 27.

‡ José Ramos-Horta, *Prakata dalam Towards a Peaceful Solution in East Timor*, East Timor Relief Association (ETRA), NSW, Australia, 1996, hal. 7. Cerita dalam Alkitab mengenai Daud dan Goliath (1 Samuel, 17:1-58) adalah perumpamaan yang tepat untuk Timor-Leste. Daud mempelajari keberanian dan ilmu berperangnya sebagai seorang anak gembala yang melindungi sekumpulan hewan miliknya dari hewan liar, termasuk dari singa dan beruang. Dalam waktu senggangnya, dia mengembangkan dua keahlian lain—musik dan puisi. Dia menghadapi Goliath, si Raksasa Filistin, seorang diri dan mengalahkan kekuatan superior Goliath dengan katapel.

sendiri dan aliansinya), yang menganggap bahwa dalam Perang Dingin, Fretilin telah ambil bagian menentang negara-negara Barat.^{*} Selain itu Fretilin harus menghadapi upaya sistematis Indonesia dan orang-orang Timor yang bersaksi kepada PBB mendukung integrasi guna menggerogoti kredibilitasnya. Kepada Dewan Keamanan, pihak-pihak tersebut mengatakan bahwa Fretilin tidak mewakili mayoritas pendapat di Timor-Leste, dan beralasan bahwa dari lima partai yang ada di Timor, hanya Fretilin yang menentang integrasi, serta bahwa Fretilin telah terlibat dalam kegiatan terorisme di Timor-Leste.[†]

374. Pada awalnya mayoritas suara dalam Dewan Keamanan dan Sidang Umum berpihak pada Timor-Leste dan menjunjung tinggi hak atas penentuan nasib sendiri. Namun, jumlah pendukung itu tidak mencerminkan realitas kekuatan politik dan ekonomis Indonesia, ataupun meningkatnya keyakinan bahwa pendudukan Indonesia di Timor-Leste tidak dapat diubah. Walaupun Fretilin telah berusaha, naskah resolusi melemah antara 1975 dan 1981, dan jumlah negara yang menolak ataupun abstain dalam sidang PBB bertambah. Pada 1981, negara yang mendukung Timor-Leste sebanyak 54 negara, 42 negara menolak, dan 46 negara lain abstain. Ini berarti secara global hanya 34% negara yang mendukung kasus Timor-Leste.

375. Strategi yang berbeda-beda telah dicoba, dengan tingkat kesuksesan yang bermacam-macam. Fretilin berhasil mengirim misi pencari-fakta PBB ke Timor-Leste pada 1976, tetapi Indonesia memblokir utusan PBB, Vittorio Winspeare Guicciardi, untuk menemui para pemimpin Resistansi Fretilin, dan kunjungan itupun tidak membuahkan hasil. Sekretaris Jenderal PBB, Kurt Waldheim, tidak menuntaskan hal ini, dan kasus Timor-Leste tidak dimasukkan kembali dalam agenda Dewan Keamanan sampai 1999. Untuk memperpanjang waktu dan memperkuat posisi legal Timor-Leste, José Ramos-Horta mengusulkan membujuk Sidang Umum untuk meminta *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional mengenai pernah atau tidak pernahnya dilakukan tindakan penentuan nasib sendiri yang pantas, seperti yang dikatakan oleh Indonesia. Walaupun demikian, Portugal tidak setuju dan ide itu pun tidak dikembangkan.[‡] Dengan bantuan Francesc

^{*} David Scott menulis: "Abilio Araújo melihat perjuangan dalam konteks Marxis-Leninis yang dia dapatkan di Lisbon. Ia dan José Ramos-Horta berdiskusi dan berdebat di Portugal mengenai pendekatan-pendekatan dan terminologi kebijakan. Abilio ingin kami menggunakan bahasa Marxis dalam membuat pernyataan kepada media; José memilih untuk menggunakan pendekatan politik yang lebih netral dan terfokus secara nyata." Naskah yang tidak diterbitkan, 2004.

[†] Pernyataan pertama Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB mengenai Timor-Leste, dikirim oleh Anwar Sani, pada 15 Desember 1975, mencakup tuduhan terorisme terhadap Fretilin. (Krieger, hal. 60.) Orang-orang Timor yang bersaksi atas nama Indonesia dalam sesi Dewan Keamanan ini adalah Mário Carrascalão (UDT), José Gonçalves (Independenti), dan José Martins (KOTA). Pernyataan mereka, yang mencakup serangan terhadap Fretilin dan José Ramos-Horta, berakibat buruk terhadap kredibilitas dan advokasi Fretilin dalam PBB, serta memperkuat persepsi internasional bahwa masyarakat Timor-Leste sangat terpecah-pecah dan tidak stabil. (Krieger, hal. 70-77) José Martins "henggang" secara formal pada Maret 1976 dan menyerahkan sebuah laporan rahasia kepada PBB yang berisi perincian rencana Indonesia terhadap Timor-Leste.

[‡] Portugal percaya bahwa Timor-Leste belum menggunakan hak-haknya dan bahwa Timor-Leste seharusnya tidak mempertanyakan keyakinan ini dengan meminta pendapat kepada Mahkamah Internasional. Dalam aksi terpisah pada 1991, Portugal membawa Australia ke Mahkamah Internasional, antara

Vendrell di Sekretariat PBB, José Ramos-Horta berhasil membuat Sidang Umum menyinggung situasi kemanusiaan di Timor-Leste dalam resolusi-resolusi yang diadopsi pada 1979-1981. Resolusi tersebut mencakup tuntutan akses oleh UNICEF, UNHCR, dan WFP untuk memberi bantuan dan, secara tidak langsung, berhasil memperingatkan komunitas internasional mengenai dampak negatif pendudukan Indonesia dan menentang pelarangan akses Indonesia. Namun, Indonesia hanya memberi akses kepada UNICEF.²⁰⁵

376. Salah satu cara mengukur kesuksesan diplomasi Resistansi di dalam negeri dan di PBB adalah dengan menghitung referensi terhadap Timor-Leste yang dibuat dalam debat PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa ia menghadiri sejumlah besar sesi Sidang Umum PBB hanya dengan harapan akan mendengar isu Timor-Leste disebut, terutama oleh tokoh-tokoh senior pemerintah. Tetapi yang sering ia dapat hanya kekecewaan.

*Kita hitung apa yang kita dengar di Sidang Umum. Ketika seorang kepala negara, perdana menteri, atau menteri luar negeri membawa sebuah isu kepada sidang pleno Sidang Umum, itu merupakan sesuatu yang signifikan. Setiap tahun saya duduk di situ, mendengar, menghitung, dan setiap kali saya dengar satu acuan kecil saja, saya akan terkesima: 'Wow, ini dia!' Tapi ini tidak banyak terjadi.*²⁰⁵

377. Ketika itu, Delegasi Eksternal Fretilin mengalami masalah internal ideologi dan kepemimpinan yang berat, bersamaan dengan “pembersihan” internal Fretilin di Timor-Leste yang diperburuk oleh pemerosotan kegiatan militer, termasuk kematian pemimpin Fretilin, Nicolau Lobato, dan situasi diplomatik Timor-Leste yang rumit. Semua masalah itu memuncak pada 1978 di Maputo, ketika Mari Alkatiri, Marina Ribeiro, José Ramos-Horta, dan Ana Pessoa dijadikan tahanan rumah oleh rekan-rekan Fretilin. Ramos-Horta dikenai tuduhan “kapitulasionisme,” dan ia menilai peristiwa tersebut sebagai “buruk dan sadis”.²⁰⁶ Ia mengatakan kepada Komisi:

*Saya dituduh mau bernegosiasi dengan Indonesia hanya karena saya tidak setuju dengan slogan di Timor waktu itu...dari Komite Sentral, yakni “Negosiasi, Takkan Pernah”.*²⁰⁷

378. Ia berpendapat bahwa fleksibilitas untuk berdialog, termasuk dengan Indonesia, seharusnya tidak disamakan dengan menyerah dan merupakan hal yang signifikan

lain atas pelanggaran terhadap hak atas penentuan nasib sendiri Timor-Leste dengan ditandatangani perjanjian Australia dengan Indonesia untuk bersama-sama mengeksploitasi sumber minyak dan gas di Laut Timor.

* Pada Juni 1982, UNICEF dan Palang Merah Indonesia memulai program untuk anak-anak, ibu-ibu, dan keluarga mereka. Sebagai bagian dari program, UNICEF mengajarkan bahasa Indonesia kepada perempuan-perempuan Timor dengan alasan bahwa mereka harus mengetahui bahasa Indonesia untuk dapat memahami cara memberi makan dan informasi kesehatan lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia menimbulkan kritik kuat dari José Ramos-Horta. (Wawancara CAVR, 26 Mei 2004.) UNHCR memberi kontribusi dengan mendanai beberapa repatriasi ke Portugal dan Cape Verde.

untuk mengakhiri konflik. Ia mengatakan pula bahwa Abilio Araújo mendalangi peristiwa itu, dengan dukungan dari Rogério Lobato dan aktivis Australia Denis Freney, yang juga hadir dalam pertemuan-pertemuan.* Isu tersebut diselesaikan dengan bantuan dari wakil-wakil Frelimo.

379. Peristiwa itu merusak Fretilin secara internal dan menghambat kampanye internasionalnya, walaupun hal ini tidak diumumkan secara luas. Karena kesibukannya di Mozambik dari September 1978 sampai Februari 1979, José Ramos-Horta terpaksa membatalkan kunjungannya ke Selandia Baru, yang telah berhasil diatur oleh kelompok-kelompok solidaritas setelah secara terbuka bertentangan dengan pemerintah mereka, serta tidak dapat mewakili Timor-Leste pada Sidang Umum PBB tahun itu. Delapan negara menarik dukungan terhadap Timor-Leste selama sesi itu. Kecenderungan kemunduran tersebut sedikit berbalik pada tahun berikutnya. Berkat kerja keras delegasi Fretilin, Timor-Leste berhasil meraih kembali tiga suara.

Voting 1982 di PBB

380. Sesi Sidang Umum PBB 1982 menjadi ajang uji kekuatan bagi para pemain utama dan merupakan detik-detik kritis bagi Timor-Leste. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pinto Balsemão, Portugal menunjukkan niat untuk membahas kembali isu tersebut, menyusul pernyataan dari Dewan Kementerian pada 1980 yang menyetujui penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste dan adanya inisiatif diplomatik. Sementara itu, Indonesia memperoleh, antara lain, dukungan lebih jauh dari Australia. Beberapa hari sebelum di Sidang Umum, mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, mengatakan kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB:

*Ini adalah saat yang tepat untuk mencoret persoalan Timor-Leste dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berhenti menyibukkan serta mengusik bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan Pasifik.*²⁰⁸

381. Sebagai tanggapan, José Ramos-Horta mengusulkan agar isu tersebut ditujukan pada ‘jasa baik’ Sekretaris Jenderal PBB, yang saat itu dijabat oleh Javier Perez de Cuellar (1982 - 1991). Di apartemen bawahtanah yang sederhana di suatu bilangan East 55th Street, New York, ia menyusun rancangan resolusi sederhana, dengan harapan bahwa negara-negara anggota akan menerima rancangan tersebut. Ia yakin bahwa rancangan resolusi tersebut merupakan “kontribusi paling berharga” yang ia berikan pada perjuangan Timor-Leste.†

* José Ramos-Horta mengucapkan terima kasih atas kontribusi Denis Freney kepada Timor-Leste dalam Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo pada 10 Desember 1996. Meskipun demikian, ia mengkritik sikap “destruktif” Denis Freney pada saat itu, dan menyebutnya “sangat berdedikasi pada Timor-Leste tetapi melalui kepercayaan ideologinya sendiri, dan Abilio adalah teman dalam perjuangan yang ideologinya benar-benar tepercaya”. Wawancara CAVR, 26 Mei 2004.

† Resolusi Sidang Umum 37/30, 23 November 1982. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 29 Juli 2004.

382. Indonesia berusaha keras menentang. Tapi, dengan dukungan dari Roque Rodrigues, José Luis Guterres, dan sekutu utama Timor-Leste—Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, São Tomé dan Príncipe, Portugal, Brasil, Vanuatu, Zimbabwe, Benin, dan Aljazair—resolusi tersebut lolos, meskipun hanya dengan mayoritas empat suara. Ramos-Horta mengaku kepada Komisi bahwa “masalah Timor tidak akan pernah membaik jika kalah dalam resolusi itu”.²⁰⁹ Lebih daripada setengah jumlah suara untuk Timor-Leste didapat dari negara-negara Afrika tempat markas delegasi Fretilin berada.*

383. Secara operasional, resolusi itu merupakan pertarungan, karena masa depan Timor-Leste dipercayakan penuh kepada dua pihak yang oleh Fretilin masih diragukan komitmennya, yaitu: Pemerintah Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB.[†] Referensi dalam rancangan Ramos-Horta untuk berkonsultasi dengan Fretilin dan orang Timor lainnya, diganti dalam naskah akhir dengan referensi yang tidak jelas untuk [berkonsultasi dengan] “semua pihak yang bersangkutan secara langsung”, yang memercayakan kepada Sekretaris Jenderal, Javier Perez de Cuellar, untuk memutuskan dengan siapa ia harus berkonsultasi, dan kepada Portugal untuk memastikan bahwa pandangan pihak Timor didengar juga dalam proses itu.

384. Tanda-tanda pertama itu tidak memberi alasan untuk bersikap optimistis. Hampir 12 bulan setelah isu tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, José Ramos-Horta secara publik menuduh Portugal telah bersikap tak acuh, apatis, dan berkhianat.²¹⁰ Dua belas bulan kemudian, pada Agustus 1984, Lord Avebury, Ketua Kelompok Hak Asasi Manusia di Parlemen Inggris, merasa terpanggil untuk mengatakan kepada Sekretaris Jenderal bahwa Laporan Perkembangannya hanya mengacu kepada komunikasi antara Portugal dan Indonesia, dan tidak mengandung “indikasi adanya upaya untuk berunding dengan Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka (Fretilin) ataupun partai-partai Timor lainnya.”²¹¹

385. Namun, keputusan untuk menggunakan sistem internasional ternyata tepat. Isu Timor-Leste tetap ada dalam agenda PBB, selamat dari pengambilan suara yang berpotensi fatal dalam Sidang Umum, dan harapan untuk solusi diplomatik tidak memudar serta bahkan berkembang kembali saat angin segar berbalik mendukung Timor-Leste pada 1990-an. Resistansi tetap terfokus pada PBB dan memberi perhatian lebih pada forum-forum PBB lainnya, terutama pada rapat-rapat tahunan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa dan Komite Khusus Dekolonisasi PBB di New York, yang keduanya memperbolehkan debat mengenai penentuan nasib sendiri. Selain melobi dan membuat pernyataan sendiri, kelompok Resistansi berhasil mendorong partisipasi masyarakat sipil. (Lihat bagian mengenai masyarakat sipil internasional di bagian 6 di bawah, paragraf 429 - 526.)

* 27 negara di Afrika yang mendukung Timor-Leste, 6 menolak, dan 13 abstain.

† José Ramos-Horta percaya bahwa Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim (1972-1981) harus berbagi kesalahannya atas kegagalan Dewan Keamanan menyelesaikan resolusi 1976 atas Timor-Leste. Dewan Keamanan tidak lagi membahas isu tersebut sampai pada 1999. *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, The Red Sea Press, 1987, hal. 122.

Pembentukan kembali partai-partai

386. Sejak 1980-an, Fretilin dan UDT mengalami sejumlah perubahan yang memengaruhi upaya diplomasi internasional mereka, dan secara bertahap berkontribusi membentuk suatu koalisi parsial guna mempromosikan upaya penentuan nasib sendiri.

387. Pada 1981, setelah hampir hancur, Fretilin membentuk Dewan Revolusioner Resistansi Nasional (Conselho Revolucionária da Resistência Nacional, CRRN). Dewan itu dibentuk di Timor-Leste dengan masukan dari Abílio Araújo di Lisbon. Dari sudut pandang kampanye diplomatik, kontribusi yang penting dari badan baru ini adalah menunjukkan munculnya kembali Fretilin, dan Resistansi di dalam dihubungkan kembali dengan perwakilan eksternal setelah beberapa tahun terisolasi secara paksa antara satu dengan lainnya. Di luar Timor-Leste, CRRN sendiri tidak banyak diketahui. Namun, pertemuan Xanana Gusmão dengan komandan Pasukan Indonesia di Timor-Leste, Kolonel Purwanto, pada Maret 1983 di Lariguto, yang juga dihadiri Mario Carrascalão, dipublikasikan luas secara internasional dan sangat bermanfaat untuk mengembalikan dukungan kepada Timor-Leste.^{*} Rencana Perdamaian Fretilin, yang diluncurkan secara internasional oleh José Ramos-Horta pada Juni 1984 atas inisiatif dari dalam Timor-Leste, memberi perhatian baru pada solidaritas internasional untuk bekerja dengan tujuan spesifik yang secara langsung mewakili Timor-Leste dalam pencarian penyelesaian secara tuntas di bawah naungan PBB. Permintaan untuk dilibatkan di dalam proses PBB, bersama dengan Portugal dan Indonesia sebagai partai yang paling “bersangkutan secara langsung”, menjadi fokus utama Resistansi dan bagian advokasi masyarakat sipil, dan oleh para pemimpin Timor dicanangkan dalam sejumlah besar dokumen dan forum.[†]

388. Pembangunan kembali UDT terjadi di luar Timor-Leste dan melibatkan usaha memperkuat partai itu di Australia. UDT mulai hadir di Australia setelah João Carrascalão bermigrasi ke Sydney dari Portugal pada 1978 dan bergabung dengan para anggota serta pendukung UDT yang telah menetap di Australia sebagai pengungsi sejak perang saudara. Dengan didukung oleh Domingos de Oliveira, Lucio Encarnação, António Nascimento, Fausto Soares, dan teman-teman lainnya, kepemimpinan UDT harus menghadapi banyak tantangan baik secara individual maupun politik. João Carrascalão memberitahu Komisi bahwa kehidupan di Australia sangat sulit, dan bahwa pekerjaan pertamanya di Sydney adalah di sebuah pabrik plastik, bekerja 12 jam sehari dengan rotasi kerja (*shift*), dan belakangan ia terpaksa mengambil pekerjaan kedua sebagai pembersih bus dan kantor agar

.....
^{*} Sebuah pertemuan publik yang dihadiri 1.500 orang diadakan di Melbourne pada 1983 dalam rangka menyambut Abílio Araújo dan Roque Rodrigues pada kunjungan resmi pertama Fretilin ke Australia setelah pencabutan pelarangan oleh Pemerintah Australia, dan untuk mendengarkan laporan mereka mengenai pembicaraan perdamaian Lariguto antara Fretilin dan Indonesia.

[†] Sebagai contoh, surat Xanana Gusmão kepada Sekretaris Jenderal PBB, 7 Agustus 1985, dikirim oleh misi São Tomé (Dokumen PBB S/17592); surat kepada Boutros Boutros Ghali (31 Januari 1992), dan kepada Nelson Mandela (15 Mei 1992). Surat pertama Xanana Gusmão kepada PBB atas nama CRRN tertanggal 14 Oktober 1982 tetapi lebih menyerupai laporan situasi yang bersifat menentang ketimbang seruan langsung untuk tindakan PBB.

dapat mengumpulkan uang untuk bepergian ke luar negeri atas nama Timor-Leste. Pengungsi UDT lainnya di Australia punya pengalaman serupa. Ia juga harus menghadapi ketidakpercayaan terhadap UDT dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan beberapa bagian dalam diaspora Timor di Australia.

Saya sangat terlibat dalam Resistansi di luar negeri. Pada awalnya banyak yang tidak percaya bahwa saya bukan pro-integrasionis. Karena kakak saya gubernur, dan UDT tengah menderita dampak propaganda awal yang mengatakan bahwa UDT menginginkan integrasi... Jadi, sangat tidak mudah, banyak orang tidak percaya. Mungkin bahkan rekan-rekan saya dari kalangan pemimpin Resistansi tidak percaya kalau saya tidak pernah ada di pihak Indonesia.²¹²

389. Setelah berdiri, UDT mengikutsertakan suaranya dalam usaha menuntut penentuan nasib sendiri. Pada 1982, João Carrascalão merupakan salah satu dari dua orang Timor yang bersaksi dalam Audiensi Senat Australia tentang Timor-Leste.* Pada November 1987, ia mewakili UDT dalam Konferensi Konsultatif Kristen untuk Asia-Pasifik yang pertama mengenai Timor-Leste, yang diadakan di Manila. Konferensi itu menuntut partisipasi langsung dari pihak Timor dalam perbincangan untuk menyelesaikan konflik.

390. Upaya untuk menjadikan partai sebagai alat yang lebih efektif dan meyakinkan bagi aspirasi masyarakat Timor dirintangi oleh ketidaksetujuan internal di antara para pemimpin UDT di Lisbon dan Australia. Masalah ini akhirnya diselesaikan pada 1993 ketika partai itu, dengan dibantu oleh generasi muda pemimpin-pemimpin UDT yang berkomitmen pada reformasi demokratis, mengadakan kongres di Portugal—pertama kali diadakannya pertemuan seperti ini sejak perang saudara.²¹³ Kongres memilih João Carrascalão sebagai presiden dan mengeluarkan Francisco Lopes da Cruz, presiden pertama UDT, atas “pengkhianatan terhadap partai, bangsa, dan negara”.²¹⁴ Sejumlah komite regional dibentuk untuk melakukan kampanye yang lebih teratur bagi Timor-Leste. Zacarias da Costa tanggung jawab atas relasi internasional dan selama lima tahun berikutnya UDT membawa kasus penentuan nasib sendiri di dalam semua forum PBB dan pertemuan besar masyarakat sipil internasional. Usaha ini berjalan efektif terutama di Eropa, di mana usaha ini antara lain digabungkan dengan lobi oleh Portugal, Fretilin, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, untuk membuat oposisi yang bertambah kuat oleh Parlemen Eropa terhadap penguasaan Indonesia di Timor-Leste.

391. Pada 1993, Fretilin juga menangani masalah persaingan kekuasaan yang telah berlangsung lama antara para pemimpin delegasi eksternal: Mari Alkatiri, Abílio Araújo, dan José Ramos-Horta. Para aktivis Timor sangat kritis terhadap perselisihan internal itu dan terus mengimbuai penyelesaiannya. Mereka percaya perselisihan itu memecah-belah Fretilin di luar negeri, mengalihkan perhatian para pemimpin dari peran utama mereka, dan menciptakan kekacauan dalam

* Saksi lainnya adalah João Gonçalves, petugas sosial untuk komunitas Timor-Leste.

Resistensi di Timor-Leste, ketika mereka menerima informasi dari luar mengenai salah satu anggota yang menjelekkan anggota lain. Mereka juga kritis terhadap ketidakaktifan Abílio Araújo dan Guilhermina Araújo.²¹⁵ Pengunduran diri José Ramos-Horta dari Fretilin pada 1988 dan pemilihannya sebagai Perwakilan Khusus CNRM, diikuti oleh keputusan Abílio Araújo untuk mengambil kepemimpinan Fretilin, berakibat pada menajamnya perselisihan itu. Pada Agustus 1993, atas inisiatif Mari Alkatiri, yang ketika itu menjabat wakil ketua, Delegasi Eksternal Fretilin mencabut jabatan Abílio Araújo sebagai ketua delegasi dan perwakilan Fretilin untuk Eropa dan Portugal.*

Dari perbedaan ke persatuan: pencarian persatuan dan perdamaian

392. UDT dan Fretilin mengakui bahwa demi kepentingan Timor-Leste, sangat penting untuk menyetujui suatu *modus vivendi*. João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa hubungan pada tahun-tahun awal “amat sangat buruk”, terutama pada tingkat masyarakat. Pada 1976, João dan Mari Alkatiri bertemu secara rahasia di Portugal untuk mendiskusikan masalah ini, tetapi memutuskan bahwa “saat ini masih sulit untuk bekerjasama”. Ia menyatakan “perlu waktu lama sebelum rakyat menyadari bahwa perjuangan tidak dapat dilakukan secara terpisah”.²¹⁶

393. Pembentukan Persatuan Nasionalis (*Convergencia Nacionalista*) pada 1986 merupakan langkah maju. Ide tersebut timbul dari diskusi informal antara José Ramos-Horta dan João Carrascalão, tetapi didorong oleh Anacoreto Correia, seorang anggota parlemen Portugis, yang berkunjung ke Timor-Leste pada Juli 1986. Persatuan ini bersifat eksternal bagi Timor-Leste, dan tidak mendapat dukungan luas maupun berkelanjutan dari partai manapun,[†] tetapi para penandatanganannya—Moises do Amaral (Ketua Komisi Politik UDT) dan Abílio Araújo (Ketua Delegasi Eksternal Fretilin)—berpendapat bahwa memperlihatkan adanya kesatuan sangat penting untuk mengimbangi dukungan internasional bagi Timor-Leste, dan untuk memenangi dukungan lebih lanjut di Portugal dan Eropa.[‡] José Ramos-Horta percaya bahwa usaha memperlihatkan kesatuan memang membantu:

.....
* Abílio Araújo dikeluarkan dari Fretilin karena kolaborasinya dengan Indonesia. Ia sekarang menjabat sebagai Presiden Partai Nasionalis Timor (Partido Nacionalista Timorense) yang didirikan di Dili pada 15 Juli 1999 untuk memasyarakatkan otonomi yang luas dalam Indonesia yang berdasar pada sebuah “kebijakan cara ketiga” yang menawarkan pilihan yang tidak melibatkan baik “kediktatoran” CNRT maupun integrasi penuh dengan Indonesia. PNT menerima hasil pemilihan 1999 dan peran UNTAET sebagai pihak berwenang yang sah di Timor-Leste selama masa transisi menuju kemerdekaan. Sebagai musisi yang terampil, Abílio Araújo menggubah musik untuk lagu kebangsaan *Pátria, Pátria* dan lagu-lagu Timor yang sangat dikenal yaitu *Foho Ramelau* dan *Funu nain Falintil*.

† João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa *Convergencia Nacionalista* “tidak dianggap serius pada saat itu baik oleh UDT maupun Fretilin” dan bahwa terdapat kecurigaan adanya keterlibatan Indonesia. (Wawancara CAVR, Dili, 30 Juli 2004.)

‡ Persatuan Nasionalis mendesak Portugal untuk mempercepat pembelaannya bagi Timor-Leste dalam pembicaraan yang disponsori oleh PBB, dan mengembangkan suatu “rencana dinamis untuk bertindak” untuk dilaksanakan ketika Portugal bergabung dengan Uni Eropa pada 1987. (Krieger, hal. 279.)

Memang membantu karena Portugal waktu itu memanfaatkan perselisihan antara Fretilin dan UDT, untuk membenarkan mereka yang tidak berbuat apa-apa. Memang membantu, tapi benar-benar suatu perjuangan tanpa akhir untuk terus mempertahankannya.²¹⁷

394. Fretilin memberi kelonggaran pertama dari sejumlah kelonggaran yang diberikannya kepada UDT. Fretilin mengakui UDT sebagai sesama partai dan menyetujui adanya sistem multipartai di masa depan. Pernyataan-pernyataan Persatuan Nasionalis mendeskripsikan UDT dan Fretilin sebagai “dua organisasi nasionalis Timor-Leste yang paling penting”²¹⁸ dan “sah”, serta meminta Portugal mendanai usaha diplomatik kedua partai tersebut. Pada 1987, delegasi Fretilin dan UDT bersaksi kepada Komite Dekolonisasi di New York mengenai dukungan untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengakui kebungkamannya yang lama dan ketidakhadirannya di PBB. UDT menyangkal pernyataan Indonesia bahwa UDT mendukung integrasi, dan menyatakan menghendaki kemerdekaan serta mengatakan bahwa “kami ingin bangsa kami memilih kedaulatan, melalui suatu proses demokratis di bawah pengawasan PBB”.²¹⁹

395. Pada Desember 1988, dibentuk sebuah organisasi payung nasionalis baru yaitu Dewan Nasional Perlawanan Maubere (Conselho Nacional da Resistência Maubere, CNRM). CNRM mencerminkan suatu revisi radikal terhadap doktrin dan strategi yang telah ditandatangani 12 bulan sebelumnya, ketika Xanana Gusmão mengeluarkan pernyataan bahwa dia menolak Marxisme, mendeklarasikan Falintil sebagai pasukan netral secara politik, dan keluar dari Fretilin.²²⁰ Yang memberi inspirasi pada perjuangan, kata Xanana, adalah keinginan untuk hidup bebas dari pendudukan asing, bukan revolusi. Ia menyatakan bahwa blok Timur bersikap tak acuh terhadap Timor-Leste. Istilah ‘revolusioner’ diganti dengan ‘Maubere’, CNRM pun diganti menjadi CRRN, menandakan bahwa ideologi politik harus dinomorduakan di bawah kemerdekaan nasional, serta menyiratkan pendekatan nonpartisan yang inklusif. Perubahan ini memberi dampak besar terhadap Timor-Leste. Mario Carrascalão mengatakan:

Ketika Xanana mengatakan bahwa ia bukan Fretilin, hanyalah komandan Falintil, itulah saat perang ini mulai dimenangi. Orang-orang Apodeti dan UDT yang sebelumnya menjadi musuh Fretilin juga dapat bergabung dengan gerakan ini.²²¹

396. Namun, UDT masih merasa istilah ‘Maubere’ tidak cukup inklusif dan secara formal menunda keanggotaan CNRM, walaupun dalam praktik tetap kooperatif. *

397. Perubahan-perubahan ini juga memberi dasar kuat untuk meluncurkan kampanye diplomatik baru yang efektif. Muncul menjelang akhir Perang Dingin,

.....
* João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa istilah ‘Maubere’ tidak dikenal di beberapa bagian di Timor-Leste dan tidak akurat: “Tidak semua dari kami Maubere.” (Wawancara CAVR, 30 Juli 2004. Lihat juga Bagian 3: Sejarah Konflik untuk diskusi mengenai asal-usul istilah itu.)

perubahan tersebut memberi tantangan pada saat yang tepat bagi persepsi internasional bahwa gerakan kemerdekaan adalah proyek sayap kiri ekstrem serta merupakan ancaman bagi Indonesia dan stabilitas wilayah. Bahasa hak-hak asasi manusia dan demokrasi menggantikan retorika militan di masa lalu. Menurut Xanana Gusmão, CNRM:

Berkomitmen untuk membangun bangsa yang bebas dan demokratis, berdasarkan penghormatan pada kebebasan berpikir, berserikat, dan berekspresi, serta menjunjung setinggi-tingginya Hak Asasi Manusia Universal. Sistem multipartai dan ekonomi pasar akan menjadi fondasi Timor-Leste merdeka... Ia akan menjadi negara yang bebas dan tidak bersekutu, dengan tujuan kuat menjadi anggota ASEAN, untuk turut berperan bagi stabilitas regional.^{*}

398. Pendekatan baru ini sudah diperhitungkan secara internasional dengan menunjukan José Ramos-Horta sebagai perwakilan pribadi Xanana Gusmão dan perwakilan khusus CNRM di luar negeri. Dengan menghubungkan Resistansi dengan Ramos-Horta, yang kepercayaan sosial demokrat dan pandangan hak asasi manusianya lebih dapat diterima secara internasional bila dibandingkan dengan citra Marxis Abilio Araújo, menunjukkan besarnya perbaikan itu. Pada awalnya pemilihan atas dirinya tidak diterima dengan baik oleh UDT dan Fretilin, yang takut bahwa peran mereka akan melemah.[†] Strategi baru itu mewajibkan mereka menomorduakan kepentingan partai dan menonjolkan sifat nasionalis, serta menyelenggarakan berbagai kampanye dengan aktivis Timor dari luar barisan mereka yang jumlahnya semakin bertambah.

399. Sebagai bagian dari ofensif diplomatik baru, Resistansi meluncurkan rencana perdamaian lain yang dikembangkan oleh José Ramos-Horta atas dasar perundingannya dengan Delegasi Eksternal Fretilin dan Xanana Gusmão. Ramos-Horta menyusun rencana itu di Darhamsala, markas besar Dalai Lama, dan mengumumkan rencana itu untuk kali pertama di Brussel pada April 1992. Rencana tersebut terdiri atas lima butir pendekatan baru CNRM dan satu butir rencana perdamaian yang dikeluarkan oleh Xanana Gusmão pada 5 Oktober 1989 dan telah didukung oleh Persatuan Nasionalis UDT dan Fretilin.²²²

400. Rencana itu terbagi dalam tiga fase. Dalam fase pertama, yang berlangsung selama dua tahun, Indonesia akan tetap berkuasa, tapi akan diperkenalkan sejumlah langkah guna membangun kepercayaan terhadap pihak Indonesia,

.....
^{*} Barbedo de Magalhães, *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*, Oporto University, Portugal, 1992, hal. 43. Makna dari perubahan-perubahan ini, cara, dan intinya, dapat diperoleh dari perbandingan dengan pengaduan tajam Nicolau Lobato terhadap Xavier do Amaral pada 1977 untuk kejahatan-kejahatan revolusioner. (Pernyataan Komite Sentral Fretilin atas "Pengkhianatan Besar Xavier do Amaral," Radio Maubere, 14 September 1977.)

[†] Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004. *The Communiqué of the Nationalist Convergence of Timor*, 10 November 1989, tentang "peran yang tak tergantikan" dari Fretilin dan sebagai perwakilan masyarakat Timor-Leste. (Krieger, hal. 282.)

termasuk penarikan pasukan dan penerimaan pengawasan PBB atas hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada fase kedua, Timor-Leste diberi otonomi penuh yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun. Pada fase ketiga, kepastian status Timor-Leste akan ditentukan melalui referendum. Rencana tersebut bermaksud menekan Pemerintah Soeharto dengan menawarkan jalan ke luar yang terhormat, serta memperkenalkan Resistansi sebagai pemeran utama yang lebih konstruktif dibandingkan yang lainnya. José Ramos-Horta berkata:

*Ini juga berarti bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, serta komunitas internasional, untuk menunjukkan sikap tanggungjawab, kedewasaan, dan kehati-hatian para pemimpin Resistansi Timor-Leste.*²²³

401. Tanggapan di dalam partai, masyarakat sipil internasional, dan diaspora Timor-Leste pada awalnya negatif. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

*Saya harus mempertahankannya begitu sering, baik di Portugal maupun di komunitas Timor, dengan Fretilin dan UDT. Ini sangat kontroversial pada awalnya, karena kata 'otonomi' sangat tabu ketika itu, tapi kemudian sebagian besar orang setuju dengan ini.*²²⁴

402. Pemerintah Indonesia juga bersifat curiga. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

Saya ingat pernah berbicara dengan Ali Alatas di New York tanggal 18 Oktober 1994, pertemuan resmi kami yang pertama di New York. Alatas mengatakan, "Rencana damai Anda itu sepertinya merupakan batu loncatan menuju kemerdekaan".

403. Jose Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa Menteri Alatas "memang benar". Tapi, ia menjelaskan bahwa Indonesia akan diuntungkan jika dapat memanfaatkan kesempatan itu secara konstruktif, dan rakyat pun puas dengan otonomi setelah sepuluh tahun.

404. Sebuah jaringan perwakilan internasional dan penghubung CNRM untuk mempromosikan rencana itu ditempatkan di Portugal, Kanada, Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, serta wilayah sekitarnya. Jaringan itu melibatkan diplomat generasi baru seperti José Amorim Dias, wakil CNRM di Uni Eropa sejak 1993, dan Constancio Pinto,* wakil CNRM di Amerika Serikat dan Kanada sejak 1994. Usaha mereka didukung Pusat Dukungan Internasional Timor-Leste (ETISC) yang didirikan di Darwin oleh Juan Federer, yang juga melakukan pencarian dana dan memberi bantuan pribadi kepada José Ramos-Horta. Pada saat yang sama, José Ramos-Horta meneruskan bekerjasama langsung dengan Fretilin

.....
* Sebelum meninggalkan Timor-Leste pada 1991, Constancio Pinto telah bertanggung jawab atas nama CNRM dalam mengatur semua kegiatan klandestin di kota-kota dan desa-desa. Lihat Constancio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, Boston: South End Press, Boston, 1997.

dan UDT, sesuai dengan peran masing-masing, tetapi menegaskan perlu adanya koordinasi. Untuk kepentingan ini, pada 1995 dibentuk sebuah Komite Pengurus Garis Depan Diplomasi (menggantikan Persatuan Nasionalis), dan tanggungjawab dibagi antara kedua partai itu.

405. Di atas pertumbuhan kesadaran internasional setelah terjadinya pembantaian Santa Cruz, José Ramos-Horta menggunakan rencana itu untuk memperluas kampanye, membuka jalan untuk membawa kasus Timor-Leste kepada lembaga-lembaga penting, seperti Parlemen Eropa, Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Royal Institute of International Affairs di London, dan perkumpulan pers di Thailand dan Australia, serta mengarahkan usaha Resistansi pada jalan yang baru dan positif.

406. Semua usaha tersebut memuncak dengan pemberian penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta pada 1996. Keikutsertaan José Ramos-Horta merupakan dukungan kuat dari lembaga-lembaga yang paling terhormat di dunia untuk diplomasi Resistansi dan rencana perdamaannya. Penghargaan itu menandai pengakuan legitimasi masalah Timor-Leste dan dimulainya fase baru dalam perjuangan. Ramos-Horta mempromosikan rencana itu dalam pidato penerimaan hadiah Nobel. Dalam pernyataannya, Komite Nobel Norwegia menyatakan harapan, “bahwa penghargaan ini akan mendorong upaya-upaya untuk mencari solusi diplomatik bagi konflik di Timor-Leste, yang berdasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri”.²²⁵ Sekretaris Jenderal PBB menyatakan pendapat yang sama dalam ucapan selamatnya atas penghargaan itu, dan beberapa minggu kemudian, pada Februari 1997, Kofi Annan, Sekretaris Jenderal yang baru, menunjuk Jamsheed Marker sebagai utusan pribadinya untuk Timor-Leste guna mengaktifkan kembali proses PBB.

407. Dengan bantuan Pemerintah Portugis, pada 1998 CNRM menyelenggarakan konvensi di Peniche, Portugal, yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari Timor-Leste. Pertemuan itu diadakan di luar negeri agar Timor-Leste dapat memanfaatkan dorongan internasional yang baru dan, dalam pernyataan Agio Pereira, “untuk memperkenalkan suatu garis depan kesatuan nasional dan Xanana Gusmão sebagai pemimpin”.²²⁶ Konvensi itu memperkuat kesatuan dengan menghapus, atas instruksi eksplisit dari Xanana Gusmão, kata ‘Maubere’ dari namanya sebagai penghormatan terhadap UDT. Dengan demikian namanya berubah menjadi Conselho Nacional da Resistência Timorense (Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor, CNRT), yang menyambut baik orang Timor yang sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Indonesia, serta mengakui peranan Gereja.* Pertemuan ini juga mengonfirmasikan komitmen Resistansi terhadap demokrasi dan pluralisme, dengan mengadopsi sejenis Magna Carta mengenai kebebasan, hak, kewajiban, dan jaminan hak asasi manusia untuk masyarakat Timor-Leste. Konvensi itu disambut secara universal sebagai peristiwa unik. Dalam pernyataan Pemerintah Australia dikatakan bahwa konvensi itu berhasil menyatukan “pihak-pihak yang bertikai

.....
* Resistansi internal dan Xanana Gusmão, yang dipenjar di Jakarta, diwakili pada pertemuan ini oleh Fr Filomeno Jacob SJ, dan Fr Domingos Maubere Soares.

dalam perang saudara, yaitu UDT dan Fretilin, ke dalam suatu koalisi—hal yang belum pernah dicapai sebelumnya” serta memperoleh persetujuan “atas pemilihan komandan Falintil Xanana Gusmão, yang ada di penjara, sebagai Presiden CNRT dan pemimpin utama Resistansi”.²²⁷

408. Resistansi bergabung dengan All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogues (AIETD) yang disponsori oleh PBB dan dimulai pada 1995, dengan posisi yang kuat dan mampu memanfaatkannya. Pada AIETD keempat, 1998, José Ramos-Horta dengan dukungan dari UDT dan Fretilin memperoleh mayoritas dukungan komunitas Timor untuk berpartisipasi langsung dalam pertemuan antara Portugal dan Indonesia yang disponsori PBB. Jamsheed Marker melaporkan bahwa pada saat yang sama, negara-negara Barat dan diplomat-diplomat PBB mulai terlibat dalam perundingan langsung dengan Xanana Gusmão di penjara dan dengan perwakilan Resistansi lainnya.²²⁸ “Hak atas dialog” akhirnya berhasil direbut.

409. Pada April 1999, CNRT mengadakan konferensi perencanaan di Melbourne. Inisiatif semacam ini dan keputusan CNRT untuk menarik Falintil serta mengatur kampanye kemerdekaan yang tertib guna menghindari terjadinya provokasi oleh milisi pro-otonomi,²²⁹ memperdalam kepercayaan internasional terhadap Resistansi pada periode menjelang pemungutan suara pada Agustus. Agio Pereira mengatakan kepada Komisi:

*Akan sangat sulit bagi PBB untuk menegosiasikan Kesepakatan 5 Mei 1999 dengan Indonesia apabila Resistansi Timor terlihat pecah atau berantakan.*²³⁰

410. Diakuinya legitimasi Resistansi oleh PBB dengan menggunakan nama dan bendera CNRT pada kartu pemungutan suara 30 Agustus 1999 merupakan kepuasan yang besar dan suatu kebanggaan. Tapi, pengakuan yang paling berharga berasal dari rakyat Timor, yang mendukung Resistansi beserta komponen-komponen politiknya pada hari bersejarah tersebut.

Diaspora

411. Diaspora Timor-Leste, secara umum, bukan bagian dari kampanye diplomatik formal Resistansi untuk penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, kehadiran dan kegiatan komunitas-komunitas Timor di luar negeri secara signifikan mengangkat profil isu ini di banyak negara, dan memberi tambahan sumberdaya serta keahlian yang sangat penting bagi kampanye formal. Diaspora semakin berperan dan efektivitasnya diakui oleh para pemimpin politik Timor-Leste. Banyak anggota utama diaspora yang kembali ke Timor-Leste selama dan setelah 1999 untuk membantu membangun negara baru ini.

.....
* Ini adalah referensi untuk laporan Fretilin mengenai pembicaraan singkat Xanana Gusmão dengan Kolonel Purwanto pada 1983 yang berjudul “Fretilin conquers the right to dialogue”, The FRETILIN External Delegation, Lisabon, 1983.

412. Pada puncaknya, diaspora itu terdiri atas 20.000 orang Timor di Australia, sekitar 10.000 di Portugal, dan beberapa lagi tersebar di Makau, Mozambik, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, dan negara-negara lainnya. Mayoritas diaspora itu terdiri atas para pengungsi perang saudara 1975 antara UDT dan Fretilin, baik yang mengungsi langsung ke Australia atau yang berhasil pergi ke Portugal melalui Timor Barat. Banyak yang pergi ke Portugal akhirnya pindah ke Australia untuk bergabung dengan sanak-saudaranya, agar lebih dekat dengan Timor-Leste dan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dari tahun ke tahun jumlah mereka semakin bertambah dengan anggota-anggota keluarga, yang perjalanannya dari Timor-Leste secara resmi diatur oleh Palang Merah Internasional, para pengungsi politik serta yang lain, yang melarikan diri melalui Indonesia, baik yang diam-diam secara individual dengan menggunakan jalur yang rumit, termasuk dengan menyuap pejabat Indonesia, ataupun melalui permohonan suaka di kedutaan besar asing di Jakarta.^{*} Mereka yang keluar melalui kedutaan besar sejak 1993 atau yang pergi setelah 1995, memberi kontribusi penting karena sangat termotivasi secara politik dan dapat berbicara berdasarkan pengetahuan pribadi mengenai pendudukan, serta tidak terkait pada afiliasi-afiliasi politik 1975. Dengan cepat dan mudah mereka bergabung dengan CNRM serta organisasi-organisasi solidaritas dan kegiatan di Inggris, Irlandia, Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Portugal, dan Australia. Pada 1995, 1.600 orang tiba di Australia, angka terbesar sejak perang saudara. Namun sejak 1999, mereka cenderung kembali ke negara asalnya. Walaupun sebagian besar komunitas umum tetap memilih untuk tinggal di luar negeri, mayoritas pemimpin utama diaspora telah kembali ke Timor-Leste atau mempertahankan keberadaan mereka di kedua tempat.[†]

413. Diaspora itu berjumlah sedikit, terpisah-pisah secara politik, tersebar-sebar, dan pada umumnya miskin. Banyak di antara mereka yang memulai hidup baru di kamp-kamp pengungsi dan membawa bekas luka serta antipati terhadap perang saudara dan invasi Indonesia. Di Portugal, jumlah orang Timor yang baru tiba tidak sebesar jumlah orang-orang dari bekas koloni Portugis di Afrika. Mereka menemui kesulitan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan, sehingga banyak orang Timor tinggal di kamp-kamp di Lisabon selama bertahun-tahun.

414. Di Australia, orang Timor memiliki kesulitan dalam bahasa, kebudayaan, dan struktur negara tersebut. Abel Guterres bercerita kepada Komisi:

Teman-teman kami yang di Portugal bisa bicara bahasa Portugis, tapi kami di Australia punya masalah besar: kami tidak mengerti bahasanya... Kata pertama yang kami tahu adalah 'yes'. Kami berkunjung ke rumah teman, dan mereka bertanya: 'Mau kopi apa teh?'

.....
* Kampanye untuk Mempersatukan Keluarga Timor di Australia (Reunite in Australia the Families of Timor, RAFT) berhasil mengumpulkan beribu-ribu dolar dari organisasi-organisasi non-pemerintah Australia dan memberikan dana pinjaman untuk membantu keluarga-keluarga Timor, tanpa peduli afiliasi politik mereka, untuk mendanai sanak saudara bergabung dengan mereka di Australia.

† Untuk studi mengenai komunitas diaspora orang Timor di Sydney, lihat Amanda Wise *No Longer in Exile? Shifting Experiences of Home, Homeland and Identity for the East Timorese Refugee Diaspora in Australia in the Light of East Timor's Independence*, University of Western Sydney, 2002. Lihat juga disertasi Pascoela Barreto tentang diaspora Timor-Leste di Portugal.

Dan kita semua menjawab 'yes', sehingga mereka akan bawa kopi dan teh sekaligus.²³¹

415. Mereka menetap terutama di daerah pinggiran di kota-kota besar dan mencari pekerjaan di manapun mereka bisa mendapatkannya, seperti di pabrik sebagai buruh lepas, dan di perusahaan transportasi umum. Faktor-faktor ini memperlambat serta menyulitkan perkembangan komunitas dan organisasi politik. Mereka dibantu dalam proses ini oleh organisasi sosial, kelompok-kelompok masyarakat dan Gereja, serta pejuang-pejuang laki-laki dan perempuan yang terkemuka dalam kelompok mereka sendiri.

416. Kesuksesan dalam membangun komunitas dan penyebaran budaya politik nasionalis kepada generasi penerus merupakan prestasi yang luarbiasa. Di Portugal, Makau, dan Australia, komunitas-komunitas itu membentuk organisasi politik, budaya, dan olahraga, mengadakan pertemuan, dan terus menginformasikan anggotanya melalui siaran radio yang mereka kelola sendiri, serta melalui surat edaran. Gereja Katolik berperan penting sebagai tempat pertemuan yang netral dan sumber spiritual, budaya, dan pastoral, terutama di mana terdapat pastor-pastor dari Timor. Pembentukan komunitas-komunitas ini merupakan sikap pembangkangan dan penentuan nasib sendiri orang Timor di lingkungan asing, dan melahirkan sumberdaya baru yang menambah kapasitas dan penjangkauan diplomatik Timor-Leste secara signifikan.

417. Walaupun sering mengalami rintangan besar yang disebabkan oleh warisan perang saudara, diaspora memberi dampak di negara-negara tempat komunitas mereka kuat, dan dalam beberapa kasus menyamai usaha solidaritas lainnya. Luisa Teotonio Pereira mengatakan kepada Komisi:

Masyarakat Timor di Portugal selalu bertahan dengan organisasi-organisasi mereka sendiri [dan hanya] sekali-sekali diundang berpartisipasi dalam struktur-struktur Portugis. Mungkin hanya sekali mereka pernah bergabung sebagai warganegara Portugis yang setara: dalam kasus Komisi Kebebasan bagi Xanana, Kebebasan bagi Timor [Comissão Liberdade para Xanana, Liberdade para Timor], yang dibentuk pada 1993.²³²

418. Itu juga berlaku bagi bagian-bagian komunitas Timor di Australia. Walaupun memulainya secara perlahan, mereka membentuk persekutuan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan saling mendukung melalui protes, lobi, penyebaran informasi, pencarian dana, serta kegiatan-kegiatan budaya, keagamaan, dan politik—termasuk, pada tahun-tahun belakangan, konser dan produksi CD musik, pameran, dan pertunjukan karya teater profesional. Hal ini tidak selalu mudah. Abel Guterres mengatakan kepada Komisi:

Ketika kami berdemonstrasi di Departemen Luar Negeri atau Kedutaan Indonesia, beberapa orang akan bilang ke atasannya bahwa mereka sakit, tapi kemudian muncul di televisi pada demonstrasi.

Kalau atasannya memahami situasinya, ia akan mengizinkan mereka ambil waktu libur; tapi beberapa ada yang dipecat, dan kalau sudah dipecat—bagaimana mau makan?²³³

419. Beberapa orang mempelajari ilmu perdagangan dan bisnis serta mengambil kursus tingkat menengah dan di universitas, guna mempersiapkan diri mengabdikan di Timor-Leste setelah kemerdekaan. Abel Guterres mengatakan kepada Komisi:

Sebagian orang memberi satu persen, sebagian lagi sepuluh persen, dua puluh, tiga puluh, empat puluh sampai seratus persen hidupnya untuk Timor-Leste. Semua ikut berperan. Mungkin hanya hal-hal kecil saja, tapi mereka semua melakukan sesuatu.²³⁴

420. Orang-orang Timor juga terlibat dalam penjangkauan internasional dengan mendukung advokasi para diplomat dalam forum-forum internasional atau, dengan bertambahnya kepercayaan diri, merekalah yang mewakili Timor-Leste dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah-pemerintah asing atau di konferensi-konferensi internasional.^{*} Selain membentuk dan mengurus organisasi untuk mempertahankan identitas dan solidaritas komunitas mereka, diaspora Timor juga membentuk organisasi-organisasi yang efektif untuk memberikan dukungan kemanusiaan, advokasi, hak asasi manusia, dan dukungan lainnya kepada Timor-Leste secara langsung.[†]

421. Para pemimpin Timor-Leste mengakui dan mendorong kontribusi diaspora. José Ramos-Horta yang tinggal di tengah komunitas diaspora di Australia dan sering berinteraksi dengan mereka, dengan visi ke depan meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam misinya. Setelah penangkapan atas dirinya, Xanana Gusmão mengirim surat-surat kepada diaspora untuk memperkuat kepercayaan mereka bahwa diaspora Timor adalah bagian dari Resistansi seperti mereka yang ada di Timor-Leste. Dalam sebuah surat yang dialamatkan kepada Xana Bernades, tertanggal 9 Juni 1992, Xanana menulis:

Saya tahu, bahwa Anda "independen" (dari partai-partai politik), tapi bagaimanapun juga Anda satu dengan kami. Anda adalah bagian kami. Dan kami, sebagai pejuang tua bangsa ini, bangga pada Anda.[‡]

.....
^{*} Di Eropa, misalnya, ini mencakup tur-tur oleh orang Timor yang bermarkas di Portugal yang berkampanye melalui Eropa, menari, menyanyi, dan menunjukkan budaya Timor-Leste. Contoh-contoh lain adalah partisipasi perempuan diaspora Timor dalam Konferensi Dunia mengenai Perempuan yang diadakan di Nairobi pada 1985, konferensi berikutnya di Beijing, pertemuan-pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Gereja, dan advokasi kepada Australia, Selandia Baru, dan pemerintah lainnya.

[†] Dua contoh penting adalah East Timor Relief Association (ETRA), yang dibentuk di Sydney pada 1992, dan Pusat Hak Asasi Timor-Leste (East Timor Human Rights Centre, ETHRC), yang dibentuk di Melbourne pada 1995. Seperti halnya organisasi-organisasi diaspora yang terfokus pada pembebasan, mereka bubar setelah 1999.

[‡] Surat kepada Xana Bernades, seorang perempuan muda Timor yang tinggal di Australia, menanggapi sepucuk surat dari dirinya bersama dana yang terkumpul dari pertandingan kriket dan festival solidaritas di Melbourne (Sarah Niner [Ed.], *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 170-171).

422. Xanana Gusmão mengulang pernyataan itu setelah pembebasannya. Ia mengatakan dalam suatu konferensi pers di Lisbon pada 2000, bahwa dunia mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya, bila bukan karena mereka yang melarikan diri dari Timor-Leste dan mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri. Dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Komisaris Olandina Caeiro meminta Abel Guterres mengidentifikasi momen yang sangat istimewa dalam hidupnya, sejak ia meninggalkan Timor-Leste pada 1975. Abel menjawab:

Ada banyak momen yang berkesan, tapi ada satu yang paling menonjol. Tahun 1999 saya datang ke Lecidere, saya lihat bendera CNRT sedang dikibarkan. Lalu saya berpikir: 'Wow, ini luarbiasa'. Ini sesuatu yang dari dulu selalu saya impikan. Rasanya seperti di surga. Sulit menggambarkan perasaan saya waktu itu. Saya melihat semuanya menari tebe-tebe di sekitar bendera. Benar-benar sesuatu yang sangat luarbiasa.'²³⁵

Kesimpulan

423. Perjuangan traumatis Timor-Leste selama 25 tahun demi penentuan nasib sendiri seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti negara-pulau kecil lainnya di wilayah itu, hak Timor-Leste yang diakui secara internasional untuk membuat keputusan-keputusannya sendiri, seharusnya dihargai, dirayakan, dan difasilitasi secara damai, dan tidak ditindas dengan kekerasan.

424. Di antara berbagai macam faktor yang menentukan kemerdekaan Timor-Leste, yang paling penting ialah kontribusi dari gerakan Resistansi.

425. Untuk mencapai cita-citanya, Resistansi harus menghadapi sejumlah besar masalah rumit, yang bersifat eksternal, dan yang dibuatnya sendiri, termasuk perang saudara. Meskipun memiliki legitimasi yang jelas mengenai tujuannya, garis depan diplomatik terpaksa beroperasi dalam lingkungan yang bertentangan dengan ideologi dan tujuan-tujuannya, dan yang memihak kepada kekuatan pendudukan ketimbang kepada kuasa pemerintahan yang sah. Resistansi eksternal juga terpisah dan beroperasi dengan hanya separuh efektif. Fretilin harus memikul beban sendiri selama bertahun-tahun, sementara UDT membangun kembali organisasi serta kredibilitasnya setelah perang saudara dan kolaborasi tokoh-tokoh utamanya dengan Indonesia.

426. Resistansi menghadapi tantangan-tantangan ini dengan menggunakan kekuatannya dan dengan menyesuaikan diri tanpa mengorbankan cita-citanya atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Walaupun tidak berhasil menghentikan memburuknya nasib diplomatiknya, kebijakan awal Fretilin sangat penting dan memberi kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang. Kebijakan-kebijakan itu meliputi keputusan membuka garis depan diplomatik, untuk memfokuskan pada PBB dan hak-hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri yang diakui secara internasional, untuk bekerja dengan Portugal, untuk membangun dukungan di Afrika dengan lima negara bekas

jajahan Portugis dan suara yang banyak di PBB, untuk membangun relasi dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penting di negara-negara Barat, serta memilih José Ramos-Horta sebagai wakil Timor-Leste di PBB. Kontribusi Ramos-Horta dalam membangun dukungan masyarakat sipil dan kesadaran dunia mengenai Timor-Leste sangat luarbiasa, demikian pula masukannya kepada Resistansi tentang kebijakan dan strategi, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan diplomatiknya yang ekstensif, sangat penting baik di dalam maupun di luar negeri.

427. Kontribusi yang paling penting terhadap diplomasi Resistansi berasal dari dalam, ketika Resistansi dibentuk kembali sebagai pergerakan yang berdasarkan nasionalisme dan bukan afiliasi partai atau ideologi politik, serta berkomitmen pada demokrasi mendukung pluralisme dan hak asasi manusia. Perubahan kebijakan ini membantu memperbaiki nasib Timor-Leste, dan José Ramos-Horta diberi kepercayaan memimpin pelaksanaannya di luar negeri. Untuk menerapkannya ke dalam praktik tentu saja membutuhkan waktu, tetapi dampak diplomatik yang timbul sangat luarbiasa, karena berhasil menyangkal pernyataan bahwa Resistansi terbatas pada Fretilin dan hanya bersifat eksternal. Barisan-barisan Resistansi di dalam dan luar Timor-Leste meningkat, termasuk di kalangan diaspora. Mereka mengakomodasi sejumlah kebijakan UDT yang signifikan dan akhirnya berhasil meredam ketakutan bahwa Timor-Leste potensial menjadi “Kuba di Asia Tenggara”. Walaupun ditolak di beberapa bagian, Resistansi yang sebelumnya terpisah-pisah tumbuh menjadi suatu gerakan terpadu di bawah pimpinan Xanana Gusmão dan José Ramos-Horta.

428. Resistansi internal dan eksternal telah memetik ilmu dari pengalaman pahitnya, dan menciptakan dirinya kembali dalam kancah peperangan dan politik internasional. Hasilnya, dalam kerjasama dengan masyarakat sipil, adalah salah satu gerakan diplomasi rakyat yang paling berhasil selama abad ke-20.

Masyarakat sipil

Pendahuluan

429. Bagian ini berfokus pada kontribusi masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat sipil internasional menemani rakyat Timor-Leste dalam setiap langkah perjalanan panjang mereka menuju kemerdekaan, tetapi usaha-usahanya jarang diakui dalam catatan sumber-sumber resmi atau hanya disinggung secara umum.* Bagian ini

* Catatan resmi Pemerintah Australia tentang peran Australia di dalam menyelesaikan perdebatan Timor-Leste tidaklah memasukkan peran masyarakat sipil. Lihat *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2001. Jamsheed Marker menyebut sepintas lalu tentang organisasi non-pemerintah dalam *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland & Company, Inc., London, 2003. Dalam catatannya tentang Jajak Pendapat 1999, Ian Martin, kepala UNAMET, memberikan penghargaan besar terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah, tetapi mengakui bahwa cerita versi mereka bukanlah pokok persoalan buku yang dia tulis (*Self-Determination in East Timor*, hal. 13).

ditujukan untuk mengakui solidaritas yang luarbiasa itu, dan untuk memberitahu rakyat Timor-Leste, yang mayoritas tidak meninggalkan tanah airnya selama perang dan terputus dari dunia luar, tentang aktivitas yang berlangsung di luar Timor-Leste guna membela hak asasi mereka atas penetapan nasib sendiri. Karena keterbatasan tempat, tidaklah mungkin menceritakan secara terperinci atau berlaku adil terhadap ribuan individu dan organisasi yang terlibat selama 25 tahun perjuangan (1974 - 1999). Setiap negara sebaiknya layak mendapat bagian tersendiri. Namun, bab ini hanya difokuskan pada tahun-tahun awal, ketika kegiatan penting yang dilakukan umumnya jarang diketahui hingga hari ini. Masyarakat sipil Indonesia layak dihargai secara khusus, karena keterlibatan mereka membutuhkan keberanian luarbiasa. Kontribusi masyarakat sipil internasional dalam bidang-bidang penting lainnya seperti bantuan, pengungsi, dan kebutuhan kemanusiaan tidak disertakan, meskipun diketahui bahwa layanan-layanan ini sering sangat penting untuk kelangsungan hidup dan tanpa mereka penentuan nasib sendiri mungkin akan menjadi tidak berarti bagi banyak warga Timor-Leste.

Terminologi

430. Komisi telah memilih menggunakan istilah ‘masyarakat sipil’ karena empat alasan. Pertama, sebagai satu sektor istilah ini membedakan dari sektor-sektor penting lainnya yang membentuk masyarakat demokrasi, yaitu pemerintah dan bisnis. Istilah ini mengakui timbulnya ‘sektor ketiga’ dan perannya yang independen dalam menanggulangi masalah-masalah dunia. Dalam konteks Timor-Leste hal ini sangat relevan, karena dalam sebagian besar periode 1974 - 1999, masyarakat sipil memainkan peran yang memiliki ciri khas tersendiri, dan dalam hal Timor-Leste biasanya berseberangan dengan pihak pemerintah dan bisnis.’ Kedua, istilah ini lebih luas dibanding ‘organisasi non-pemerintah’ (ornop/NGO) dan ‘grup solidaritas’, yang sering digunakan dalam konteks ini, tapi tidak cukup luas untuk mencakup luas dan ragam individu, grup, dan organisasi yang memberi dukungan kepada Timor-Leste dalam penentuan nasib sendiri. Ketiga, istilah ‘masyarakat sipil’, bukan sekadar ‘organisasi non-pemerintah’ (NGO), tetapi memiliki isi positif dan mewakili komitmen untuk membangun masyarakat yang beradab berdasarkan nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah ini pantas digunakan di sini karena masyarakat sipil internasional mendapat legitimasi dan kehormatan dalam pembelaannya terhadap Timor-Leste dengan mempromosikan nilai-nilai inti dan umumnya beroperasi tanpa kekerasan, di dalam batas-batas hukum dan melalui

* Menurut kesaksian Luisa Teotonio Pereira kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Portugal adalah pengecualian untuk aturan umum ini, setidaknya di tahun-tahun sesudahnya. Konfrontasi yang mencirikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil di negara-negara lain baru berubah pada 1999, setelah Indonesia dan komunitas internasional menyetujui penyelenggaraan tindakan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste. Sektor swasta atau bisnis pada umumnya tidak terlibat secara terbuka dengan kedua belah pihak, walaupun mendapat keuntungan dari hubungan komersilnya dengan Indonesia, yang tumbuh pesat di bawah pemerintahan Soeharto. Tidak ada pergerakan warga yang mendukung Timor-Leste di negara-negara seperti bekas Uni Soviet dan Cina karena keberadaan ‘sektor ketiga’ tidak dikenal dalam sistem sosialis.

jalur hukum.* Terakhir, istilah masyarakat sipil direkomendasikan karena telah diadopsi secara resmi oleh PBB dan menandai pergeseran penting dalam pemikiran internasional. Telah tumbuh pengakuan di lingkungan pemerintah bahwa masyarakat sipil memiliki peran dalam pemerintahan global, dan bahwa pekerjaan PBB bukan lagi monopoli pemerintah.† Pengalaman Timor-Leste melahirkan kebijaksanaan untuk tidak menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Seperti diakui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan di Dili pada Mei 2002, kontribusi masyarakat sipil sangat penting dalam peran PBB untuk menyelesaikan konflik Timor-Leste.

Masyarakat sipil internasional

431. Peran masyarakat sipil internasional dalam mendukung hak-hak politik Timor-Leste dibagi dalam lima tahap dan, seperti riwayat Timor-Leste, diawali serta diakhiri pada tahap puncak; sedangkan di tengah perjalanannya penuh kegagalan dan keputusasaan.

Tahap pertama: Tantangan awal dan permulaan, 1974 - 1978

432. Meskipun secara prinsip dekolonisasi dimulai pada 1960,‡ masyarakat sipil internasional tidak menunjukkan perhatian yang berarti hingga 1974, ketika mereka merespons pemberitaan media dan lobi-lobi para aktivis Timor-Leste dan para perwakilan Fretilin khususnya. Masyarakat sipil internasional layak dikritik karena tidak lebih cepat mengangkat masalah Timor-Leste menanggapi baik inisiatif PBB maupun situasi yang menyedihkan di Timor Portugis di bawah rezim Salazar-Caetano. Pada saat yang sama, dengan tanggapannya yang terlambat itu, masyarakat internasional tidak dapat dituduh telah merekayasa isu motif-motif politik tersembunyi, seperti yang sering ditudingkan. Kesadaran masyarakat internasional justru berkembang dan bertindak sebagai tanggapan atas inisiatif rakyat Timor-Leste, bukan sebaliknya.

433. Invasi Indonesia dikutuk oleh individu dan organisasi di sejumlah negara, termasuk Kanada, Jepang,§ Selandia Baru, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Namun pada waktu itu pusat-pusat utama aktivitas masyarakat sipil internasional yang terorganisasi hanya ada di Portugal, Australia, dan Inggris.

* Kasus kontroversial adalah dirusaknya pesawat jet tempur Hawk milik Inggris oleh empat orang aktivis perempuan pada Januari 1996. Setelah kejadian tersebut mereka dibebaskan oleh pengadilan. [Lihat segmen 6.2.4: Titik balik 1991-1998, paragraf 478 – 493, di bawah]

† Sementara PBB mendorong kemitraan, ia tetap menjadi forum bagi negara. PBB tidak berencana memberikan kursi atau suara pada organisasi masyarakat sipil dalam Sidang Umum.

‡ PBB pertama-tama mengakui status Timor-Leste sebagai koloni dengan hak kemerdekaan pada 1960.

§ Contoh protes adalah yang dilakukan di luar kantor pemerintah Indonesia di Tokyo dan Osaka. [Suster Monica Nakamura, Kesaksian dalam Audiensi Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.]

434. Masyarakat sipil Portugal menyambut baik Revolusi Anyelir 1974 dan keputusan Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA, Movimento das Forças Armadas) untuk dekolonisasi, demokratisasi, dan mengembangkan masyarakat sipil Portugis dan provinsi-provinsinya di seberang lautan. Masyarakat sipil sendiri merupakan pewaris perubahan politik tersebut, setelah berpuluh-puluh tahun termarginalisasi di bawah pemerintahan diktatorial. Bagi banyak orang, demokrasi dan dekolonisasi saling berkaitan. “Sebuah negara tidak bisa bebas selama menindas negara-negara lain” adalah slogan umum sebelum dan sesudah 25 April. Masyarakat Portugal yang hidup dan bekerja di Timor-Leste dan mereka yang telah bekerja untuk mengakhiri kediktatoran dan kolonialisme Portugis, merasakan tanggungjawab kuat terhadap rakyat Timor-Leste. Centro de Informação e Documentação Anti-colonial (CIDAC, Pusat Informasi dan Dokumentasi Anti-Kolonial) didirikan pada September 1974 untuk menggalakkan dekolonisasi, termasuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Timor-Leste. CIDAC berkontribusi dalam pendirian Associação de Amizade Portugal-Timor-Leste (Badan Persaudaraan Portugal dan Timor-Leste) meski hanya sebentar; dan pada 1981, pada pendirian Comissão para os Direitos do Povo Maubere (CDPM, Komisi untuk Hak Rakyat Maubere) yang menjadi organisasi solidaritas utama Portugal sampai dibubarkan pada 2002.

435. Meskipun hubungan dengan Timor-Leste telah terjalin selama 400 tahun, dan dengan adanya bahasa yang sama serta adanya orang Timor-Leste di Portugal, selama periode awal ini dalam hubungan dengan masalah Timor-Leste, masyarakat sipil menghadapi banyak tantangan pada tingkat pemerintah dan masyarakat. Ini termasuk ketidaktahuan umum tentang Timor-Leste, kekacauan di Portugal yang menghasilkan perubahan politik yang radikal setelah 48 tahun menghadapi rezim kediktatoran, kesibukan dengan koloni-koloni Portugal di Afrika, perbedaan pendapat tentang masa depan Timor-Leste, serta perselisihan antara Fretilin dan UDT. Luisa Teotonio Pereira, koordinator CDPM selama 19 tahun, memberi kesaksian pada Komisi:

Ketidaktahuan tentang sejarah dan kebudayaan rakyat Timor, konteks geo-strategis wilayahnya, dan terpencilnya dari metropolis, dan juga kerahasiaan negosiasi antara Portugal dan Indonesia, menyebabkan diskusi tentang Timor berada di tataran yang rendah dan umumnya hanya menyinggung ideologi, dengan nilai praktis yang sangat sedikit. Warga Portugal yang tertarik dengan hak-hak rakyat Timor tidak mampu memaksa kekuatan politik saat itu untuk melakukan perubahan strategi mendasar yang selanjutnya dapat mengubah jalannya kejadian, seperti tindakan memperkuat keberadaan dan tindakan Portugis di Timor, serta menginternasionalisasi masalah tersebut.²³⁶

436. Sadar akan tanggungjawab mereka, khususnya karena memiliki bahasa yang sama dengan gerakan Resistansi Timor-Leste, grup-grup masyarakat sipil berusaha keras menyebarkan informasi berdasarkan sumber-sumber Timor dan lainnya, termasuk hasil kerja luarbiasa dari jurnalis-jurnalis Portugis yang berani seperti,

antara lain, Adelino Gomes. Namun, karena tantangan-tantangan tersebut di atas, masyarakat sipil Portugis membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat memaksimalkan kontribusinya.

437. Australia merupakan pusat utama untuk dukungan masyarakat sipil internasional terhadap Timor-Leste selama periode tersebut. Sebagai tetangga demokratis terbesar Timor-Leste, sejak 1974 Australia dijadikan sasaran oleh partai-partai politik Timor-Leste, khususnya Fretilin, dengan tujuan mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil untuk partai mereka dan program-programnya. Maka, pada saat invasi Indonesia terjadi, masalah Timor-Leste sudah tercantum dalam agenda sejumlah organisasi dan individu Australia, termasuk kaum akademisi, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, politikus, lembaga bantuan, gereja, tentara veteran,* mahasiswa, dan serikat dagang. Sejumlah besar dari mereka itu pernah berkunjung ke Timor-Leste.

438. Sejak saat itu, landasan bagi komitmen masyarakat sipil Australia yang beragam dan mantap telah diletakkan. Ini dapat dilihat dari survei singkat atas asosiasi-asosiasi pertama mereka, yang banyak di antaranya telah memberi kontribusi terhadap pengembangan dukungan jangka panjang regional dan internasional bagi Timor-Leste.

439. Beberapa anggota parlemen Australia mengunjungi Timor-Leste, dua kali pada 1975, dan membentuk kelompok dukungan Timor-Leste yang kecil tapi kuat di Canberra, menentang kebijakan anti-kemerdekaan-Timor dari pemerintah saat itu dan seterusnya. Salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh, Ken Fry, memberi kesaksian pada Dewan Keamanan PBB pada April 1976 dan menjadi pendukung utama Timor-Leste di Parlemen Nasional. Rekannya, Gordon McIntosh, juga aktif dalam Senat Australia dan berperan sangat penting dalam menggerakkan masyarakat sipil Selandia Baru. Penyelenggaraan Sidang Kongres AS tentang Timor-Leste pada 1977 didorong oleh para anggota parlemen Australia yang dipimpin oleh Tom Uren, salah seorang veteran yang bertugas di Timor Barat pada Perang Dunia Kedua.

440. Lembaga-lembaga bantuan Australia mengirim bantuan kemanusiaan sebagai reaksi atas perang saudara yang pecah 1975. Di antaranya termasuk Australian Council for Overseas Aid (ACFOA, Dewan Australia untuk Bantuan Luar-Negeri), sebuah asosiasi yang merangkul sekitar 70 organisasi nonpemerintah nasional. Selama 24 tahun berikutnya, lembaga tersebut secara terbuka mengadvokasi—baik di negara sendiri maupun di luar negeri—penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Fr. Mark Raper, SJ, salah seorang anggota delegasi ACFOA, menggalang dukungan untuk Timor-Leste di jaringan-jaringan keadilan sosial di Australia dan Asia. Dengan demikian ia memperkuat dukungan atas penentuan nasib

* Beberapa veteran perang Australia yang bertempur melawan Jepang di Timor-Leste dengan pertolongan dan perlindungan dari masyarakat Timor-Leste di dalam Perang Dunia Kedua, memiliki kepercayaan kuat bahwa Australia berutang secara moral kepada masyarakat Timor-Leste atas pengorbanan yang mereka lakukan untuk Australia. Mantan prajurit penyerang Cliff Moris dan Paddy Kenneally berada di antara mereka yang secara terbuka mengemukakan cara pandang ini; tapi, khawatir akan penyebaran ajaran komunisme, tidak semua rekan mereka bisa setuju dengan mereka.

sendiri yang dianjurkan Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian (Catholic Commission for Justice and Peace). Lembaga-lembaga bantuan Australia, termasuk Australian Catholic Relief (Bantuan Katolik Australia) dan Community Aid Abroad (Bantuan Komunitas Luar Negeri), mendanai kunjungan James Dunn ke Portugal pada Januari 1977, dan di sana ia mewawancarai para pengungsi yang meninggalkan Timor-Leste setelah Agustus 1976. Lapornya sangat penting dalam mengonfirmasi telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia sebagaimana diklaim oleh Fretilin.

441. Australia merupakan negara tujuan utama bagi para pengungsi perang saudara Timor-Leste—suatu perkembangan yang berhasil memperkuat kampanye untuk Timor-Leste di Australia dan di wilayah sekitarnya. Lima orang pengamat Deklarasi Kemerdekaan Fretilin pada November 1975 semuanya warga Australia: jurnalis Michael Richardson, Jill Jolliffe, dan Roger East; David Scott, Ketua Community Aid Abroad; dan Sam Kruger, seorang bekas tentara. Jill Jolliffe menjadi salah seorang sumber yang paling mengerti tentang Timor-Leste, dan laporan-laporannya muncul di media internasional selama penjajahan. Tiga dari enam orang jurnalis yang berpangkalan di Australia dan terbunuh di Timor-Leste sebelum akhir 1975 adalah warga Australia. Nasib mereka menarik perhatian masyarakat luas di seluruh Australia. Istri salah seorang jurnalis itu, Shirley Shackleton, dan saudara laki-laki seorang jurnalis lainnya, Paul Stewart, menggunakan media dengan pandai dan menjadi simbol perjuangan Timor-Leste di Australia. Isu Timor mendapatkan dukungan di kalangan serikat buruh, dan menghasilkan pelarangan untuk barang-barang yang akan dikirim ke Indonesia, serta kunjungan ke Jakarta pada April 1976 oleh Presiden Dewan Serikat Buruh Australia (Australian Council of Trade Unions, ACTU), Bob Hawke, serta rekannya aktivis Timor yang berdedikasi, Jim Roulston, untuk mendorong dilakukannya penyelidikan tuntas terhadap tewasnya jurnalis-jurnalis di Balibó. Kelompok solidaritas Australia yang paling lama bekerja, yaitu Campaign for an Independent East Timor (CIET, Kampanye untuk Timor-Leste Merdeka) dan Australia - East Timor Association (AETA, Perhimpunan Australia - Timor-Leste), didirikan setelah para pendirinya mengunjungi Timor-Leste. CIET didirikan di Sydney pada November 1974 oleh Denis Freney (1936-1995), yang mempunyai jaringan di Inggris, di beberapa kota Australia (Adelaide, Canberra, Darwin, Newcastle, Wollongong), dan kemudian juga di Selandia Baru. AETA, melalui David Scott, membantu pembentukan misi pertama Fretilin di PBB pada Desember 1975. Setelah invasi Indonesia, CIET menjadi saluran informasi utama tentang penjajahan dan resistansi, melalui hubungan radio Fretilin yang berbasis di Darwin* dan East Timor News Agency (Biro Berita Timor-Leste). CIET juga

* Radio Maubere adalah satu-satunya alat bagi Resistansi dalam berhubungan dengan dunia luar setelah militer Indonesia menutup wilayah tersebut. Siaran Fretilin tentang perang di Timor-Leste ditangkap di Darwin dan disebarkan oleh CIET ke perwakilan-perwakilan Fretilin di luar negeri, PBB, grup-grup dukungan, media, dan pemerintah. Transmisi dari Darwin dilakukan dengan keterampilan dan kegigihan anggota-anggota Fretilin Tony Belo dan Estanislau da Silva dan warga Australia pendukung mereka, dipimpin oleh Brian Manning, meskipun secara periodik peralatan mereka disita oleh otoritas Australia. Komunikasi rahasia Fretilin harus dipecahkan sebelum disebarkan. Jaringan ini ditutup pada November 1978 setelah militer Indonesia mengambil radio Fretilin dari tangan Alarico Fernandes di Timor-Leste.

tanggung jawab dalam membuat *The Isle of Fear, Isle of Hope*, film berbahasa Inggris pertama tentang perjuangan Timor-Leste, yang dibuat pada 1975. Komisi mendengar kesaksian David Scott tentang usaha-usaha nekat untuk membatalkan embargo terhadap Timor-Leste pada 1976, termasuk usaha yang gagal untuk mendaratkan kapal dari Darwin oleh beberapa orang Australia.’

442. Aktivitas masyarakat sipil di Inggris lebih kecil daripada yang di Portugal atau di Australia. Dibandingkan Australia dan Portugal, Inggris hampir tidak memiliki relasi dengan Timor-Leste. Hal ini disebabkan karena wilayahnya yang terpencil dan tidak adanya komunitas Timor-Leste di Inggris yang mengikuti kejadian-kejadian di tanahair mereka. Di samping itu, meskipun ada dua warga Inggris yang termasuk dalam lima jurnalis yang berbasis di Australia yang terbunuh di Balibó pada Oktober 1975, pemerintah Inggris mengambil kebijakan yang bersifat menjauhkan diri dari masalah Timor-Leste, guna mengurangi kemungkinan terjadinya tekanan publik untuk mengecam Indonesia. Berdasarkan hubungannya dengan Portugal yang sudah sejak dulu, Inggris mengambil sikap “*low profile*” terhadap masalah Timor-Leste selama tahun-tahun akhir pemerintahan Portugal di sana. (Lihat segmen 3.5 dalam bab ini tentang pemerintah Inggris, paragraf 221 - 244.)

443. Meskipun menghadapi lingkungan yang tidak menunjang, dua organisasi masyarakat sipil Inggris bersikeras mengangkat masalah tersebut. Hasil kerja mereka, dan kemudian keterlibatan lembaga Gereja, akhirnya menjadikan Inggris pusat penting untuk dukungan internasional pada Timor-Leste. Pelopornya adalah British Campaign for an Independent East Timor (BCIET, Kampanye Inggris untuk Timor-Leste Merdeka) dan “Tapol”, Kampanye Inggris untuk Pembebasan Tahanan Politik Indonesia.[†] BCIET dibentuk pada 1974 sebagai bagian dari jaringan CIET yang dipimpin Denis Freney dan menjadi ujung tombak gerakan solidaritas di Inggris sampai 1979. Salah satu peran utamanya adalah menyebarkan informasi yang diterima dari Fretilin ke seluruh Inggris melalui Denis Freney. John Taylor dan Dave Macey adalah dua anggota penting yang bekerjasama erat dengan “Tapol” dan membangun hubungan yang erat dengan kalangan gereja, akademisi, dan politik. John Taylor kemudian menulis dua buku tentang Timor-Leste dan menyumbangkan tulisan pada beberapa buku lainnya.

444. “Tapol” dibentuk pada Juni 1973 dan menerbitkan laporan-laporan reguler tentang Timor-Leste sejak 1974. Setelah BCIET bubar, “Tapol” membantu terus

Sambungan ini dibangun kembali pada 1985 untuk periode yang singkat. Catatan Brian Manning tentang aktivitas ini dapat ditemukan dalam *A Few Rough Reds*, ed. Hal Alexander dan Phil Griffiths, Australian Society for the Study of Labour History, Canberra, 2003. Catatan Rob Wesley-Smith dapat ditemukan dalam *Free East Timor*, ed. Jim Aubrey, Random House Australia, Milsons Point, NSW, 1998.

* Pemerintah Australia menyita kapal dan mendakwa kru tersebut dengan dakwaan pelanggaran hukum bea cukai. Pengadilannya berlangsung selama 12 hari. (David Scott, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004)

† Sebagai reaksi atas Timor-Leste dan situasi yang sedang berubah di Indonesia, Tapol memperluas namanya menjadi British Campaign for the Defence of Political Prisoners and Human Rights in Indonesia dan, sejak 1986, menjadi Indonesia Human Rights Campaign.

menghidupkan isu Timor-Leste di Inggris, sampai sejumlah organisasi gereja ikut mengobarkan kampanye dan British Coalition for East Timor (Koalisi Inggris untuk Timor–Leste) dibentuk pada awal 1980-an. Umumnya, “Tapol” berkampanye melalui publikasi laporan berkala, yang keteraturan, kelangsungan, dan profesionalismenya sangat dikagumi oleh aktivis lain. Kontribusinya yang utama berupa laporan-laporan yang berdasarkan pada sumber-sumber dari dalam Indonesia. “Tapol” dan laporan berkalanya sangat berutang budi pada inisiatif dan dedikasi Carmel Budiardjo—ia sendiri bekas tahanan politik di Indonesia—dan Liem Soei Liong, orang Indonesia yang hidup terkucil di Belanda. Mereka menjalin jaringan internasional yang luas melalui laporan berkala mereka dan berbicara kepada umum di luar negeri, termasuk kemudian di PBB. Mereka juga membangun jaringan dukungan yang kukuh di Inggris, yang terdiri atas para pelindung terpadang, termasuk orang-orang terkemuka seperti Lord Avebury, seorang advokat yang persuasif bagi banyak kalangan elite di sepanjang perjuangan Timor-Leste di Inggris.

445. Masyarakat sipil menerapkan dua pendekatan yang sangat berbeda mengenai isu Timor-Leste selama periode ini. Sebagian besar dari pihak pertama terdiri atas grup-grup solidaritas yang berkampanye mendukung kemerdekaan Timor-Leste dan Fretilin. Grup solidaritas pertama yang dibentuk bernama Campaign for an Independent East Timor (CIET). Kelompok ini mengakui bahwa Timor-Leste telah menentukan status politiknya serta menerima realitas kekuasaan Fretilin. Mereka dengan bersemangat menyetujui program-program reformasi Fretilin, yang cocok dengan perkembangan progresif dan agenda-agenda politik,^{*} serta menolak anggapan bahwa Timor-Leste akan lebih baik di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Pendirian ini terus berjalan selama tahun-tahun awal penjajahan, ketika Fretilin menguasai wilayah dan kontak radio dengan dunia luar, dan diperluas dengan menyertakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri ketika Fretilin melakukan perubahan strategi. Gerakan solidaritas ini bahkan tidak surut dengan terjadinya, atau diduga terjadinya, pelanggaran hak asasi manusia oleh Fretilin. Sebagian besar masyarakat waktu itu tidak tahu tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia tersebut, atau percaya bahwa klaim-klaim, baik yang berasal dari pihak Indonesia maupun dari pihak pendukung Timor-Leste, dibesar-besarkan atau didasari motif politik.

446. Pihak lain dalam masyarakat internasional cenderung menempuh pendekatan yang lebih didasarkan pada prinsip hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri, ketimbang pada politik kepartaian. Dari pandangan kebijakan politik paling tidak pihak ini bersikap terbuka mengenai integrasi masa depan Timor-Leste dengan Indonesia, jika hal ini merupakan hasil dari proses yang adil, di samping itu juga bersikap menjaga jarak dengan Fretilin dan gerakan solidaritas. Sebagian besar pihak ini terdiri atas beberapa organisasi nonpemerintah, gereja, dan beberapa organisasi hak asasi manusia

* Contoh-contoh para kaum akademis yang mempromosikan Fretilin dan kebijakan-kebijakannya dalam hubungannya dengan pendidikan, ekonomi, dan reformasi lainnya adalah Ant3nio Barbedo de Magalhaes, Helen Hill, dan John Taylor. Helen Hill, yang mengunjungi Timor-Leste sebelum diambil-alih Indonesia, menulis tesis doktoralnya tentang Fretilin, yang hingga saat ini menjadi satu-satunya studi tentang partai tersebut. Kontribusinya yang lain termasuk *Timor Story*, diterbitkan pada 1976 oleh Timor Information Service. .

yang bekerja atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan secara jelas. Mereka kurang fleksibel dibanding grup-grup solidaritas, tetapi sering lebih pandai dalam mengatur siasat kebijakan tentang isu Timor-Leste, khususnya dalam periode ketika Perang Dingin sedang memuncak. Kemandiriannya juga mencegah mereka terlibat dalam perang ideologi dan masalah organisasi, seperti yang terjadi pada beberapa bagian dalam gerakan solidaritas pada tahun-tahun awal. Namun meskipun mandiri, mereka tidak bertentangan dengan Fretilin atau pihak-pihak yang solid dengan Fretilin, dan sering bekerjasama serta bahkan mencari informasi dari mereka.

447. Contoh untuk pendekatan ini adalah mantan konsul Australia untuk Timor-Leste, James Dunn, yang pandangannya tentang masalah Timor-Leste berpengaruh kuat pada persepsi publik dari berbagai kalangan. Ia mewakili banyak pihak ketika menulis hal-hal berikut di bawah ini kepada José Ramos-Horta (Fretilin) dan Domingos de Oliveira (UDT), pada 18 September 1974:

Saya menulis catatan pendek untuk Anda—dan juga untuk Domingos Oliveira—dengan maksud menjauhkan diri dari laporan-laporan yang mengatakan bahwa Australia mendukung integrasi Timor ke dalam Indonesia. Saya tidak ingin berkomentar tentang laporan itu, atau tentang kebijakan apapun dari pemerintah Australia mengenai hal ini. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa, menurut saya, rakyat Timorlah yang harus memutuskan masa depan negara mereka, tanpa tekanan dari pihak luar. Dalam isu mengenai integrasi dengan Indonesia, saya hanya dapat mengatakan bahwa pada waktu saya berkunjung, saya merasa sangat sedikit rakyat Anda yang memilih garis kebijakan ini sebagai solusi atas nasib mereka. Jika situasi ini berubah, dan rakyat Timor memilih bergabung dengan Indonesia, tentu saja saya akan menerima keputusan tersebut. Begitu pula jika rakyat Timor memutuskan lebih memilih kemerdekaan, keputusan tersebut sepenuhnya akan saya terima secara pribadi, dan saya ingin membantu bangkitnya negara baru tersebut dengan cara apapun. Saya juga akan menghormati keputusan rakyat Anda untuk melanjutkan hubungan dengan Portugal, jika itu yang diinginkan. Tantangan ada pada Anda: Australia tidak bisa memaksa Anda ke arah manapun melawan keinginan Anda.*

448. Pendekatan yang berhasil menarik publik yang lebih luas ini diterapkan dengan hasil yang cukup baik oleh Action for World Development (AWD, Gerakan untuk Pembangunan Dunia), yang dipimpin Bill Armstrong. Sebagai gerakan gereja-gereja ekumenis di Australia, AWD menggunakan koneksinya dengan lembaga bantuan,

* Salinan dari surat dalam arsip CAVR. James Dunn adalah Konsul Australia untuk Timor Portugis 1962-1964. Ia mengunjungi wilayah tersebut mewakili pemerintah Australia pada 17-27 Juni 1974 dan mewakili ACFOA setelah perang saudara. Ia seorang pembela Timor-Leste yang tak mengenal lelah dan sangat kredibel selama penjajahan, serta penulis *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, 2003. Pada 2001 ia dianugerahi Order of Australia, dan pada 2002 dijadikan Grande Oficial of the Order of Prince Henry oleh Jorge Sampaio, Presiden Portugal.

para aktivis keadilan sosial, dan gereja-gereja di Australia dan luar negeri, termasuk World Council of Churches (Dewan Gereja Sedunia), untuk menggalakkan masalah Timor-Leste menjadi masalah hak asasi manusia, bukan sekadar masalah pro-Fretilin atau anti-Indonesia.

449. AWD mendukung publikasi *Timor Information Service* (TIS) yang diedit oleh John Waddingham, salah seorang aktivis Australia untuk Timor-Leste yang memiliki pengetahuan sangat luas mengenai isu tersebut. Ia menyediakan informasi dan analisis yang andal, berdasarkan pada beberapa sumber dan bukan hanya sumber Fretilin. Pendekatan ini menarik garis tajam antara militer Indonesia dan rakyat Indonesia, yang situasinya juga perlu diketahui lebih baik, sehingga memungkinkan untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia, sebagaimana kemudian memang telah terjadi. Hal ini juga perlahan-lahan membuka kemungkinan dibangunnya hubungan dengan diaspora Timor-Leste di Makau, Portugal, dan Australia, termasuk dengan anggota-anggota senior UDT,* yang meninggalkan Timor-Leste sebagai pengungsi setelah kemenangan Fretilin dalam perang saudara. Mereka masih marah dan memiliki salah pengertian terhadap mereka yang dianggap pro-Fretilin.

450. AWD juga mendukung Pat Walsh yang bekerja untuk Timor-Leste dengan John Waddingham, sebelum bergabung dengan ACFOA dan bertugas sebagai peneliti utama dan advokat hak asasi manusia hingga 2000. Pekerjaan ini beragam dan mencakup penggalakan masalah hak asasi manusia di Indonesia dan masalah hubungan Australia-Indonesia. Dalam kaitannya dengan Timor-Leste, pekerjaan tersebut difokuskan pada penentuan nasib sendiri tetapi juga termasuk usaha menangani para pengungsi, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan melibatkan jaringan ekstensif serta lobi di Australia dan internasional.

451. Namun variasi dalam pendekatannya tidak menghasilkan dampak pada pemerintah Indonesia dan sekutunya. Banyak pihak di kalangan pemerintah, media, bisnis,[†] dan masyarakat sipil, tak mengacuhkan pihak-pihak yang vokal membela Timor-Leste dan menganggap mereka sebagai pro-Fretilin dan anti-Indonesia, terlepas dari kecenderungan politik mereka. Dukungan utama untuk Fretilin dari Communist Party of Australia (Partai Komunis Australia) memperkuat pandangan yang dipropagandakan oleh Indonesia serta oleh beberapa pihak dalam hierarki Gereja Katolik Timor-Leste bahwa Fretilin adalah pengikut

.....
* Beberapa pejabat Australia melaporkan pernyataan Jenderal Benny Moerdani pada 1 Desember 1975 bahwa "UDT memusuhi beberapa warga Australia, khususnya ACFOA dan perwakilan media tertentu dan juga Palang Merah. Orang asing siapapun yang ada di Dili berisiko dituduh oleh UDT sebagai simpatisan Fretilin". Dokument 354, Canberra, 2 Desember 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 593, n.4

† *Australia-Indonesia Business Co-operation Committee* (AIBCC) menekan pemerintah Australia kurang dari 12 bulan setelah invasi untuk memberikan pengakuan penuh atas kedaulatan Indonesia di Timor-Leste demi kepentingan keamanan regional. Komite tersebut, yang mewakili 153 perusahaan besar, termasuk ANZ Bank, the Bank of NSW, Blue Metal Industries, the Australian Wheat and Dairy Boards, serta perusahaan gula utama, CSR, berargumentasi bahwa oposisi berlanjut atas penggabungan Timor-Leste dengan Indonesia bisa merusak hubungan dengan Indonesia. "Recognize Takeover: Companies in Approach to Canberra", *The Age*, 23 Oktober 1976.

paham komunis.’ Isu ini, ditambah perdebatan tentang Timor-Leste yang tidak layak hidup sebagai negara yang merdeka dan pentingnya hubungan baik dengan Indonesia, memecah pendapat publik dan menghalangi perjuangan Timor selama beberapa tahun. Pemerintah dan pihak-pihak yang mendukungnya, atau mereka yang diam saja, dituduh ikut berdosa. Masyarakat sipil, menurut kata-kata David Scott, “dipandang rendah sebagai ‘pencari perhatian’, ‘do-gooder’, ‘komunis’, ‘fellow traveller’, ‘bleeding heart’, ‘pinkos’ ‘tidak loyal pada Australia’ dan, yang terkejut dari semua itu, ‘naif’”²³⁷

Tahap kedua: Krisis dan awal baru 1978 - 1983

452. Periode ini merupakan masa yang paling sulit dan menantang bagi rakyat Timor-Leste serta para pendukung internasionalnya. Pada 1978, terjadi krisis yang mendalam. Pada akhir tahun ini, Indonesia mencapai kemajuan yang penting di bidang militer. Tentara Fretilin hampir dibinasakan dan Fretilin telah kehilangan pemimpinnya yang dipuja-puja, Nicolau Lobato, dan hubungan radio dengan dunia luar pun telah berhenti. Puluhan ribu warga Timor-Leste meninggal karena kelaparan atau menyerah, setelah dipaksa turun dari pergunungan dan keluar dari wilayah Fretilin melalui serangan militer yang gencar serta bencana kelaparan. Pada 1983, Dom Martinho da Costa Lopes, pemimpin Gereja Katolik dan pembela rakyat Timor-Leste yang terkemuka, dipaksa mundur dan meninggalkan Timor-Leste. Situasi diplomatik Timor-Leste juga berjalan buruk selama periode ini. Sayap eksternal Fretilin diguncang perpecahan internal yang serius dan nasib Timor-Leste di PBB semakin parah. Pada 1982, Timor-Leste mengalami “pukulan yang menghancurkan”, menurut kata-kata José Ramos Horta, ketika sebuah Resolusi PBB yang lemah pun hanya mendapat empat suara. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, dengan girang mengatakan bahwa hasil ini “sangat memuaskan” dan bahwa Indonesia berharap PBB bisa menghapus isu Timor-Leste di tahun berikutnya, untuk selamanya.

453. Perkembangan kritis ini berdampak besar pada semangat dan momentum dukungan masyarakat sipil untuk Timor-Leste. Dihentikannya transmisi radio Fretilin dan larangan Indonesia terhadap akses independen ke wilayah Timor-Leste sangat menyulitkan usaha mempertahankan perhatian publik dan media pada isu tersebut, dan adanya rasa kegagalan menurunkan semangat perjuangan untuk Timor-Leste. Pemerintah beberapa negara berusaha memperlemah komitmen masyarakat sipil dengan berulang-ulang menyatakan bahwa dukungan masyarakat sipil tersebut “percuma” dan bahwa solusi tentang masalah Timor-Leste sudah “tidak dapat diubah.”[†]

* Di Australia, Bob Santamaria, pemimpin National Civic Council, yang sangat anti-komunis, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang Fretilin dan mereka yang ia tuntutan (meskipun sering salah) sebagai ‘pengikut komunis’. Pendapatnya sangat berpengaruh di kalangan konservatif dan kalangan Gereja, dan merugikan Timor-Leste.

† Menteri Luar Negeri Selandia Baru B.E. Talboys memberi contoh tipikal. Dalam sebuah memo kepada Kabinet setelah kunjungan Dubes Roger Peren dan Atase Pertahanan Kolonel Macfarlane ke Timor-Leste pada 1978, ia menulis: “Kesimpulan utama mereka adalah bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesia tidak dapat diubah kembali. Ini sesuai dengan pendapat pribadi saya tentang ini. Sementara pemerintah berkeberatan dengan tindakan-tindakan Indonesia di Timor, saya sendiri percaya bahwa tidak ada yang bisa dicapai, paling tidak bagi rakyat Timor, dengan terus mempermasalahkan masa

Banyak pihak juga berpendapat bahwa melanjutkan dukungan untuk masalah tersebut tidak tanggung jawab karena hanya akan mendorong perlawanan dan menghasilkan lebih banyak lagi kematian serta penindasan di Timor-Leste.

454. Meski diperlemah, khususnya dalam kapasitasnya untuk memobilisasi opini publik, masyarakat sipil tetap mempertahankan komitmennya. Telah diputuskan bahwa, bahkan jika tidak ada lagi yang mungkin dilakukan, isu tersebut harus tetap dihidupkan. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa perjuangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum, dan bahwa perdamaian yang langgeng di Timor-Leste hanya dapat dijamin melalui proses penentuan nasib sendiri yang sejati.* Sikap rakyat Timor-Leste juga menjadi faktor yang menentukan. Luisa Teotonio Pereira mengatakan pada Komisi:

Kapanpun pihak yang skeptis [di Portugal], khususnya di kalangan pemerintah, berusaha membenarkan “tindakan-tindakan realistis”, untuk “mengakhiri penderitaan rakyat Timor”, mereka selalu menjawab: “Selama rakyat Timor-Leste terus berjuang, apakah masuk akal jika kami menyerah pada ancaman dan tekanan?”²³⁸

455. Usaha solidaritas terus berlanjut. Di Selandia Baru pada 1978, CIET melancarkan kampanye besar-besaran berjudul “Biarkan Horta Bicara” dan memaksa pemerintah Selandia Baru membatalkan penolakan pemberian visa kepadanya.[†] Di Belanda pada 1980, masyarakat sipil bekerjasama dengan Fretilin untuk menuntut pemerintah Belanda ke pengadilan karena mengeksport peralatan militer (korvet) ke Indonesia. Pengadilan memutuskan memenangkan pemerintah, dengan dasar bahwa Republik Demokratik Timor-Leste dan Fretilin tidak memiliki status hukum. Grup-grup lain di Eropa dan Skandinavia berusaha memublikasikan keadaan buruk Timor-Leste dan memprotes pemerintah karena tidak mengambil tindakan. Ini termasuk aktivitas Michel Robert melalui Association de Solidarite avec Timor-Oriental (Perhimpunan Solidaritas dengan Timor-Leste) di Prancis; kerja Torben Retboll di Denmark, termasuk melalui International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA, Kelompok Kerja Internasional tentang Masalah Pribumi); dan hasil kerja Klemens Ludwig atas nama Society for Threatened Peoples in Germany (Perserikatan untuk Bangsa-Bangsa yang Terancam di Jerman). Pada 1985, para aktivis Jerman berhasil membujuk lebih daripada 100 anggota parlemen untuk menekan Menteri Pertahanan Jerman agar mengangkat masalah Timor-Leste kepada Presiden Soeharto saat kunjungannya ke Jakarta. Ia menolak. Seperti Belanda, Swedia,

lalu.” (“Memorandum for Cabinet”, Office of the Minister of Foreign Affairs, Wellington, 8 February 1978, dalam NZ...OIA Material, Volume 1).

* Sebagai contoh, ACFOA mengakui dalam Catatan Perkembangannya, Juli 1980, bahwa Timor-Leste “jarang sekali disebut dalam media Australia” tapi “hak rakyat Timor-Leste akan penentuan nasib sendiri harus tetap menjadi tujuan dasar...”

† Ramos-Horta tidak jadi berangkat karena krisis Fretilin di Maputo. Aktivis utama Selandia Baru pada periode tersebut adalah Colin Isles, Harry Bruhns, dan John Compton.

Prancis, dan Inggris, Jerman juga tetap menjual senjata ke Indonesia. Tapi, terdapat kemajuan di Parlemen Eropa, yang menghasilkan sejumlah resolusi tentang Timor-Leste dan pada 1994 mengimbau diakuinya hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta penghentian semua bantuan militer dan penjualan senjata ke Indonesia.

456. Pada 1981, grup solidaritas Asia pertama untuk Timor-Leste dimulai di Jepang oleh para kelompok perempuan di Hiroshima, dipimpin oleh Jean Inglis. Grup ini menerbitkan laporan berkala berbahasa Jepang, berjudul *Higashi Chimoru Tsuchin* (Berkala Timor-Leste), yang mencurahkan perhatiannya terhadap usaha penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste. Di Amerika Serikat, Arnold Kohen yang memulai keterlibatannya dalam masalah Timor-Leste setelah mendengar José Ramos-Horta berbicara pada 1975, memfokuskan usahanya pada pihak-pihak terkemuka di tiga institusi penting, kebanyakan di Washington: Kongres, media, dan Gereja Katolik. Ia bekerjasama dengan para anggota Kongres yang bersimpati dan para asistennya untuk mengadakan audiensi kongres yang baru, yang kali ini berfokus pada tanggapan Amerika terhadap kelaparan yang melanda Timor Timur pada 1978 - 1979.¹ Ia dan Fr Reinaldo Cardoso, dengan bantuan Noam Chomsky, berhasil membujuk *New York Times* untuk menerbitkan editorial yang sangat kritis terhadap pemerintahan Carter. Pada 1980, *New York Times* mengimbau Amerika Serikat untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste dan terus melakukannya. Noam Chomsky memberi kesaksian mendukung Timor-Leste pada Komite Dekolonisasi PBB pada 1978. Ia menulis panjang-lebar tentang Timor-Leste, khususnya mengkritik pers Amerika Serikat karena kurang memperhatikan masalah ini. Arnold Kohen memberitahu Komisi:

*Kata-kata Chomsky tentang masalah ini memiliki pengaruh nyata, terkadang tidak langsung; dan sejarah harus mencatatnya karena kata-katanya sangat penting dalam membantu mengubah ketidaktahuan yang luas yang dulu ada di Amerika Serikat dan negara-negara lain tentang Timor-Leste.*²³⁹

457. Arnold Kohen juga mengakui kontribusi mending Edward Doherty pada “waktu yang gelap ini”, kontribusi seorang penasihat kebijakan luar negeri untuk Uskup Amerika, David Hinkley, juga dari Ketua Seksi Amerika untuk Amnesty International, dan Michael Chamberlain, salah seorang dari sedikit aktivis akarrumput pada waktu itu dan pendiri East Timor Human Rights Committee yang bekerja selama 1979 - 1984.

458. Di Australia, kelompok-kelompok masyarakat sipil memprakarsai penyelidikan publik oleh Parlemen Australia pada 1982 - 1983. Proses tersebut mengumpulkan wakil-wakil komunitas Timor-Leste, Gereja, Amnesty International, beberapa lembaga bantuan, universitas, dan grup solidaritas dari tujuh kota. Carmel Budiardjo,

.....
* Dalam kesaksiannya kepada Komisi, mantan pejabat PBB, Francesc Vendrell, memberi penghargaan pada sukses luarbiasa Arnold Kohen dalam mendapatkan dukungan Kongres Amerika Serikat untuk Timor-Leste, yang berlanjut hingga 1999. Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004

sekretaris “Tapol” di London, dan Profesor Roger Clark dari Rutgers University di Amerika Serikat, juga memberi kesaksian. Penyelidikan ini memaksa pemerintah mengirim delegasi Parlemen Australia ke Timor-Leste dalam usaha membatalkan bukti dari para saksi.*

459. Pada waktu itu sahabat-sahabat Timor-Leste juga menghasilkan beberapa publikasi. Pekerjaan rintisan Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, diterbitkan pada 1978, dan selama beberapa tahun menjadi referensi utama berbahasa Inggris tentang Timor-Leste. Bekerja dari Portugal, ia juga menerbitkan *Timor Newsletter* selama 1980 - 1983. Pada 1979, “Tapol” mengisi kekosongan di Inggris dan Amerika Serikat dengan menerbitkan *An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor*, oleh Arnold Kohen dan John Taylor. Pada 1980, *Yale Journal of World Public Order* menerbitkan monograf penting Profesor Roger Clark berjudul *The 'decolonisation' of East Timor and the United Nations norms of self-determination and aggression*. Lahir di Selandia Baru, Clark seorang profesor hukum terkemuka di Rutgers University di Amerika Serikat. Penghancuran ilmiahnya atas klaim-klaim Indonesia, yang mengatakan klaim-klaim itu sudah sejalan dengan hukum internasional, merupakan sumbangan pertama dari seorang pakar di bidang ini. Clark juga memberi kesaksian di PBB dan lembaga-lembaga lain tentang Timor-Leste. Pada 1981, *Det Glomda Kriget* (Perang yang Terlupakan) diterbitkan di Stockholm oleh Ollie Tornquist dan H. Amahorseja dari ‘Osttimor Kommitten’ di Swedia

460. Periode krisis ini memaksa masyarakat sipil untuk lebih kreatif dan membagi-bagi fokus dan jaringannya agar dapat terus menghidupkan masalah ini. Mereka berpendapat bahwa protes dan fokus pada isu penentuan nasib sendiri saja tidak cukup. Khususnya sebagai tanggapan atas bencana kelaparan yang mengejutkan pada 1978 - 1979, warga dan organisasi yang merasa prihatin atas nasib Timor-Leste didorong untuk menjalin hubungan dengan Timor-Leste dengan cara-cara baru, misalnya melalui isu-isu seperti hak asasi manusia, penyatuan keluarga, pemukiman pengungsi, bantuan pembangunan, dan bantuan darurat. Intervensi dari International Committee of the Red Cross (ICRC, Komite Palang Merah Internasional), Catholic Relief Services (CRS), World Vision, dan Oxfam-UK sebagai tanggapan terhadap kelaparan tersebut diterima dengan baik, meskipun dengan hati-hati demi alasan kemanusiaan dan lainnya, meskipun ada keberatan tentang cara-cara CRS melakukan pekerjaannya. (Lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan, untuk informasi dan komentar lebih lanjut tentang kerja ICRC dan CRS.) Foto-foto korban kelaparan dan informasi lainnya juga digunakan untuk menunjukkan dampak perang dan untuk memobilisasi opini publik. Seperti sudah disebut, Penyelidikan Kongres dan Parlemen terhadap masalah ini dilakukan di Amerika Serikat dan Australia.

461. Tiga awal baru terjadi selama periode ini. Masing-masing memiliki konsekuensi jangka panjang yang positif dan menjadi sumber harapan di tengah kesuraman.

* Delegasi ini dipimpin oleh W.L. Morrison MP dan berkunjung ke Timor-Leste Juli-Agustus 1983.

462. Pertama, diaspora Timor-Leste, yang telah menetap di Portugal, Makau, dan Australia, menjadi lebih aktif. Organisasi-organisasi yang mereka dirikan menentang persepsi bahwa hanya minoritas warga Timor-Leste saja yang berhaluan nasionalis, dan kemudian menjadi sumber inspirasi dan informasi penting untuk komunitas yang lebih luas di negara sendiri dan di luar negeri.

463. Kedua, periode ini menyaksikan permulaan kolaborasi internasional. Meskipun fenomena ini memuncak pada 1990-an, fondasinya telah diletakkan saat itu. Contoh yang patut diperhatikan yaitu sidang Pengadilan Permanen Rakyat (Permanent People's Tribunal) tentang Timor-Leste, yang diadakan di Lisabon 19-21 Juni 1981. Sidang ini dimaksudkan untuk mengangkat profil Timor-Leste selama periode suram, khususnya di Portugal, mengumpulkan dari lima belas negara para pemimpin Fretilin, para pengacara, kaum akademisi, para politikus, jurnalis, perwakilan Gereja, dan orang-orang Indonesia. Organisasi solidaritas Portugis, CDPM (Comissão para os Direitos do Povo Maubere, Komisi untuk Hak Rakyat Maubere), dibentuk pada saat itu.

464. Ketiga, Gereja Katolik di Timor-Leste muncul menjadi pengkritik yang terbuka tentang tingkah laku militer Indonesia. Ini merupakan perkembangan politik yang luarbiasa penting bagi Timor-Leste, baik secara domestik maupun internasional, karena sebelumnya Gereja merupakan lembaga yang tidak representatif dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Fretilin. Peranan Gereja berkembang pesat setelah invasi Indonesia,* dan menjadi kekuatan politik meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para pastor dan mendapat tekanan dari Vatikan. Intervensi Gereja menutup kerugian militer lebih lanjut yang dialami Fretilin dan merupakan pukulan serius bagi Indonesia yang berharap Gereja dan negara akan dapat bekerjasama dalam membangun provinsi baru. Melalui jemaah keagamaannya, Gereja juga memiliki hubungan internasional yang sangat berguna dan hubungan khusus dengan Vatikan. Gereja dikritik di beberapa kalangan,† tapi para pendukung internasional dapat menunjuk pada pernyataan-pernyataan Gereja sebagai bukti bahwa masalah Timor-Leste belum selesai dan bahwa Resistansi tidak hanya terbatas pada Fretilin. Keterlibatan Gereja juga melegitimasi masalah Timor-Leste bagi banyak orang yang sebelumnya masih bimbang atau khawatir akan adanya klaim yang menghubungkannya dengan paham komunis.

.....
* Untuk lebih terperinci, lihat bagian tentang Vatikan di atas, paragraf 310 - 351. Menurut sebuah laporan Gereja Indonesia yang belum dipublikasikan, orang Katolik yang dibaptis adalah sekitar sepertiga dari populasi, tapi pada akhir 1976 sebagian besar orang Timor-Leste sudah mengklaim afiliasi Katolik. (*Notes on East Timor*, 2 November 1976.)

† Roger Peren, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, melaporkan kunjungannya ke Timor-Leste pada 1978. "Hanya anggota hierarki Katolik Roma, dari Paus ke bawah, telah secara terbuka bertindak dengan kritis terhadap pemerintah ini, tapi seiring waktu, kami semakin tidak menaruh kepercayaan pada pandangan-pandangan mereka." Dia mengklaim di bagian laporan selanjutnya bahwa pandangan negatif kalangan gereja ini mungkin disebabkan oleh "ketidakpuasan alamiah karena mereka tidak lagi memegang kekuasaan yang mereka nikmati di bawah rezim Portugis." (Paragraf 8 dan paragraf 86, 13 Januari 1978, Selandia Baru, East Timor OIA Material, Volume 1.)

465. Beberapa kesaksian para pastor yang pernah bekerja di Timor-Leste memperkuat perkembangan tersebut, termasuk di antaranya mantan utusan Portugis, Pastor Leoneto do Rego dan Pastor Reinaldo Cardoso, serta pastor-pastor Timor-Leste, Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres. Kesaksian mereka dalam beberapa forum internasional diperkuat oleh kunjungan internasional Dom Martinho da Costa Lopes ke Oseania, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa setelah keberangkatannya dari Timor-Leste. Kunjungannya ini diatur dan didanai oleh grup-grup masyarakat sipil, dan dalam kunjungan-kunjungan itu ia menggalakkan kampanye penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste. Setelah kunjungan Dom Martinho da Costa Lopes ke Jepang, Uskup Aloisius Soma memasukkan Timor-Leste ke dalam agenda Japanese Catholic Council for Justice and Peace (Dewan Katolik Jepang untuk Keadilan dan Perdamaian), dan pada 1987 menunjuk Suster Monica Nakamura sebagai petugas khusus untuk Timor-Leste. John Taylor dan Arnold Kohen memberitahu Komisi bahwa kunjungan Monsignor Lopes ke Inggris dan Amerika Serikat “sangat efektif”, karena berhasil menunjukkan kegagalan Indonesia untuk menguasai sebagian besar Timor-Leste dan mengonfirmasi bahwa para diplomatnya pada umumnya mewakili opini umum di wilayah tersebut.²⁴⁰ Efeknya adalah bahwa Gereja internasional, setelah beberapa tahun dalam kebimbangan, mulai bergerak dan bergabung dengan Gereja Timor-Leste dalam program advokasi bersama. Ini kemudian diperkuat oleh keterlibatan beberapa badan Protestan penting di Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Oseania, meskipun terdapat perbedaan pendirian mengenai isu itu dengan Gereja Protestan Indonesia.

Tahap ketiga: Membangun kembali dukungan masyarakat sipil 1983 - 1991

466. Meskipun pernah hampir binasa, pihak Resistansi berhasil selamat dari *Anschluss* Indonesia. Gejala utama tahap ini adalah dikembangkannya kembali Resistansi di Timor-Leste oleh Xanana Gusmão, tampilnya Xanana Gusmão sebagai pemimpin Resistansi, dan perubahan Resistansi tahap demi tahap menjadi gerakan nasionalis yang luas, sehingga di dalamnya dapat berperan semua lapisan masyarakat dan bukan hanya Fretilin serta militer. Seorang pemimpin lain juga muncul dalam tahap ini: Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, yang diangkat sebagai kepala Gereja Katolik pada 1983 dan menjadi pembela yang gigih untuk penentuan nasib sendiri serta sumber inspirasi bagi masyarakat sipil internasional. Tiga perkembangan menjelang akhir periode tersebut secara tidak langsung juga mendukung perjuangan Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri. Tiga hal tersebut yaitu: keputusan Presiden Soeharto untuk membuka wilayah Timor-Leste, berakhirnya Perang Dingin, dan kunjungan Paus Yohanes Paulus II, satu-satunya pemimpin dunia yang berkunjung di tengah-tengah konflik sedang berlangsung.

.....
* Kurt Waldheim, Sekjen PBB warga Austria, menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan tindakan Indonesia di Timor-Leste. Istilah itu berkenaan dengan invasi Adolf Hitler ke Austria pada Perang Dunia Kedua. Lihat memo Kantor Luar Negeri Inggris, 15 Mei 1976 (Arsip CAVR).

467. Hasil perubahan-perubahan yang dibawa oleh Xanana Gusmão membutuhkan waktu. Tapi, hasil terakhirnya tampak pada lebih kuatnya bukan saja gerakan Resistansi di dalam negeri, tapi juga front diplomasi serta diaspora Timor-Leste dan masyarakat sipil internasional. Pada 1983, setelah dicekal oleh pemerintah Australia, delegasi para pemimpin Fretilin berhasil berkunjung ke Australia dan berpidato di depan 1.500 orang dari segala lapisan masyarakat di Melbourne, diorganisasi oleh Australia East Timor Association. José Ramos-Horta terus bersafari untuk membangkitkan dukungan di setiap negara yang ia kunjungi.* Dengan dukungan dan kadang-kadang nasihat dari grup-grup masyarakat sipil, orang Timor-Leste lainnya pun mulai melakukan lobi internasional.†

468. Sebagai pemimpin baru dalam Gereja Katolik yang sekarang mempunyai kebijakan arus-utama, pandangan Uskup Belo berpengaruh di lingkungan masyarakat sipil internasional. Ia melanjutkan kebijakan Dom Martinho da Costa Lopes dalam menyatakan keprihatinan umum tentang HAM, tapi lebih berfokus pada perlunya penyelesaian jangka panjang. Kegigihannya dalam membela kebijakan penentuan nasib sendiri punya arti sangat penting untuk mengakhiri konflik dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, serta menumbuhkan semangat pada para pendukung Timor-Leste di luar negeri yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya bahwa masalah hak asasi manusia bagi rakyat Timor-Leste dapat dicapai tanpa adanya penyelesaian politik.

469. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan dan bertambah kuatnya sejumlah jaringan baru baik internasional maupun nasional. Victor Scheffers (Netherlands Catholic Commission for Justice and Peace - Komisi Katolik Belanda untuk Keadilan dan Perdamaian) dan Robert Archer (Catholic Institute for International Relations - Lembaga Katolik untuk Hubungan Internasional) di London mendirikan Christian Consultation on East Timor (Konsultasi Kristen tentang Timor-Leste) yang menjadi forum tahunan besar untuk gereja-gereja dan organisasi masyarakat sipil, khususnya di Eropa. Grup-grup warga Jepang bekerja untuk menentang kebisan tentang masalah Timor-Leste di kalangan media massa, kaum akademisi, parlemen, grup-grup keagamaan, dan pemerintah. Mereka mengundang José Ramos-Horta ke Jepang pada 1985 dan Dom Martinho da Costa Lopes pada tahun berikutnya. Mereka bekerja dengan para anggota Parlemen Jepang, dipimpin oleh Satsuki Eda, membentuk Diet Members Forum on East Timor (Forum Anggota Diet tentang Timor-Leste). Pada 1987, mereka mengunjungi Timor-Leste dan mengajukan petisi pada PBB. Melalui usaha para aktivis seperti Akihisa [Aki] Matsuno dan Kiyoko Fukusawa, Free East Timor Coalition (Koalisi Timor-Leste Merdeka) dibentuk pada 1988 dan tumbuh menjadi koalisi beranggotakan sekitar

* Sebagai contoh, José Ramos-Horta mengunjungi Jepang pada Maret 1985 atas undangan kelompok masyarakat sipil Jepang, menjadikannya orang Timor-Leste pertama yang memperkenalkan masalah Timor-Leste secara langsung ke publik Jepang. (Suster Monica Nakamura, kesaksian diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004.)

† Sebagai contoh, kunjungan Agio Pereira, Abel Guterres, dan Mimi Ferreira ke wilayah Pasifik dan keikutsertaan Emilia Pires dan Ines de Almeida pada Konferensi Perempuan Dunia di Nairobi 1985.

40 kelompok di seluruh Jepang. Pada 1995, masyarakat sipil membantu mengubah posisi Jepang dari pro-Indonesia menjadi mendukung proses PBB di Timor-Leste.

470. Pada November 1987, Christians in Solidarity with East Timor (CISSET - Umat Kristen dalam Solidaritas dengan Timor-Leste) mengadakan konsultasi masyarakat sipil Asia-Pasifik pertama tentang Timor-Leste. Diadakan di Filipina, konsultasi tersebut menekankan perlunya partisipasi rakyat Timor-Leste dalam mencari penyelesaian politik. Di Kanada, mengikuti pekerjaan Canada Asia Working Group dan Indonesia East Timor Program, East Timor Alert Network (ETAN) dibentuk pada 1986 atas inisiatif Elaine Briere. ETAN merupakan salah satu dari sedikit organisasi yang mempersoalkan tanggungjawab sektor swasta terhadap masalah hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada 1997, ETAN memproduksi siaran video berjudul *The Sellout of East Timor*, yang berisi kritik sangat pedas terhadap hubungan bisnis Kanada dengan Indonesia. Foto-foto Timor-Leste karya Briere yang menakjubkan, yang diambil pada 1974, digunakan oleh organisasi-organisasi pendukung di banyak negara.* Grup-grup solidaritas di Eropa menciptakan dimensi baru dalam kampanye mereka dengan memperluas jaringan mereka dengan menyertakan Campaign Against Arms Trade (CAAT).† Pada 1988, jaringan internasional Parliamentarians for East Timor (PET) dibentuk. Dalam kekuatan penuh, PET terdiri atas 900 orang anggota parlemen di 40 negara. PET melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan presentasi kepada Sekjen PBB tentang nasib Timor-Leste dan merekomendasikan masyarakat Timor-Leste untuk hadiah Nobel Perdamaian.‡

471. Sejumlah sumber informasi baru muncul pada waktu itu dan memberi tambahan sangat penting pada materi yang beredar tentang Timor-Leste. Sumber-sumber tersebut termasuk *Timor-Leste: Mensagem aos vivos* oleh António Barbedo de Magalhães (Portugal, 1983); *Timor: A People Betrayed*, oleh James Dunn (Australia, 1983); *Em Timor-Leste, a paz é possível* (laporan berkala Portugis dihasilkan oleh Jean Pierre Catry, 1983-91); *East Timor: The Struggle Continues*, diedit oleh Torben Retboll (Kopenhagen, 1984); *Timor: Past and Present* oleh Finngeir Hiorth (Norwegia, 1985); *The War Against East Timor* oleh Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong (Britain, 1984); *Funu: The Unfinished Saga of East Timor* oleh José Ramos-Horta (AS, 1987); *Timor Link*, jurnal triwulan yang didirikan pada 1985 oleh Robert Archer, dan kemudian diedit oleh John Taylor dan Catherine Scott, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations (CIIR); *The Shadow over East Timor*,

* Aktivis Timor-Leste, Abe Barreto dan Bella Galhos, memberi dimensi Timor-Leste yang penting dalam usaha solidaritas di Kanada, saat mereka membelot dari suatu program kepemudaan Kanada dan melibatkan diri dalam kampanye ETAN pada 1994-1999.

† CAAT didirikan di London 1974 untuk mengakhiri perdagangan senjata internasional, khususnya subsidi dan dukungan pemerintah terhadap ekspor senjata kepada rezim-rezim yang menindas masyarakatnya melalui konflik bersenjata. CAAT bertujuan mengekspose relasi militer barat dengan Indonesia yang memungkinkan pemerintah Soeharto tetap berkuasa dan tidak mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste.

‡ Parliamentarians for East Timor (PET) awalnya diketuai Lord Avebury, yang juga ketua All-Party Parliamentary Human Rights Group di Parlemen Inggris. Dukungan sekretariat disediakan oleh Sharon Scharfe di Kanada.

video Denis Freney, James Kesteven, dan Mandy King (Sydney, 1987); *Buried Alive: The Story of East Timor*, video oleh Gil Scrine, Fabio Cavadini, dan Rob Hibberd (Sydney, 1989); *Descolonização de Timor: Missão impossível*, oleh Mario Lemos Pires (Portugal, 1991); *Timor-Est, le genocide oublie* oleh Gabriel Defert (Paris, 1992). Amnesty International dan Human Rights Watch, organisasi baru yang berbasis di New York, juga menerbitkan sejumlah laporan tentang Timor-Leste dalam periode ini. Kedua organisasi tersebut bersikap netral tentang isu penentuan nasib sendiri, meskipun mereka bersaksi pada Komite Khusus Dekolonisasi PBB. Laporan independen dan lengkap mereka tentang hak asasi manusia dianggap lebih kredibel dibanding sangkalan resmi Indonesia dan berhasil meyakinkan banyak pihak di kalangan masyarakat sipil tentang perlunya penyelesaian selayaknya konflik tersebut dengan melalui proses penentuan nasib sendiri yang sejati.^{*}

472. Selama periode ini masyarakat sipil berhasil meningkatkan perhatian PBB. Karena kekhawatiran akan nasib Timor-Leste di PBB setelah pemungutan suara tertutup pada Sidang Umum pada 1982, antara 20 sampai 25 organisasi nonpemerintah internasional membuat “ziarah tahunan” ke New York untuk mengajukan permohonan kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB guna mendukung kebijakan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste.[†] Sangat sedikit, walaupun ada, isu-isu lain dalam agenda Komite yang mendapat perhatian sebanding dari masyarakat sipil. Para pemohon dalam Pertemuan 1986 antara lain adalah pemerhati ahli Indonesia, Profesor Benedict Anderson dari Cornell University; Elizabeth Traube, ahli kebudayaan Timor-Leste; dan sejumlah organisasi nonpemerintah dari yang besar seperti Asia Watch sampai grup solidaritas yang kekurangan dana tetapi sangat terlibat, seperti Hobart East Timor Committee dari Australia.

473. Organisasi-organisasi nonpemerintah juga meningkatkan masukan mereka kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, baik dalam Sub-Komisi Minoritas maupun dalam debat tahunan tentang penentuan nasib sendiri. Usaha ini sering tidak dihargai karena sedikit saja pemerintah yang menyebut-nyebut Timor-Leste dalam pernyataan mereka atau menyambut kesempatan lobi di tempat minum kopi Komisi. Sebagai tambahan, para advokat masyarakat sipil harus menghadapi kritik pemerintah Indonesia di hadapan seluruh dunia yang

* Dalam kesaksiannya ke Komisi, Ian Martin mengakui para peneliti Amnesty Internasional yang mengerjakan penelitian atas Timor-Leste selama penjajahan Indonesia, yaitu Anthony Goldstone, Sidney Jones, Geoff Robinson, dan Kerry Brogan [Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.] Sidney Jones kemudian bekerja untuk Human Rights Watch dan menghasilkan sejumlah laporan penting tentang Timor-Leste. Pentingnya pekerjaan organisasi-organisasi ini dapat dilihat dari tuduhan-tuduhan pemerintah Indonesia bahwa klaim-klaim mereka tidak benar dan bermotivasi politik. Lihat surat Departemen Luar Negeri Indonesia kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, 2 November 1994, dalam Krieger hal.231.

† Francesc Vendrell, seorang mantan pejabat PBB, memberi kesaksian kepada Komisi bahwa dia yang memicu ide mendorong organisasi-organisasi nonpemerintah internasional untuk mengajukan permohonan ke Komite Khusus Dekolonisasi PBB. [Kesaksian diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.] Praktik ini didorong oleh José Ramos-Horta dan pada 1991 telah dikoordinasi oleh International Federation for East Timor (IFET) yang dilahirkan oleh Kan Akatani, seorang pensiunan diplomat Jepang dan perwakilan Japanese Catholic Council for Justice and Peace.

menyebut mereka membuat klaim-klaim yang hanya berdasar pada tujuan politik. Perwakilan masyarakat sipil berubah-ubah dari tahun ke tahun. Organisasi nonpemerintah yang berbicara membela Timor-Leste pada sidang Sub-Komisi Minoritas pada 1987 adalah Pax Romana, Pax Christi International, National Aboriginal and Islander Legal Service, serta Human Rights Advocates. Intervensi masyarakat sipil sering merupakan praktik kolaboratif berdasarkan masukan dari organisasi nonpemerintah di berbagai bagian dunia. Organisasi nonpemerintah internasional yang diterima oleh PBB kadang mengorbankan hak bicara mereka untuk memberi kesempatan pada perwakilan Timor-Leste untuk berbicara atas nama mereka, atau menyediakan dana untuk mereka. Partisipasi José Ramos-Horta di Sub-Komisi PBB pada Agustus 1991 didanai oleh Community Aid Abroad (CAA) dan Australian Council for Overseas Aid (ACFOA). Hal itu menghasilkan kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan pada tahun tersebut ke Timor-Leste.

474. Institusi-institusi arus-utama mulai mempertanyakan peraturan Soeharto pada periode ini. Berita-berita yang mengkritik kekayaan dan kebijakan antidemokrasi Soeharto muncul di pers Barat sebelum kunjungan “Winds of Freedom” Presiden AS Ronald Reagan ke Asia pada 1986. Indonesia membalas dengan memberangus media yang tanggung jawab atas pemberitaan tersebut, tapi ini justru menghasilkan kontroversi lebih jauh dan memperkuat alasan para pengkritik. Pada saat yang sama, lebih daripada 100 anggota Kongres menekan Presiden Ronald Reagan untuk mengangkat masalah Timor-Leste pada Presiden Soeharto. Ini menjadi pertama penting yang diikuti oleh advokasi bertahun-tahun oleh masyarakat sipil, baik di dalam maupun di luar Indonesia.’

475. Pada 1989, beberapa kesempatan terbuka bagi Timor-Leste dan jaringan dukungan internasionalnya pun berkembang. Sejak 1 Januari 1989, Presiden Soeharto membuka Timor-Leste untuk pertama kali, setelah tertutup sejak Desember 1975. Para individu dan organisasi dari masyarakat sipil yang peduli mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi Timor-Leste dan, meskipun terdapat larangan dan bahaya, melakukan kontak dengan pihak Resistansi, menyediakan bantuan materi, bertindak sebagai kurir dua-arah, serta membangkitkan perhatian baru di negara-negara mereka. Diperkirakan sekitar 3.000 orang asing telah berkunjung pada 1989-91.[†] Untuk memfasilitasi komunikasi, Australia East Timor Association menerbitkan kamus Tetum-Inggris pertama, karya Cliff Morris, seorang veteran Perang Dunia Kedua.

.....
* Artikel pers tersebut adalah David Jenkins, “After Marcos, now for the Soeharto billions”, *Sydney Morning Herald*, 10 April 1986, dan artikel oleh A.M. Rosenthal di *New York Times* mengenai represi di Indonesia. Laporan *The Sydney Morning Herald* menimbulkan kontroversi cukup besar karena Soeharto disamakan dengan diktator Filipina yang dijatuhkan, Ferdinand Marcos.

† Bantuan terhadap Resistansi tidak berupa bantuan militer tetapi termasuk barang-barang seperti obat, kamera video, dan telepon. Pada saat meninggalkan Timor-Leste, para pengunjung ini membawa dokumen-dokumen, rekaman wawancara, foto-foto, dan materi lain untuk digunakan di luar, termasuk bagi para pemimpin Resistansi di luar Timor. Beberapa catatan terdapat pada “*Opening Up: Travellers Impressions of East Timor 1989-1991*”, Kirsty Sword dan Pat Walsh (ed.), (Melbourne, AETA 1991)

476. Contoh penggunaan kesempatan ini oleh masyarakat sipil adalah wawancara yang berani dengan pemimpin Resistansi Xanana Gusmão di persembunyiannya di gunung, yang dilakukan pada September 1990 oleh seorang pengacara dan anggota serikat buruh, Robert Domm. Wawancara tersebut disiarkan oleh Australian Broadcasting Commission dan telah sangat meningkatkan profil dan status internasional Xanana Gusmão.* Jumlah orang Timor-Leste yang belajar dan bekerja di Indonesia juga meningkat, sebagai konsekuensi dari dibukanya kawasan Timor-Leste. Ini memungkinkan para nasionalis di antara mereka untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia dan pihak-pihak internasional yang bekerja di atau berkunjung ke Jakarta, termasuk wakil-wakil media massa.

477. Tamu terpenting setelah Timor-Leste dibuka adalah Paus Yohanes Paulus II, yang berkunjung pada Oktober 1989. Pengakuan Paus tentang adanya konflik di Timor-Leste dan perlunya penyelesaian secara damai bertentangan dengan sebagian besar pemerintah dunia dan menjadi inspirasi bagi rakyat Timor-Leste serta para pendukung internasionalnya. Secara internasional dampak kunjungannya diperbesar ketika terjadi demonstrasi yang pertama kali sejak invasi Indonesia, yang digelar pada akhir misanya di Tasitolu dan diberitakan oleh media massa dunia. Pada 9 November 1989, runtuhnya Tembok Berlin secara simbolis menandai berakhirnya Perang Dingin. Peristiwa itu bergema sangat kuat pada masyarakat sipil pro-Timor-Leste di seluruh dunia, dan melumpuhkan dua dogma penting yang digunakan untuk melawan advokasi mereka terhadap penentuan nasib sendiri: bahwa integrasi Timor-Leste dengan Indonesia diperlukan untuk menahan penyebaran komunisme, dan bahwa kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste “tidak dapat diganggu-gugat”.

Tahap keempat: Titik-titik balik 1991 - 1998

478. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam perjuangan Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Periode tersebut dimulai dengan bencana hebat yang menimpa militer Indonesia dalam bentuk pembantaian Santa Cruz, dan 12 bulan kemudian diikuti dengan penangkapan Xanana Gusmão. Pada 1996, Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada para pembela hak penentuan nasib sendiri yang terkemuka, yaitu Uskup Belo dan José Ramos Horta, dan pada 1997 Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB yang baru, memutuskan mengintensifkan diplomasi PBB. Periode ini berakhir dengan jatuhnya pemerintah Soeharto pada Mei 1998. Masyarakat sipil telah memberikan kontribusi mereka pada setiap titik balik ini, dan menggunakannya untuk memajukan isu penentuan nasib sendiri. Teknologi komunikasi baru juga mulai tersedia pada periode ini dan cukup mampu meningkatkan kapasitas serta pengaruh masyarakat sipil.

.....
* Wawancara juga mengumumkan tawaran Xanana Gusmão untuk berbicara dengan Indonesia tanpa pra-kondisi di bawah naungan PBB. Indonesia menolak tawaran tersebut yang dipromosikan Timor-Leste Talks Campaign, yang menerbitkan buletin berjudul “*The Missing Peace*”. Catatan kunjungan berbahaya Domm ke pergunungan dengan pemandu orang Timor dan teks wawancara terdapat *East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive*, ACFOA Development Dossier No 29, February 1991.

479. Tidak seperti kekejaman lain yang diderita di Timor-Leste, pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 menimbulkan titik-balik pendapat dunia tentang kawasan ini. Ini sebagai akibat dari hadirnya para pengamat internasional ketika peristiwa menyedihkan itu terjadi serta pemaparan mereka kepada dunia luar terhadap tragedi tersebut melalui media cetak, radio, dan televisi. Terbunuhnya seorang warga asing, Kamal Bamadhaj, menambah kemarahan publik, khususnya di Selandia Baru, Australia, dan Malaysia.* Rekaman video peristiwa penembakan dan teror yang dibuat dengan risiko tinggi oleh Max Stahl, diselundupkan keluar dengan berani dari Timor-Leste ke Amsterdam oleh seorang wartawan Belanda, Saskia Kouwenberg.† Bukti yang kuat ini, ditambah dengan foto-foto yang diambil oleh fotografer Inggris Steve Cox yang babak belur dianiaya,²⁴¹ mengonfirmasi tuduhan yang selama itu diajukan oleh para pendukung masyarakat sipil, yaitu bahwa Timor-Leste adalah masyarakat yang ada dalam cengkeraman ketegangan, bahwa penindasan militer adalah realitas, dan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri adalah kunci untuk mencapai perdamaian.

480. Keterlibatan masyarakat sipil internasional meningkat pesat setelah tragedi Santa Cruz. Pada 19 November 1991, Portugal mengadakan hari berkabung nasional. Tokoh-tokoh masyarakat sipil terkemuka menandatangani surat terbuka kepada Presiden AS untuk memprotes Amerika Serikat yang telah menerima kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste meskipun tanpa dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri. Para mahasiswa Portugis yang tergabung dalam Forum Estudante dan Missao Paz por Timor menggalang dana untuk menyewa kapal feri Portugis, *Lusitania Expresso*, untuk melakukan protes atas situasi tersebut dengan berlayar ke Timor-Leste. Segera setelah pembantaian Santa Cruz, East Timor Action Network (ETAN) dibentuk di Amerika Serikat oleh Charles Scheiner, John Miller, dan lainnya dengan tujuan mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mendukung penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Jurnalis AS, Alan Nairn dan Amy Goodman, yang hampir tidak selamat dari pembantaian Santa Cruz, berkampanye ke seluruh Amerika Serikat, memberi andil bagi perkembangan ETAN. Pada 2000, ETAN telah didukung oleh sekitar 10.000 anggota dengan 27 grup lokal di seluruh Amerika Serikat. Juga pada November, International Platform of Jurists for East Timor (IPJET), dibentuk di Belanda dipimpin oleh Pedro Pinto Leite. Tujuan IPJET adalah memobilisasi ahli hukum internasional untuk mendukung usaha penentuan nasib sendiri. Ini dilakukan melalui konferensi, publikasi, dan petisi, termasuk ke PBB dan Uni Eropa. Pada 1995, IPJET sudah memiliki 250 anggota di

.....
* Orangtua Kamal Bamadhaj berasal dari Selandia Baru dan Malaysia; saat itu ia adalah mahasiswa di Australia dan aktif mendukung hak asasi manusia untuk Timor-Leste. Pada 12 November ia sedang bekerja sebagai penerjemah untuk Bob Muntz dari Oxfam-Community Aid Abroad. Muntz hampir terbunuh dan seimbanginya ke Australia dia tanpa kenal lelah memberikan kesaksian sebagai saksi mata tentang kekejaman itu. Pada 1994, dalam kasus Todd vs Panjaitan, Center for Constitutional Rights (CCR) yang berbasis di New York berhasil menuntut Mayjen Sintong Panjaitan atas perannya dalam pembantaian Santa Cruz. Ia diperintahkan membayar USD14 juta biaya kerugian ke Helen Todd, ibu Kamal Bamadhaj. Pembayaran tidak pernah dilakukan. Helen Todd memberi kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.

† Saskia Kouwenberg menyelundupkan sebagian kaset tersebut dalam pakaiannya. Max Stahl sendiri membawa sebagian kaset keluar dan sedikitnya satu kaset tidak dapat diselamatkan dari tempat persembunyiannya di permakaman Santa Cruz.

lebih daripada 50 negara. Dukungan publik dimobilisasi di Irlandia oleh East Timor Ireland Solidarity Campaign (ETISC) yang dibentuk oleh Tom Hyland di Dublin setelah film stasiun televisi Yorkshire yang berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor* ditayangkan pada Januari 1992, menggunakan gambar-gambar pembantaian milik Max Stahl. Hasil kerja ETISC merupakan contoh lain, di samping Portugal, di mana gerakan solidaritas dapat bekerja secara efektif dengan pemerintahnya. Dengan menyediakan informasi kritis dan memobilisasi energi komunitas rakyat Irlandia, ETISC mendukung peran utama pemerintah Irlandia dalam kasus Timor-Leste di Uni Eropa pada 1990-an. Di Skotlandia, Glasgow University East Timor and Indonesia Support Group dibentuk pada pertengahan 1990-an.

481. Penangkapan Xanana Gusmão oleh militer Indonesia pada 20 November 1992 pada awalnya menimbulkan depresi di kalangan diaspora Timor dan masyarakat sipil. Tetapi cepat disadari bahwa cara terbaik untuk melindungi pemimpin Resistansi adalah dengan mengampanyekan profil internasionalnya, membangun publisitas yang telah dihasilkan oleh masyarakat sipil, dan bahwa penahanan dan pengadilan Xanana Gusmão justru memberi kesempatan untuk melancarkan kampanye baru. Organisasi-organisasi hak asasi manusia sangat memperhatikan proses pengadilannya di Dili pada Mei 1993. Pemerintah Indonesia menolak memberi visa untuk Rodney Lewis, yang meminta mengamati proses pengadilan Gusmão, sebagai wakil dari International Bar Association and the Law Council of Australia. Protes terdengar semakin keras setelah hakim pengadilan memerintahkan Gusmão berhenti dengan pembelaannya yang baru tiga halaman dibacanya, dengan menyatakan bahwa pembelaan itu “tidak relevan” dan meminta serta menahan dokumen pembelaan tersebut. Sementara itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil menganggap dokumen pembelaan Gusmão sangat relevan. Mereka menerjemahkan dan menerbitkan salinan pembelaan tersebut, yang diselundupkan dan diterbitkan lebih sebagai gugatan terhadap Indonesia dan sekutu-sekutunya ketimbang sebagai pembelaan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil itu juga menilai proses pengadilan Gusmão sebagai cacat hukum, sama seperti yang dialami Timor-Leste sendiri.²⁴² Portugal dan Amnesty International, antara lain, mengutuk pengadilan tersebut. Semangat perlawanan di pihak pembela juga memberi ilham pada para pendukung dan melegakan mereka, setelah disebarkannya isu bahwa setelah Gusmão tertangkap, dia menerima kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste dan mengimbau para pengikutnya agar menyerahkan diri.

482. Grup-grup solidaritas mengampanyekan “Xanana dalam tahanan” sebagai simbol Timor-Leste yang terjajah dan mengaitkan nasib Xanana dengan nasib Timor-Leste. Stiker-stiker bertuliskan “Bebaskan Xanana, Bebaskan Timor-Leste” beredar di ruang konferensi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina 1993, termasuk ditempel di balik pintu-pintu toilet yang diduga akan digunakan oleh delegasi pemerintah Indonesia di konferensi tersebut. Kampanye dalam bentuk kartu pos, doa massal, demonstrasi, dan tulisan-tulisan tentang Gusmão berlipat ganda. Pada September 1994, United Nations Association of Australia memberi penghargaan *in absentia* kepada Xanana sebagai pembela hak asasi manusia. Ulangtahunnya menjadi isyarat berkumpul bagi mereka setiap tahun, menandai berjalan pelannya

hukuman seumur hidup baginya serta solidaritas para pendukungnya dan komitmen mereka pada apa yang ia anjurkan, termasuk masalah referendum.

483. Ironisnya, pemenjaraan Xanana Gusmão di Jakarta justru memungkinkan dia berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat sipil dan komunitas internasional, dibanding pada saat dia ada di pergunungan terpencil di Timor-Leste. Kirsty Sword Gusmão sangat berperan dalam melakukan hal tersebut, khususnya selama tahun 1992 - 1996 ketika ia bertugas di Jakarta. Selain melakukan pekerjaan tetapnya, Kirsty bertugas sebagai sekretaris klandestin Resistansi dan antara lain dibantu oleh Victoria Markwick-Smith, yang berpengalaman dalam kegiatan ilegal Timor di Jakarta, dan didukung dari luar negeri oleh keluarganya dan jaringan kecil teman-temannya yang tepercaya. Meski banyak tantangan dan risiko, kegiatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah tingkat tinggi, yaitu antara Xanana Gusmão dalam sel penjara dengan duta besarnya, José Ramos-Horta, dan banyak orang lainnya lagi. Ini juga memungkinkan terjadinya banyak diskusi, baik pribadi maupun resmi, antara Xanana Gusmão dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, dan bahkan memungkinkan pelelangan di luar negeri lukisan-lukisan yang dibuatnya di penjara, dalam rangka pengumpulan dana untuk Resistansi.*

484. Film John Pilger, *Death of a Nation*, banyak berperan dalam memperkuat keterlibatan dunia pada Timor-Leste, menyusul pemutarannya di Jenewa pada saat sidang tahunan Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada awal 1994. Misalnya saja, setelah film itu ditayangkan di televisi nasional di Selandia Baru, para anggota parlemen membuat petisi dan pemerintah Selandia Baru menghapus kebijakannya yang menyatakan bahwa status Timor-Leste tidak dapat diubah lagi.

485. Pada 1994, Asia Pacific Coalition for East Timor (APCET) dibentuk di Filipina. APCET mengadakan beberapa konferensi yang diatur oleh sekretariatnya, Initiatives for International Dialogue (Inisiatif-inisiatif untuk Dialog Internasional), dipimpin oleh Gus Miclat. Masyarakat sipil telah aktif di beberapa negara Asia selama beberapa tahun, tapi ini merupakan awal dari solidaritas untuk Timor-Leste yang terkoordinasi dan terus berjalan di seluruh Asia. Berturut-turut konferensi APCET di Filipina, Malaysia, dan Thailand menentang tanggapan yang bersifat bermusuhan dari Indonesia dan sekutu-sekutu dekatnya di ASEAN. Mereka juga menentang pendapat beberapa pemerintah Asia bahwa hak asasi manusia tidaklah universal, dan anggapan dari beberapa negara Barat bahwa Timor-Leste tidak memiliki dukungan di kawasan Asia. Dua organisasi masyarakat sipil diwakilkan dalam konferensi APCET 1995 di Kuala Lumpur, dan tidak lama kemudian Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Timur) didirikan di Jakarta. Salah satu bentuk kegiatan APCET tentang Timor-Leste adalah dikumpulkannya orang-orang dari komunitas tertindas di kawasan Asia. Para warga Timor peserta APCET bertemu

.....
* Kirsty Sword Gusmão mengunjungi Timor-Leste 1991 membantu stasiun televisi Yorkshire dengan menyelesaikan film *In Cold Blood*. Usahanya untuk penentuan nasib sendiri diceritakan Kirsty Sword Gusmão dan Rowena Lennox dalam bukunya *A Woman of Independence*, Macmillan, Sydney, 2003. Contoh-contoh komunikasi Xanana Gusmão dengan masyarakat sipil, termasuk pesan-pesan terhadap *East Timor Talk Campaign*, HJC Princen, dan perempuan-perempuan Ploughshares for Peace terdapat di otobiografi *To Resist is To Win*.

dengan para aktivis dari Myanmar, Sri Lanka, Mindanao, Aceh, dan Papua Barat, membantu mengembangkan hubungan-hubungan yang masih berlanjut hingga hari ini. Asia Students Association (ASA) yang berbasis di Hong Kong adalah afiliasi penting bagi APCET. Sekretariatnya bekerja keras untuk membawa isu Timor-Leste ke gerakan-gerakan mahasiswa di negara-negara kawasan tersebut.

486. Penggunaan senjata, yang dipasok negara Barat, untuk pembantaian Santa Cruz, mendorong masyarakat sipil untuk meningkatkan imbauan agar dilakukan embargo senjata terhadap Indonesia.* Kampanye ini sangat vokal terdengar di Amerika Serikat dan Inggris, didukung oleh Campaign Against Arms Trade. Pada Januari 1996, empat perempuan dari Ploughshares for Peace memasuki pabrik pesawat Inggris dan dengan menggunakan martil melumpuhkan jet tempur British Hawk yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke Indonesia. Pesawat Hawk diberitakan telah digunakan untuk melawan Resistansi di Timor-Leste dan empat perempuan tersebut mendesak agar pengiriman Hawk dibatalkan selama tiga tahun. Inggris negara pemasok senjata terbesar kedua bagi Indonesia. Perempuan-perempuan tersebut, Andrea Needham, Lotta Kronlid, Joanna Wilson, dan Angie Zelter, melaporkan perbuatan mereka kepada perusahaan Hawk terkait dan kemudian ditangkap. Pengadilan mereka pada 1996 memahat sejarah hukum: mereka dibebaskan oleh juri di Liverpool dengan menyatakan bahwa para perempuan tersebut bertindak demi mencegah kejahatan pemusnahan yang lebih besar.²⁴³ Namun, kampanye tersebut gagal mengubah kebijakan bantuan militer Inggris dan Amerika Serikat terhadap Indonesia saat itu.†

487. Inisiatif penting lainnya dalam periode tersebut adalah sejumlah seminar yang diadakan pada 1990-an oleh seorang profesor Portugis, António Barbedo de Magalhães.‡ Seminar-seminar yang sebagian besar diadakan di Portugal itu menyatukan para aktivis dan kaum akademisi, termasuk dari Indonesia, untuk berbagi informasi dan mengembangkan kebijakan serta strategi tentang Timor-Leste. Di Australia, organisasi dan inisiatif baru terus bermunculan, Termasuk Australians for a Free East Timor (AFFET), yang didirikan di Darwin oleh aktivis lama Rob Wesley-Smith sekitar saat pembantaian Santa Cruz; cabang Australia East Timor Association di Sydney pada 1992;§ Friends of East Timor yang berbasis

.....
* Allan Nairn memberi kesaksian bahwa M-16 pasokan AS digunakan dalam pembantaian. Kesaksian kepada Komite Senat AS mengenai Hubungan Luar Negeri, 27 Februari 1992.

† Pemerintah Inggris bertahan dari tekanan publik dan membela penjualan senjata ke Indonesia dengan alasan bahwa Indonesia memiliki hak untuk membela diri, peralatan tersebut tidak digunakan melawan rakyat Timor-Leste, dan bahwa latihan militer Inggris akan memperbaiki penghargaan militer Indonesia pada hak asasi manusia dan demokrasi. Lihat Baroness Trumpington, House of Lords, 10 Juli 1992 (Krieger, hal. 302)

‡ Barbedo de Magalhães pertama kali mengunjungi Timor-Leste pada 1975 dan sangat tertarik pada kebijakan pendidikan Fretilin. Dia adalah pengarang *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*, Oporto University, 1992 dan publikasi-publikasi lain termasuk *Timor-Leste na encruzilhada da transição Indonésia*, Gradiva, 1999.

§ Pembuat film tentang Timor-Leste, Gil Scrine, adalah orang pertama yang memanggil rapat. Di bawah Jefferson Lee dan Andrew McNaughtan, Australian-East Timor Association (AETA) di Sydney mengembangkan suatu profil internasional dan, melalui kunjungan-kunjungan oleh McNaughtan, membuka hubungan langsung dengan Resistansi di Timor-Leste.

di Perth; Mary McKillop Institute of East Timorese Studies (MMIETS) didirikan pada 1993 di Sydney oleh Sisters of St Joseph; East Timor International Support Centre di Darwin, dikepalai oleh Juan Federer yang mendirikan Timor Aid pada 1998; di Melbourne, University Students for East Timor, East Timor Human Rights Centre, diketuai oleh Uskup Hilton Deakin; Action in Solidarity with Indonesia and East Timor (ASIET) yang dipimpin oleh Max Lane juga didirikan pada waktu itu dan menggalakkan hubungan antara grup-grup klandestin mahasiswa Timor-Leste dengan organisasi-organisasi sosialis yang berusaha menuntut perubahan di Indonesia. Australian Coalition for East Timor (ACET) menyiapkan diri untuk melakukan koordinasi, tapi sebagian besar grup-grup tersebut memilih konsultasi secara informal. International Federation for East Timor (IFET), yang didirikan pada periode ini, memiliki pengalaman yang mirip. IFET berhasil mencapai keanggotaan 30 organisasi dari 18 negara, tetapi banyak di antaranya yang ada dalam konstelasi organisasi pro-Timor yang sekarang menjadi besar dan beragam, meskipun tidak ikut serta dalam aksi mendukung penentuan nasib sendiri.

488. Pada waktu itu hak masyarakat Timor atas penentuan nasib sendiri di bidang kebudayaan diperkuat oleh inisiatif-inisiatif seperti pembukaan sekolah untuk anak-anak dari Timor di Darwin, yang disponsori oleh Jepang, dan usaha mengejutkan Profesor Geoffrey Hull dengan penerbitan buku pelajaran Tetum, *Mai Koalia Tetum*, justru di kala bahasa Tetum masih dilarang untuk penggunaannya sebagai bahasa resmi dan di sekolah-sekolah. Dibantu oleh Profesor Geoffrey Hull dan ahli bahasa Timor, Manuel Viegas, Mary McKillop Institute memperbanyak penerbitan buku-buku untuk tingkat sekolah dasar dalam bahasa Tetum, yang membantu Uskup Belo dalam perlawanannya terhadap kebijakan resmi ketika dia memilih untuk menggunakan bahasa Tetum untuk sekolah-sekolah Katolik di Timor-Leste.

489. Juga layak dicatat dalam periode ini ialah timbulnya pengaruh gambar-gambar video terhadap perhatian masyarakat, tumbuhnya organisasi-organisasi baru, dan koordinasi antara organisasi-organisasi itu, yang sangat diuntungkan oleh datangnya zaman internet. Pelayanan internet untuk umum pada 1990-an masuk kurang lebih bersamaan dengan keputusan Indonesia untuk dalam batas tertentu mempermudah orang masuk ke Timor-Leste. Kebersamaan waktu tersebut bukan saja suatu kebetulan yang menggembirakan; adanya internet juga sangat bertepatan dengan kebutuhan para aktivis hak asasi manusia karena cepat, murah, aman, mudah digunakan, interaktif, dan memiliki kapasitas serta jangkauan global yang sangat berarti. Informasi tentang Timor-Leste yang selama lima belas tahun sebelumnya merupakan komoditas langka, kini tersedia luas melalui internet berkat keterampilan dan komitmen para anggota masyarakat sipil. Situs *apakabar*, sebuah milis perintis elektronik gratis milik John MacDougall, meliputi baik tentang Indonesia maupun Timor-Leste; dan rintisan ini segera diikuti oleh *reg.easttimor*, yang menjadi pusat dan saluran utama untuk komunikasi cepat mengenai isu Timor-Leste ke seluruh dunia. Didirikan pada 1994 dan dikoordinasi oleh ETAN/US, *reg.easttimor* memungkinkan publik dan organisasi masyarakat sipil di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara melakukan konferensi interaktif dan mengakses laporan serta bahan-bahan terjemahan tentang Timor-Leste dari layanan-layanan kabel dan media Indonesia, Portugis, dan lainnya, selain

juga dokumen-dokumen resmi dari PBB, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya. Buku tentang Timor-Leste yang relatif sedikit tersedia sekarang bertambah banyak dengan adanya situs web yang dapat diakses publik. *TimorNet* di Universitas Coimbra, Portugal, menyediakan jaringan informasi tentang sejarah, geografi, dan kebudayaan Timor-Leste, dokumen-dokumen penting PBB, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, artikel, publikasi, dan saran untuk bertindak dan mengatur aksi. Para aktivis menggunakan email untuk memperbanyak informasi dan mengoordinasi serta mengatur kegiatan. Colin Renwick mendirikan suatu pusat mini untuk membantu organisasi-organisasi nonpemerintah kecil dan rawan di Indonesia dan Timor-Leste agar dapat memiliki akses internet yang murah, dapat diakses, dan aman, serta memberi pelatihan bagi beberapa aktivis Timor-Leste terpilih,^{*} sehingga meningkatkan efektivitas kaum klandestin. Dengan keterampilan ini, orang-orang Timor-Leste yang mendukung Xanana Gusmão di Jakarta dapat mengirim pesan-pesan email tertulis kepada rekan-rekan di luar negeri, termasuk kepada José Ramos-Horta.

490. Internet digunakan juga untuk tindakan langsung. Pada 1997, sebuah penyedia jasa internet Irlandia melancarkan protes terhadap pemerintah Indonesia, setelah Indonesia mendaftar domain milik Timor-Leste sebagai persiapan kemerdekaan politis. Pada tahun yang sama, Portuguese Hackers against Indonesia memasuki situs web milik militer Indonesia dan menyebarkan “propaganda” di situs web tersebut. Ini diikuti oleh penyusupan-penyusupan situs web di Departemen Luar Negeri Indonesia dan tempat-tempat lain, yang memicu serangan balasan terhadap situs web Portugis oleh para peretas (*hacker*) Indonesia. Perang *cyber* mengenai Timor-Leste berlanjut sampai 1999. Pada Agustus 1998, empat puluh lima domain Indonesia diretas, diikuti sabotase oleh Indonesia terhadap *Connect Ireland*, pencipta domain untuk Timor. Semua ini berakhir dengan perubahan kebijakan mengenai Timor-Leste oleh Presiden Habibie. Meskipun demikian, pemahaman bahwa Indonesia—tidak seperti Timor-Leste—rentan di bidang ini menginspirasi José Ramos-Horta untuk mengancam, pada Agustus 1999, bahwa ia akan meluncurkan kampanye internet yang “nekat dan ganas”, jika Indonesia menolak menghormati hasil referendum 30 Agustus.²⁴⁴

491. Keputusan Komite Nobel Norwegia untuk memberi penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional sedunia, 10 Desember 1996, merupakan dorongan moral, politik, dan organisasi yang sangat besar bagi usaha masyarakat sipil untuk hak penentuan nasib sendiri. Hadiah tersebut diberikan secara terpisah oleh Komite Nobel dan sangat layak diterima dua orang tersebut, Uskup Belo dan José Ramos-Horta, tetapi nominasi terhadap mereka adalah hasil inisiatif masyarakat sipil dan khususnya teman-teman lama Timor-Leste yang bekerja di balik layar di Amerika Serikat. Penghargaan yang bergengsi tersebut mengonfirmasi kebenaran moral usaha masyarakat sipil dan memperlemah tuntutan yang diajukan pemerintah Indonesia dan para pembelanya, termasuk dalam hal sejarah konflik versi Indonesia. Penghargaan tersebut juga membantu secara politis, melalui pembahasan tentang perlunya dilakukan penentuan nasib sendiri

* Pastor Domingos Soares, alias Fr Maubere, adalah salah satu orang yang dilatih Colin Renwick.

untuk menyelesaikan konflik—tujuan utama pembelaan masyarakat sipil selama 20 tahun—dan penetapan masalah hak penentuan nasib sendiri sebagai isu utama.’ Hadiah tersebut ibarat bonus bagi organisasi masyarakat sipil. Liputan media global yang terjadi karenanya, dan berlanjut mengiringi perjalanan José Ramos-Horta keliling dunia dalam peran barunya, menghasilkan minat dan dukungan baru dari publik bagi kampanye masyarakat sipil di banyak negara.

492. Akhir kekuasaan Soeharto datang mendadak, dipicu oleh krisis moneter Asia Timur yang melanda hebat seperti tsunami pada Juli 1997, dan mengekspos betapa rawan Orde Baru di balik mistifikasi tentang Orde Baru yang tidak bisa dihancurkan. Bagi Timor-Leste, jatuhnya Soeharto merupakan “keuntungan moral” seperti disebut Bernard Williams.²⁴⁵ Sebagian orang dari kalangan masyarakat sipil mengatakan bahwa perubahan harus dicapai sementara Soeharto masih berkuasa, karena hanya Soeharto yang memiliki kekuasaan untuk memerintah militer.[†] Yang lain mengatakan bahwa kemerdekaan bergantung pada demokratisasi di Indonesia atau, paling tidak, pada perubahan kepemimpinan. Yeni Rosa Damayanti memberi kesaksian pada Komisi:

Saya mendengar dari para mahasiswa Timor Timur di Jawa, bahwa Xanana sendiri mengatakan kemerdekaan Timor Timur akan bergantung pada proses demokratisasi Indonesia. Akan sulit untuk mencapai kemerdekaan tanpa demokrasi di Indonesia [yang berarti bahwa Soeharto harus jatuh].²⁴⁶

493. Pendapat yang kedua terbukti benar. Soeharto tetap kukuh pada pendiriannya dan hingga detik terakhir ia menolak memberi otonomi terbatas sekalipun pada Timor-Leste. Tekanan masyarakat sipil meningkat. Soeharto menjadi sasaran demonstrasi massa di Vancouver, ketika ia menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada November 1997.[‡] Di dalam negeri, mahasiswa berhasil merebut dukungan yang terus meningkat dari kelas menengah, untuk reformasi total dan mengatur demonstrasi-demonstrasi besar-besaran. Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan kursi presiden ke Wakil Presiden BJ Habibie pada 21 Mei 1998.

* Siaran pers Komite Nobel Norwegia menyatakan: “Komite Nobel akan mendorong usaha untuk mendapatkan solusi diplomatik terhadap konflik Timor-Leste berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri”. Komite yakin hal itu terjadi. Beberapa tahun kemudian Geir Lundestad, Sekretaris Komite, mengatakan mengenai pemberian hadiah Nobel: “Terlihat beberapa dampak positif yang disebabkan pemberian Hadiah Nobel 1996 kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta dalam perjuangan untuk membela hak atas menentukan nasib sendiri rakyat Timor-Leste”. (Geir Lundestad, Sekretaris, Komite Nobel Norwegia, “Reflections on the Nobel Peace Prize”, <http://nobelprize.org/peace/articles/undestad>, pada 10 Juni 2004.

† Umur Soeharto yang telah lanjut dan masalah kesehatannya mungkin merupakan faktor pertimbangan dalam pemberian Hadiah Nobel. Di Australia, organisasi-organisasi nonpemerintah bertemu dengan Abdurrahman Wahid, pemimpin Muslim progresif yang kemudian menjadi presiden Indonesia keempat, untuk membicarakan pendekatan terhadap Soeharto oleh David Lange, mantan perdana menteri Selandia Baru. Rencana tersebut didahului oleh berbagai peristiwa.

‡ Selama sepuluh hari sebelum APEC, 13 orang Timor-Leste yang diasingkan dan beberapa orang Indonesia melakukan tur di Kanada mengimbau pihak berwenang untuk “halangi Soeharto atau penjarakan dia” atas kejahatan-kejahatannya di Timor-Leste dan Indonesia.

Tahap kelima: Penentuan nasib sendiri, 1998-99

494. Periode ini menandai babak akhir kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste dan saat yang dramatis serta intens bagi semua yang terlibat, termasuk masyarakat sipil. Seperti kedatangannya 24 tahun sebelumnya, kepergian Indonesia penuh kekerasan dan kekacauan. Tapi, kali ini tujuannya, meskipun tidak dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kebijakan internasional dan dihargai oleh masyarakat sipil. Indonesia membalik posisinya langkah demi langkah. Pada Juni 1998, Presiden Habibie menawarkan otonomi terbatas di dalam wilayah Indonesia kepada Timor-Leste. Tujuh bulan kemudian, pada Januari 1999, dia menawarkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri di bawah supervisi PBB. Pemilihan suara dilakukan pada 30 Agustus 1999 dan menghasilkan pilihan kemerdekaan secara penuh. Pada 20 Oktober 1999, MPR Indonesia mengakui hasil tersebut dan mencabut dekrit 1976 yang memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Pada 1 November 1999, pasukan-pasukan terakhir TNI meninggalkan wilayah Timor-Leste.

495. Awalnya, masyarakat sipil meragukan naiknya BJ Habibie sebagai presiden. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seseorang yang dianggap eksentrik dan selama hubungannya yang panjang dan erat dengan Soeharto tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada isu Timor-Leste. Ternyata masyarakat sipil sangat diuntungkan dari kekuasaan Habibie yang singkat itu. Ia menerima apa yang selama itu dituntut oleh masyarakat sipil, yaitu tindakan penentuan nasib sendiri yang sejati di Timor-Leste. Secara substansial ia membuka ruang demokrasi, yang memberi kebebasan bagi masyarakat sipil di Indonesia dan Timor-Leste untuk mengatur dan mengampanyekan penentuan nasib sendiri, suatu kesempatan yang sangat mereka manfaatkan.*

496. Pembalikan kebijakan oleh Habibie secara dramatis juga mengubah dinamika sekitar masalah Timor di arena internasional. Pemerintah negara-negara yang sebelumnya mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste dan sangat mendukung Orde Baru, sekarang mengubah kebijakan mereka untuk mendukung penentuan nasib sendiri. Untuk pertama kalinya sejak 1975, pemerintah dan masyarakat sipil—dengan pengecualian Portugal, di mana keduanya telah bersepakat—mengakhiri perselisihan mereka, paling tidak dalam masalah-masalah kebijakan substansial, dan mulai bekerjasama untuk menyokong penentuan nasib sendiri di Timor-Leste dan tidak lagi saling menentang.

497. Digabung dengan akses dan laporan media tentang Timor-Leste seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perkembangan ini mendorong masyarakat sipil dengan semangat yang baru. Bahkan negara-negara yang sudah sejak lama melibatkan diri dalam masalah ini pun menyaksikan perkembangan yang dramatis dalam hal kadar dan luasnya dukungan publik. Jean Pierre Cattry memberitahu

* Habibie melakukan sejumlah reformasi yang secara langsung menguntungkan masyarakat sipil. Dia mengakui kebebasan berkumpul dan pembentukan partai-partai politik, mengurangi pembatasan pers, membebaskan para tahanan politik, dan mengatur penandatanganan atau pengesahan konvensi-konvensi penting hak asasi manusia dan buruh internasional.

Komisi bahwa di Portugal saja tumbuh “ratusan grup dari parlemen ke sekolah-sekolah, kotamadya, jemaah gereja, asosiasi profesional, serikat dagang... tidak mungkin menyebut semuanya.”²⁴⁷ Australia memiliki pengalaman yang sama.’ Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengakui fenomena ini: “Selama saya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tidak ada isu kebijakan luar negeri yang mendapat perhatian publik di Australia lebih daripada Timor-Leste...”²⁴⁸ Pemerintah Australia juga mengakui peran masyarakat sipil di dalam negerinya dalam merebut hak penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste, dengan mengundang dua wakil masyarakat sipil bergabung dalam delegasi resmi guna mengamati pemungutan suara Agustus 1999 tersebut.[†]

498. Sebagian besar dari 2.300 orang pengamat pemungutan suara yang disetujui PBB berasal dari kalangan organisasi nonpemerintah. Mengenai peran mereka, Ian Martin mengatakan:

Banyak yang berasal dari kelompok-kelompok solidaritas dengan komitmen pada penentuan nasib sendiri atau kemerdekaan Timor-Leste Tapi, mandat yang mereka terima saat akreditasi mengharuskan mereka bersikap netral.²⁴⁹

499. Sebagian besar para pengamat, sekitar 1.700 orang, adalah orang Indonesia dan Timor-Leste. Dalam suatu tampilan organisasi internasional dan solidaritas yang mengesankan, mereka didukung oleh rekan-rekan dari seluruh dunia, sebagian besar dikoordinasi oleh IFET (International Federation for East Timor, yang berbasis di AS/ETAN), Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berbasis di Thailand, dan Asia-Pacific Coalition for East Timor (APCET) yang berbasis di Filipina. Mereka mewakili banyak warga di banyak negara, yang bagi mereka, sama seperti bagi rakyat Timor-Leste, pemungutan suara itu menjadi klimaks dari suatu perjuangan hebat dan mendemonstrasikan kembali pentingnya serta besarnya kekuatan rakyat dalam menghadapi masalah-masalah global.

Masyarakat sipil Indonesia

500. Masyarakat sipil Indonesia pada 1990-an memasukkan masalah Timor-Leste ke dalam daftar masalah-masalah sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan yang sangat mendesak. Meskipun kecil dan terisolasi, bagian-bagian penting dari gerakan pro-Timor itu langsung menuju inti masalah dan menyatakan pembelaan mereka terhadap hak penentuan nasib sendiri. Orientasi politik ini terjadi berkat pengaruh orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan orang-orang Timor-Leste yang belajar di Jawa dan Bali. Pembelaan mereka di Indonesia era Soeharto membutuhkan keberanian yang luarbiasa. Meskipun Konstitusi Indonesia mengharuskan memerangi

.....
* Luasnya minat publik Australia terbukti dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat sipil dan individu yang memberi kesaksian pada penyelidikan tentang Timor-Leste di Parlemen Australia pada 1999.

† Kedua pengamat tersebut adalah Pat Walsh dari ACFOA dan Anne Wigglesworth dari Caritas Australia.

kolonialisme dan menegakkan hak semua bangsa atas kemerdekaan,²⁵⁰ namun dalam pandangan rezim tersebut, mendukung penentuan nasib sendiri di Timor-Leste (setelah 1976) adalah tindak subversi terhadap asas utama persatuan nasional, yang harus menyokong kebijakan negara dan militer. Mereka yang mendukung atau berkolaborasi dengan para pembela Timor diganggu dan berisiko dicap sebagai pengkhianat. Hanya di Timor-Leste sajalah aktivitas-aktivitas seperti itu menjadi lebih berbahaya. Namun dengan keberanian mereka berbicara, grup-grup masyarakat sipil Indonesia mematahkan tabu ketakutan dan kebisuan, dan dengan susah-payah berhasil memobilisasi dukungan. Kegiatan ini memuncak dengan hadirnya ratusan warga Indonesia di samping warga Timor-Leste, ketika rakyat Timor-Leste melaksanakan hak penentuan nasib sendiri pada Agustus 1999.

Tahun-tahun awal

501. Sampai 1990-an, Timor-Leste bukanlah isu penting di kalangan organisasi nonpemerintah di Indonesia, meskipun beberapa tokoh perseorangan dan organisasi sudah aktif sebelum tahun-tahun itu. Bagi sebagian orang, keterlibatan ini merupakan bagian dari tugas profesional mereka yang, meski sering sensitif dan sulit, tidak melibatkan aktivitas politik langsung. Ini termasuk George Aditjondro yang mengunjungi Timor-Leste pada Mei 1974 sebagai koresponden *Tempo*, dan berbagi informasi dengan kalangan Gereja di luar negeri setelah invasi;^{*} tokoh-tokoh perseorangan yang berasosiasi dengan Gereja Protestan, seperti Yopie Lasut, Gustaf Dupe, Asmara Nababan, dan Ade Rostina Sitompul, yang mengurus para tahanan politik Timor-Leste yang ditahan di penjara-penjara Indonesia; para anggota lembaga Gereja Katolik LPPS, Fr. Gerry Zegwaard MSC, Fr. Hardoputranto SJ, dan Immaculata Mardani yang menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Timor-Leste dan merupakan sumber informasi rahasia tentang Timor-Leste bagi orang-orang di luar Indonesia.[†]

502. Sebagian orang Indonesia yang tinggal di luar negeri juga aktif mendukung Timor-Leste sebelum 1990, khususnya di kalangan mereka yang meninggalkan Indonesia untuk menghindari pembersihan PKI setelah Soeharto merebut kekuasaan pada 1965.[‡] Di Eropa, mereka bergabung dengan grup-grup pendukung

* George Aditjondro adalah anggota dari sebuah grup Katolik Indonesia muda yang pada 1974 berusaha memformulasi kebijakan Timor-Leste yang demokratis dan non-militer untuk KWI. Dokumen mereka dapat dibaca sebagai Appendix 1 dalam *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out* diedit oleh Herb Feith, Emma Baulch, dan Pat Walsh, ACFOA Mei 1994. Aditjondro juga dipercaya telah menulis laporan non-pemerintah pertama dari dalam Indonesia setelah invasi dalam bentuk sebuah surat kepada Fr Mark Raper, SJ, yang diterima Asian Bureau Australia pada 21 April 1976. (arsip CAVR)

† LPPS didukung oleh dan melakukan kontak secara reguler dengan agensi-agensi Katolik di seluruh dunia melalui Asia Partnership for Human Development (APHD) yang berbasis di Hong Kong. Meskipun tidak secara langsung relevan dengan catatan ini, harus diakui kontribusi kemanusiaan tidak egois yang dilakukan oleh banyak orang Indonesia pada Timor-Leste selama penjajahan Indonesia. Untuk catatan pengalaman mereka selama pergolakan pada 1999, lihat Yohanes Sukandar, Sigit Wijayanto, Martinus Manggo (ed.), *Selamat Tinggal Timor Timur*, Insist Press, Yogyakarta 2000.

‡ Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis pertama di Asia dan pada 1966 telah menjadi salah-satu yang terbesar. Orde Baru muncul pada 1966 setelah pengambilalihan militer, dicekalnya PKI, dan dilikuidasinya hampir satu juta orang anggotanya dan mereka yang dituduh sebagai pendukungnya.

di Jerman, Prancis, Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda (Komite Indonesia), tapi umumnya tetap tidak mau diketahui namanya karena sensitifnya isu dan kerawanan mereka sebagai orang politik yang diasingkan. Kusni Sulang aktif di Paris dan Hendrik Amahorseja di Swedia. Di Australia, Siauw Tiong Djin, Goei Hok Gie (Andrew Gunawan); dan di Belanda juga Ernst Utrecht. Pada 1981, Jusfiq Hadjar dan Liem Soei Liong menjadi orang-orang Indonesia pertama yang secara terbuka menentang invasi dan mendukung kemerdekaan Timor-Leste ketika mereka memberi kesaksian pada Pengadilan Permanen Rakyat di Lisabon. Sebagai balasan, pemerintah Soeharto menyatakan mereka sebagai *persona non grata* dan dicekal untuk kembali ke Indonesia. Orang-orang yang diasingkan lainnya tidak pernah secara terbuka menunjukkan dukungan mereka dan kemudian diperbolehkan kembali ke Indonesia dengan selamat. Sebagian diaspora Indonesia mungkin telah mendukung Timor-Leste untuk memajukan kepentingan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang. Liem Soei Liong menyangkal pekerjaannya atau pekerjaan Carmel Budiardjo di “Tapol” didorong oleh agenda ganda seperti itu.*

503. Diaspora Indonesia di Eropa membantu aktivitas pro-Timor di Indonesia. Mereka menyediakan informasi alternatif tentang Timor-Leste, misalnya dengan mengirim laporan berkala “Tapol” ke Indonesia dan melakukan kunjungan rahasia.[†] Para jurnalis Indonesia yang bekerja di Radio Belanda seperti Tossy Santoso dan Yoss Wibisono menyiarkan berita dan wawancara tentang Timor-Leste yang diterima di Indonesia. Tossy Santoso juga menulis beberapa buku tentang Timor-Leste dalam bahasa Indonesia. Strategi produktif lainnya yang mereka lakukan adalah usaha menghubungkan para aktivis Timor-Leste dengan para aktivis Indonesia dan rekan-rekan internasionalnya. Para aktivis seperti Max Lane di Australia dan António Barbedo de Magalhães di Portugal memiliki jaringan strategi yang sama. Inisiatif internasional ini memberi kontribusi dalam pembentukan dan pengarahannya organisasi nonpemerintah Indonesia seperti Inflight, Solidamor, dan SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere). Orang-orang Indonesia di luar negeri menjadi lebih aktif tentang masalah Timor-Leste pada akhir 1980-an dan pada 1990-an. Dua orang Indonesia yang menetap di Belanda, Aeri Harapan dan Reza Muharram, bergabung dengan kapal protes Portugis *Lusitania Expresso* pada Maret 1992. Sebagai hukuman, paspor mereka berdua dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Yeni Rosa Damayanti juga dibatalkan paspornya setelah partisipasinya dalam sebuah demonstrasi anti-Soeharto pada 1996. Kewarganegaraan mereka hanya dikembalikan setelah Soeharto jatuh.

* Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005. Dalam sikap sensitif pada saat kesaksian publiknya pada CAVR, Yeni Rosa Damayanti menyertakan aktivis Inggris Carmel Budiardjo dalam daftarnya yang berisi orang-orang Indonesia yang aktif di luar negeri. Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2003, hal. 5. Carmel Budiardjo dipenjara di Indonesia setelah 1965 dan, setelah dibebaskan dan kembali ke Inggris, mengabdikan hidupnya untuk membela hak asasi manusia di Indonesia.

† Liem Soei Liong melakukan beberapa kunjungan rahasia selagi dia dicekal dan pada tiap kesempatan tersebut memberikan ceramah tentang Timor-Leste pada para aktivis Indonesia. Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005. Aktivis Indonesia Nugroho Katjasungkana mengonfirmasi pengaruh dari para [diaspora] Indonesia pada pekerjaan solidaritas para aktivis Indonesia. Kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret, 2003.

504. Warga Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bekerja sementara, belajar, atau bepergian ke luar negeri sering dihadapkan pada isu Timor-Leste melalui media atau rekan-rekan mereka. Para pemimpin masyarakat sipil seperti Abdurrahman Wahid, Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara terkadang menggunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk membahas isu tersebut dan bertemu dengan tokoh-tokoh Timor-Leste. Mereka tetap diawasi dan karena tanggungjawabnya di Indonesia mereka tidak berani mengambil risiko berbicara terbuka, karena akan mendapat kesulitan dari pihak yang berwenang, baik bagi mereka sendiri ataupun organisasi mereka.

Tahun 1990-an

505. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sipil di Indonesia sering membisu tentang Timor-Leste sampai 1990-an. Masyarakat sipil hampir tidak ada di Indonesia di bawah rezim Soeharto. Orde Baru bersistem otoriter, malahan hampir totaliter. Masyarakat sipil tidak memiliki tempat formal dalam struktur politik yang membela kaum korporat dan bertindak dari atas ke bawah, yang melarang hak-hak sipil dan politik dengan alasan persatuan, pembangunan, dan stabilitas nasional. Ketika organisasi masyarakat sipil akhirnya muncul, mereka terlalu disibukkan oleh isu-isu tanah, tenaga kerja, lingkungan dan lainnya, dan hanya memiliki sedikit dari kebebasan dan sumberdaya yang dimiliki organisasi komunitas di negara-negara demokratis.

506. Selain dikucilkan, masyarakat sipil juga dibuat tidak tahu tentang realitas di Timor-Leste. Pemerintah Soeharto membatasi akses ke wilayah tersebut, termasuk untuk media massa Indonesia dan masyarakat sipil, mengontrol dengan ketat informasi tentang Timor-Leste, dan pemerintah hanya mengumumkan versi resmi, yaitu integrasi adalah positif dan telah mengikuti tindakan penentuan nasib sendiri. Dalam kesaksian terbukanya pada Komisi, Yeni Rosa Damayanti bertanya secara retorik: “Di mana rakyat Indonesia ketika rakyat Timor-Leste sedang menderita?” Dia menjawab: “Jawabannya, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini.”²⁵¹

507. Faktor terbesar kedua adalah iklim ketakutan di Indonesia yang diciptakan oleh pengambilalihan oleh militer yang penuh kekerasan pada 1965, dan yang diresmikan secara hukum serta operasional selama pemerintahan Soeharto. Dalam penilaian Liem Soei Liong, “Timor-Leste selalu merupakan isu yang sensitif, dan mungkin pada awal 1980-an merupakan isu yang lebih sensitif dibanding isu PKI/1965.”²⁵² Yeni Rosa Damayanti mengilustrasikan maksud pernyataan ini dalam praktik, ketika dia memberitahu Komisi tentang interogasi seorang Mayor Bakorstanas terhadap dirinya pada 1991 menyusul protes terhadap Perang Teluk, yang dengan gagah-berani dikaitkan oleh para aktivis Indonesia dengan invasi Indonesia ke Timor-Leste. Dia memberi kesaksian:

Sang Mayor meletakkan pistolnya di hadapan saya dan berkata: “Kamu boleh bicara tentang apa saja, tapi kamu tidak boleh bicara tentang Timor Timur. Ribuan tentara telah meninggal di Timor Timur

*dan saya tak akan membiarkan satupun orang Indonesia untuk berbicara tentang Timor Timur. Ribuan orang telah meninggal dan kamu hanyalah satu orang lagi, dan nyawa satu orang Indonesia tidak ada artinya...*²⁵³

508. Nugroho Katjasungkana memberi kesaksian pada Komisi bahwa pada 1980-an orang-orang Indonesia yang tertarik pada pendidikan, kesehatan, dan koperasi alternatif menjadi tertarik pada Timor-Leste ketika mereka mengetahui bahwa Fretilin juga mempunyai perhatian pada bidang-bidang tersebut pada 1975.²⁵⁴ Tapi awal dukungan politik yang berkesinambungan bagi Timor-Leste dimulai pada awal 1990-an oleh organisasi-organisasi seperti Infight (Saleh Abdullah), Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia (HJC Princen*), dan Hidup Baru (Yopie Lasut). Selain dari masukan internasional dari orang-orang Indonesia di luar negeri, kontak dengan mahasiswa Timor-Leste yang belajar di Jawa setelah dibukanya provinsi tersebut pada 1989 juga berkontribusi pada kebangkitan ini. Yeni Rosa Damayanti memberitahu Komisi:

*Saya dikenalkan pada kasus Timor Timur ketika rekan-rekan mahasiswa Timor Timur yang sekolah di Jawa mulai berdatangan. Ada beberapa orang saat itu, Fernando de Araújo dan lainnya... Mahasiswa-mahasiswa Timor Timur datang ke tempat kami dan di sanalah saya pertama kali mendengar tentang apa yang sedang terjadi di Timor Timur. Bayangkan, setelah bertahun-tahun.*²⁵⁵

509. Ini juga menjelaskan mengapa gerakan dukungan lebih kuat di kalangan mahasiswa yang sebagian besar berada di Jawa dan Bali. Seperti di banyak negara lainnya, pembantaian Santa Cruz pada 1991 juga merupakan titik balik bagi banyak pihak di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa sifat asli dari negara Indonesia sedang diungkapkan di Timor-Leste dan bahwa sistemnya sendiri sudah salah, bukan hanya aktivitasnya di wilayah tersebut. Para anggota Infight, LPHAM, dan Hidup Baru bergabung dengan pemuda Timor-Leste untuk memprotes pembantaian tersebut di depan kantor PBB di Jalan Thamrin pada 19 November 1991, yang menyebabkan mereka ditangkap dan diinterogasi. Pada 23 November, menyusul inisiatif oleh Asosiasi Mahasiswa Yogyakarta, 12 Dewan Mahasiswa menandatangani petisi di Bandung untuk menuntut penarikan mundur pasukan-pasukan Indonesia dari Timor-Leste dan memberikan “hak yang penuh dan bebas untuk penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.”²⁵⁶

510. Pokastim, Kelompok Komunikasi Timor Timur, melakukan koordinasi yang longgar. Bekerja untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Timor-Leste, Pokastim menjadi organisasi yang pertama dalam mengadakan pertemuan

.....
* Dilahirkan di Belanda, Haji Princen adalah seorang perintis terkemuka hak asasi manusia di Indonesia sejak waktu perang kemerdekaan, saat dia berperang bersama pihak Indonesia. Dia melindungi banyak orang Timor-Leste, termasuk mereka yang mencari suaka ke luar negeri. Rakyat Timor-Leste mengadakan upacara di Taman Borja da Costa, Dili, untuk menandai kematiannya pada 2002.

publik pertama di Timor-Leste tentang isu penentuan nasib sendiri, yang diadakan di sebuah universitas pada akhir 1997. Grup-grup solidaritas Indonesia Fortilos (Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae) dan Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Timur) tumbuh dari Forum ini.²⁵⁷ Kedua grup tersebut secara eksplisit mendukung penentuan nasib sendiri. Solidamor memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi di Indonesia,^{*} memonitor pemungutan suara Agustus 1999, dan pada bulan tersebut juga menjadi kantor penghubung di Jakarta untuk Resistansi Timor-Leste (CNRT). Pada Mei 2000, sekitar 50 orang Timor-Leste prointegrasi menyerang kantor Solidamor, mencuri berkas-berkas dan uang, serta mencederai beberapa aktivis termasuk Bonar Tigor (Coki) Naipospos, ketua Solidamor. Yang berwenang tidak berbuat banyak untuk menanggapinya.

511. Kelompok-kelompok pro-Timor bertujuan memberi informasi dan memobilisasi para aktivis muda dengan menerbitkan informasi alternatif tentang Timor-Leste. Contoh-contoh awal termasuk wawancara Robert Domm dengan Xanana Gusmão dan *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide* (Timor Timur: Pendudukan Indonesia dan Genosida) oleh Profesor Barbedo de Magalhães. Pijar menerbitkan laporan Pelapor Khusus PBB Bacre Waky Ndiaye pada 1995, wawancara Michele Turner dengan para pengungsi Timor-Leste yang diberi judul *Telling East Timor: Personal Testimonies 1942 – 1992*, dan pembelaan pemimpin klandestin Renetil, Fernando de Araújo. Di Salatiga, Geni (Gemi Nastiti Foundation) menerbitkan artikel-artikel kritis mengenai perkembangan Timor-Leste dan demonstrasi anti-Uskup Belo di Jawa. Di Semarang, para mahasiswa Universitas Diponegoro menerbitkan pembelaan Xanana Gusmão dan kritik George Aditjondro terhadap penjajahan Indonesia atas Timor-Leste.

512. Para aktivis Timor-Leste dan Indonesia juga terlibat dalam tindakan langsung gabungan, khususnya melalui SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere), bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD). Para anggota PRD, yang juga terdiri atas para mahasiswa, pekerja, petani, dan artis, selalu menyertakan tuntutan partai atas referendum di Timor-Leste selain advokasi mereka untuk upah minimal, pemilu yang bersih, dan presiden baru. SPRIM mengadakan rapat-rapat umum dan pada 1995 bergabung dengan beberapa orang Timor-Leste untuk menduduki Kedutaan Belanda dan Rusia di Jakarta.

513. Para aktivis Indonesia juga berhubungan dengan organisasi-organisasi yang sehaluan di wilayah Asia-Pasifik. Pemimpin Pijar, Rachlan Nashidik dan Tri Agus Susanto Siswowiharjo, menghadiri konferensi APCET pertama yang diadakan di Manila pada 1994. Orang-orang Indonesia juga hadir di APCET II di Kuala Lumpur pada 1995 dan APCET III di Bangkok pada 1998. Hubungan dengan Australia juga dipertahankan melalui jaringan beragama, termasuk Action in Solidarity with Indonesia and East Timor (ASIET) dan Indonesia Australia Program for Cooperation

* Pada 1986 Solidamor menerjemahkan dan menerbitkan *Funu: The Unfinished Saga of East Timor* karya José Ramos-Horta. Kampanye yang kreatif dari Solidamor untuk Timor juga termasuk penerbitan buku saku *Mengenal Timor Timur Dulu dan Sekarang*, Solidamor, Jakarta, September 1998.

with Indonesia (IAPC).^{*} Majalah triwulan Australia, *Inside Indonesia*, yang dibentuk pada 1983, adalah media pertukaran informasi yang dihormati dan menjadi sumber informasi alternatif satu lagi tentang Timor-Leste untuk para pembaca Indonesia.

514. Organisasi nonpemerintah lain menyediakan bantuan hukum dan perawatan penyantunan bagi para tahanan politik Timor-Leste yang telah ditahan di Timor-Leste dan Indonesia karena mempromosikan hak penentuan nasib sendiri. Ketika sejumlah besar orang Timor ditahan setelah pembantaian Santa Cruz pada 1991, para pengacara Indonesia dan lainnya pergi ke Timor-Leste untuk membantu mereka dalam pembelaan hukum. Ade Rostina Sitompul memberi kesaksian pada Komisi tentang risiko pribadi yang mereka hadapi untuk membantu para tahanan Timor di Dili saat itu:

*Itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena aparat keamanan sangat represif dan kita selalu dibuntuti ke manapun kita pergi... Para pengacara, seperti Pak Luhut [Pangaribuan], diteror di Hotel Turismo... Kita menerima panggilan-panggilan telepon yang menyuruh kita pulang atau akan dibunuh dan saya takut sekali waktu itu.*²⁵⁸

515. Elsam dan lembaga-lembaga keadilan sosial dari Gereja Protestan (PGI) dan Katolik (KWI) mendirikan Joint Committee for the Defence of the East Timorese (JCDET – Komite Gabungan untuk Membela Timor Timur). Fungsinya adalah menyediakan bantuan hukum, membantu keluarga para tahanan di Timor-Leste, dan mencari dana bagi para mahasiswa Timor-Leste yang, karena aktivitas politik mereka, telah kehilangan beasiswa dari pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mewakili José António Neves pada pengadilannya 1994-1995 dan mengatakan bahwa pengadilan tersebut tidak sah karena Timor-Leste belum menjalankan haknya atas penentuan nasib sendiri.

516. Pada 1994, Ade Rostina Sitompul terpaksa meninggalkan Indonesia selama enam bulan agar tidak tertangkap.

517. Pengalaman George Aditjondro menggambarkan lebih jauh tentang akibat dari penentangan kebijakan Indonesia atas Timor-Leste. Pada 1994, setelah sebuah surat kabar asal Australia menerbitkan laporan-laporannya mengenai Timor-Leste, Aditjondro dicap sebagai “pengkhianat” oleh tokoh-tokoh pemerintah dan rumahnya di Salatiga dilempari batu. Ia terpaksa meninggalkan Indonesia pada 1995 untuk periode yang panjang.[†]

^{*} IAPC didirikan oleh Australian Council for Overseas Aid (ACFOA, sekarang ACFID) untuk menumbuhkan hubungan rakyat ke rakyat antara Indonesia dan Australia, dan sebagian juga untuk membalik persepsi di Indonesia yang menganggap bahwa LSM Australia terlalu berfokus ke Timor-Leste. Kontribusinya pada International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan organisasi Indonesia lainnya memungkinkannya mengangkat Timor-Leste dalam lingkungan yang lebih positif. Pada 1992, sekretarisnya, Pat Walsh, diusir dari Indonesia dan dicekal selama beberapa tahun setelah namanya disebut dalam pengadilan pembantaian Dili.

[†] Alasan utama Aditjondro pergi adalah untuk menghindari pengadilan politik karena artikel-artikel yang ia tulis tentang bisnis yang berhubungan dengan Soeharto, tetapi pandangan-pandangannya ten-

518. Para pendukung Timor-Leste dari Indonesia tidak hanya harus menghadapi pihak militer dan pemerintah yang tidak bersahabat. Banyak pihak dalam masyarakat sipil arus utama, termasuk orang-orang Kristen, Muslim, dan profesional kelas menengah, juga tidak setuju dengan mereka dan mendukung pendirian resmi tentang Timor-Leste. Apapun alasan mereka, banyak orang Indonesia dari kalangan ini mempunyai kekhawatiran yang sama, bahwa Indonesia akan pecah seperti Yugoslavia dan Uni Soviet jika Timor-Leste diperbolehkan memilih keluar dari Republik Indonesia. Pandangan ini juga ada dalam beberapa gerakan demokrasi yang, sementara setuju dengan imbauan aktivis untuk reformasi luas, mendesak pendukung Timor-Leste dari Indonesia dan rekan-rekannya di Timor-Leste untuk meninggalkan cita-cita kemerdekaan dan bekerjasama dengan mereka untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu demokrasi untuk semua. Itu semua merupakan argumen yang kuat. Namun, para aktivis Timor-Leste tidak pernah sekali pun mengancam keamanan Indonesia, integritas nasional Indonesia, atau mencoba ikut campur dalam urusan internal Indonesia. Mereka tetap berfokus pada perjuangan mereka sendiri.

519. Sejak pertengahan 1990-an, beberapa tokoh prodemokrasi dan organisasi bergabung dengan generasi yang lebih muda dalam mendukung Timor-Leste. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)—sebuah koalisi lebih daripada 100 organisasi nonpemerintah Indonesia dan internasional—mengomentari tentang “munculnya makin banyak suara dalam gerakan demokratisasi di Indonesia untuk penyelesaian damai dari konflik Timor Timur.”²⁵⁹ Mereka yang berbicara termasuk editor *Tempo*, Goenawan Mohamad; ahli pendidikan Katolik, Romo Y.B. Mangunwijaya; pemimpin serikat buruh, Mochtar Pakpahan; dan pembangkang Islam terkemuka, Sri Bintang Pamungkas, yang masing-masing mendukung penentuan nasib sendiri.

520. Beberapa tokoh masyarakat juga menentang kebijakan pemerintah, termasuk pemimpin dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Pada 1996, ketua Muhammadiyah, Amien Rais, menyatakan secara terbuka bahwa Timor-Leste sebaiknya dibiarkan berpisah dari Indonesia, jika memang itu kehendak rakyatnya. Ia memberitahu pers Australia bahwa ia percaya pemerintah Indonesia telah berusaha yang terbaik, “tapi jika rakyat Timor Timur tetap menginginkan referendum dan menginginkan negara merdeka, saya pikir lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika hasil referendum memang benar, berarti kita tidak boleh bertahan pada posisi kita. Biarkan mereka bebas.”²⁶⁰ Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, pemimpin Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, membuat banyak pernyataan terbuka, dan lebih terus terang, tentang perlunya menyelesaikan masalah Timor-Leste. Dengan dukungan Gus Dur, INFID terus-menerus membuat pernyataan tentang Timor-Leste dalam resolusi setiap konferensi yang diselenggarakannya. Dengan alasan bahwa hak asasi manusia dan demokratisasi sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, INFID menentang ‘pendekatan keamanan’ secara militer dan mengimbau komunitas internasional

tang Timor-Leste juga mempersulit hubungannya dengan rezim Soeharto (Herb Feith, Emma Baulch, and Pat Walsh (ed.), *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out*).

untuk menghentikan segala bentuk bantuan militer sebelum TNI berada di bawah kontrol kekuasaan sipil. INFID juga mengimbuu komunitas internasional supaya “mendukung dilakukannya pengadilan internasional untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang dilakukan anggota militer Indonesia di Timor-Leste”²⁶¹ setelah kekerasan pasca-pemungutan suara 1999.

521. Yeni Rosa Damayanti memberi kesaksian pada Komisi tentang euforia yang melanda kalangan masyarakat sipil Indonesia menyusul jatuhnya Soeharto pada Mei 1998. Dalam beberapa bulan berikutnya, para aktivis Indonesia mengunjungi Timor-Leste secara bebas dan meningkatkan kampanye publiknya. “Kami tidak lagi berbicara tentang Timor-Leste dalam ruang-ruang tertutup.”²⁶² Walaupun demikian, sebagian besar warisan Orde Baru tetap hidup, dan Yeni Rosa Damayanti serta Nugroho Katjasungkana memberi kesaksian bahwa organisasi-organisasi nonpemerintah Indonesia, berdasarkan pengalaman penindasan di tangan aparat keamanan selama bertahun-tahun, sangat terkejut ketika PBB menyerahkan soal keamanan kepada militer dan polisi Indonesia pada 1999. Pada April 1999, sebagai contoh, kelompok-kelompok pendukung Indonesia terpaksa menyembunyikan teman-teman Timor-Leste di rumah-rumah aman, ketika Kopassus membawa 150 orang milisi prointegrasi ke Jakarta untuk mencari orang-orang yang berkampanye untuk penentuan nasib sendiri.²⁶³

522. Meski ada ketidakpercayaan terhadap TNI, dan juga karena itu, sekitar 600 anggota masyarakat sipil Indonesia mengunjungi Timor-Leste pada Agustus 1999 untuk mengamati jalannya pemungutan suara. Dikoordinasi oleh Kiper* (Komite Independen Pemantau Suara), mereka membentuk grup pengamat eksternal terbesar dan menolak klaim Indonesia yang mengatakan bahwa PBB telah memanipulasi jumlah suara. Dengan kehadirannya, mereka menawarkan perlindungan bagi para pemilih Timor-Leste dan membantu memfasilitasi tindakan penentuan nasib sendiri yang bersejarah tersebut. Sebagai orang Indonesia, mereka telah menyumbangkan segala kemungkinan untuk melawan. Presiden Habibie bukanlah orang Indonesia pertama yang bicara tentang referendum bagi Timor-Leste dan diapun tidak mendengarnya pertama kali dari Perdana Menteri Australia John Howard. Masyarakat sipil Indonesia telah membela ide tersebut jauh-jauh hari sebelum 1999.

Kesimpulan

523. Ian Martin, pemimpin UNAMET yang bertugas menjamin rakyat Timor-Leste menjalankan haknya untuk penentuan nasib sendiri, menulis bahwa:

Peran hebat yang dilakukan organisasi nonpemerintah dan beberapa tokoh individu yang tetap menaruh kekhawatiran atas nasib Timor-Leste ketika dunia diplomatik sangat tidak menaruh perhatian, adalah kisah yang memiliki pelajaran-pelajaran penting...²⁶⁴

.....
* Kiper diketuai oleh Bonar Tigor Naipospos. Para anggota dewan termasuk Lukman Soetrisno, Abdurachman Wahid, Arief Budiman, Saparinah Sadli, dan George Aditjondro.

524. Pandangan ini disetujui secara luas. Sebagian besar pekerjaan dalam gerakan solidaritas dilakukan dengan risiko menghadapi sikap tidak bersahabat pemerintah dan para pemegang kekuasaan lainnya. Begitu pun di negara-negara kaya, sebagian besar organisasi solidaritas dan individu berjuang untuk memperoleh dana dan sumberdaya, justru ketika banyak orang menganggap Timor-Leste hanya isu marginal. Sebagian besar usaha tersebut dilakukan oleh para individu dengan mengorbankan waktu dan kehidupan pribadi mereka, demi perjuangan Timor-Leste. Ini semua merupakan proses perjuangan, tapi juga proses berbagi dan belajar, untuk meraih rakyat Timor yang ada di dalam negeri dan diasporanya, serta merupakan proses pembangunan kemitraan dan persahabatan antarkelompok di dalam dan di luar negeri.

525. Pada 23 Mei 2002, tiga hari setelah perayaan kemerdekaan Timor-Leste, sekumpulan orang dipanggil rapat di Dili untuk menghormati solidaritas internasional. Tiga pemimpin Timor-Leste yang baru disumpah, Presiden Kay Rala Xanana Gusmão, Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan Menteri Senior Urusan dan Kerjasama Luar Negeri José Ramos-Horta, menggunakan kesempatan tersebut untuk memberi pujian pada semua individu dan grup yang mendukung perjuangan Timor-Leste. Beberapa hari sebelumnya, di Taman Rakyat Internasional di tepi laut Lecidere, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan memberitahu sekelompok orang yang dikumpulkan oleh program United Nations Volunteer: “tanpa kerja para anggota UNV, Timor-Leste tidak akan pulih dari kehancuran; tanpa tindakan-tindakan solidaritas internasional, Timor-Leste tidak akan dapat mencapai kemerdekaan.” Sebuah piagam di tempat tersebut mencantumkan kata-kata berikut dari José Ramos-Horta, penerima Nobel Perdamaian: “Kami tidak akan pernah melupakan Anda, teman-teman abadi kami.”²⁶⁵

526. Komisi yakin bahwa pelajaran-pelajaran berikut dapat dipetik dari pengalaman ini:

- Kontribusi masyarakat sipil untuk penyelesaian masalah Timor-Leste hanya mungkin karena adanya masyarakat sipil dan diperbolehkannya mereka bergerak bebas sebagai sektor independen di berbagai belahan dunia; atau karena, seperti di Indonesia dan Timor-Leste sendiri, masyarakat sipil mewajibkan diri melawan penindasan. Pengalaman Timor-Leste menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi berfungsinya setiap masyarakat dan komunitas internasional.
- Selama dua puluh lima tahun perjuangan, kemitraan yang kuat ditempa antara para pemimpin Timor-Leste sekarang dengan masyarakat sipil internasional, yang jarang ditemukan dalam sejarah pembangunan bangsa. Kemitraan ini, yang sekarang memasuki tahap baru, sebaiknya dijunjung tinggi oleh kedua pihak karena merupakan aset jangka panjang yang penting bagi Timor-Leste.
- Dari pengalaman Timor-Leste, masyarakat sipil memetik pelajaran bahwa, selain harus strategis, mereka sangat efektif ketika (a) bertahan pada prinsip; (b) tak memiliki kepentingan politis; (c) tidak menggunakan kekerasan; (d) terbuka pada kontribusi semua orang; dan (e) independen tapi siap bekerjasama dengan kalangan pemerintah dan bisnis bila memungkinkan.

Temuan-temuan

Komunitas internasional

527. Komisi menemukan bahwa:

1. Pengakuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Timor-Leste adalah wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, merupakan hal yang fundamental bagi nasib Timor-Leste sebagai bangsa yang kecil dan rentan. Hal ini memberi dasar hukum internasional bagi masalah tersebut, yang menjadi aset utama bangsa Timor-Leste dalam perjuangan mereka menuju kemerdekaan.
2. Rasa hormat negara-negara anggota terhadap sistem hukum internasional dan peran PBB merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan penegakan perdamaian dan keadilan, terutama bagi golongan minoritas. Bangsa Timor-Leste tahu, dari pengalamannya, bahwa kegagalan negara-negara anggota untuk menghormati prinsip-prinsip internasional memiliki konsekuensi yang amat pahit, tetapi juga bahwa PBB yang berfungsi dengan baik akan dapat menguntungkan semua.
3. Sebagian besar anggota PBB gagal mendukung Timor-Leste dalam Sidang Umum dari 1976 sampai 1982, baik dengan memberi suara menentang resolusi-resolusi untuk Timor-Leste maupun dengan tidak memberi suara samasekali. Sampai ketika diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB di 1982, masalah Timor-Leste hanya dapat dipertahankan di PBB oleh sepertiga dari komunitas dunia. Sebagian besar negara-negara ini adalah negara Dunia Ketiga atau sosialis. Hanya empat negara Barat yang mendukung Timor-Leste di PBB sepanjang periode ini, yakni: Siprus, Yunani, Islandia, dan Portugal.
4. Sebagian besar negara-negara Barat gagal menyeimbangkan dukungan bagi prinsip penentuan nasib sendiri dan kepentingan strategis dan ekonomi mereka yang terkait dengan Indonesia. Pada 1975 mereka jelas lebih mementingkan kepentingan mereka dengan Indonesia, dan hanya di permukaan menghormati penentuan nasib sendiri.
5. Masyarakat sipil memainkan peran penting dengan menegakkan prinsip-prinsip internasional di banyak negara, termasuk Portugal dan Indonesia. Masyarakat sipil mendorong hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, memberikan dukungan moral, politik, dan keuangan bagi perjuangan Timor, dan menentang pengabaian atau sikap permusuhan pemerintah negara-negara di dunia terhadap Timor-Leste. Penghormatan kepada hak-hak sipil dan politik serta berfungsinya suatu masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi berfungsinya setiap komunitas dan sistem internasional.
6. Timor-Leste memperoleh keuntungan dari kerja para pejabat dan badan penting PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Khusus atau

Pribadi yang mereka tunjuk, staf dalam Sekretariat yang tanggung jawab atas isu tersebut, Komite Khusus Dekolonisasi, Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia, dan Sub-Komite Perlindungan Golongan Minoritas.

7. Dewan Keamanan mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri pada 1975 dan 1976, namun gagal menegakkan hak ini secara efektif hingga 1999. Dewan Keamanan tidak melakukan intervensi untuk menghentikan invasi Indonesia, walaupun sekurangnya dua dari anggotanya mengetahui maksud Indonesia; Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dan perlunya menghindari pertumpahan darah selanjutnya, tetapi tidak memberi bantuan kemanusiaan darurat; Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi kepada Indonesia atas kegagalan Indonesia memenuhi kehendak Dewan Keamanan; Dewan Keamanan tidak menindaklanjuti Resolusi 389 dan menanggukuhkan masalah ini hingga 1999. Kegagalan ini merupakan tanggungjawab Anggota Tetap Dewan Keamanan yang semuanya, kecuali Cina, bersikap menyepelkan masalah Timor dan memilih melindungi Indonesia dari reaksi internasional di atas kerugian Timor.
8. Amerika Serikat mengakui bahwa bangsa Timor-Leste memiliki hak atas penentuan nasib sendiri tetapi tidak mendukung satupun resolusi Sidang Umum mengenai isu tersebut antara 1975 dan 1982, atau memberi bantuan apapun untuk perjuangan Timor untuk penentuan nasib sendiri hingga 1998. Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan dan negara adikuasa, Amerika Serikat memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mencegah campurtangan militer Indonesia, tetapi menolak melakukan hal itu. Amerika Serikat menyetujui invasi itu dan membiarkan Indonesia menggunakan peralatan militernya meski menyadari bahwa itu melanggar hukum Amerika Serikat sendiri dan akan digunakan untuk menekan hak atas penentuan nasib sendiri. Amerika terus memberi dukungan militer, ekonomi, dan politik kepada Indonesia, walaupun resolusi-resolusi Dewan Keamanan meminta Indonesia mundur dan memperkenankan pelaksanaan penentuan nasib sendiri secara bebas.
9. Prancis dan Inggris mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Tetapi, walaupun mereka Anggota Tetap Dewan Keamanan, memilih tinggal diam mengenai isu tersebut. Kedua negara itu bersikap abstain dalam semua resolusi Sidang Umum antara 1975 dan 1982, serta gagal dalam mengampanyekan hak tersebut atau dalam memberi bantuan kepada perjuangan rakyat Timor hingga 1998. Kedua negara itu justru meningkatkan bantuan, perdagangan, serta kerjasama militer mereka dengan Indonesia selama pendudukan. Beberapa peralatan militer Prancis dan Inggris digunakan oleh pasukan Indonesia di Timor-Leste.
10. Cina dan Uni Soviet mendukung resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Umum atas isu tersebut antara 1975 dan 1982 (dengan Cina sebagai pengecualian di 1979). Indonesia dengan gegabah menyatakan bahwa kedua negara itu bersekutu dengan Fretilin dan mempunyai kepentingan strategis

di Timor-Leste, serta memanfaatkannya untuk membenarkan campurtangan militer. Kenyataannya, kedua negara itu memberi prioritas besar kepada Indonesia dan hanya menaruh sedikit perhatian pada nasib Timor, dengan perkecualian dukungan awal oleh Cina.

11. Jepang mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan tidak mengakui pengambilalihan oleh Indonesia, juga tidak memberi bantuan militer kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang mendukung hanya satu resolusi Dewan Keamanan dan menentang semua resolusi Sidang Umum antara 1975 dan 1982. Jepang adalah investor dan donor bantuan terbesar bagi Indonesia, serta memiliki kapasitas lebih banyak daripada negara-negara Asia lainnya untuk memengaruhi penyusunan kebijakan di Jakarta, tetapi Jepang tidak menggunakan pengaruh ini atas nama Timor-Leste.
12. Vatikan mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan, konsisten dengan kebijakan ini, Vatikan tidak menggabungkan Gereja Katolik setempat ke dalam Gereja Indonesia, walaupun ada tekanan dari Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Paus Yohanes Paulus II adalah satu-satunya pemimpin dunia yang mengunjungi wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan. Para pemimpin Gereja di Timor-Leste secara berkala meminta Vatikan mendukung permintaan mereka untuk penentuan nasib sendiri. Tetapi Vatikan, yang berkepentingan melindungi Gereja Katolik di Indonesia yang mayoritas Muslim, tetap bungkam di depan umum mengenai masalah tersebut dan mencegah pihak-pihak lain di Gereja membicarakan isu tersebut.

Pemangku kepentingan utama

528. Komisi menemukan bahwa:

1. Diplomasi pihak Resistansi Timor-Leste merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai penentuan nasib sendiri. Resistansi mempertahankan komitmennya dalam menghadapi tantangan-tantangan luar biasa, termasuk perpecahan yang cukup berarti, keterbatasan sumber daya, isolasi, dan besarnya kendala yang dihadapi di dalam dan di luar Timor-Leste. Diplomasi pihak resistansi pada akhirnya berhasil karena berfokus pada prinsip-prinsip yang disetujui secara internasional, menghindari penggunaan ideologi dan kekerasan, terbuka bagi kontribusi semua orang Timor, dan menggunakan secara maksimal jaringan internasional, media massa, dan jaringan-jaringan masyarakat sipil. Lebih cenderung sebagai isu hak-hak asasi manusia dan moral ketimbang isu ideologi, masalah Timor-Leste memperoleh legitimasi dan dukungan internasional dan mulai tidak menguntungkan Indonesia, yang menyandarkan penyelesaian masalah pada kekuatan dan tanpa dasar hukum internasional atau moralitas.
2. Republik Indonesia di bawah Presiden Soeharto melanggar hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Tanggungjawab atas pelanggaran

ini terletak terutama pada Presiden Soeharto, tetapi ditanggung bersama-sama oleh pasukan-pasukan bersenjata Indonesia, lembaga-lembaga intelijen, dan CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang secara prinsipil tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya.

3. Presiden Soeharto dan para penasihatnya memutuskan menggabungkan Timor Portugis pada 1974, dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Cara-cara itu meliputi jalan propaganda, intimidasi, subversi, campurtangan urusan dalam negeri Timor Portugis, penggunaan kekuatan, dan pendudukan militer.
4. Majelis Rakyat Timor Timur yang bersidang di Dili pada 31 Mei 1976 tidak memenuhi syarat internasional untuk tindakan penentuan nasib sendiri yang murni. Sidang ini tidak representatif dan tidak pula merupakan proses yang terbuka dan demokratis. Timor ketika itu tengah berada dalam cengkeraman pendudukan militer dan konflik bersenjata, dan masih belum sampai pada taraf pemerintahan sendiri, dengan lembaga-lembaga politik yang bebas yang akan memungkinkan rakyatnya menentukan pilihan yang sesungguhnya. Proses itu hanya memberi satu pilihan dan karenanya ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Militer Indonesia secara paksa menekan perjuangan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia berusaha menetralsisir para pendukung dari masyarakat sipil Timor, Indonesia, serta internasional terhadap penentuan nasib sendiri.
6. Bangsa Indonesia tidak memikul tanggungjawab atas pelanggaran ini. Masyarakat sipil Indonesia menunjukkan keberanian yang luarbiasa, dengan secara aktif mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.
7. Menyusul perubahan kebijakan Indonesia oleh Presiden Habibie, tindakan penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya diadakan di Timor-Leste pada 1999, walaupun militer Indonesia berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan menggunakan kekerasan.
8. Republik Portugal di bawah perintah rezim Salazar-Caetano melanggar hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan tidak mengakui status wilayah itu sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan dengan tidak mempersiapkan rakyat Timor menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan persyaratan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegagalan ini merugikan hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan turut menyebarkan pendirian bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak akan mungkin bertahan secara ekonomi ataupun politik dan bahwa Timor-Leste hanya dapat hidup melalui penggabungan dengan Indonesia.
9. Keputusan yang diambil Portugal pada 1974 untuk mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri merupakan peristiwa bersejarah yang mengubah nasib Timor. Meskipun demikian, Portugal gagal menjalankan tanggungjawabnya selama masa penting ini dan menyinggalkan

Timor-Leste dalam keadaan relatif tidak berdaya, baik di lapangan maupun secara internasional dalam menghadapi rencana-rencana Indonesia untuk menggabungkan wilayah tersebut.

10. Sebagai kuasa pemerintahan, Portugal setia kepada prinsip penentuan nasib sendiri sepanjang pendudukan Indonesia, serta memberi bantuan keuangan dan politik kepada bangsa Timor-Leste dalam perjuangan mereka untuk penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, diplomasi Portugis tidak menandingi diplomasi Indonesia dan tidak mengampunahkan penentuan nasib sendiri dengan cukup kuat atau konsisten, hampir di sepanjang masa pendudukan Indonesia.
11. Masyarakat sipil Portugis secara aktif mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, terutama melalui pembelaan di dalam dan luar negeri, dan terus melakukan penyebaran informasi.
12. Australia ada pada posisi yang sangat baik untuk memengaruhi penyusunan kebijakan mengenai isu tersebut; karena baik bangsa Timor-Leste, Presiden Soeharto, maupun komunitas internasional memandang penting pandangan Australia tentang masalah ini. Australia memberi peringatan menentang penggunaan kekuatan pada 1975, namun juga memberi kesan kepada Indonesia bahwa Australia tidak akan menentang rencana penggabungan Indonesia. Australia tidak menggunakan pengaruh internasionalnya untuk menghalangi invasi dan untuk menghindarkan Timor-Leste dari akibat-akibat kemanusiaannya yang dapat diduga akan terjadi. Australia mengakui hak atas penentuan nasib sendiri, tetapi pada praktiknya melemahkannya dengan menerima rencana Indonesia untuk menggabungkan wilayah tersebut, menentang kemerdekaan Timor-Leste dan menentang Fretilin, serta memberi pengakuan *de jure* kepada pengambilalihan oleh Indonesia. Australia hanya mendukung satu resolusi Sidang Umum atas masalah tersebut antara 1975 dan 1982, memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia, serta bekerja keras untuk mendapat dukungan publik Australia dan komunitas internasional untuk keuntungan posisi Indonesia.
13. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota-anggotanya dengan tegas mendukung tindakan penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan pada 1999.

Lampiran: Perilaku dalam pengambilan suara atas resolusi mengenai Timor-Leste di Sidang Umum PBB

Tabel A: Resolusi Sidang Umum dan bagaimana negara memberikan suara antara 1975 - 1982								
1974 - 1999	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Afghanistan	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y
Afrika Selatan	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Afrika Tengah, Republik	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Albania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Aljazair	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Amerika Serikat	A	T	T	T	T	T	T	T
Angola	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Antigua dan Barbuda	-	-	-	-	-	-	NP	T
Arab Libia, Republik	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Arab Syria, Republik	A	A	T	T	T	T	T	T
Argentina	A	A	A	A	A	T	T	T
Australia	Y	A	A	T	T	T	T	T
Austria	A	A	A	A	A	A	A	A
Bahama	A	A	A	A	A	A	A	A
Bahrain	Y	A	A	A	A	A	T	T
Bangladesh	Y	T	T	T	T	T	T	T
Barbados	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Belanda	A	A	A	A	A	A	A	A
Belgia	A	A	A	A	A	A	A	A
Belize	-	-	-	-	-	-	Y	Y
Belorus SSR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Benin	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Bhutan	A	A	A	A	A	A	A	A
Bolivia	Y	A	A	A	A	T	T	A
Botswana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Brasil	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bulgaria	Y	Y	Y	Y	NP	NP	NP	NP
Burundi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Cap Verde	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Chad	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T
Cile	A	T	T	T	T	T	T	T
Cina	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y
Czechoslovakia	Y	Y	Y	Y	A	A	A	A
Denmark	A	A	A	A	A	A	A	A
Djibouti	-	-	A	NP	NP	NP	NP	NP
Dominika	-	-	-	-	NP	NP	NP	A
Dominika, Republik	NP	A	A	A	A	A	T	A
Ekuador	Y	Y	Y	A	NP	A	Y	NP
El Salvador	Y	A	A	A	A	T	T	T
Equatorial Guinea	Y	Y	Y	NP	Y	Y	A	NP
Etiopia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Fiji	Y	A	A	A	A	A	A	T
Filipina	T	T	T	T	T	T	T	T
Finlandia	A	A	A	A	A	A	A	A
Gabon	Y	Y	Y	A	A	A	A	A
Gambia	Y	Y	Y	Y	Y	NP	T	T
Ghana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	Y
Grenada	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Guatemala	A	A	A	A	A	NP	T	T
Guinea	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A

Guinea-Bissau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Guyana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Haiti	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	A
Honduras	NP	A	A	A	T	T	T	T
Hungaria	Y	Y	Y	Y	A	A	A	A
Islandia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
India	T	T	T	T	T	T	T	T
Indonesia	T	T	T	T	T	T	T	T
Inggris Raya	A	A	A	A	A	A	A	A
Iran	T	T	T	T	Y	Y	Y	NP
Irak	A	A	T	T	T	T	T	T
Irlandia	A	A	A	A	A	A	A	Y
Israel	A	A	NP	A	A	A	A	A
Italia	A	A	A	A	A	A	A	A
Jamaika	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	A
Jepang	T	T	T	T	T	T	T	T
Jerman, Republik Demokrasi	Y	Y	Y	Y	NP	NP	NP	NP
Jerman, Republik Federal	A	A	A	A	A	A	A	A
Kamboja	NP	Y	NP	A	NP	T	T	T
Kamerun, Republik Persatuan	Y	Y	Y	Y	A	A	A	A
Kanada	A	A	A	A	Y	T	T	T
Kenya	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kolombia	A	Y	A	A	T	T	T	A
Komoro	NP	NP	Y	NP	NP	NP	T	NP
Kongo	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kosta Rika	A	A	A	NP	Y	A	NP	A

Kuba	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kuwait	Y	A	A	A	A	NP	T	T
Laos, Republik Demokrasi Rakyat	Y	Y	Y	A	Y	Y	NP	Y
Lebanon	NP	A	A	A	A	NP	NP	A
Lesotho	Y	Y	Y	Y	Y	A	Y	Y
Liberia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	T
Luksemburg	A	A	A	A	A	A	A	A
Madagaskar	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Malawi	Y	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y
Malaysia	T	T	T	T	T	T	T	T
Maladewa	NP	A	T	T	T	T	T	T
Mali	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Malta	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Maroko	A	T	T	T	A	A	A	T
Mauritania	A	T	T	T	A	A	A	A
Mauritius	A	Y	NP	Y	NP	A	NP	Y
Meksiko	Y	Y	Y	Y	Y	NP	Y	Y
Mesir	A	A	T	T	T	T	T	T
Mongolia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NP	NP
Mozambik	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Myanmar	NP	NP	A	A	A	A	A	A
Nepal	Y	A	A	A	A	A	A	A
Nikaragua	A	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Niger	Y	NP	Y	Y	Y	Y	NP	A
Nigeria	Y	NP	Y	A	A	A	A	A
Norwegia	A	Y	A	A	A	A	A	A
Oman	A	T	T	T	T	T	T	T
Pakistan	Y	A	A	A	A	A	A	T

Panama	A	Y	Y	A	A	A	A	A
Pantai Gading	Y	Y	A	A	A	A	A	A
Papua Nugini	NP	A	A	T	T	T	T	T
Paraguay	A	A	A	T	T	NP	T	T
Peru	Y	A	A	A	A	A	A	A
Polandia	Y	Y	Y	NP	NP	A	A	A
Portugal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Prancis	A	A	A	A	A	A	A	A
Qatar	T	A	A	T	T	T	T	T
Rumania	Y	Y	Y	NP	A	A	A	A
Rwanda	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
St Christopher and Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Lucia	-	-	-	-	Y	Y	Y	T
St Vincent dan Grenadines	-	-	-	-	-	NP	T	NP
Samoa	-	-	A	A	A	A	A	A
Sao Tome dan Principe	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Saudi Arabia	A	T	T	T	T	T	T	T
Selandia Baru	A	A	A	A	T	T	T	T
Senegal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	A
Seychelles	-	NP	NP	A	Y	Y	Y	Y
Sierra Leone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Singapura	A	A	T	T	T	T	T	N
Siprus	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Solomon, Kepulauan	-	-	-	NP	NP	NP	A	N
Somalia	NP	Y	NP	NP	NP	T	A	A
Spanyol	A	A	A	A	A	A	A	A
Sri Lanka	A	A	A	A	A	A	A	A

Sudan	A	A	A	A	T	T	T	T
Suriname	NP	T	T	T	T	T	T	T
Swaziland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Swedia	Y	Y	Y	Y	Y	A	A	A
Thailand	T	T	T	T	T	T	T	T
Togo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Trinidad dan Tobago	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Tunisia	NP	T	T	T	T	T	T	T
Turki	A	T	T	T	T	T	T	T
Uganda	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ukraina SSR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
USSR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Uni Arab Emirat	Y	A	A	A	A	A	NP	NP
Tanzania, Republik Persatuan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Upper Volta	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Uruguay	A	T	T	T	T	T	T	T
Vanuatu	-	-	-	-	-	-	Y	Y
Venezuela	Y	A	A	A	A	A	A	A
Vietnam	-	-	Y	NP	Y	Y	Y	Y
Yaman	NP	A	NP	NP	T	T	NP	T
Yaman, Republik Demokratis	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Yordania	A	T	T	T	T	T	T	T
Yugoslavia	A	A	A	A	A	A	A	A
Yunani	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Zaire	A	A	T	T	T	A	A	A
Zambia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Zimbabwe	-	-	-	-	-	Y	Y	Y

Total	72:10: 43:19	68:20: 49:9	67:26: 47:9	59:31: 44:16	62:31: 45:14	58:35: 46:15	54:42: 46:15	50:46: 50:11
Proporsi suara untuk	50%	46.6%	44.9%	39.3%	40.8%	37.7%	34.4%	31.8%

Y = Setuju; T = Menolak; A = Abstain; - = bukan anggota PBB pada saat pemungutan suara;
NP = Tak Hadir pada saat pemungutan suara

Total = Y:T:A:NP Suara dalam Pemungutan Suara tentang Timor di PBB 1975 - 1982

Catatan akhir

1. Lihat paling akhir, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (2004) International Court of Justice [selanjutnya: ICJ], paragraf [selanjutnya: para] 155.
2. Ini termasuk di dalam Resolusi Dewan Keamanan [selanjutnya: DK] 384, 22 Desember 1975; Resolusi DK 389, 22 April 1976; Resolusi Sidang Umum [selanjutnya: SU] 3845 (XXX), 12 Desember 1975; Resolusi SU 31/53, 1 Desember 1976; Resolusi SU 32/34, 28 November 1977; Resolusi SU 33/39, 13 Desember 1976, Resolusi SU 35/27, 11 November 1980; Resolusi SU 36/50, 24 November 1981; Resolusi SU 37/30, 23 November 1982.
3. Common article 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik selanjutnya: PIHSP] dan Pasal 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya [selanjutnya: PIHESB], Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960, para 2.
4. Pasal. 3, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa Kolonial, Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960.
5. Pasal 1(3), PIHSP dan Pasal 1(3) PIHESB
6. Komite Hak Asasi Manusia, General Comment 12, para 6.
7. Ibid.
8. Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Baik dan Kooperasi antarbangsa yang mengikuti Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Resolusi SU 2625 (XXV), 24 Oktober 1970
9. Opini Penasihat mengenai Konsekuensi Legal bagi Negara-Negara atas Keberlanjutan Keberadaan Afrika Selatan di Namibia (Afrika Barat-Day) tanpa memperhitungkan Resolusi DK 276 (1970) (1971) ICJ Reports 16 at para 119; Opini terpisah dari Hakim Weeramantry dalam Kasus-kasus Mengenai Timor Timu r (Portugal v Australia) (1995) Laporan ICJ 90, esp at 204; art 41(2), Komisi Hukum Internasional [selanjutnya: KHI] Rancangan Pasal-pasal mengenai Tanggungjawab negara-negara untuk Aksi Pelanggaran Internasional, KHI, Komentar mengenai Rancangan Pasal-pasal atas tanggungjawab Negara-negara untuk Aksi Pelanggaran Nasional, at hal. 287-291, esp p.290
10. Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 1; dan Resolusi DK 389, 22 April 1976, para 1.
11. Pasal 25, Piagam PBB
12. Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 2; Resolusi DK 389, 22 April 1976, para 2.
13. Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 3.
14. Dokumen 391, Jakarta, 23 Desember 1975, dalam Wendy Way (ed.), Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976, Department of Foreign Affairs and Trade Documents on Australian Foreign Policy, Melbourne University Press, Victoria, 2000 [selanjutnya: Wendy Way, (ed.), DFAT], hal.650
15. Dokumen 154, Jakarta, 10 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.291

16. Resolusi SU 1542 (XV), 15 Desember 1960 Krieger (ed), *East Timor and the International Community Basic Documents*, Grotius, Cambridge University Press, 1997. hal. 29-30.
17. Korespondensi antara Dr Salazar dan Perdana Menteri Australia, R.G. Menzies, 1961-1964, Penyelidikan Senat Australia ke Timor Timur, 1999-2000, Submisi 5, hal. 31-47.
18. Kabel rahasia, 5 Februari 1963, dikeluarkan oleh Pemerintah Australia pada tahun 2002.
19. José Ramos-Horta, *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1978, hal. 14.
20. Secretariat to the Special Committee on Decolonisation, Working Paper on Timor, 20 November 1975. Krieger, hal. 18-26.
21. Dokumen 406, Jakarta, 24 Januari 1976, di Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 674. Pandangan yang serupa diungkapkan oleh Duta Besar Selandia Baru, Roger Peren, tahun 1978, di material New Zealand Government Official Information Act (OIA) [selanjutnya: New Zealand...OIA]Dokumen Pemerintah Selandia Baru, Vol. 1, 13 Januari 1978.
22. Departemen Hubungan Politik PBB, Laporan mengenai Dekolonisasi, No. 7, Agustus 1976, hal. 43.
23. Resolusi DK 3294 (XXIX), 13 Desember 1974, para 2
24. Mario Lemos Pires, Kesaksian diberikan pada kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003
25. Surat dari Misi Permanen Portugal kepada Sekretaris Jenderal PBB, 28 November 1975, di Krieger,hal. 39.
26. Communique of the Council of Ministers. dikutip dalam Laporan PBB mengenai Dekolonisasi, op.cit, hal. 45.
27. Kontak Rahasia antara Portugal, Indonesia, dan PGET: Juni-Juli 1976, di Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 782-783.
28. Case Concerning East Timor (Portugal v Australia) (1995), Laporan International Court of Justice 90.
29. Mario Lemos Pires, kesaksian diberikan pada, ibid.
30. CAVR wawancara dengan Adelino Gomes, Dili, 11 Juni 2003.
31. Krieger, hal. 39-40.
32. David Scott, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004, hal. 2.
33. Laporan Senat Australia, Timor Timur, Desember 2000, hal. 138.
34. Surat kepada J.L Jones, Foreign and Commonwealth Office, 11 Juni 1976,di dokumen terdeklasifikasi (Dowson File 7.25).
35. Pernyataan, 6 September 1983, Torben Retboll (ed.) *East Timor: The Struggle Continues*, International Working Group for Indigenous Affairs, Copenhagen, Oktober 1984, hal. 197.
36. Dokumen 888, 4 Maret 1993, Arsip Keamanan Nasional di George Washington University [selanjutnya:AKN]
37. Jamsheed Marker, *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland & Company, Inc., London, 2003, hal. 73.
38. Resolusi DK 1272, 25 Oktober 1999.
39. Resolusi SU 56/282, 8 Mei 2002.
40. Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Hubungan Politik PBB, Laporan mengenai Dekolonisasi, hal. 41.
41. Dikutip dalam Donald Weatherbee, "Portuguese Timor: an Indonesian Dilemma", *Asian Survey*, 6 (12), Dec. 1966, hal. 689.
42. Weatherbee, hal. 690.
43. Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam dikutip dalam Departemen Politik PBB, Report on Decolonisation.,hal. 47.
44. Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Politik PBB, Report on Decolonisation dikutip dalam hal. 14, 48.
45. Dokumen 95, Jakarta, 24 Februari 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 198.
46. Richard Woolcott, *The Hot Seat: Reflections on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings*, Harper Collins Publishers, Sydney, 2003, hal. 306.
47. Dokumen 217, Jakarta, 6 September 1975, dalam Wendy Way (Ed.), DFAT, hal. 391-392.

48. Krieger, hal. 63.
49. Resolusi SU 3485 (XXX), 12 Desember 1975 dan Resolusi DK 384 (1975), 22 Desember 1975, dalam Krieger, hal. 123, 53.
50. Laporan Winspeare Guicciardi kepada Sekretaris Jenderal, 29 Februari 1976, dalam Krieger, hal. 92.
51. Krieger, hal. 47-49.
52. Krieger, hal. 124.
53. Kongres AS Sidang dengar pendapat mengenai Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Committee on International Relations, 19 Juli 1977, hal. 47.
54. 1 Juni 1976, dalam NZ...OIA, Volume 1
55. José Ramos-Horta, surat kepada Sekretaris Jenderal, 8 Juli 1976. UN Doc. S/12133.
56. Fransesc Vendrell, Kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
57. Kesaksian diberikan pada Ibid.
58. Krieger, hal. 275.
59. dikutip dalam Woolcott, hal. 164.
60. Siaran Pers PBB, 3 September 1999.
61. Notilen Kabinet, Canberra, 5 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 26.
62. Dokumen 375, Jakarta, 13 Desember 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 627.
63. Notilen Kabinet, Canberra, 21 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.26, n.1
64. Ibid., hal. 26-27.
65. Pengiriman kabar dari Furlonger, Jakarta, 19 Januari 1973. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 43.
66. 1 Desember 1970. Dokumen, p. 42.
67. 30 Mei 1973: Catatan R. Woolcott kepada Whitlam. Documents, p. 45.
68. Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 141.
69. Dokumen 263, Canberra, 16 Oktober 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 263.
70. Dokumen 26, Yogyakarta, 6 September 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 91-92
71. Dokumen 45, Lisbon, 14 Oktober 1974. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 119.
72. Dokumen 24, Canberra, 2 September 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 91-92.
73. Document 123, Townsville, 4 April 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 246.
74. Dokumen 169, Jakarta, 17 Agustus 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 313-314.
75. Dokumen 191, Canberra, 27 Agustus 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 347
76. Dokumen 265, Jakarta, 16 Oktober 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 347
77. Dokumen 310, Jakarta, 29 Oktober 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 533.
78. Department of Foreign Affairs and Trade, East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge, Canberra, 2001, p. 13.
79. Australian Senate Report, East Timor, hal. 167.
80. Ibid., hal. 174-75.
81. Untuk teks laporan survei, lihat East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge, Department of Foreign Affairs and Trade [selanjutnya East Timor in Transition, DFAT], Canberra 2001, hal. 177-179.
82. Australian Senate Report, East Timor, hal. 142.
83. Resolusi DK 384 (1975), 22 Desember 1975, dalam Krieger, pp. 53-54.
84. Ibid.
85. Laporan SRSG, 29 Februari 1976. Krieger, pp. 87-93.
86. Resolusi DK 389 (1976), Krieger, hal. 93.
87. Fransesc Vendrell, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004.
88. Kesaksian diberikan pada Ibid.
89. Ibid.
90. Ibid.
91. Jamsheed Marker, hal. 204
92. Teks Kesepakatan terdapat di, Self-determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention, oleh Ian Martin. Lynne Rienner Publishers, 2001, pp. 141-148.

93. Resolusi UNSC 1236 (1999).
94. Mark Riley, "How the UN plans to abandon a people", Sydney Morning Herald, 7 Agustus 1999.
95. Ian Martin, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
96. Kesaksian diberikan pada Ibid.
97. Resolusi DK 1264 (1999).
98. Dokumen 55, Jakarta, 29 Oktober 1974, dalam Wendy Way (Ed.) DFAT p. 130.
99. Dokumen 98, Canberra, February 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 201
100. 16 Desember 1975. dalam Krieger, hal. 69.
101. Ramos-Horta, Funu: The Unfinished Saga of East Timor, Red Sea Press, 1987, hal. 156.
102. UK Unclassified Documents, Dowson Files 7.2
103. Dokumen 478, Jakarta, 3 Juli 1976, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 807.
104. Krieger, hal. 85
105. Krieger, op.cit, hal. 117
106. Resolusi Sidang Umum 3485 (XXX), 12 Desember 1975.
107. Krieger, hal. 152.
108. Konvensi yang berhubungan dengan perpajakan ganda dan penghindaran fiskal, ditandatangani oleh Prancis dan Indonesia pada tanggal 14 September 1979. Krieger, hal. 292
109. Ramos-Horta, Funu, hal. 142
110. Gabriel Defert, Timor Est, le genocide oublie: Droit d'un peuple e raisons de'Etat, L'Harmattan, Paris, 1992, hal. 246.
111. Ibid.
112. Ramos-Horta, Funu, hal. 142.
113. New Zealand...OIA Material, Vol. 1
114. Dokumen 58, Canberra, 14 November 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 133.
115. Woolcott, hal. 149.
116. Debat Dewan Keamanan 18 Desember 1975 dan 22 April 1976, dalam Krieger, hal 81, 117.
117. Ramos-Horta, Funu, hal. 109.
118. Kawat ke London, 10 Februari 1976, dalam UK unclassified documents Dowson Files 7.4
119. Defert, hal.241-243; Ramos-Horta, Funu, hal. 155.
120. UN Monthly Chronicle, Vol. 1(4), Agustus-September 1964, hal. 32.
121. Dokumen 157, Jakarta, 21 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 295.
122. Kabel rahasia, 24 Oktober 1975, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 6
123. Ibid.
124. Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 137.
125. Kabel rahasia, 24 Oktober 1975, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.
126. Dokumen 249, 2 Oktober 1975, in Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 443.
127. See Richard Mann, 400 years and More of The British in Indonesia, Gateway Books, United Kingdom, 2004.
128. J. A. Ford, 10 Februari 1976, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.4.
129. A.K. Goldsmith, South East Asian Department FCO, 4 Februari 1976, dalam dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.5.
130. J. A. Ford, 2 Januari 1976, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.2.
131. Krieger, p. 118.
132. A.M. Simons, 20 Mei 1976. Dowson Files 7.15.
133. 11 Juni 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.26.
134. Krieger, p. 164.
135. Baroness Trumpington, House of Lords, 16 Juli 1992. Krieger, p. 301.
136. Krieger, p. 302.
137. Tapol and Campaign Against the Arms Trade (CAAT) Factsheet, Juni 2004.
138. United Kingdom –House of Lords, Official Report, Parliamentary Debates, Unstarred Question-Indonesia: Aid and Human Rights, 16 Juli 1992. Krieger, p. 302.

139. 24 Mei 1976. di dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.16.
140. Saran yang disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik, Averell Harriman, 5 Februari 1963. Dokumen 2 NSA
141. Ibid.
142. Gary Gray, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004. Gary Gray memberi kesaksian dalam kapasitas sebagai pribadi.
143. Menteri Luar Negeri, 25 September 1974. Dokumen 15 NSA.
144. Kedutaan AS di Canberra, 20 Februari 1975. Dokumen 24 NSA.
145. Dewan Keamanan Nasional, 4 Maret 1975. Dokumen 40 NSA.
146. Pertemuan Staf Menteri Luar Negeri, 8 Oktober 1975. Dokumen 90 NSA.
147. Permohonan kepada Presiden AS, 5 Desember 1975. Dokumen 174 NSA.
148. Memo pembicaraan Gedung Putih, 10 Desember 1975. Dokumen 163 NSA.
149. Krieger, hal. 119
150. Kreiger, hal. 239
151. Laporan Dewan Keamanan Nasional kepada Brent Scowcroft, 12 Desember 1975. Dokumen 165 NSA.
152. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
153. Human rights in East Timor and the Question of the Use of US Equipment by the Indonesian Armed Force: Audiensi di hadapan Sub-Komite mengenai Urusan Asia dan Pasifik dan Sub-Komite mengenai Organisasi-organisasi Internasional, 10, 17, 22 dan 23 Maret 1977, US Government Printing Office, Washington, 1977.
154. Dewan Keamanan Nasional, 29 Juni 1976. Dokumen 312 NSA.
155. Surat kepada Senator Humphrey, 15 Oktober 1976. Dokumen 355 NSA.
156. Pernyataan yang disampaikan Kenneth M Quinn, Asisten Sementara Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, kepada Audiensi di hadapan Komite Senat Hubungan Luar Negeri AS, 6 Maret 1992, dalam Krieger, hal. 318.
157. Memorandum untuk Presiden Carter, 14 Juni 1977. Dokumen 398 NSA.
158. Dikutip oleh Gary Gray kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
159. Arnold Kohen, kesaksian diberikan pada pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
160. 31 Januari 1992. Dokumen 872 NSA.
161. CHR Vole tentang Timor Leste, 4 Maret 1993. Dokumen 885 NSA.
162. Kedutaan AS Jakarta untuk Menteri Luar Negeri, 5 Maret 1993. Dokumen 885 NSA.
163. Siaran Pers Kementerian Luar Negeri AS, 4 September 1999.
164. Resolusi SU 1514 (XV) dan 1541 (XV). Lihat Buku Tahunan 1960 PBB, hal. 49,509.
165. Shizuo Saito, *New Trends at the United Nations: Reactions to the Structural Changes in the International Order*, Shinyudo, Tokyo, 1979, hal. 19.
166. Ramos-Horta, *Funu*, hal. 122.
167. Krieger, hal. 109.
168. 10 Januari 1976. dalam NZ...OIA Material, Vol. 1.
169. 4 Mei 1976, dalam NZ...OIA Material, Vol. 1.
170. Krieger, hal. 50.
171. April 1976, Dokumen NSA 252
172. Dokumen 406, Jakarta, 24 Januari 1976, dalam Wendy Way (ed.), *DFAT*, hal. 674.
173. *East Timor in Transition*, *DFAT*, , hal. 12. Untuk Persetujuan Pajak, lihat Krieger, hal. 292.
174. Pernyataan oleh 92-anggota Diet Jepang, *Members Forum di Timor Timur kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB*, New York, 8 Agustus 1991.
175. Petisi kepada Komite Khusus Dekolonisasi, 8 Agustus 1991.
176. Kenneth Christie dan Denny Roy, *The Politics of Human Rights in East Asia*, Pluto Press, London, 2001, hal, 274-275. Piagam ODA direvisi pada tahun 2003.
177. Terbitan Pers, Menteri Luar Negeri Jepang, 4 September 1999.

178. Henry Kissinger kepada sebuah pertemuan makan siang di Sydney, 13 November 1995., dalam E G Whitlam, "E.G. Whitlam launches Bill Nicol's Timor – a Nation Reborn", It's time e-magazine, Issue 7, University of Sydney Co-op Bookshop, 26 Juni 2002.
179. Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Panggabean, 22 Juli 1974. dalam NZ...OIA Material, Volume 1.
180. Dikutip dalam Peter Elgin East Timor, The Globe and Mail and Propaganda, Portuguese Studies Review 11 (1) 2003, hal. 69-70.
181. Don McKinnon, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Pidato kepada Canterbury School of Journalism, 21 Maret 1995, dalam NZ...OIA Material, Volume 3, Februari 1994-Oktober 1995
182. Eamon Duffy, Saints and Sinners, A History of the Popes, Yale University Press, Princeton, New Jersey, 2002, hal 367.
183. Dikutip dalam Frédéric Durand, Catholicisme et protestantisme dans l'île de Timor: 1556-2003, Irasec, Bangkok, 2002, hal 89.
184. Pat Walsh, "Church May Hold Key to Timor's Future", National Outlook, January 1982, hal 14.
185. Wawancara CAVR dengan Pat Walsh, Dili, 25 February 2005
186. Dikutip dalam Komisi Katolik untuk Keadilan, Pembangunan, dan Perdamaian, Melbourne, The Church and East Timor: A collection of documents by National and International Church Agencies, Catholic Commission for Justice, Development and Peace, Melbourne, 1993, hal 13-15; dan Frédéric Durand, hal 92-93.
187. Dikutip dari jumpa pers Christians in Solidarity with East Timor, 20 Mei 1983.
188. Surat kepada Monsignor Francesco Canalini (1986-1991), dalam The Church and East Timor: A Collection of documents by National and International Church Agencies, Catholic Commission for Justice, development and Peace, Melbourne, hal 10.
189. Surat kepada Pastor Pierre Toulat, Sekretaris, Komisi Prancis untuk Keadilan dan Perdamaian, Paris.
190. Suster Monica Nakamura, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
191. Radio Renascenza, 12 Mei 1991, dipetik dari Frédéric Durand, hal 111.
192. Wawancara CAVR dengan Alex Gusmão, 28 Maret 2005.
193. Wawancara dengan Kay Rala Xanana Gusmão pada bulan September 1990. Robert Domm "East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive", ACFOA Development Dossier 29, 1991, hal 24.
194. Dikutip di Smythe, hal 199.
195. dikutip dalam Dikutip di Kohen, hal 154.
196. Pat Walsh, East Timor's Political Parties and Groupings, ACFOA, April 2001
197. Domingos de Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal UDT, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
198. Ibid.
199. Fretilin on the World Stage", in Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 450
200. Jill Jolliffe, East Timor: Nationalism and Colonialism, University of Queensland Press, 1978, hal. 221.
201. David Scott, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
202. Krieger, hal. 66-7.
203. Krieger, hal. 96.
204. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
205. Ibid.
206. Ibid.
207. Ibid.
208. UN Press Release, Department of Public Information Press Section, GA/D/2334, 9 November 1982.
209. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, 29 Juli 2004.
210. Statement on the Current Portuguese Attitude on the Question of East Timor, 6 September 1983, Ost-Timor Information, No. 3, Oktober 1983.
211. Surat dari Parliamentary Human Rights Group in Britain kepada Sekretaris Jenderal, 10 Agustus 1984, dalam Torben Retbøll, hal. 209-211

212. Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
213. wawancara CAVR dengan Zacarias da Costa, 14 Maret 2005.
214. Maria Angela Carrascalão, *Timor: Os Anos da Resistencia*, Mensagem, Lisbon, 2002, hal. 135.
215. Estavão Cabral, 'Fretilin: Roots of the Friction', *Fitun*, No. 11, September 1993.
216. Wawancara CAVR, dengan João Carrascalão, Dili 30 Juli 2004.
217. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili 26 Mei 2004.
218. Surat Persatuan Nasional Timor kepada Presiden Republik Portugis, Mário Soares, 9 Maret 1988, dalam Krieger, hal. 280.
219. Pernyataan oleh Uni Demokrasi Timor kepada Komite Khusus Dekolonisasi, New York, 13 Agustus 1987.
220. Pesan 7 Desember 1987 mengenai 12 tahun invasi Indonesia., dalam Sarah Niner (ed.), *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 129-136.
221. Ben Anderson et al, wawancara dengan Mário Carrascalão, Indonesia (76), Oktober 2003, hal. 21-22.
222. Communiqué of the Nationalist Convergence of Timor, 10 November 1989, dalam Krieger, hal. 281-282.
223. José Ramos-Horta, *Towards a Peaceful Solution in East Timor*, East Timor Relief Association (ETRA), Sydney, 1996, hal. 31.
224. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
225. Nobel Committee Press Release, 1996.
226. Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, 24 September 2004.
227. *East Timor in Transition*, DFAT, hal. 10.
228. Jamsheed Marker, *East Timor*
229. Lihat Fernando de Araujo, 'kampanye untuk kemerdekaan CNRT', dalam James J. Foxdan Dionisio Babo Soares(ed.), *Out of the Ashes*, Crawford House, Canberra, 2000, hal. 106-125.
230. Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, 24 September 2004.
231. Abel Guterres, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
232. Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
233. Abel Guterres, kesaksian, *Ibid*.
234. *Ibid*.
235. *Ibid*.
236. Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
237. David Scott, manuskrip tak diterbitkan, salinannya ada di dalam arsip CAVR.
238. Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
239. Arnold Kohen, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004, Dili.
240. Wawancara CAVR dengan John Taylor dan Arnold Kohen, Dili, 2 Februari 2005.
241. Untuk catatan hasil kerja Steve Cox di Inggris setelah pembantaian tersebut, lihat Kirsty Sword Gusmão with Rowenna Lennox, 'A Woman of Independence', Macmillan, Sydney, 2003, hal. 38-39.
242. Lihat, sebagai contoh, Peter Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana's Defence*, East Timor Relief Association, Sydney, Mei 1996.
243. Esai oleh Carmel Budiardjo dalam 'East Timor: Testimony by Elaine Briere', Toronto, 2004, hal. 68.
244. Lihat David T. Hill 'East Timor and the Internet: Global political leverage in/on Indonesia', *Indonesia* (73), April 2002, hal.25-51.
245. Dikutip dalam Carlos Santiago Nino, 'Radical Evil on Trial', Yale University Press, Princeton, New Jersey, 1996, p. 186.
246. YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik CAVR mengenai penentuan nasib sendiri, 15-17 March 2004.
247. Jean Pierre Catry, Memo ke CAVR, 28 Januari 2005.

248. East Timor in Transition , DFAT, hal. v.
249. Lihat Ian Martin, Self-determination dalam East Timor..., hal. 88.
250. Para 1, mukadimah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
251. YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
252. Liem Soei Liong, Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005.
253. YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
254. Nugroho Katjasungkana, kesaksian diberikan pada Ibid.
255. Yeni Rosa Damayanti, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
256. Dikutip dalam George J. Aditjondro 'Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau', Yayasan Hak dan Fortilos, Jakarta, 2000, hal. 251.
257. James Goodman "Indonesians for East Timor", Inside Indonesia, No 59, 1999.
258. Ade Rostina Sitompul, kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penahanan Politis, 17 Februari 2003, hal. 5-6
259. Pernyataan oleh Konferensi INFID ke 11, Bonn, 4-6 Mei 1998.
260. Patrick Walters, 'Let Timor-Leste Decide, Muslim leader', The Australian, 11 Desember 1996.
261. Pernyataan oleh Konferensi INFID ke 12 tentang Peran Militer dalam Masyarakat Indonesia, Bali, 14-17 September, 1999.
262. Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, Dili, 15-17 Maret 2004.
263. Yeni Rosa Damayanti, kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
264. Ian Martin, Self-determination in East Timor..., hal. 13.
265. Geoffrey C. Gunn, "International Actors and East Timor's Right to Self-determination", Laporan ke CAVR, Agustus 2003, hal. 138.